

**PENYEBAB DEFISIT KEAMANAN DI ACEH
PADA MASA IMPLEMENTASI
CESSATION OF HOSTILITIES AGREEMENT DAN
PEMBERLAKUAN KEADAAN DARURAT MILITER I**

TESIS

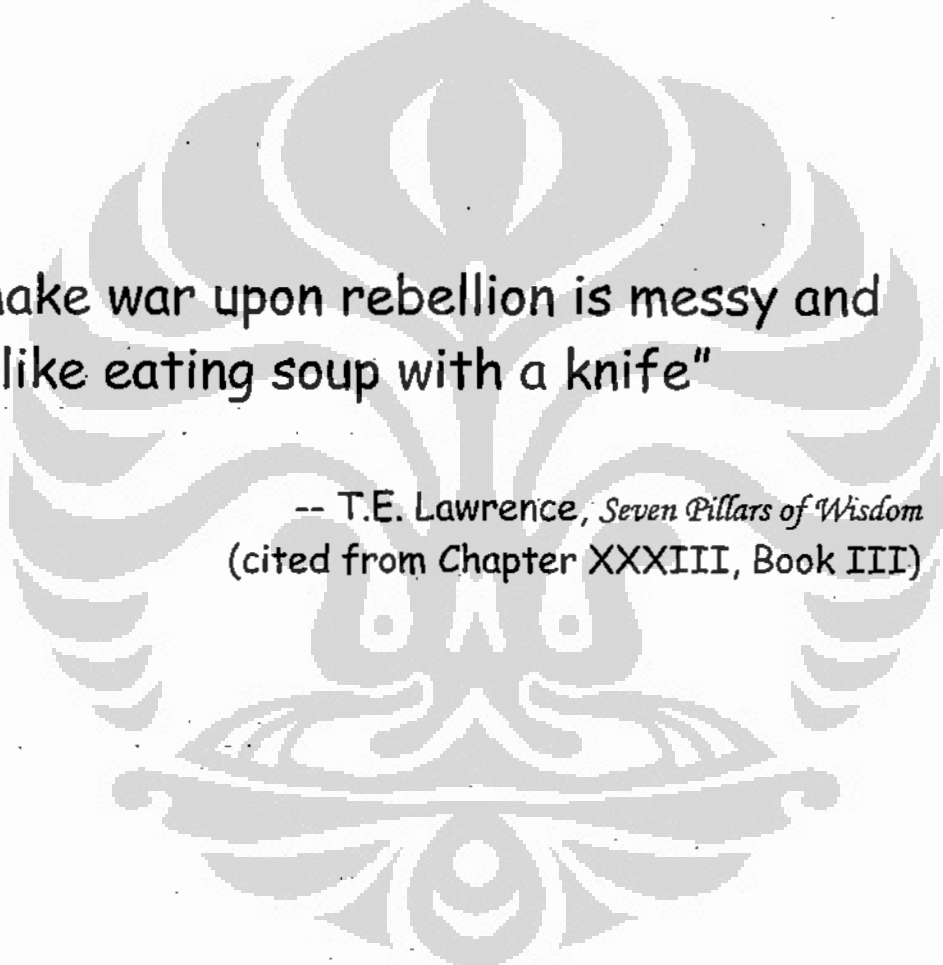
**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister Sains (M.Si)
Dalam Ilmu Hubungan Internasional**

**IISGINDARSAH
0706187754**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JULI 2009**

**PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS INDONESIA**



"To make war upon rebellion is messy and slow, like eating soup with a knife"

-- T.E. Lawrence, *Seven Pillars of Wisdom*
(cited from Chapter XXXIII, Book III)


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Iisgindarsah

NPM : 0706187754

Tanda Tangan :



Tanggal : 17 Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Iisgindarsah
NPM : 0706187754
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Tesis : Penyebab Defisit Keamanan di Aceh Pada Masa Implementasi Cessation of Hostilities Agreement dan Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer I

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Politik Kekhususan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Makmur Keliat, Ph.D.

Sekretaris Sidang : Christian Harijanto, MA.

Pembaca Ahli : Prof. Ikrar Nusa Bhakti, Ph.D.

Pembimbing : Andi Widjajanto, M.Sc., MS.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 17 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT; karena atas berkah dan rahmat-Nya lah, penulis dapat menyelesaikan thesis ini. Thesis yang berjudul "**Penyebab Defisit Keamanan di Aceh Pada Masa Implementasi Cessation of Hostilities Agreement dan Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer I**" diajukan sebagai syarat untuk memenuhi Ujian Akhir Program Pasca Sarjana, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Thesis ini dirampungkan setelah melalui proses penelitian dan penulisan selama kurang lebih enam bulan. Dalam periode waktu itu, penulis mengkaji berbagai literatur yang berhasil dikumpulkan sejak akhir bulan Desember 2008 dan melakukan diskusi dengan sejumlah pakar yang memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai topik penelitian dari thesis ini.

Berkenaan dengan itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Mas Andi Widjajanto, M.Sc., MS., atas segala bimbingan dan dorongannya, dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyelesaian thesis ini. Penulis juga memohon maaf apabila terdapat sejumlah kekurangan dan keterbatasan substantif dalam thesis ini. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dari para pembaca yang budiman sebagai masukan yang bermanfaat bagi penulis. Akhir kata, semoga thesis ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan pembaca sekalian. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih. *Keep on seeking truth from the facts!!!*

Jakarta, Juli 2009

IISGINDARSAH

UCAPAN TERIMA KASIH

“Apa yang paling berharga bagi anda sebagai seorang mahasiswa setelah lulus dari studi pasca-sarjana?” Beberapa orang mungkin akan menjawab pertanyaan tersebut dengan: gelar magister of sains (M.Si), nilai A untuk thesis, dan lainnya. Namun, kita terkadang lupa bahwa yang paling berharga sebenarnya adalah pengalaman dan interaksi kita dengan orang-orang yang telah memberikan pendidikan dan pemahaman kepada kita untuk menjadi seorang manusia yang sebenar-benarnya.

Melalui lembaran kertas bagian ini, penulis menyampaikan rasa syukur, apresiasi, dan terima kasih kepada:

- ✦ **To the Force of universe – Allah SWT** – atas segala berkah, rahmat, dan hidayah-Nya. Tanpa menegasikan berbagai kelalaian penulis untuk memenuhi berbagai kewajiban kepada-Nya, penulis selalu menyadari bahwa kekuatan-Nya lah yang menggerakkan hati, pikiran, dan tenaga penulis untuk selalu belajar, berpikir, dan bertindak sebaik dan sekeras mungkin dalam kehidupan ini.
- ✦ **My beloved parent, Ali Ismail dan Ermilia Said** yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa dan restu, bimbingan dan semangat, dan kepercayaan kepada penulis dan memenuhi segala kebutuhan penulis sejak lahir hingga saat ini dan selamanya. Dad, Mum, you both are one of the very best things I ever had on my life, and thanks for being my teacher, friend, and any way you could. Nothing could replace your place on my heart and mind.
- ✦ **My dear brother and sisters: Melsaria**, I wish we would be together in heaven when the Day comes; **Albaqi Khadafi dan Rizkita Ria**, thanks for all the support you had give, and don't ever let our beloved parent down.
- ✦ **Seluruh anggota keluarga besar penulis** dimana pun mereka berada.

- ↳ Para guru dan dosen penulis: Teacher is a sense of duty and responsibility toward the education and learning process of its students; “Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani.”
- *Dr. Hariyadi Wirawan* selaku Ketua Departemen Hubungan Internasional, FISIP-Universitas Indonesia, yang telah memberikan dorongan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan thesis ini;
 - *Dr. Makmur Keliat* selaku Ketua Program Pasca Sarjana Hubungan Internasional, FISIP-Universitas Indonesia, yang selalu memberikan pemikiran-pemikiran menarik dalam menyikapi perkembangan fenomena Hubungan Internasional;
 - *Andi Widjajanto, M.Sc., MS.* selaku Pembimbing Thesis, yang telah merapihkan cara berfikir akademis penulis, khususnya dalam penulisan thesis ini, dan memberikan masukan substantif tentang fokus studi yang akan penulis tempuh di S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore;
 - *Dr. Kusnanto Anggoro* selaku guru dan mentor penulis, yang telah memberikan dedikasi dan keramahannya dalam membangun *the way of thinking* penulis terhadap persoalan-persoalan kontemporer maupaun dalam pengkajian dan penulisan thesis ini. You're one of my finest Teachers, and it's my honor to be your student, sir. Matur nuwun sanget mas;
 - *Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti* selaku pembaca ahli thesis ini, yang telah memberikan kritik bagi perbaikan substansi thesis ini;
 - *Adrianus Harsawaskita, MA.* selaku guru, mentor dan sahabat penulis. I'm so proud to be your student and one of my best comrades. Thus, don't ever let your student down as your students would try deathly not to let you down!!!
 - Para peneliti dan akademisi senior: *Prof. Dr. Indria Samego, Dr. Rizal Sukma, Dr. Edy Prasetyono, Dr. Cornelis Lay, Dr. M. Riefqi Muna, Fajrul Fallaakh, MA.*

- Segenap dosen dan staf pengajar di Departemen Hubungan Internasional, FISIP-Universitas Indonesia: *Dwi Ardhanariswari, M.A., M.Phil., Christian Harijanto, M.A.*, dsb.
 - Segenap dosen dan staf pengajar di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP-Universitas Katolik Parahyangan: *Prof. Dr. Bob Sugeng Hadiwinata, Dr. Yulius Purwadi Hermawan, P.Y. Nur Indro, M.Si, Drs. R.M.T Sosrowinarsidojo*, dsb.
- ✚ Kepada mereka yang telah membantu penulis mengartikulasikan nilai-nilai kehidupan ini sebagai seorang manusia.
- *Indonesia – right or wrong you are my country – thesis* didedikasikan untuk dirimu;
 - *My best comrades in arms: Evan A. Laksmama, I'dil Syawfi, Yohannes Billy Hendrawan dan Ivan Kurniawan.* As musketeers always say: 'one for all, all for one', I feel that I'm so lucky to have you all as my comrades of arms. Might peace – security and security – be upon us forever and for always;
 - *The Girl I loved most in the first place*; I learned that love is like religion. Not everybody is gifted to have the luxurious of faith, or even love itself;
 - *Hazelia Margaretha.* Thanks for coming to my best comerade's life. I praised to the Force that you both will always be together to the end of the world;
 - My charming friends: *Ariane Putri, Natalia Helena, Sisca Libra Andiries, Jessica Evangeline, Yiska Tesalonika*, dsb.
 - *The most good-looking girl* that I would love to find somehow and spend the rest of my life.
- ✚ Kepada mereka yang telah mewarnai kehidupan penulis.
- *T. Hari Prihatono* selaku Direktur Eksekutif ProPatria Institute, yang telah memberikan kesempatan untuk berkarya dan memperdalam

wawasan tentang berbagai persoalan kebangsaan di bidang pertahanan dan keamanan.

- Komunitas 'Security Sector Reform' di Indonesia: *Mufti Makaarim* (IDSPS), *Oslan Purba* (KontraS), *Andi K. Yuwono* (Praxis), *Agung Yudhawanata* (Elsam), *Nawawi Baharudin* (INFID), dan kawan-kawan seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu per satu;
- Kawan-kawan alumni ProPatria Institute: *Dodi Fransisco*, *Halim Wasiman*, *Liza Feradiani*, *Stevanus Suluh Rudito*, *Tiara Prames Wulan*, *Yandri Kurniawan Kasim*, *Yuliah Qotimah*, dsb.
- *Rekan-rekan Angkatan 14* Pasca Sarjana Hubungan Internasional, FISIP-Universitas Indonesia, terima kasih atas persahabatan dan masa-masa kuliah yang menyenangkan; Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan.

Gents : Fany Dastanta, Maradona Runtukahu, Paladin Ansharullah, Prasojo, Ranier Farabi, Rangga Aditya Elias, Taufik Resamali, Wisma Ubayaji, Yugolastarob Khomeini, dsb.

Ladies: Acih Sari, Allena Vici Valensia, Arlita Noviana, Devy Putri Kussanti, Dewi Indira Biasane, Editha Maharany, Elsi Yulia, Fara Soraya, Fierda Milasari Rahmawati, Lucia Sihombing, Lydia, Niyla Qomariastuti, Octavia Dewi, Renny, Resa Margared, dsb.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan berbagai kontribusi terhadap penelitian, penelaahan, dan penulisan thesis ini.

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iisgindarsah
NPM : 0706187754
Program Studi : Pasca Sarjana
Departemen : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Tesis


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Penyebab Defisit Keamanan di Aceh Pada Masa
Implementasi Cessation of Hostilities Agreement dan
Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer I**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Juli 2009
Yang menyatakan



(Iisgindarsah)

ABSTRAK

Nama : Iisgindarsah
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Penyebab Defisit Keamanan Pada Masa Implementasi Cessation of Hostilities Agreement dan Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer I

Thesis ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa terdapat defisit keamanan dalam pengelolaan keamanan nasional di negara-negara berkembang. Secara lebih spesifik, thesis ini bermaksud untuk menerangkan penyebab terjadinya defisit keamanan dalam penanganan konflik bersenjata di Aceh pada masa implementasi Cessation of Hostilities Agreement dan pemberlakuan keadaan darurat militer I. Untuk itu, thesis ini mengkaji apakah terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan praktik (de)sekuritisasi selama dua periode waktu tersebut.

Thesis ini menerapkan dua metode utama dalam analisisnya. Metode analisa data base dilakukan untuk membangun data kuantitatif tentang kasus masalah keamanan dan penugasan aparat keamanan untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun metode studi kasus instrumental untuk menjelaskan data kualitatif mengenai pelaksanaan pendekatan (de)sekuritisasi. Thesis ini dapat membuktikan bahwa defisit keamanan di Aceh pada masa implementasi COHA dan pemberlakuan keadaan darurat militer I, terjadi sebagai akibat adanya kesenjangan antara pernyataan ancaman dengan kebijakan yang ditempuh pemerintah Indonesia dan langkah-langkah operasional yang diterapkan aparat keamanan.

Kata kunci: defisit keamanan, *comprehensive (de)securitization*, *(de)securitization gap*, perundingan damai, demiliterisasi, darurat militer, operasi pemulihan keamanan

ABSTRACT

Name : Iisgindarsah
Graduate Study : International Relations
Title : The Causes of Security Gap in Aceh during the Implementation of Cessation of Hostilities Agreement and the Imposition of Martial Law I

The purpose of this thesis is to explain why security deficit occurs in the management of national security in developing countries. Specifically, this thesis portrays the causes of security deficit during armed conflict in Aceh in the period of the implementation of Cessation of Hostilities Agreement and the imposition of martial law I. Therefore, this thesis assessed whether (de)securitization gap is present during both time period

This thesis utilizes two methods in its analysis. Data base analysis is employed to build quantitative data concerning security problems and the performance security actors to cope those problems. Meanwhile instrumental case study is used to explain qualitative data regarding the implementation of (de)securitization approach. This thesis finds out that security deficit in Aceh during the implementation of Cessation of Hostilities Agreement and the imposition of martial law I, is caused by the gap between threat speech act and the policy outcome as well as operational measures carried out by security actors.

Keywords: security deficit, comprehensive (de)securitization, (de)securitization gap, peace process, demilitarization, martial law, security operation

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	v
Ucapan Terima Kasih	vii
Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademis	xi
Abstrak	xiii
Abstract	xv
Daftar Isi	xvii
Daftar Tabel	xxi
Daftar Gambar	xxiii
Daftar Grafik	xxv
BAB I	
Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	5
1.3. Signifikansi dan Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Signifikansi Penelitian	6
1.3.2. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kerangka Pemikiran	7
1.4.1. Tinjauan Pustaka	7

1.4.2. Kerangka Konseptual	12
1.4.2.1. Konsep Masalah Penelitian: <i>Security Deficit</i>	12
1.4.2.2. Konsep Utama: <i>(De)Securitization Gap</i>	14
1.5. Operasionalisasi Konsep	21
1.6. Hubungan Antar Variabel	22
1.7. Alur Pemikiran	23
1.8. Asumsi dan Hipotesis Penelitian	24
1.9. Metodologi Penelitian	25
1.10. Sistematika Penulisan	27
BAB II	29
Defisit Keamanan di Aceh Pada Masa Implementasi Cessation of Hostilities Agreement dan Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer I	
2.1. Dinamika Penyelesaian Konflik Bersenjata di Aceh	30
2.1.1. Operasi Pemulihan Keamanan	30
2.1.2. Proses Perundingan Damai	34
2.2. Masalah Keamanan di Aceh	39
2.2.1. Kasus Masalah Keamanan Selama Implementasi COHA	40
2.2.2. Masalah Keamanan Selama Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer I	44
2.3. Upaya Penanganan Masalah Keamanan di Aceh	49
2.3.1. Penugasan Aparat Keamanan Selama Implementasi COHA	50
2.3.2. Penugasan Aparat Keamanan Selama Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer I	53

2.4. Penilaian Defisit Keamanan di Aceh Pada Masa Implementasi COHA dan Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer I	56
BAB III	61
Kesenjangan Dalam Pelaksanaan Pendekatan (De)Sekuritisasi Pada Masa Implementasi Cessation of Hostilities Agreement dan Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer I	
3.1. Pendekatan Desekuritisasi dan Implementasi COHA	62
3.1.1. Kerangka Kerja Penghentian Permusuhan	62
3.1.2. Permasalahan Pelaksanaan Tahapan Implementasi COHA	66
3.2. Pendekatan Sekuritisasi dan Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer I	83
3.2.1. Kerangka Kerja Operasi Terpadu	84
3.2.2. Keterbatasan Capaian Pelaksanaan Operasi Pemulihan Keamanan dan Operasi Penegakan Hukum	88
3.3. Kesenjangan Dalam Pelaksanaan Pendekatan (De)Sekuritisasi di Aceh	97
BAB IV	101
Penutup	
4.1. Temuan dan Kesimpulan	101
4.2. Implikasi Teoritis	105
4.3. Implikasi Kebijakan	107
4.4. Rekomendasi	109
Daftar Pustaka	111
Lampiran I	138
Tabulasi Data Kasus Masalah Keamanan di Aceh	

(9 Desember 2002 sd. 19 November 2003)

Lampiran II 171
Tabulasi Data Penugasan Aparat Keamanan di Aceh
(9 Desember 2002 sd. 19 November 2003)

Lampiran III 198
Cessation of Hostilities: Framework Agreement Between
Government of the Republic of Indonesia and
the Free Aceh Movement

Lampiran IV 205
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 28 Tahun 2003
Tentang Pernyataan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan
Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussam



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Derajat Kerentanan Keamanan	13
Tabel 1.2	Obyek Keamanan, Spektrum Ancaman dan Instrumen Penanggap	20
Tabel 1.3	Operasionalisasi konsep	22
Tabel 3.1	Jumlah Kekuatan GAM di Kabupaten di Aceh	72
Tabel 3.2	Kesenjangan Dalam Pelaksanaan Pendekatan (De)Sekuritisasi di Aceh	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan Antar Variabel Penelitian	23
Gambar 1.2.	Alur Pemikiran Penelitian	16
Gambar 3.1	Kerangka Kerja Penghentian Permusuhan	65
Gambar 3.2	Struktur Pemerintahan Darurat Militer di Aceh	85
Gambar 3.3	Kerangka Kerja Operasi Terpadu	87
Gambar 3.4	Skema Operasi Pemulihan Keamanan di Aceh	88
Gambar 3.5	Pelaksanaan Operasi Terpadu di Aceh	89



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Data Kasus Masalah Keamanan di Aceh (9 Desember 2002 sd. 19 November 2003)	40
Grafik 2.2	Kategori Kasus Masalah Keamanan di Aceh Periode Implementasi COHA	41
Grafik 2.3	Presentase Kategori Masalah Keamanan di Aceh Periode Implementasi COHA	41
Grafik 2.4	Pemetaan Masalah Keamanan di Kabupaten/Kota di Aceh Periode Implementasi COHA	42
Grafik 2.5	Jumlah Kasus Masalah Keamanan di Kabupaten/ Kota di Aceh Periode Implementasi COHA	43
Grafik 2.6	Jumlah Desa di Aceh Yang Tidak atau Kurang Berfungsi	44
Grafik 2.7	Jumlah Kepala Desa Tewas di Kabupaten di Aceh	44
Grafik 2.8	Kategori Masalah Keamanan di Aceh Periode Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer I	45
Grafik 2.9	Presentase Kategori Masalah Keamanan di Aceh Periode Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer I	46
Grafik 2.10	Pemetaan Masalah Keamanan di Kabupaten/Kota di Aceh Periode Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer I	47
Grafik 2.11	Jumlah Sekolah Terbakar di Aceh Periode Pemberlakuan Darurat Militer I	48
Grafik 2.12	Jumlah Masalah Keamanan di Kabupaten/Kota di Aceh Periode Pemberlakuan Darurat Militer I	49
Grafik 2.13	Data Penugasan Aparat Keamanan di Aceh (9 Desember 2002 sd. 19 November 2003)	50

Grafik 2.14	Kategori Penugasan Aparat Keamanan di Aceh Periode Implementasi COHA	51
Grafik 2.15	Presentase Kategori Penugasan Aparat Keamanan di Aceh Periode Implementasi COHA	51
Grafik 2.16	Pemetaan Penugasan Aparat Keamanan di Kabupaten/Kota di Aceh Periode Implementasi COHA	52
Grafik 2.17	Jumlah Penugasan Aparat Keamanan di Kabupaten/ Kota di Aceh Periode Implementasi COHA	53
Grafik 2.18	Kategori Penugasan Aparat Keamanan di Aceh Periode Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer I	54
Grafik 2.19	Presentase Kategori Penugasan Aparat Keamanan di Aceh Periode Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer I	54
Grafik 2.20	Pemetaan Penugasan Aparat Keamanan di Aceh Periode Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer I	55
Grafik 2.21	Jumlah Penugasan Aparat Keamanan di Kabupaten/ Kota di Aceh Periode Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer I	56
Grafik 2.22	Komparasi antara Masalah Keamanan dan Penugasan Aparat Keamanan di Kabupaten/Kota di Aceh Periode Implementasi COHA	57
Grafik 2.23	Komparasi antara Masalah Keamanan dan Penugasan Aparat Keamanan di Kabupaten/Kota di Aceh Periode Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer I	58
Grafik 2.24	Komparasi Akumulatif dan Presentase Jumlah Masalah Keamanan dan Penugasan Aparat Keamanan di Aceh	59
Grafik 3.1	Jumlah Aparat Keamanan di Aceh	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Mengapa terdapat defisit keamanan dalam pengelolaan keamanan nasional di negara-negara berkembang? Dinamika lingkungan strategis kontemporer menghadirkan berbagai tantangan baru yang menambah kompleksitas ancaman yang harus dihadapi setiap negara. Semakin banyaknya ancaman transnasional telah menjadikan perbedaan “luar” dan “dalam” negeri menjadi sesuatu yang tidak mutlak. Selain itu, ancaman kini dapat menampilkan dirinya dalam berbagai dimensi, baik militer maupun non-militer.¹ Kompleksitas ancaman tersebut tentu meniscayakan pengelolaan keamanan secara komprehensif (*comprehensive security*), baik pada tataran global, regional maupun nasional. Pada tataran nasional, setiap negara, tak terkecuali Indonesia memerlukan sekaligus kerangka regulasi dan beragam aktor keamanan yang memiliki diferensiasi struktur, spesialisasi fungsi dan spesifikasi kompetensi untuk menangani berbagai spektrum ancaman.²

Membahas keamanan secara komprehensif tentu sangat bermanfaat untuk memahami kompleksitas masalah, tetapi Mohammed Ayoob beranggapan hampir tidak mungkin menggunakan konsep yang terlalu elastik itu sebagai alat analitikal, khususnya ketika membahas kompleksitas persoalan keamanan nasional di negara-negara berkembang.³ Negara-negara berkembang harus

¹ Lihat Peter Hough, *Understanding Global Security* (London: Routledge, 2004), h. 13-15.

² Lihat Susanna Bearne, et. al, *National Security Decision-Making Structure and Security Sector Reform* (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2005), h. 3-4; ProPatria Institute, “Keamanan Nasional”, *Monograph*, No. 2 (16 Februari 2004), h. 5.

³ Lihat Mohammed Ayoob, “Defining Security: A Subaltern Realist Perspective”, dalam Keith Krause dan Michael C. Williams, eds., *Critical Security Studies: Concepts and Cases* (London: UCL Press, 1997), h. 125-128.

menghadapi dua tantangan sekaligus, yaitu memantapkan bangunan kenegaraannya (*state-building*) dan membina kehidupan kebangsaan (*nation-building*).⁴ Ketika pengelolaan keamanan nasional di negara-negara maju sudah mulai melembaga, pemerintah negara berkembang masih harus merumuskan kerangka regulasi bagi penyelenggaraan seluruh fungsi pemerintahan di bidang keamanan nasional.⁵ Selain itu, pemerintah negara berkembang dihadapkan pada “problematika keamanan” (*security problematic*) dalam melakukan mobilisasi sumber daya dan tindakan tertentu untuk bisa memantapkan bangunan kenegaraannya dan sekaligus memainkan peran tertentu dalam percaturan politik internasional.⁶ Oleh karena itu, persoalan utama dalam pengelolaan keamanan nasional di negara-negara berkembang adalah “defisit keamanan” (*security deficit*), yaitu selisih antara daya tembus ancaman dengan kemampuan suatu negara untuk menegakkan legitimasi dan otoritasnya atas suatu obyek keamanan.⁷

Permasalahan yang demikian dapat terlihat dalam penanganan pemberontakan bersenjata di Aceh. Setelah pencabutan status Daerah Operasi Militer (DOM) pada bulan Agustus 1998, pemerintah Indonesia berupaya menyelesaikan konflik bersenjata di Aceh melalui perundingan damai dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai alternatif dari pendekatan keamanan. Dengan difasilitasi oleh Henry Dunant Center – sebuah lembaga non-pemerintah yang berbasis di Swiss – pemerintah Indonesia dan GAM menandatangani kesepakatan Jeda Kemanusiaan pada tanggal 12 Mei 2000 untuk membuka akses bagi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Aceh dan menumbuhkan rasa saling percaya bagi tercapainya solusi damai.⁸ Meski

⁴ Lihat Kusnanto Anggoro, “Bangsa, Negara dan Transisi Politik”, dalam Stanley, eds., *Keamanan, Demokrasi dan Pemilu 2004* (Jakarta: ProPatria Institute, 2004), h. 2.

⁵ Lihat T. Hari Prihatono, eds., *Penataan Kerangka Regulasi Keamanan Nasional* (Jakarta: ProPatria Institute, 2006), h. 1. Lihat juga Kusnanto Anggoro, “Bridge Over Troubled Water: Convergence and Divergence in the Formulation of National Security Bill in Indonesia”, *Monograph*, No. 12, ProPatria Institute (1 October 2008).

⁶ Lihat Mohammed Ayoob, “The Security Problematic of The Third World”, *World Politics*, Vol. 43, No. 2 (Januari 1991), h. 257-283.

⁷ Lihat Kusnanto, (2004), op.cit., h. 41, 42, 44.

⁸ Lihat “Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh”, 12 Mei 2000.

kesepakatan gencatan senjata ini diperpanjang sampai pada tanggal 15 Januari 2001, namun selama hampir delapan bulan pelaksanaannya ternyata tidak mampu menghentikan ataupun mengurangi tingkat kekerasan dan insiden bersenjata di Aceh.⁹

Menyikapi situasi keamanan di Aceh yang semakin memburuk, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Inpres No. 4/2001 yang memuat rencana penyelesaian masalah Aceh secara komprehensif.¹⁰ Namun, kebijakan ini tidak cukup memberikan penjelasan yang substantif karena hanya menjabarkan tanggung jawab dan arahan umum bagi berbagai departemen dan instansi pemerintah agar menyiapkan rincian rencana masing-masing terkait penyelesaian konflik di Aceh di bawah kendali dan koordinasi wakil presiden.¹¹ Ketidakjelasan arah kebijakan ini menyebabkan Operasi Pemulihan Keamanan dan Penegakkan Hukum yang digelar POLRI dan TNI lebih mengemuka ketimbang langkah komprehensif lainnya. Meski komando operasi tersebut berada di bawah kendali Mayor Jenderal Yusuf Manggabarani selaku Kepala Korps Brimob POLRI, namun pelaksanaan otoritas itu dilakukan oleh Brigadir Jenderal TNI Zamroni mengingat keterbatasan personil dan peralatan POLRI dalam menggelar operasi kontra-gerilya (*counter-insurgency operation*).¹²

Ketika diangkat menggantikan Presiden Wahid pada bulan Oktober 2001, Presiden Megawati Soekarnoputri melanjutkan kebijakan pendahulunya dengan meneruskan pelaksanaan operasi pemulihan keamanan dan menginisiasi kembali perundingan damai dengan GAM.¹³ Pada tanggal 9 Desember 2002,

⁹ Lihat Anthony L. Smith, "Indonesia's Aceh Problem: Measuring International and Domestic Costs", *Asia-Pacific Security Studies*, Vol. 2, No. 5 (Juli 2003), h. 2.

¹⁰ Lihat Inpres No. 4 Tahun 2001 tentang Langkah-Langkah Komprehensif Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh.

¹¹ Lihat International Crisis Group, "Aceh: Why Military Force Won't Bring Lasting Peace", *Asia Report*, No. 17 (Juni 2001), h. 5.

¹² Lihat Kirsten Schulze, "Indonesia Strives to Restore Order in Aceh", *Jane's Intelligence Review* (September 2001), h. 28-30.

¹³ Lihat Inpres No. 7 Tahun 2001 tentang Langkah-Langkah Komprehensif Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh; Inpres No. 1 Tahun 2002 tentang Peningkatan Langkah Komprehensif Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Masalah Aceh.

kedua belah pihak menandatangani Cessation of Hostilities Agreement yang memuat kesepakatan, khususnya tentang pelaksanaan tahap demiliterisasi di Aceh.¹⁴ Meski dapat mengurangi tingkat kekerasan di Aceh, namun pelaksanaan kesepakatan damai ini mulai bermasalah oleh karena adanya perbedaan penafsiran tentang “penempatan” (*placement*) persenjataan GAM dan “relokasi” (*relocation*) pasukan TNI di Aceh.¹⁵ Walau tidak mencapai kesepakatan apapun, pemerintah Indonesia masih berupaya menyelamatkan proses perdamaian melalui perundingan dengan GAM di Tokyo pada tanggal 18 Mei 2003.¹⁶

Menyusul kegagalan perundingan damai di Tokyo, Presiden Megawati kemudian mengeluarkan Keppres No. 28/2003 untuk memberlakukan status Darurat Militer di Aceh.¹⁷ Kebijakan ini diikuti oleh pelaksanaan Operasi Terpadu pada tanggal 19 Mei 2003 yang meliputi operasi pemulihan keamanan, operasi kemanusiaan, operasi penegakan hukum, dan operasi pemantapan pemerintahan daerah. Namun, pemberlakuan status darurat militer membuat pelaksanaan Operasi Terpadu berada di bawah kendali TNI mengingat jabatan Penguasa Darurat Militer Daerah di Aceh dipegang oleh Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Endang Suwarya.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa operasi militer merupakan aspek utama dari Operasi Terpadu, sementara tiga operasi lainnya cenderung diarahkan untuk menanggulangi berbagai konsekuensi dari penggelaran operasi militer.¹⁹

¹⁴ Lihat “Cessation of Hostilities: Framework Agreement between Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement”, 10 Mei 2002.

¹⁵ Lihat Kirsten E. Schulze, “The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of A Separatist Organization”, *Policy Studies*, No. 2 (2004), h. 45, 47-48

¹⁶ Lihat Edward Aspinall dan Harold Crouch, “The Aceh Peace Process: Why It Failed”, *Policy Studies*, No. 1 (2003).

¹⁷ Lihat Keppres No. 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Darurat Militer di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

¹⁸ Lihat Rizal Sukma, “Security Operations in Aceh: Goals, Consequences and Lessons”, *Policy Studies*, No. 3 (2004), h. 22.

¹⁹ Lihat ProPatria Institute, “Rute Baru Penyelesaian Aceh”, *Monograph*, No. 1 (7 Januari 2004), h. 6.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Kompleksitas ancaman dalam lingkungan strategis kontemporer meniscayakan pemerintah setiap negara mengelola keamanan nasionalnya secara komprehensif dengan melibatkan berbagai fungsi pemerintahan dan beragam aktor keamanan. Akan tetapi, tidak seperti negara-negara maju, pemerintah negara-negara berkembang masih harus merumuskan kerangka regulasi bagi penyelenggaraan seluruh fungsi pemerintahan di bidang keamanan nasional. Dalam konteks itu, problematika dalam pengelolaan keamanan nasional yang dihadapi pemerintah negara-negara berkembang, termasuk Indonesia adalah defisit keamanan, yaitu selisih antara daya tembus ancaman dengan kemampuan suatu negara untuk mengatasi ancaman tersebut.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini akan menyoroiti persoalan defisit keamanan dalam penanganan konflik bersenjata di Aceh. Pemilihan kasus ini didasarkan oleh dua pertimbangan utama. *Pertama*, ditinjau dari kajian keamanan, kebijakan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Aceh, dapat dikategorikan dalam dua pendekatan, yaitu: (i) pendekatan desekuritisasi (*desecuritization*) melalui implementasi kesepakatan damai; dan (ii) pendekatan sekuritisasi (*securitization*) melalui pelaksanaan operasi pemulihan keamanan dan pemberlakuan keadaan bahaya. *Kedua*, ditinjau dari disiplin ilmu hubungan internasional, pemerintah Indonesia secara resmi melibatkan aktor non-negara yang bersifat lintas batas sebagai mediator dalam upaya penyelesaian konflik bersenjata di Aceh, khususnya dalam kaitannya dengan pendekatan desekuritisasi. Adapun pertanyaan penelitian (*research question*) yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Mengapa terdapat defisit keamanan dalam penanganan konflik bersenjata di Aceh?”

Konsep “kesenjangan dalam praktik (de)sekuritisasi” (*securitization gap*) yang digunakan dalam penelitian ini akan dibatasi pada: (1) obyek keamanan

yang terkait dengan aspek-aspek kedaulatan pemerintahan; dan (2) sifat ancaman berdasarkan derajat kekerasannya. Dengan menggunakan metodologi “analisa data base” dan “studi kasus instrumental”, penelitian ini mampu menjelaskan mengenai penyebab defisit keamanan dalam pengelolaan keamanan nasional di suatu negara berkembang. Adapun lingkup waktu penelitian atas kasus konflik bersenjata di Aceh akan dibagi dalam dua periode, yaitu: (1) periode pendekatan desekuritisasi, mulai dari penandatanganan Cessation of Hostilities Agreement sampai dengan gagalnya perundingan damai di Tokyo (9 Desember 2002 sd. 18 Mei 2003); dan (2) periode pendekatan sekuritisasi, yaitu pada masa pemberlakuan keadaan darurat militer I (19 Mei 2003 sd. 19 November 2003).

1.3. Signifikansi dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini menerapkan konsep “kesenjangan dalam praktik (de)sekuritisasi” – yang merupakan turunan dari kajian sekuritisasi – dalam analisa pembahasan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Konsep utama ini memiliki kelebihan dalam menganalisa persoalan dalam penanganan suatu masalah keamanan yang disebabkan oleh adanya kesenjangan antara “pernyataan tentang adanya ancaman” (*discursive, speech act*) dengan “tindakan nyata” (*non-discursive action*) yang dilaksanakan untuk mengatasi ancaman tersebut. Karena itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khasanah kajian keamanan (*security studies*) dalam disiplin ilmu hubungan internasional berupa temuan-temuan penelitian mengenai berbagai persoalan dalam pelaksanaan pendekatan (de)sekuritisasi untuk menjelaskan penyebab atas persoalan defisit keamanan dalam pengelolaan keamanan nasional di negara-negara berkembang.

Berbagai literatur kontemporer tentang kajian keamanan, khususnya terkait reformasi sektor keamanan di Indonesia menekankan bahwa pembenahan dan sekaligus pembangunan sistem keamanan nasional harus bertumpu pada

prinsip-prinsip demokrasi yang sesuai dengan kaidah tata pemerintahan yang baik. Selain keniscayaan normatif itu, keandalan sistem keamanan nasional juga meniscayakan bekerjanya dengan baik seluruh unsur penyelenggara fungsi-fungsi pemerintahan di bidang keamanan nasional yang terjalin satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap praktik dan permasalahan dalam penanganan masalah-masalah keamanan patut menjadi bahan pertimbangan dalam rangka membangun kerangka kerja pengelolaan keamanan nasional yang komprehensif dan integratif. Dalam konteks itu, penelitian ini memberikan kontribusi berupa rekomendasi untuk membenahi pengelolaan keamanan nasional di Indonesia.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan penyebab atas defisit keamanan dalam pengelolaan keamanan nasional di negara-negara berkembang;
2. Mempelajari penggunaan kerangka konseptual “sekuritisasi yang komprehensif” (*comprehensive securitization*) atas suatu masalah keamanan;
3. Menjelaskan kesenjangan dalam pelaksanaan praktik (de)sekuritisasi dalam penanganan suatu masalah keamanan;
4. Memberikan rekomendasi untuk membenahi pengelolaan keamanan nasional di Indonesia.

1.4. Kerangka Pemikiran

1.4.1. Tinjauan Pustaka

Konsep keamanan (*security*) dan ancaman (*threat*) merupakan dua konsep utama yang tidak bisa dilepaskan satu dengan lainnya dalam setiap

pembahasan tentang keamanan nasional (*national security*) suatu negara. Dalam kajian keamanan tradisional, konsep keamanan didefinisikan dalam konteks ancaman fisik (militer) dari negara lain. Frederick Hartman, misalnya, melihat keamanan nasional sebagai “penjumlahan total” dari berbagai “kepentingan nasional yang vital” bagi suatu negara, sehingga kepentingan nasional pun didefinisikan sebagai “sesuatu yang membuat negara bersedia dan siap untuk berperang”.²⁰ Sementara itu, Walter Lippmann menilai bahwa suatu bangsa berada dalam keadaan aman bilamana tidak berbahaya bagi dirinya untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya vital guna menghindari perang, dan mampu keluar sebagai pemenang jika terpaksa harus berperang.²¹ Mengacu pada konsepsi Lippman tersebut, tidak mengherankan sebenarnya jika Arnold Wolfers menegaskan bahwa jawaban atas berbagai ancaman keamanan meniscayakan pembangunan kekuatan (militer) sebagai sarana untuk “menangkal” maupun “mengalahkan” mereka.²²

Sementara itu, dalam diskursus kontemporer, konsep keamanan didefinisikan secara lebih fleksibel dengan memasukkan perspektif dan unsur yang tidak terdapat dalam diskursus tradisional. Jessica Tuchman Matthews, misalnya, memahami konsep keamanan tidak hanya terbatas pada dimensi militer, tetapi merujuk pada seluruh dimensi yang menentukan eksistensi suatu negara.²³ Bahkan sebelumnya, Barry Buzan dalam bukunya: *People, States and Fear* menjelaskan bahwa ancaman keamanan dapat bersumber dari dimensi militer, politik, sosial, ekonomi dan lingkungan dengan level analisa pada tataran sub-nasional, nasional dan internasional.²⁴ Dengan masuknya dimensi-dimensi non-militer tersebut, lingkup keamanan nasional suatu negara tidak terbatas pada

²⁰ Lihat Frederick H. Hartman, *The Relations of Nations* (New York, 1967), h. 14.

²¹ Dikutip dari John Baylis dan Steve Smith, *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations* (Oxford: Oxford University Press, 2001), h. 255.

²² Lihat Arnold Wolfers, *Discord and Collaboration: Essay on International Politics* (Baltimore: John Hopkins University Press, 1962), h. 150.

²³ Lihat Jessica Tuchman Matthews, “Redefining Security”, *Foreign Affairs*, Vol. 68, No. 2 (Spring 1989), h. 162.

²⁴ Lihat Barry Buzan, *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, 2nd Ed.* (Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1991), h. 118-134.

aspek keutuhan wilayah (*teritorial security*), tetapi juga mencakup aspek seperti keamanan lingkungan (*environmental security*), keamanan pangan (*food security*), keamanan energi (*energy security*), dan keamanan ekonomi (*economic security*), serta keamanan manusia (*human security*).²⁵

Disamping proliferasi sektoral tersebut, konsep keamanan juga mengalami komprehensi substansial melalui perdebatan mengenai obyek kajian keamanan (*referent object*). Meskipun Buzan menyebutkan individu sebagai “unit dasar yang tak terpisahkan” (*irreducible base unit*) dalam pembahasan tentang keamanan, namun ia menekankan bahwa “negara” merupakan obyek utama yang harus diamankan dari segenap ancaman.²⁶ Berbeda dengan Buzan, Ken Booth berpendapat bahwa negara bukanlah obyek keamanan tunggal yang tepat, melainkan “warga negara”.²⁷ Sementara menurut Martin Shaw, baik negara maupun individu perlu dipahami dalam konteks sosiologis. Karena itu, ia menempatkan “masyarakat” (*society*) sebagai obyek dalam kajian keamanan.²⁸ Dengan masuknya unsur manusia tersebut, substansi keamanan nasional tidak hanya menitikberatkan pada keutuhan wilayah dan kedaulatan pemerintahan, tetapi juga harus mengedepankan keselamatan seluruh warga negaranya.

Harus diakui bahwa konseptualisasi keamanan dari sudut menyeluruh (*comprehensive security*) telah memberikan kontribusi penting bagi diskursus kajian keamanan kontemporer, namun konseptualisasi tersebut tidak cukup memberi pijakan untuk merumuskan ukuran yang layak mengenai ancaman terhadap keamanan nasional. Richard Ullman, misalnya, mendefinisikan ancaman

²⁵ Lihat, misalnya, Caroline Thomas, *The Environment in International Relations* (London: Royal Institute of International Affairs, 1992); Giacomo Luciani, “The Economic Content of Security”, *Journal of Public Policy*, Vol. 8, No.2 (1989), h. 151-173; Jan H. Kalicki dan David L. Goldwyn eds., *Energy Security* (Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press, 2005); United Nations Development Programme, *Human Development Report 1994* (Oxford: Oxford University Press for UNDP, 1994).

²⁶ Lihat Buzan, (1991), *op.cit.*, h. 35, 57.

²⁷ Lihat Ken Booth, “Security and Emancipation”, *Review of International Studies*, Vol. 17, No. 4 (1991), h. 319.

²⁸ Lihat Martin Shaw, “There is No Such Thing as Society: Beyond Socialism and Statism in International Security Studies”, *Review of International Studies*, Vol. 19, No. 2 (1993), h. 160.

terhadap keamanan nasional sebagai “tindakan atau rangkaian kejadian yang, dalam waktu relatif singkat, (1) membahayakan kualitas [kelangsungan] hidup entitas nasional suatu negara, atau (2) membatasi ruang gerak pilihan kebijakan pemerintah suatu negara”.²⁹ Namun, meningkatnya interdependensi antar negara dan kemajuan teknologi informasi semakin meluluhkan batas-batas teritorial dan dapat mengikis sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁰ Kecenderungan lingkungan strategis tersebut, menurut Elke Krahmman, merupakan tantangan serius terhadap keamanan nasional suatu negara mengingat semakin banyaknya ancaman yang bersifat transnasional dengan menampilkan dirinya dalam berbagai dimensi, baik militer maupun non-militer, yang dilakukan oleh aktor non-negara maupun negara.³¹ Gejala transnasionalitas dan multidimensional ini menyebabkan “tingkat ancaman” (*level of threat*) dalam setiap dimensi keamanan tidak selalu sama, sehingga memperumit penilaian tentang kapan suatu masalah dapat dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional (*threat assessment*).

Membahas dan memahami keamanan secara komprehensif tentu sangat bermanfaat untuk memahami kompleksitas masalah, tetapi Mohammed Ayoob beranggapan hampir tidak mungkin menggunakan konsep yang terlalu elastik itu sebagai alat analitikal, khususnya ketika membahas kompleksitas persoalan keamanan di negara-negara berkembang.³² Sebagai negara yang dibangun atas dasar warisan kolonial, negara-negara berkembang harus menghadapi dua tantangan sekaligus, yakni membangun kehidupan bernegara dan membina kehidupan berbangsa.³³ Lebih lanjut, Caroline Thomas menyebutkan bahwa

²⁹ Lihat Richard H. Ullman, “Redefining Security”, *International Security*, Vol. 8, No. 1 (Summer 1983), h. 133.

³⁰ Lihat Victor D. Cha, “Globalization and the Study of International Security”, *Journal of Peace Research*, Vol. 37, No. 3 (May 2000), h. 391-403.

³¹ Lihat Elke Krahmman, “From State to Non-State Actors: The Emergence of Security Governance”, dalam Elke Krahmman, eds., *New Threats and New Actors in International Security* (New York: Palgrave Macmillan, 2005), h. 3-17.

³² Lihat Mohammed Ayoob, “Defining Security: A Subaltern Realist Perspective”, dalam Keith Krause dan Michael C. Williams, eds., *Critical Security Studies: Concepts and Cases* (London: UCL Press, 1997), h. 125-128.

³³ Lihat Mohammed Ayoob, “Regional Security and the Third World,” dalam Mohammed Ayoob, ed., *Regional Security in the Third World* (London: Groom Helm, 1986), h. 9-10.

masalah keamanan di negara-negara tersebut tidak sebatas pada dimensi militer, tetapi meliputi berbagai dimensi yang menyangkut eksistensi [politik]nya.³⁴ Kajian yang dilakukan oleh Robert I. Rotberg mengindikasikan salah satu karakteristik dari negara gagal (*failed state*) adalah ketidakmampuan pemerintah negara tersebut dalam mengelola keamanan nasionalnya.³⁵

Dalam konteks itu, pemerintah negara-negara berkembang dihadapkan pada “problematika keamanan” (*security problematic*) dalam melakukan mobilisasi sumber daya dan tindakan tertentu untuk bisa memantapkan bangunan kenegaraannya dan sekaligus memainkan peran tertentu dalam percaturan politik internasional.³⁶ Di satu sisi, pemerintah sebagai entitas politik yang memiliki otoritas atas wilayah dan rakyatnya, dapat memperoleh ancaman dari individu dan/atau sekelompok masyarakat. Namun di sisi lain, tindakan pemerintah tersebut, khususnya menyangkut penggunaan instrumen koersif menjadikannya rentan (*vulnerable*) terhadap tekanan pihak luar.³⁷ Oleh karena itu, Mohammed Ayoob mendefinisikan keamanan atau ketidakamana dalam hubungannya dengan berbagai kerentanan (*vulnerabilities*), baik dari dalam maupun luar negeri yang dapat mengancam eksistensi ataupun berpotensi melemahkan bangunan kenegaraan, baik integritas wilayah, tegaknya lembaga dan pranata kenegaraan, serta kewibawaan pemerintahan.³⁸ Sehubungan dengan itu, menurut Edward Azar dan Chung-in Moon, kemampuan suatu negara hendaknya tidak dibatasi pada penggunaan instrumen koersif (*security hardware*), tetapi juga melibatkan “piranti

³⁴ Lihat Caroline Thomas, “New Directions in Thinking about Security in the Third World”, dalam Ken Booth, ed., *New Thinking about Security and International Security* (London: Harper Collins, 1991), h. 269.

³⁵ Lihat Robert I. Rotberg, “The Failure and Collapse of Nation-States: Breakdown, Prevention, and Repair”, dalam Robert I Rotberg, ed., *When States Fail: Causes and Consequences* (New Jersey: Princeton University Press, 2004), h. 1-50.

³⁶ Lihat Mohammed Ayoob, “The Security Problematic of The Third World”, *World Politics*, Vol. 43, No. 2 (Januari 1991), h. 257-283.

³⁷ Lihat Mohammed Ayoob, *The Third World Security Predicament: State Making, Regional Conflict, and the International System* (Boulder: Lynne Rienner, 1995); David D. Laitin, *Nations-States and Violence* (New York: Oxford University Press, 2007); George Sorenson, “Individual Security and National Security: The State Remain Principal Problem”, *Security Dialogue*, Vol. 27, No. 4 (1996), h. 375-390.

³⁸ Lihat Ayoob, (1997), op.cit., h. 130.

lunak keamanan” (*security software*), seperti institusionalisasi partisipasi politik, pembangunan ekonomi dan rekayasa kultural.³⁹

Berangkat dari pemahaman yang demikian, Kusnanto Anggoro menafsirkan keamanan nasional sebagai situasi dimana aktor [negara] mampu melindungi segala sesuatu yang menjadi preferensi dan otoritasnya, serta mempunyai kemampuan untuk melakukan atau[pun] tidak melakukan sesuatu sesuai dengan preferensinya dalam rangka mencapai apa yang dianggapnya sebagai kepentingan atau nilai-nilai inti (*core interest, values*).⁴⁰ Dalam pengertian tersebut, menurut Kusnanto, persoalan yang harus menjadi perhatian adalah “defisit keamanan” (*security deficit*), yaitu selisih antara daya tembus (*penetrability*) ancaman dengan kemampuan nasional (*national capacity*) suatu negara untuk menegakkan legitimasi dan otoritasnya atas suatu obyek keamanan.⁴¹ Dengan demikian, masalah dalam pengelolaan keamanan nasional di negara-negara berkembang dapat terjadi bukan saja disebabkan oleh adanya ancaman nyata, tetapi juga karena ketidakberdayaan pemerintah negara tersebut dalam menunaikan fungsinya di bidang keamanan nasional.

1.4.2. Kerangka Konseptual

1.4.2.1. Konsep Masalah Penelitian: *Security Deficit*

Sebagaimana yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, persoalan utama yang senantiasa membayangi pengelolaan keamanan nasional, khususnya

³⁹ Lihat Edward Azar dan Chung-in Moon, “Legitimacy, Integration and Policy Capacity: The ‘Software’ Side of Third World National Security”, dalam Edward Azar dan Chung-in Moon, eds., *National Security in the Third World: The Management of Internal and External Threats* (Hants, England: Edward Elgar Publishing Limited, 1988), h. 77-101.

⁴⁰ Lihat Kusnanto Anggoro, “Pertahanan dan Keamanan Negara Pada Milenium Ketiga”, dalam Stanley, eds., *Keamanan, Demokrasi dan Pemilu 2004* (Jakarta: ProPatria Institute, 2004), h. 43. Lihat juga Rizal Sukma, “Konsep Keamanan Nasional”, *Discussion Paper*, ProPatria Institute (28 November 2002), h. 3.

⁴¹ Lihat Kusnanto, (2004), op.cit., h. 41, 42, 44.

di negara-negara berkembang adalah “defisit keamanan”. Konsep ini dapat dilihat substansinya dalam pembahasan “kerentanan” (*vulnerabilities*). Derajat kerentanan yang ditimbulkan oleh suatu masalah keamanan dapat diukur dengan melihat hubungan interaktif antara penetrabilitas – skala dan intensitas – ancaman dengan kapasitas – otoritas dan sumber daya – aktor keamanan. Seperti diilustrasikan dalam Tabel 1.1., situasi “defisit keamanan” terjadi apabila penetrabilitas atau daya tembus ancaman lebih besar daripada kapasitas aktor keamanan untuk menangani ancaman tersebut. Berdasarkan konseptualisasi tersebut, defisit keamanan dalam penanganan konflik bersenjata di Aceh akan ditunjukkan dengan melihat disparitas antara jumlah kasus masalah keamanan dengan jumlah penugasan aparat keamanan untuk menangani masalah tersebut.

Tabel 1.1
Derajat Kerentanan Keamanan⁴²

		Penetrabilitas Ancaman		Skala dan Intensitas	
		Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah
Kapasitas Aktor	Tinggi	Vulnerable, kapasitas memadai	Stabil, <i>idle capacity</i>		
	Kecil	Potentially vulnerable, kapasitas memadai			
Otoritas dan Sumber Daya					

Dalam penelitian ini, penyebab defisit keamanan dalam penanganan konflik bersenjata di Aceh akan dianalisa dengan menggunakan konsep “kesenjangan dalam praktik (de)sekuritisasi” (*securitization gap*). Konsep ini merupakan turunan dari kajian “sekuritisasi” yang diformulasikan oleh para teoritis di Conflict and Peace Research Institute atau yang lebih dikenal sebagai

⁴² Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Kurnanto Anggoro atas masukannya dalam perumusan substansi tabel ini.

Copenhagen School.⁴³ Untuk memahami konsep utama tersebut, terlebih dahulu harus dipahami konseptualisasi “praktik (de)sekritisasi yang komprehensif” (*comprehensive securitization*).

1.4.2.2. Konsep Utama: (*De*)*Securitization Gap*

Dalam buku mereka: *Security: A New Framework for Analysis*, Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde menjelaskan bahwa keamanan pada hakikatnya berkaitan dengan masalah kelangsungan hidup (*survival*).⁴⁴ Karena itu, suatu masalah dapat diangkat menjadi isu keamanan bilamana masalah tersebut dianggap menghadirkan ancaman nyata (*existential threat*) terhadap obyek tertentu (*referent object*).⁴⁵ Adanya ancaman tersebut menjustifikasi penggunaan “langkah-langkah luar biasa” (*extraordinary measures*) – baik penggunaan kekerasan, mobilisasi sumber daya maupun kekuasaan khusus untuk menanganinya.⁴⁶ Dengan kata lain, melalui ungkapan “keamanan”, pemerintah suatu negara dapat menyatakan keadaan darurat dan berhak untuk menggunakan cara apapun untuk menghentikan perkembangan yang mengancam.

Identifikasi Existential Threat dan Referent Object dalam Dimensi Keamanan.

Untuk mengoperasionalisasi kerangka konseptual sekritisasi, harus dimengerti terlebih dahulu arti atau maksud dari *referent object* dan *existential threat*. *Referent object* adalah segala sesuatu yang terancam keberadaannya dan berhak untuk diamankan.⁴⁷ Sementara *existential threat* hanya bisa dipahami dalam hubungannya dengan karakter tertentu dari obyek yang menjadi

⁴³ Istilah “Copenhagen School” bagi para teoritis yang menganut mazhab sekritisasi dihidupkan pertama kali oleh Bill McSweeney. Lihat Bill McSweeney, “Identity and Security: Buzan and the Copenhagen School”, *Review of International Studies*, Vol. 22, No. 1 (1996), h. 81-93.

⁴⁴ Lihat Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis* (Boulder, CO: Lynne Rienner, 1998), h. 21.

⁴⁵ Lihat Ibid., h. 21.

⁴⁶ Lihat Ibid., h. 21.

⁴⁷ Lihat Ibid., h. 36.

perhatian.⁴⁸ Mengingat karakter *referent object* sangat beragam tergantung pada sektor dan peringkat analisa, maka demikian pula halnya dengan ancaman terhadap suatu obyek.⁴⁹ Oleh karena itu, untuk keperluan analisa, suatu penelitian harus membatasi “wilayah” pengkajiannya, yang dalam kajian keamanan disebut sebagai “sektor” – terdiri dari sektor militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan. Dengan meng-*highlight* salah satu sektor, maka seorang peneliti bisa mengidentifikasi tipe interaksi atau pola tertentu, dan variabel yang harus diperhatikan dalam penelitiannya.⁵⁰

Mengacu pada konseptualisasi itu, penelitian ini menekankan pada sektor politis dan militer untuk menjelaskan karakter *referent object* dan sekaligus menerangkan sifat ancaman terhadap suatu obyek. Secara tradisional, kedaulatan negara (*state sovereignty*) merupakan *referent object* yang paling utama, baik dalam sektor politik maupun militer. Berkenaan dengan itu, Barry Buzan menawarkan tiga kriteria tentang komponen negara, yaitu: (1) landasan fisik, seperti integritas wilayah, penduduk maupun sumber daya (*physical-based of the state*); (2) landasan institusional yang mencerminkan otoritas pemerintahan (*institutional-expression of the state*); dan (3) wawasan dan cita-cita bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*idea of the state*).⁵¹ Mengacu pada konsepsi tersebut, obyek keamanan yang menjadi acuan penelitian ini adalah “kedaulatan pemerintahan” yang meliputi penyelenggaraan fungsi dan otoritas pemerintahan, akses terhadap sumber daya, dan kewibawaan pemerintah. Adapun mengenai sifat ancaman, pada tataran konseptual, masalah pokok yang menjadi pembahasan pada sektor politik dan militer secara berturut-turut adalah ancaman non-militer dan ancaman bersenjata.⁵² Dalam penelitian ini, spektrum ancaman terhadap kedaulatan pemerintahan akan merujuk pada “derajat kekerasan”, yang meliputi gangguan terhadap ketertiban masyarakat dan konflik bersenjata.

⁴⁸ Lihat Buzan, Waever dan de Wilde, (1998), op.cit., h. 21.

⁴⁹ Lihat Ibid., h. 21-22.

⁵⁰ Lihat Ibid., h. 27.

⁵¹ Lihat Buzan, (1991), op.cit., h. 65, 69-70, 82-83, 90-91.

⁵² Lihat Buzan, Waever dan de Wilde, (1998), op.cit., h. 52-141.

Pewacanaan Ancaman (Speech Act, Discursive Act).

Secara konseptual, “keamanan” merupakan suatu ungkapan yang diangkat untuk menggeser masalah politik keluar dari aturan permainan yang ada dan menempatkan isu tersebut, baik sebagai isu politik khusus atau bersifat luar biasa (*above politics*).⁵³ Jadi sekuritisasi merupakan bentuk ekstrim dari politisasi bila dilihat bahwa isu publik berkisar dari *non-politicized*⁵⁴, *politicized*⁵⁵, sampai pada *securitized*. *Securitized* di sini berarti suatu isu dianggap sebagai sesuatu yang mengancam dan mengacu pada keadaan yang mendesak. Karena itu, diperlukan tindakan darurat atau tindakan luar biasa di luar batas prosedur politik normal untuk mengatasinya.⁵⁶ Pada prinsipnya, penempatan isu pada spektrum tersebut – dari tidak mengancam sampai mengancam – tergantung pada keadaan.⁵⁷

Makna konsep sekuritisasi terletak pada penggunaannya, yaitu: bagaimana suatu pihak secara implisit menerapkan sekuritisasi. Mengangkat suatu isu menjadi isu keamanan merupakan langkah yang bersifat *self-referential*⁵⁸ karena isu tersebut diajukan sebagai suatu ancaman.⁵⁹ Dengan kata lain, suatu isu bisa menjadi isu keamanan, bukan atau tidak harus karena ancaman yang benar-benar ada, tetapi karena isu tersebut dianggap sebagai ancaman. Oleh karena itu, “definisi” dan “kriteria” sekuritisasi yang tepat terletak pada keterkaitan antara pembentukan “pemahaman subyektif bersama” (*intersubjective understanding*)

⁵³ Lihat Buzan, Waever dan de Wilde, (1998), op.cit., h. 23.

⁵⁴ Isu *non-politicized* adalah isu yang bukan menjadi perdebatan publik, dan tidak akan menjadi keputusan bersama atau tidak menyangkut kepentingan orang banyak.

⁵⁵ Isu *politicized* menyangkut kepentingan orang banyak, karena itu isu semacam ini menjadi bahan perdebatan di ruang publik, dan menjadi bagian dari kebijakan publik. Keputusan yang menyangkut isu ini mengharuskan adanya keputusan pemerintah dan alokasi sumber daya, atau diadakannya pengaturan bersama.

⁵⁶ Lihat Buzan, Waever dan de Wilde, (1998), op.cit., h. 23-24.

⁵⁷ Lihat Ibid., h. 24.

⁵⁸ Arti *self-referential* mengacu pada pihak yang mengemukakannya. Pihak ini mengemukakan pandangan atau kesimpulan pribadinya dan berharap bahwa pihak lain menerima pandangan atau kesimpulan tersebut sebagai benar adanya.

⁵⁹ Lihat Ibid., h. 24.

atas adanya *existential threat* dengan keadaan nyata yang memiliki efek politis.⁶⁰ Selain itu, suatu isu dikatakan berhasil disekuritisasi hanya jika “para pemangku kepentingan” (*relevant audience*) bisa “menerima” “pewacanaan” (*discourse*) tentang adanya ancaman terhadap oyek tertentu.⁶¹ Karena itu, Buzan, Waever dan de Wilde tidak menekankan tujuan sekuritisasi pada pelaksanaan tindakan luar biasa (dalam berbagai bentuknya), tetapi lebih pada pembentukan pemahaman subyektif bersama yang memberi justifikasi atas pelaksanaan tindakan tersebut.⁶²

Dalam wacana keamanan, suatu isu didramatisir dan ditempatkan sebagai prioritas utama. Dengan memberikan label “keamanan” pada isu tersebut, maka pihak tertentu menyatakan perlu segeranya masalah tersebut ditangani, dan pihak tersebut berhak melakukan dengan tindakan luar biasa. Proses sekuritisasi – mengangkat suatu isu menjadi isu keamanan – ini lah yang disebut sebagai “pernyataan ancaman” (*speech act*).⁶³ Adapun “desekuritisasi” (*desecuritization*) mengacu pada proses sebaliknya. Pihak yang melakukan *speech act* disebut sebagai *securitizing actor* dengan menyatakan suatu obyek terancam keberadaannya.⁶⁴ Agar *speech act* berhasil, dibutuhkan “persyaratan pendukung” (*facilitating conditions*). Persyaratan ini dikategorikan ke dalam dua kriteria, yaitu: (1) adanya prosedur konvensional yang *legitimate*, dan tindakan harus dilaksanakan menurut prosedur ini; dan (2) orang atau keadaan dalam suatu kejadian tertentu harus tepat untuk menyatakan prosedur tersebut.⁶⁵ Jadi sekuritisasi terjadi dalam proses atau prosedur yang berlaku, bukan merupakan pelanggaran atas prosedur tersebut. *Speech act* yang berhasil merupakan kombinasi antara bahasa dan masyarakat: pernyataan merupakan interpretasi dan

⁶⁰ Lihat Ibid., h. 25.

⁶¹ Lihat Buzan, Waever dan de Wilde, (1998), op.cit., h. 25. Penerimaan publik tersebut tidak harus dengan cara yang “beradab” (*civilized*), melalui perdebatan atau diskusi di ruang publik.

⁶² Lihat Ibid., h. 25.

⁶³ Lihat Ibid., h. 26.

⁶⁴ Lihat Ibid., h. 36.

⁶⁵ Lihat Ibid., h. 32.

tanggapan atas situasi/kondisi yang terjadi; sementara masyarakat menerima adanya situasi/kondisi tersebut, dan menerima/mengakui pernyataan ancaman.⁶⁶

Tindakan Nyata (Non-discursive Act).

Berangkat dari konsepsi tiga teoritis Copenhagen School tersebut tentang pentingnya pembentukan pemahaman subyektif bersama sebagai tujuan tindakan sekuritisasi, Ralph Emmers menekankan bahwa ketika suatu isu disekuritisasi oleh *securitizing actor* melalui *speech act (discursive action)*, maka tindakan tersebut harus disertai dengan “tindakan nyata” berupa implementasi kebijakan (*policy outcome*) untuk menangani ancaman terhadap suatu obyek keamanan.⁶⁷ Sehubungan dengan itu, Kusnanto Anggoro menilai bahwa pemerintah merupakan entitas politik tunggal yang bertanggung jawab atas terselenggaranya seluruh fungsi pemerintahan di bidang keamanan nasional. Oleh karena itu, pemerintah wajib merumuskan “kebijakan yang komprehensif” dan “penyelenggaraan fungsi yang sinergetik” sebagai modalitas agar ia dapat menjawab setiap ancaman terhadap keamanan nasionalnya dengan menggunakan instrumen organisasional yang tepat (*proper*).⁶⁸ Dengan demikian, penanganan suatu ancaman meniscayakan adanya kemenyeluruhan dalam melakukan praktik (de)sekuritisasi (*comprehensive securitization*).

Dalam konteks itu, Kusnanto juga mengingatkan perlunya pemahaman atas komprehensi ancaman (*threat assessment*) ditempatkan dalam konteks yang tepat. Kontekstualisasi itu menjadi penting dalam kaitannya sebagai pijakan bagi perencanaan kebijakan strategis (*policy planning*) dan penyusunan konfigurasi instrumen (*instrumental arrangement*) fungsional dalam pengelolaan keamanan nasional.⁶⁹ Lebih lanjut, substansi kebijakan tersebut harus mampu menjelaskan

⁶⁶ Lihat Ibid., h. 32.

⁶⁷ Lihat Ralph Emmers, “The Securitization of Transnational Crime in ASEAN”, *Working Paper*, No. 39, S. Rajaratnam School of International Studies (November 2002), h. 16.

⁶⁸ Lihat Kusnanto Anggoro, “Komprehensi Konsep dan Modalitas Pengelolaan Keamanan Nasional”, *Discussion Paper*, ProPatria Institute (14 Desember 2005a), h. 4-5.

⁶⁹ Lihat Kusnanto Anggoro, “Paradigma Keamanan Nasional dan Pertahanan Negara di Negara Demokrasi”, dalam Rusdi Marpaung, dkk., eds., *Dinamika Reformasi Sektor Keamanan* (Jakarta:

apa yang ditafsirkan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional dan bagaimana ancaman itu akan dihadapi.⁷⁰ Selain itu, diperlukan pendelegasian kewenangan (*distribution of authority*) kepada instansi-instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan (*implementing agencies*) dengan kewajiban untuk menyusun strategi operasional sesuai dengan fungsi dan kompetensi utama mereka masing-masing.⁷¹ Kepolisian, misalnya, bertindak selaku instansi pelaksana di bidang ketertiban masyarakat dengan menggunakan penegakkan hukum sebagai strategi pokok. Adapun angkatan bersenjata berperan sebagai instansi utama untuk menghadapi ancaman bersenjata dengan merumuskan segala sesuatu yang berkenaan dengan strategi dan taktik operasi militer.

Tabel 1.2. di bawah ini menggambarkan interrelasi antara “spektrum kekerasan ancaman” pada aras horizontal dengan “aspek-aspek kedaulatan pemerintahan” pada aras vertikal. Bentuk-bentuk ancaman yang tertera dalam kolom-kolom menunjukkan gradasi dan rentang ancaman, serta terhadap siapa ancaman tersebut tertuju. Semakin menanjak ke kanan, ancaman menjadi bertambah sistematis, mulai dari ancaman yang bersifat kriminalitas sampai pada ancaman yang melibatkan kekuatan bersenjata. Berdasarkan derajat kekerasan suatu ancaman, tabel ini juga mengisyaratkan proporsionalitas penggunaan instrumen fungsional dalam menghadapi spektrum ancaman tertentu.

Disamping itu, perlu diingat pula bahwa ancaman dapat terjadi secara tak terduga. Kapasitas instansi tertentu dalam situasi ini sangat mungkin tidak cukup memadai, baik karena ukuran dan eskalasi ancaman maupun karena ketidaktepatan perencanaan dan keterbatasan sebaran kapasitas tersebut. Penanganan masalah keamanan yang demikian, menurut Kusnanto, memerlukan “penyesuaian-penyesuaian”, baik pada tataran kebijakan maupun strategi

Imparsial, 2005b), h. 10. Lihat juga Rizal Sukma, “Keamanan Nasional: Ancaman dan Eskalasi”, *Discussion Paper*, ProPatria Institute (23 September 2003), h. 2.

⁷⁰ Lihat Kusnanto Anggoro, “Keamanan Nasional, Pertahanan Negara dan Ketertiban Umum”, paper disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar (14 Juli 2003), h. 8.

⁷¹ Lihat *ibid.*, h. 8.

penyelenggaraan fungsional berdasarkan tingkat kegentingan dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu ancaman.⁷² Penyesuaian ini diperlukan tidak saja untuk membuka ruang bagi langkah-langkah kedaruratan (*contingency measures*), tetapi juga memungkinkan kerja sama lintas instansi (*inter-agency cooperation*) guna menjawab persoalan-persoalan mendesak secara tepat dan cepat.⁷³ Sekalipun demikian, pendekatan ini, jika terjadi, harus dianggap sebagai sesuatu yang bersifat sementara (*ad hoc*) dalam ruang lingkup yang terbatas.⁷⁴

Tabel 1.2
Obyek Keamanan, Spektrum Ancaman dan Instrumen Penanggap

	Keamanan Intelektual	Konflik Berkeadilan	
		Internal	Eksternal
Penyelenggaraan Fungsi dan Organisasi Pemerintahan	Gangguan terhadap pelaksanaan fungsi instansi pemerintahan	Separatis dan/atau pemberontakan bersenjata	Gerakan separatis lintas batas
Akses Terhadap Sumber Daya	Gangguan terhadap distribusi sumber daya	Serangan terhadap industri strategis	
Kewibawaan Bangsa dan Simbol Nasional	Penindakan kriminalitas yang meluas, pengibaran bendera gerakan separatis		
Tanggapan Internasional	Penegakkan hukum	Penegakkan hukum, penindakan (<i>use of force</i>)	Penindakan (<i>use of force</i>), diplomasi
Penggunaan Kompetensi	Pemolisian persuasif, represif	Pemolisian represif, operasi militer kontra-gerilya	Operasi militer perang, <i>confidence building measures</i>

⁷² Lihat Kusnanto, (2005b), op.cit., h. 11.

⁷³ Lihat Kusnanto, (2003), op.cit., h. 9.

⁷⁴ Lihat Kusnanto, (2005b), op.cit., h. 11; ProPatria Institute, "Pembangunan Sistem dan Perencanaan Kontingensi dalam Sistem Keamanan Nasional Indonesia", *Monograph*, No. 11 (31 Mei 2008), h. 2, 3.

Instrumen Pelaksana (mission-based)	Kepolisian dan militer profesional	Militer profesional, departemen luar negeri
---	------------------------------------	---

Sumber: Diadaptasikan dari Kusananto Anggoro, "Paradigma Keamanan Nasional dan Pertahanan Negara di Negara Demokrasi," dalam Rusdi Marpaung, dkk., eds., *Dinamika Reformasi Sektor Keamanan* (Jakarta: Imparsial, 2005), h. 11; Kusananto Anggoro, "Komprehensi Konsep dan Modalitas Pengelolaan Keamanan Nasional", *Discussion Paper*, ProPatria Institute (14 Desember 2005), h. 3-4.

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa dalam konteks manapun, pengelolaan keamanan nasional suatu negara meniscayakan adanya kebijakan yang komprehensif dan strategi penyelenggaraan fungsi yang terpadu. Ketiadaan kedua modalitas tersebut akan menyebabkan apa yang disebut oleh Rizal Sukma sebagai "kesenjangan (de)sekuritisasi" (*securitization gap*), yaitu disparitas antara pernyataan ancaman dengan tindakan nyata pemerintah untuk mengatasinya⁷⁵. Dengan kata lain, pernyataan tentang apa yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional menjadi tidak bermakna tanpa disertai oleh tindakan nyata oleh pemerintah untuk mengatasi ancaman tersebut.

1.5. Operasionalisasi Konsep

Dua konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) konsep "kesenjangan dalam praktik (de)sekuritisasi" (*securitization gap*) yang menjadi konsep utama penelitian ini; dan (2) konsep "defisit keamanan (*security deficit*) yang terjadi sebagai akibat adanya kesenjangan antara pernyataan tentang adanya ancaman dengan tindakan nyata yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menangani konflik bersenjata di Aceh.

⁷⁵ Lihat Rizal Sukma, "The Securitization of Human Trafficking in Indonesia", *Working Paper*, No. 162, S. Rajaratnam School of International Studies (3 July 2008), h. 4.

Tabel 1.3
Operasionalisasi Konsep

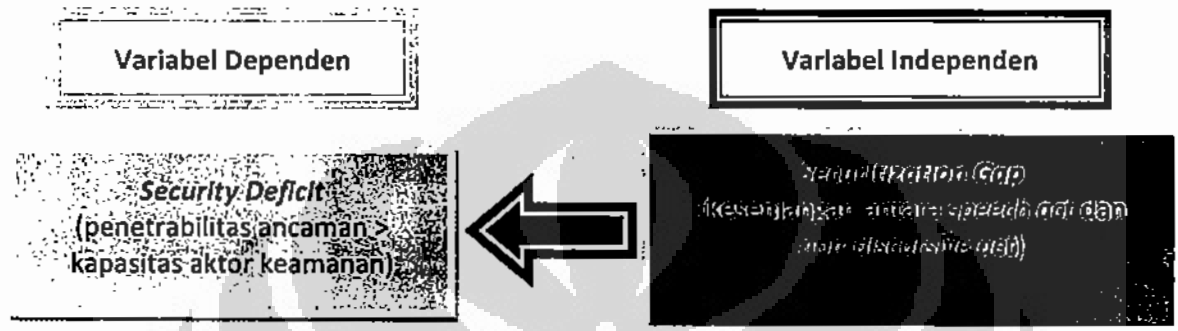
Konsep	Variabel	Dimensi	Indikator	Kategori
Defisit Keamanan (Security Deficit) (Kusnanto)	Kerentanan (vulnerability)	Derajat kerentanan	Penetrabilitas ancaman	Jumlah masalah keamanan besar (highly vulnerable)
			Kapasitas aktor keamanan	Jumlah penugasan aparat keamanan rendah (under-capacity)
Kesenjangan dalam praktik (de)sekuritisasi (Security Deficit) (Sulama)	Kesenjangan dalam praktik (de)sekuritisasi (de)sekuritisasi	Kesenjangan dalam praktik (de)sekuritisasi	Kesenjangan dalam praktik (de)sekuritisasi	Kesenjangan dalam praktik (de)sekuritisasi

1.6. Hubungan Antar Variabel

Guna menganalisa hubungan kausal antar variabel, penelitian ini mengidentifikasi dua konsep yang secara berturut-turut berkedudukan sebagai variabel dependen dan independen dalam penelitian ini. Variabel dependen adalah “defisit keamanan” yang disebabkan oleh variabel independen, yaitu “kesenjangan dalam praktik (de)sekuritisasi”. Karena penelitian ini difokuskan untuk menjelaskan mengapa terdapat defisit keamanan dalam penanganan konflik bersenjata di Aceh, maka yang menjadi penekanan di sini adalah kesenjangan

antara aspek-aspek dalam praktik (de)sekuritisasi yang komprehensif (*comprehensive securitization*).

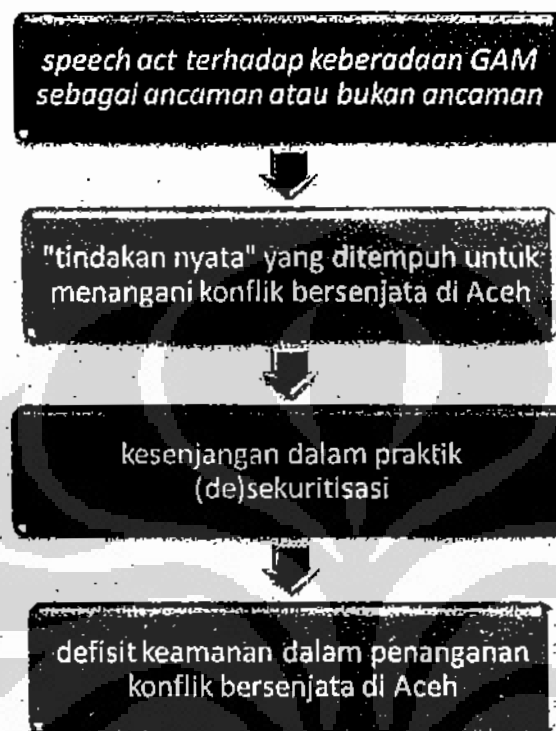
Gambar 1.1
Hubungan Antar Variabel Penelitian



1.7. Alur Pemikiran

Penelitian ini mengkaji kesenjangan antara aspek-aspek dalam praktik (de)sekuritisasi yang komprehensif (*comprehensive securitization*) yang mengakibatkan terjadinya defisit keamanan dalam penanganan konflik bersenjata di Aceh. Berdasarkan hubungan antar variabel di atas, penelitian ini menjelaskan secara sistematis penyebab terjadinya defisit keamanan dalam penanganan konflik bersenjata di Aceh; dimulai dari pernyataan tentang keberadaan Gerakan Aceh Merdeka sebagai ancaman atau bukan ancaman (*discursive, speech act*) yang diikuti oleh tindakan nyata (*non-discursive act*) pemerintah Indonesia untuk melakukan (de)sekuritisasi terhadap konflik bersenjata di Aceh dimana terdapat kesenjangan antara kedua aspek dalam praktik (de)sekuritisasi tersebut yang mengakibatkan terjadinya defisit keamanan dalam penanganan konflik bersenjata di Aceh pada masa implementasi COHA dan pemberlakuan keadaan darurat militer I.

Gambar 1.2
Alur Pemikiran Penelitian



1.8. Asumsi dan Hipotesis Penelitian

Berangkat dari operasionalisasi konsep dan hubungan antar variabel di atas, *asumsi* yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Defisit keamanan terjadi jika jumlah kasus masalah keamanan lebih besar daripada jumlah penugasan aparat keamanan untuk mengatasi masalah tersebut.
2. Kesenjangan dalam praktik (de)sekuritisasi terjadi apabila terdapat disparitas antara pernyataan tentang adanya ancaman dengan tindakan nyata yang dilaksanakan untuk mengatasi ancaman tersebut.

Mengacu pada kedua asumsi tersebut, *hipotesis* yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Terdapat defisit keamanan dalam penanganan konflik bersenjata di Aceh pada masa implementasi COHA dan pemberlakuan keadaan darurat militer I; dan
2. Terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan pendekatan (de)sekuritisasi untuk menangani konflik bersenjata di Aceh masa implementasi COHA dan pemberlakuan keadaan darurat militer I.

1.9. Metodologi Penelitian

Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif melalui studi dokumen. Studi dokumen memiliki beberapa keuntungan. *Pertama*, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan bahasa dan kata-kata yang digunakan oleh informan. *Kedua*, dokumen yang dibutuhkan dapat diakses pada waktu-waktu yang dianggap tepat bagi peneliti. *Ketiga*, mewakili data-data yang secara lengkap dan teratur telah dikumpulkan oleh informan atau peneliti lain pada fenomena yang serupa. *Keempat*, dokumen tersebut merupakan bukti tertulis, sehingga menghemat waktu peneliti untuk merekam data-data tersebut.⁷⁶ Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen resmi dari pemerintah Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data kualitatif berupa tulisan-tulisan ilmiah, baik dari buku maupun jurnal, serta pemberitaan di surat kabar dan majalah yang relevan dengan kasus yang diteliti dalam penelitian.

Guna menunjukkan adanya defisit keamanan dalam penanganan konflik bersenjata di Aceh, penelitian ini menggunakan metode analisa data base. Dengan metode tersebut dan berdasarkan koleksi kliping surat kabar yang dilakukan oleh

⁷⁶ Lihat John W. Creswell, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches* (California: Sage Publications, 1994), h. 150-151.

KontraS, penelitian ini membangun tabulasi data kualitatif tentang “kasus masalah keamanan” dan “penugasan aparat keamanan untuk mengatasi masalah tersebut” dengan memetakan pemberitaan terkait konflik bersenjata di Aceh oleh enam surat kabar – Kompas, The Jakarta Post, Media Indonesia, Republika, Suara Pembaruan dan Koran Tempo – mulai dari tanggal 9 Desember 2002 sampai bulan 19 November 2003. Berkenaan dengan itu, data kasus masalah keamanan dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: (i) serangan bersenjata dan pemboman, (ii) kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi; dan (iii) perusakan bangunan (non-sekolah) dan blokade suplai. Sementara data penugasan aparat keamanan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu: (i) operasi pemulihan keamanan, dan (ii) pemolisian dan penegakan hukum. Tabulasi data kualitatif tersebut kemudian diolah menjadi data kuantitatif dengan menjumlahkan masing-masing kategori dan memetakan sebarannya berdasarkan kabupaten/kota madya di Aceh. Lebih lanjut, kedua tabulasi data kuantitatif tersebut dikomparasikan, baik berdasarkan kabupaten/kota madya maupun secara keseluruhan untuk menunjukkan defisit keamanan dalam penanganan konflik bersenjata di Aceh.

Adapun untuk menjelaskan tentang adanya kesenjangan dalam pelaksanaan pendekatan (de)sekuritisasi di Aceh, penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Penelitian studi kasus (*case study*) adalah metode dimana peneliti membahas sebuah fenomena atau entitas yang dibatasi oleh periode waktu serta aktivitas tertentu dan mengumpulkan informasi secara rinci dengan menggunakan prosedur pengumpulan data pada suatu periode waktu tertentu.⁷⁷ Ada tiga jenis penelitian studi kasus. *Pertama*, studi kasus intrinsik (*intrinsic case study*), ketika suatu kasus tertentu dipilih karena peneliti menghendaki pemahaman yang lebih mendalam dari kasus ini. *Kedua*, studi kasus instrumental (*instrumental case study*), ketika sebuah kasus diteliti untuk memberikan pandangan pada sebuah isu ataupun untuk menjelaskan sebuah teori. *Ketiga*, studi kasus kolektif (*collective case study*) merupakan metode studi kasus instrumental yang diperpanjang untuk meliputi beberapa kasus untuk mempelajari lebih lanjut

⁷⁷ Lihat R.K. Yin (1989) dalam Creswell, (1994), *op.cit.*, h. 12.

mengenai sebuah fenomena, populasi, atau kondisi umum.⁷⁸ Penelitian ini menggunakan metode studi kasus instrumental karena pemilihan kasus dalam penelitian ini – konflik bersenjata di Aceh – dimaksudkan untuk menjelaskan sebuah fenomena tertentu, yaitu hubungan sebab akibat antara defisit keamanan dengan kesenjangan dalam praktik (de)sekuritisasi. Dengan pemilihan kasus ini, penelitian ini dapat memberikan penjelasan mengapa terdapat defisit keamanan dalam pengelolaan keamanan nasional di negara-negara berkembang.

1.10. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bagian ini memberi gambaran secara umum keseluruhan penelitian; menjelaskan latar belakang penelitian, permasalahan, kerangka pemikiran, operasionalisasi konsep, hubungan antar variabel, alur pemikiran penelitian, asumsi dan hipotesis penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Defisit Keamanan di Aceh Pada Masa Implementasi Cessation of Hostilities Agreement dan Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer I. Bagian ini membahas defisit keamanan pada dua periode waktu yang disebutkan dengan menjabarkan data kuantitatif mengenai kasus masalah keamanan dan penugasan aparat keamanan untuk menangani masalah tersebut, serta menunjukkan adanya disparitas antara keduanya.

BAB III: Kesenjangan dalam Pelaksanaan Pendekatan (De)Sekuritisasi di Aceh Pada Masa Implementasi Cessation of Hostilities Agreement dan Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer I. Bagian ini secara khusus menjelaskan kesenjangan dalam pelaksanaan pendekatan desekuritisasi yang

⁷⁸ Lihat R.E. Stake (1994) dalam Keith F. Punch, *Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches* (London: Sage Publication, 1998), h. 152.

ditempuh pemerintah Indonesia secara berturut-turut melalui implementasi kerangka kerja Cessation of Hostilities Agreement, dan pendekatan sekuritisasi melalui pemberlakuan keadaan darurat militer I dan penggelaran operasi pemulihan keamanan dan operasi penegakan hukum berdasarkan kerangka kerja Operasi Terpadu. Kesenjangan dalam pelaksanaan kedua pendekatan tersebut ditunjukkan dengan membahas disparitas antara pernyataan terhadap keberadaan GAM sebagai ancaman atau bukan ancaman dengan tindakan nyata yang dilakukan aparat keamanan dalam menangani konflik bersenjata di Aceh.

BAB 4 : Kesimpulan. Bab Kelima merupakan bagian terakhir dalam penelitian ini yang berisi temuan dan kesimpulan mengenai hubungan kausal antara kesenjangan dalam praktik (de)sekuritisasi dengan terjadinya defisit keamanan dalam penanganan konflik bersenjata di Aceh pada masa implementasi COHA dan pemberlakuan keadaan darurat militer I. Hipotesis penelitian yang diajukan pada bagian Pendahuluan ditinjau kembali berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk melihat apakah hipotesis tentang *securitization gap* memang menyebabkan terjadinya *security deficit* dalam kasus yang dipilih.

BAB II

DEFISIT KEAMANAN DI ACEH PADA MASA IMPLEMENTASI CESSATION OF HOSTILITIES AGREEMENT DAN PEMBERLAKUAN KEADAAN DARURAT MILITER I

Apakah terdapat defisit keamanan (*security deficit*) dalam pengelolaan keamanan nasional di Aceh pada masa implementasi Cessation of Hostilities Agreement dan pemberlakuan keadaan darurat militer I di Aceh? Bab kedua dalam penelitian ini memuat topik-topik yang berkenaan dengan masalah keamanan dan upaya penanganan ancaman pada kedua periode waktu tersebut. Sub-bab 2.1 memaparkan secara garis besar upaya penyelesaian konflik bersenjata di Aceh, khususnya terkait proses perundingan damai (*peace process*) dan pelaksanaan operasi pemulihan keamanan (*security operation*). Selanjutnya, dengan menggunakan metode analisa data base berdasarkan pemberitaan di enam surat kabar tentang konflik bersenjata di Aceh mulai dari bulan Desember 2002 sampai bulan November 2003, sub-bab 2.2 dan 2.3 secara berturut-turut menjabarkan data kuantitatif mengenai kasus masalah keamanan dan penugasan aparat keamanan untuk menangani masalah tersebut pada masa implementasi Cessation of Hostilities Agreement dan pemberlakuan keadaan darurat militer I. Terakhir, sub-bab 2.4 merupakan bagian kesimpulan yang membahas persoalan defisit keamanan, yaitu disparitas antara masalah keamanan dengan upaya penanganan ancaman selama dua periode waktu tersebut.

2.1. Dinamika Penyelesaian Konflik Bersenjata di Aceh

Sub-bagian ini memaparkan secara garis besar langkah-langkah yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam rangka menyelesaikan konflik bersenjata di Aceh sejak tahun 1998. Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah menjadi *focal point* perlawanan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terhadap pemerintah Indonesia. Secara prinsipil, GAM memperjuangkan pemisahan Aceh dari wilayah kedaulatan Republik Indonesia sebagai tujuan utama pemberontakannya pada periode tahun 1970-1972 dan 1990-1992.⁷⁹ Munculnya kembali pemberontakan GAM pada tahun 1998 merupakan dampak dari akumulasi berbagai akar permasalahan di Aceh yang tak terselesaikan, yaitu eksploitasi ekonomi, sentralisasi dan penyeragaman, represi militer, serta kekebalan politik.⁸⁰ Oleh karena itu, kendati militer Indonesia berhasil menundukkan dua kali pemberontakan GAM terdahulu dalam waktu yang relatif singkat, namun pemerintah Indonesia masih kesulitan menegakkan otoritasnya di Aceh. Bahkan, eskalasi konflik bersenjata cenderung meningkat sejak pencabutan status Aceh sebagai Daerah Operasi Militer pada tanggal 7 Agustus 1998.⁸¹

2.1.1. Operasi Pemulihan Keamanan

Menyusul penarikan pasukan non-organik TNI pasca pencabutan Daerah Operasi Militer, para gerilyawan GAM mulai mengintensifkan aktivitas perlawanannya terhadap pemerintah Indonesia. Pada tanggal 2 November 2000, misalnya, ratusan massa yang diprovokasi seorang anggota GAM bernama Ahmad Kandang menyerbu dan menganiaya dua prajurit TNI, serta membakar

⁷⁹ Lihat David Brown, *The State and Ethnic Politics in South-East Asia* (London: Routledge, 1994), h. 156.

⁸⁰ Lihat Rizal Sukma, "Aceh in Post-Suharto Indonesia: Protracted Conflict Amid Democratisation", paper dipresentasikan di Simposium Internasional yang bertema "At The Frontline of Conflict Prevention in Asia", Japan Institute of International Affairs, Tokyo, 6-7 Juli 2001.

⁸¹ Lihat Geoffrey Robinson, "Rawan is as Rawan Does: The Origins of Disorder in New Order Aceh", *Indonesia*, Vol. 66 (October 1998), h. 150.

bendera Merah Putih di Kabupaten Aceh Utara. Bahkan pada tanggal 29 Desember 2000, kelompok Ahmad Kandang menculik dan membunuh tujuh prajurit TNI.⁸² Berbagai insiden semacam ini kemudian mendorong pemerintah Indonesia menggelar operasi keamanan dengan nama Operasi Wibawa pada awal bulan Januari 1999.⁸³ Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah Indonesia juga menggelar Operasi Sadar Rencong yang dilaksanakan hingga akhir tahun 2000, dan Operasi Cinta Meunasah pada periode bulan Januari sampai April 2001.⁸⁴

Pada dasarnya, dua operasi keamanan yang disebut terakhir di atas merupakan operasi pemolisian di Aceh. Pemberian tanggung jawab pelaksanaan operasi keamanan kepada POLRI tidak hanya dimaksudkan untuk menghindari dampak penggunaan instrumen koersif yang berlebihan pada masyarakat Aceh, tetapi juga untuk menciptakan kesan bahwa pemerintah Indonesia kini lebih menekankan pendekatan non-militer dalam menjawab permasalahan di Aceh.⁸⁵ Namun, pemberian otoritas komando operasi tersebut tidak ditopang oleh kejelasan koordinasi pelaksanaan tugas di antara POLRI dan TNI. Lebih dari itu, di tengah ketiadaan kebijakan yang koheren dan kelemahan komando operasi, POLRI maupun TNI dibiarkan menjalankan strategi operasi keamanan tanpa ada kesinambungan dengan kebijakan politik pemerintah Indonesia.⁸⁶

Persoalan demikian terlihat jelas ketika pada bulan April 2001, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Inpres No.4/2001 yang memuat enam butir rencana penanganan masalah Aceh secara komprehensif, yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, hukum, keamanan dan kertertiban publik, serta informasi

⁸² Lihat Rizal Sukma, "Security Operations in Aceh: Goals, Consequences and Lessons", *Policy Studies*, No. 3 (Washington, DC: East West Center, 2004), h. 12-113.

⁸³ Lihat Priyambudi Sulistyanto, "Whither Aceh", *Third World Quarterly*, Vol. 22, No. 3, (2001), h. 445.

⁸⁴ Lihat Sukma, (2004), *op.cit.*, h. 13.

⁸⁵ Lihat "Kondisi Aceh Pasca Ulang Tahun GAM: Tidak Semakin Baik", *Jurnal Pasar Modal Indonesia* (Januari 2000), h. 56.

⁸⁶ Lihat International Crisis Group, "Aceh: Why Military Force Won't Bring Lasting Peace", *Asia Report*, No. 17 (2001), h. 4.

dan komunikasi.⁸⁷ Akan tetapi, kebijakan tersebut tidak menjelaskan secara substantif tentang langkah-langkah komprehensif yang dimaksud, tetapi sebatas menjabarkan tanggung jawab berbagai departemen dan instansi pelaksana untuk menyiapkan rincian rencana kelembagaan masing-masing di bawah koordinasi wakil presiden dan dua menteri koordinator.⁸⁸ Berdasarkan Inpres tersebut, Operasi Pemulihan Keamanan dan Penegakan Hukum kemudian digelar dengan komando operasi gabungan berada di bawah kendali Kepala Korps Brimob POLRI, Mayor Jenderal Yusuf Manggabarani.⁸⁹ Dalam struktur komando operasi ini, terdapat dua Komando Pelaksana Operasi (Kolakops), yaitu Kolakops Pemulihan Keamanan yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal (TNI) Zamroni di Lhokseumawe, dan Kolakops Penegakan Hukum yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal (Pol) Herman S.S. di Banda Aceh.⁹⁰

Secara keseluruhan, hasil pelaksanaan Operasi Pemulihan Keamanan dan Penegakan Hukum memiliki aspek positif maupun negatif. Pada periode awal pelaksanaannya, tingkat keberhasilan tampak nyata, terutama terkait penugasan satuan khusus kontra-gerilya Kopassus, yaitu Satuan Tugas Rajawali. Satuan ini bertugas mengumpulkan informasi intelijen dan menentukan secara selektif markas GAM di wilayah pedesaan dan mengidentifikasi secara tepat gerilyawan GAM dari warga sipil yang menjadi sasaran operasinya.⁹¹ Namun, catatan keberhasilan semacam ini menjadi temoda akibat sejumlah personil Brimob yang acapkali melakukan tindakan kekerasan, penembakan di tempat, intimidasi dan penyiksaan warga sipil yang dicurigai terlibat dalam aktivitas GAM, serta pembakaran pemukiman penduduk di Aceh.⁹² Oleh karena itu, meskipun otoritas komando operasi gabungan di Aceh secara resmi dipegang oleh seorang perwira

⁸⁷ Lihat Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2001 tentang Langkah-Langkah Komprehensif Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh.

⁸⁸ Lihat ICG, (2001), op.cit., h. 5.

⁸⁹ Lihat Sukma, (2004), op.cit., h. 15-16.

⁹⁰ Lihat "TNI Kesulihan Hadapi GAM", *Kompas* (9 Mei 2001).

⁹¹ Lihat Sukma, (2004), op.cit., h. 29.

⁹² Lihat, misalnya, "Brimob Suspected of Killing 3 Women in Aceh", *The Jakarta Post* (4 Agustus 2002), h. 30; "Tiga Wanita Ditembak Mati, Satu Anak Luka", *Kompas* (4 Agustus 2002).

senior POLRI, namun pada praktiknya di lapangan, otoritas tersebut dijalankan oleh Brigjen TNI Zamroni mengingat POLRI mengalami keterbatasan personil, peralatan maupun kompetensi dalam melaksanakan operasi kontra-gerilya.⁹³

Dominasi TNI dalam pelaksanaan Operasi Pemulihan Keamanan dan Penegakan Hukum juga dapat tercermin dari perubahan komposisi personil yang terlibat di dalamnya. Pada akhir bulan April 2001, misalnya, diperkirakan terdapat 20.000 aparat kepolisian dan 12.000 prajurit TNI di Aceh.⁹⁴ Namun, komposisi tersebut berubah drastis pada pertengahan tahun 2002. Kepala POLRI, Jenderal Polisi Da'i Bachtiar mengungkapkan bahwa anggota POLRI yang ditugaskan di Aceh sampai bulan Juli 2002 berjumlah sebanyak 12.000 personil, sedangkan prajurit TNI mencapai 20.000 personil.⁹⁵ Meski dibantah oleh jajaran Markas Besar TNI,⁹⁶ penambahan jumlah prajurit TNI di Aceh tersebut tampaknya terjadi menyusul pembentukan kembali Kodam Iskandar Muda pada tanggal 5 Februari 2002.⁹⁷ Berselang dua hari sejak peresmian Kodam Iskandar Muda, sebanyak enam batalyon atau sekitar 3.600 prajurit Kostrad siap diberangkatkan ke Aceh.⁹⁸

Meskipun mendapat berbagai tentangan dari kalangan masyarakat Aceh dan organisasi masyarakat sipil,⁹⁹ baik pemerintah maupun TNI menerangkan bahwa pembentukan Kodam Iskandar Muda diharapkan dapat menambah efektifitas TNI dalam merespon berbagai ancaman dari GAM.¹⁰⁰ Akan tetapi, situasi keamanan di Aceh sejak pembentukan Kodam Iskandar Muda justru tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan.¹⁰¹ Kontak senjata antara aparat

⁹³ Lihat Kirsten Schultz, "Indonesia Strives to Restore Order in Aceh", *Jane's Intelligence Review*, (September 2001), h. 28.

⁹⁴ Lihat John Haseman, "Jakarta Hardens Indonesia Policy", *Jane's Defence Weekly* (2 Mei 2001).

⁹⁵ Lihat "Kapolri: GAM Telah Jadi Clandestine", *Tempo Interaktif* (12 Juli 2002).

⁹⁶ Lihat "KSAD: Tidak Ada Penambahan Pasukan di Aceh", *Suara Pembaruan* (6 Februari 2002).

⁹⁷ Lihat "Kodam Iskandar Muda Diresmikan", *Suara Pembaruan* (5 Februari 2002); "Aceh Military Command Reinstated", *The Jakarta Post* (5 Februari 2002).

⁹⁸ Lihat "Kostrad Tambah Enam Batalyon ke Aceh", *Republika* (8 Februari 2002).

⁹⁹ Lihat "Kodam Aceh Wujud Sikap Ganda Pemerintah", *Media Indonesia* (7 Februari 2002).

¹⁰⁰ Lihat "KSAD Harap Kodam Atasi Kekerasan", *Kompas* (6 Februari 2002), "KSAD Resmikan Kodam Iskandar Muda", *Republika* (6 Februari 2002).

¹⁰¹ Lihat "Military Fails to Stop Violence in Aceh", *The Jakarta Post* (24 Juni 2002).

keamanan dengan gerilyawan GAM bahkan semakin sering terjadi, sementara pembunuhan dan penculikan oleh orang tak dikenal masih terus berlanjut.¹⁰² Dengan demikian, baik pelaksanaan Operasi Pemulihan Keamanan dan Penegakan Hukum maupun pembentukan Kodam Iskandar Muda ternyata selain tidak mampu mengakhiri konflik bersenjata di Aceh, tetapi juga tidak berhasil melumpuhkan kekuatan bersenjata GAM.

2.1.2. Proses Perundingan Damai

Meskipun eskalasi konflik bersenjata di Aceh cenderung semakin meningkat pasca pencabutan status Daerah Operasi Militer, namun upaya penyelesaian konflik melalui perundingan damai mulai ditempuh pemerintah Indonesia sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Berkenaan dengan itu, perwakilan Henry Dunant Center (HDC) – sebuah lembaga non-pemerintah yang berbasis di Swiss – bertemu dengan Presiden Wahid di Jakarta dan menawarkan bantuannya untuk memfasilitasi komunikasi antara pemerintah Indonesia dengan pimpinan GAM. Meskipun HDC sebagai sebuah organisasi baru saja dibentuk dan keterbatasan pengalamannya mengenai masalah-masalah sosial-politik di Indonesia, namun keputusan Presiden Wahid melibatkan HDC sebagai mediator dalam proses perdamaian di Aceh tampaknya didasarkan atas pertimbangan bahwa para staf HDC dianggap memiliki pengalaman luas dalam berbagai operasi kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa di beberapa wilayah konflik bersenjata.¹⁰³ Dengan difasilitasi oleh HDC, pemerintah Indonesia melakukan serangkaian pertemuan tertutup dengan pimpinan GAM di Jenewa

¹⁰² Lihat, misalnya, "Tiga Anggota GAM dan Satu TNI Tewas", *Jawa Pos* (10 Juni 2002); "Anggota DPRD Aceh Besar Ditembak Mati", *Kompas* (12 Juni 2002); "Penembak Misterius Terus Beraksi", *Media Indonesia* (17 Juni 2002); "Enam Anggota Paskhas TNI-AU Tewas Tertembak", *Kompas* (21 Juni 2002).

¹⁰³ Lihat Edward Aspinall dan Harold Crouch, "The Aceh Peace Process: Why It Failed", *Policy Studies*, No. 1 (Washington, DC: East West Center, 2003), h. 10.

sejak tanggal 27 Januari 2000.¹⁰⁴ Selanjutnya, pada tanggal 12 Mei 2000, pemerintah Indonesia dan GAM menandatangani “Nota Kesepahaman Bersama tentang Jeda Kemanusiaan untuk Aceh” yang berlaku mulai tanggal 2 Juni sampai 2 September 2000. Baik pemerintah Indonesia maupun GAM memahami bahwa kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan masa jeda dalam penggunaan kekuatan bersenjata agar tercipta ruang bagi tercapainya sebuah solusi damai atas konflik di Aceh.¹⁰⁵

Namun demikian, implementasi Jeda Kemanusiaan ternyata tidak mampu berbuat banyak dalam menghentikan kekerasan di Aceh. Tak berapa lama sejak kesepakatan tersebut diberlakukan di Aceh, beberapa surat kabar nasional melaporkan terjadinya sejumlah bentrokan bersenjata antara aparat keamanan dari satuan Brimob POLRI dengan gerilyawan GAM.¹⁰⁶ Berbagai insiden bersenjata ini umumnya terjadi pada saat pasukan Brimob melakukan patroli rutin di daerah pedesaan yang diketahui sebagai basis kekuatan GAM. Pihak GAM mengakui melakukan penyerangan terhadap pasukan Brimob, tetapi hal itu semata-mata hanya untuk mempertahankan diri dari kejaran aparat keamanan.¹⁰⁷ Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, bersamaan dengan implementasi Jeda Kemanusiaan, POLRI juga melaksanakan Operasi Sadar Rencong untuk memulihkan keamanan dan melucuti warga yang bersenjata di Aceh.

Walaupun pemerintah Indonesia memutuskan memperpanjang masa Jeda Kemanusiaan sampai tanggal 15 Januari 2001,¹⁰⁸ namun tingkat kekerasan pada periode kedua ini ternyata jauh lebih buruk yang ditandai dengan meningkatnya

¹⁰⁴ Lihat “Empat Putaran Itu...” *Republika* (10 Mei 2000). Selain perundingan di Jenewa, Presiden Wahid juga mengutus pejabat sementara Menteri Sekretaris Negara, Bondan Gunawan untuk melakukan pertemuan informal dengan Panglima GAM, Teungku Abdullah Syafi’i di kawasan hutan belantara, Kabupaten Pidie pada tanggal 16 Maret 2000. Lihat “Hopes High for Aceh Peace After Historic Meeting”, *The Jakarta Post* (18 Maret 2000).

¹⁰⁵ Lihat Pasal 1 dan 4 dalam “Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh”, 12 Mei 2000.

¹⁰⁶ Lihat “Kontak Senjata di Aceh, Dua Orang Tewas”, *Kompas* (22 Mei 2000); “Gerombolan Serang Pasukan Brimob di Aceh”, *Bisnis Indonesia* (19 Juni 2000); “Dua Kasus Kekerasan Kembali Terjadi di Aceh”, *Republika* (27 Juni 2000).

¹⁰⁷ Lihat “GAM Mengaku Serang Brimob Karena Bela Diri”, *Republika* (6 Juli 2000).

¹⁰⁸ Lihat “Humanitarian Pause in Aceh Gets New Life”, *The Jakarta Post* (26 September 2000).

berbagai kasus insiden bersenjata, pemboman, penembakan di tempat, kriminalitas, serta perusakan fasilitas umum maupun pemukiman penduduk di Aceh.¹⁰⁹ Sementara itu, pada tanggal 9 Januari 2001, pemerintah Indonesia dan GAM menandatangani Kesepahaman Sementara (*Provisional Understanding*) yang memuat kesepakatan moratorium (penundaan) penggunaan kekerasan.¹¹⁰ Akan tetapi, pemberlakuan moratorium mulai dari 15 Januari sampai 15 Februari 2000 pada kenyatannya juga belum mampu menghentikan ketegangan bersenjata di Aceh.¹¹¹ Memburuknya situasi keamanan di Aceh ini kemudian mendorong Presiden Wahid mengeluarkan Inpres No. 4/2001, yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Operasi Pemulihan Keamanan dan Penegakan Hukum.

Ketika menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid pada bulan Oktober 2001, melalui Inpres No. 1/2002, Presiden Megawati Soekarnoputri melanjutkan kebijakan pendahulunya yang memadukan operasi pemulihan keamanan dan proses perundingan damai dengan GAM.¹¹² Dengan difasilitasi oleh tim mediator internasional yang dibentuk HDC, proses perundingan damai kembali dilakukan pada tanggal 2-3 Februari 2002 di Jenewa, Swiss.¹¹³ Selanjutnya, pada tanggal 10 Mei 2002, kedua belah pihak mengeluarkan pernyataan sikap bersama yang memuat dua butir utama, yaitu: *pertama*, GAM menerima syarat UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai “titik tolak” untuk melakukan “dialog terbuka” yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Aceh; dan *kedua*, pemerintah Indonesia dan GAM sepakat

¹⁰⁹ Lihat, misalnya, “26 Rumah Dibakar, Tiga Terpanggang”, *Media Indonesia* (29 September 2000); “Anggota DPRD Aceh Utara Ditembak”, *Media Indonesia* (3 September 2000); “Two More Govt Offices Attacked in Banda Aceh”, *The Jakarta Post* (1 Oktober 2000); “Tiga Polisi Hilang di Aceh”, *Kompas* (11 Oktober 2000); “Enam Mayat Ditemukan di Aceh Timur”, *Kompas* (13 November 2000); “Letusan Senjata dan Bom Rakitan Sambut Pergantian Tahun”, *Kompas* (2 Januari 2001).

¹¹⁰ Lihat “GAM Ubah Strategi Perjuangan”, *Kompas* (11 Januari 2001); “GAM Bersedia Tempuh Penyelesaian Politik”, *Republika* (11 Januari 2001).

¹¹¹ Lihat, misalnya, “Moratorium Tak Mampu Hentikan Kontak Senjata”, *Media Indonesia* (26 Januari 2001).

¹¹² Lihat Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2002 tentang Peningkatan Langkah Komprehensif Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Masalah Aceh.

¹¹³ Lihat “Aceh Talks Move Slowly in Switzerland”, *The Jakarta Post* (4 Februari 2002).

membentuk sebuah kesepakatan penghentian permusuhan dengan mekanisme yang akuntabel.¹¹⁴

Namun demikian, juru bicara GAM di Aceh membantah perwakilan mereka di Swedia telah menanggalkan komitmennya untuk memerdekakan Aceh dari Republik Indonesia dengan menerima status otonomi khusus.¹¹⁵ Sebaliknya, pemerintah Indonesia menghendaki agar GAM menerima otonomi khusus sebagai solusi akhir, tidak hanya sebagai titik tolak bagi penyelesaian konflik di Aceh.¹¹⁶ Karena persoalan tersebut dan ditambah dengan memburuknya situasi keamanan di Aceh, Presiden Megawati kemudian memerintahkan TNI dan POLRI agar mengintensifkan operasi keamanan untuk memulihkan stabilitas keamanan di Aceh.¹¹⁷ Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono menyebut serangan bersenjata GAM sebagai aksi terorisme.¹¹⁸ Lebih lanjut lagi, pada tanggal 19 Agustus 2000, pemerintah Indonesia memberikan batas waktu sampai tanggal 6 Desember 2002 kepada GAM untuk memutuskan apakah akan meneruskan dialog dalam kerangka otonomi khusus ataukah menolaknya.¹¹⁹

Pada tanggal 9 Desember 2002, pemerintah Indonesia dan GAM akhirnya menandatangani Cessation of Hostilities Agreement di Jenewa, Swiss.¹²⁰ Kesepakatan COHA mensyaratkan dua langkah demiliterisasi yang mulai diimplementasikan dua bulan sejak kesepakatan itu ditandatangani. *Pertama*, GAM harus menempatkan persenjataannya di “tempat penyimpanan” (*placement*

¹¹⁴ Lihat Edward Aspinall dan Harold Crouch, “The Aceh Peace Process: Why It Failed”, *Policy Studies*, No. 1 (Washington, DC: East West Center, 2003), h. 28.

¹¹⁵ Lihat “GAM Bantah Terima Otonomi Khusus Aceh”, *Koran Tempo* (15 Mei 2002).

¹¹⁶ Lihat “Pemerintah Minta GAM Menindaklanjuti Kesepakatan Geneva” *Kompas*, 1 Juni 2002.

¹¹⁷ Lihat “Megawati Minta Aparat Bertindak Tegas”, *Koran Tempo* (4 Juli 2002); “Presiden: Tindak Tegas GAM”, *Suara Pembaruan* (4 Juli 2002); “Govt Likely to Intensify Military Operation in Aceh”, *The Jakarta Post* (5 Juli 2002).

¹¹⁸ Lihat “Pemerintah Nyatakan GAM Teroris”, *Republika* (5 Juli 2002); “Menko Polkam: Aksi GAM Merupakan Terorisme”, *Suara Pembaruan* (5 Juli 2002).

¹¹⁹ Lihat “Batas Waktu GAM Awal Desember”, *Kompas* (20 Agustus 2002); “GAM Diberi Waktu Hingga Ramadan”, *Media Indonesia* (20 Agustus 2002).

¹²⁰ Lihat “Kesepakatan Penghentian Permusuhan Ditandatangani”, *Kompas* (10 Desember 2002); “Semua Pihak Harus Patuhi Penjanjian Damai Jenewa”, *Media Indonesia* (10 Desember 2002).

sites). Kedua, pemerintah Indonesia harus merelokasi pasukan TNI dari Aceh, sementara penugasan pasukan Brimob POLRI hanya sebatas pada tugas-tugas rutin pemolisian.¹²¹ Akan tetapi, sampai tanggal 9 Februari 2003, pemerintah Indonesia maupun GAM masih memiliki perbedaan penafsiran mengenai implementasi kedua langkah demiliterisasi tersebut.¹²² Sementara itu, meskipun implementasi kesepakatan ini dapat mengurangi tingkat kekerasan di Aceh, namun insiden bersenjata masih terjadi secara sporadis, bahkan cenderung meningkat pada bulan April 2003.¹²³

Menyusul meningkatnya kembali eskalasi konflik bersenjata di Aceh, pada tanggal 7 Mei 2003, Presiden Megawati kemudian memerintahkan TNI dan POLRI agar bersiaga untuk mengantisipasi digelarnya operasi pemulihan keamanan apabila proses penyelesaian masalah Aceh secara damai tidak berhasil.¹²⁴ Untuk menunjukkan kepada publik domestik dan dunia internasional bahwa operasi militer merupakan langkah terakhir penyelesaian konflik di Aceh, pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan perundingan dengan GAM di Tokyo pada tanggal 18 Mei 2003. Dalam perundingan tersebut, GAM tetap menolak tiga usulan dari pemerintah Indonesia, yaitu mengakui kedaulatan Republik Indonesia atas Aceh, menerima status otonomi khusus dan melaksanakan segera perlucutan senjata.¹²⁵ Menyusul kegagalan perundingan damai di Tokyo, Presiden Megawati mengeluarkan Keppres No. 28/2003 untuk memberlakukan status Darurat Militer di Aceh pada tanggal 18 Mei 2003.¹²⁶

¹²¹ Lihat Pasal 3 dalam Cessation of Hostilities Agreement antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (9 Desember 2002). Lihat juga Espinall dan Crouch, (2003), op.cit., h. 32-33.

¹²² Lihat Intenational Crisis Group, "Aceh: A Fragile Peace", *Asia Report*, No. 47 (27 Februari 2003), h. 9.

¹²³ Lihat Pertempuran di Aceh Terus Berlanjut, *Koran Tempo* (23 April 2003); "Kekerasan di Aceh Meningkat", *Media Indonesia* (23 April 2003); "Kontak Senjata TNI-GAM Berlanjut", *Suara Pembaruan* (26 April 2003); "Aceh Terus Bergolak", *Kompas*, 27 April 2003.

¹²⁴ Lihat "Presiden Perintahkan TNI dan POLRI Siaga", *Kompas* (8 Mei 2003); "Mega Instruksi Aparat Untuk Bersiap Diri", *Jawa Pos* (8 Mei 2003).

¹²⁵ Lihat "RI Issues Last Warning Despite Tokyo Talks", *The Jakarta Post* (18 Mei 2003); "War Returns to Aceh as Peace Talks Fail", *The Jakarta Post* (19 Mei 2003); "Perundingan Tokyo Gagal", *Koran Tempo* (19 Mei 2003).

¹²⁶ Lihat "Aceh Darurat Militer", *Media Indonesia* (19 Mei 2003).

Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Operasi Terpadu pada tanggal 19 Mei 2003, yang meliputi operasi militer, operasi kemanusiaan, operasi penegakan hukum, dan operasi pemulihan fungsi pemerintahan daerah.¹²⁷

Secara keseluruhan, pemaparan pada sub-bagian 2.1 ini memperlihatkan bahwa ada dua pendekatan utama yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam mengelola keamanan nasional dan sekaligus menyelesaikan konflik bersenjata di Aceh sejak tahun 1998, yaitu: *pertama*, pendekatan sekuritisasi (*securitization*) melalui penggelaran operasi pemulihan keamanan; dan *kedua*, pendekatan desekuritisasi (*desecuritization*) yang diantaranya melalui perundingan damai dengan pimpinan GAM. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan desekuritisasi tercermin dari keniscayaan implementasi langkah-langkah demiliterisasi berdasarkan Cessation of Hostilities Agreement. Sementara, pendekatan sekuritisasi ditempuh dengan penggelaran operasi militer pada masa pemberlakuan keadaan darurat militer I di Aceh.

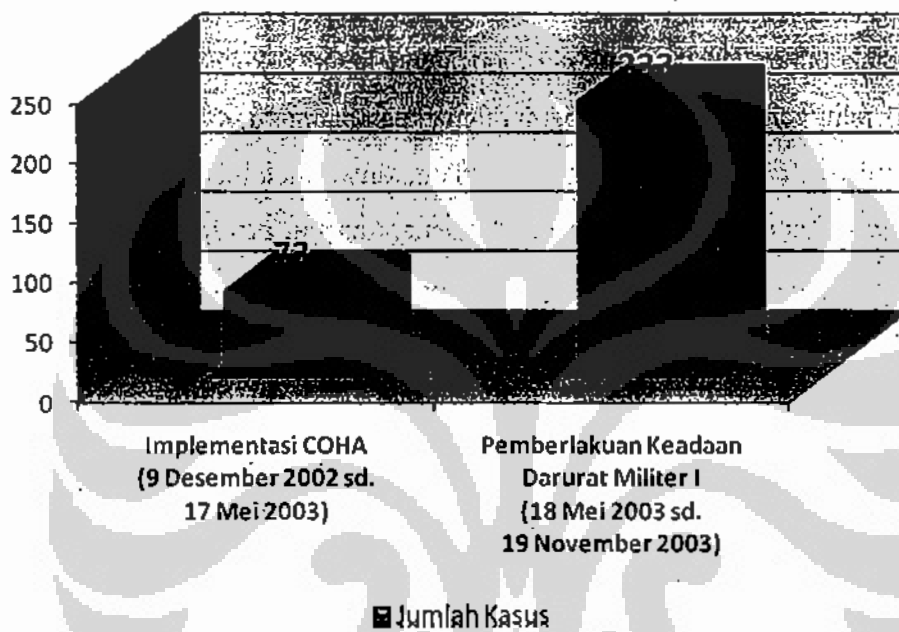
2.2. Masalah Keamanan di Aceh

Sub-bagian ini menjabarkan data kasus masalah keamanan di Aceh pada masa implementasi Cessation of Hostilities Agreement (COHA) dan pemberlakuan keadaan darurat militer I. Secara keseluruhan, berdasarkan Tabulasi Data Kasus Masalah Keamanan di Aceh (lihat Lampiran I), terdapat sebanyak 306 kasus masalah keamanan pada periode waktu mulai dari tanggal 9 Desember 2002 sampai dengan 19 November 2003. Dari jumlah tersebut, sebanyak 73 kasus terjadi pada masa implementasi COHA, dan 233 kasus pada masa pemberlakuan keadaan darurat militer I, (lihat Grafik 2.1). Masalah keamanan dalam kedua periode waktu tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga kategori utama, yaitu: *pertama*, serangan bersenjata dan pemboman; *kedua*, kriminalitas, penculikan dan

¹²⁷ Lihat "Operasi Terpadu Digelar di Aceh", *Republika* (19 Mei 2003); "Operasi Pemulihan Keamanan Dimulai", *Kompas* (19 Mei 2003).

pembunuhan, serta intimidasi; dan *ketiga*, perusakan bangunan (non-sekolah) dan blokade suplai.

Grafik 2.1
Data Kasus Masalah Keamanan di Aceh
(9 Desember 2002 sd. 19 November 2003)



2.2.1. Masalah Keamanan Selama Implementasi COHA

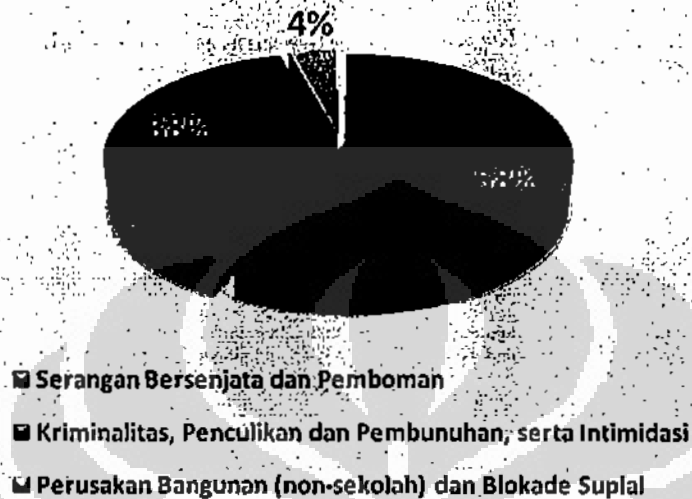
Sejak penandatanganan COHA pada tanggal 9 Desember 2002 sampai berakhirnya pada tanggal 17 Mei 2003, insiden serangan bersenjata dan pemboman yang terjadi di Aceh berjumlah sebanyak 42 kasus. Adapun peristiwa kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi berjumlah sebanyak 28 kasus. Selain itu, terdapat sebanyak tiga kasus perusakan bangunan (non-sekolah) dan blokade suplai (lihat Grafik 2.2). Dari tabulasi data pemberitaan media massa, tidak ditemukan adanya kasus pembakaran bangunan sekolah di Aceh selama periode waktu ini. Dari seluruh data kasus masalah keamanan pada periode ini, serangan bersenjata dan pemboman memiliki proporsi terbesar, yaitu sebesar 58 persen. Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi mendapatkan

proporsi sebesar 38 persen. Adapun kerusakan bangunan dan blokade suplai memiliki proporsi terkecil, yaitu hanya sebesar 4 persen (lihat Grafik 2.3).

Grafik 2.2
Kategori Kasus Masalah Keamanan di Aceh
Periode Implementasi COHA

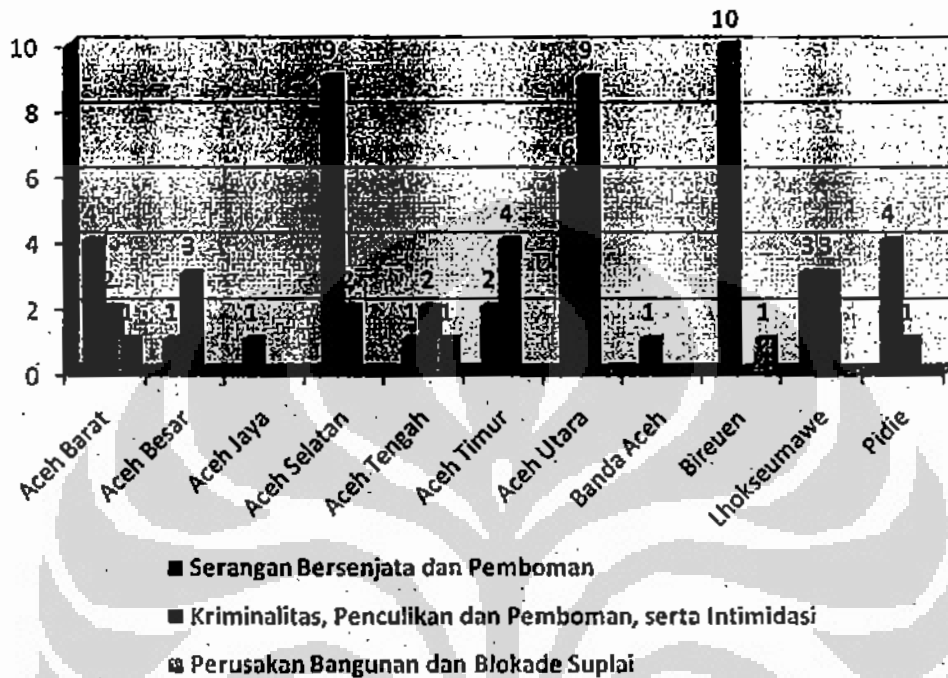


Grafik 2.3
Presentase Kategori Masalah Keamanan di Aceh
Periode Implementasi COHA



Bila dijabarkan berdasarkan wilayah peristiwanya (lihat Grafik 2.4), serangan bersenjata dan pemboman terjadi di sebelas kabupaten/kota, yaitu: Aceh Barat (4 kasus), Aceh Besar (1 kasus), Aceh Jaya (1 kasus), Aceh Selatan (9 kasus), Aceh Tengah (1 kasus), Aceh Timur (2 kasus), Aceh Utara (6 kasus), Banda Aceh (1 kasus), Bireuen (10 kasus), Lhokseumawe (3 kasus), dan Pidie (4 kasus). Sementara itu, tindakan kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi terjadi di delapan kabupaten/kota, yaitu: Aceh Barat (2 kasus), Aceh Besar (3 kasus), Aceh Selatan (2 kasus), Aceh Tengah (2 kasus), Aceh Timur (4 kasus), Aceh Utara (9 kasus), dan Pidie (1 kasus). Adapun peristiwa perusakan bangunan dan blokade suplai terjadi di tiga kabupaten/kota, yaitu: Aceh Barat (1 kasus), Aceh Tengah (1 kasus), dan Bireuen (1 kasus).

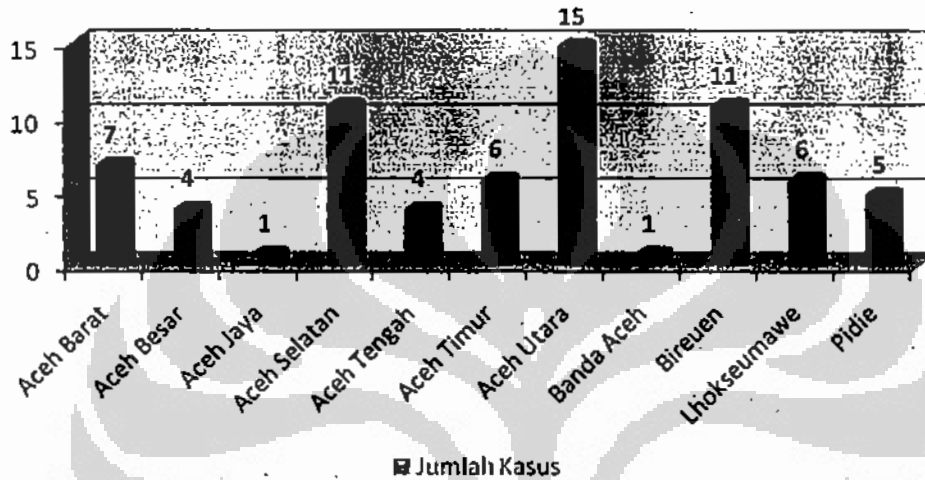
Grafik 2.4
Pemetaan Masalah Keamanan di Kabupaten/Kota di Aceh
Periode Implementasi COHA



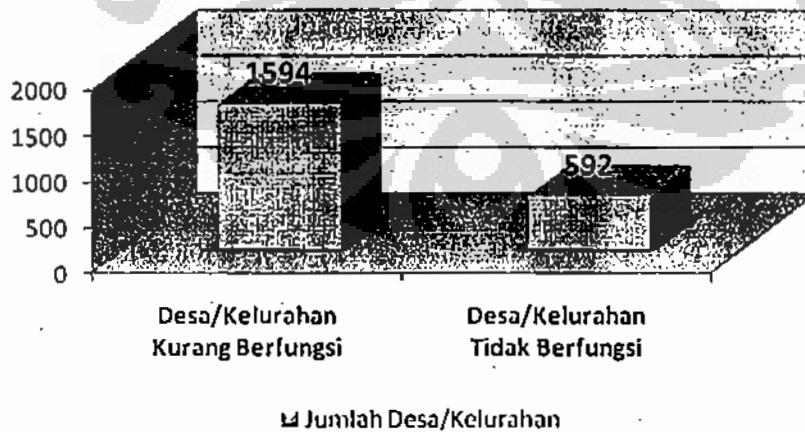
Dengan demikian, dapat diketahui total jumlah masalah keamanan yang terjadi di sebelas kabupaten/kota di Aceh pada masa implementasi COHA (lihat Grafik 2.5). Masalah keamanan terbanyak ditemukan di Kabupaten Aceh Utara (15 kasus), Aceh Selatan (11 kasus), dan Bireuen (11 kasus). Sebaliknya, Kabupaten Aceh Jaya dan Kota Banda Aceh memiliki masalah keamanan yang paling sedikit, yaitu masing-masing 1 kasus. Adapun kabupaten/kota lainnya adalah Aceh Barat (7 kasus), Aceh Timur (6 kasus), Lhokseumawe (6 kasus), Pidie (5 kasus), Aceh Besar (4 kasus), dan Aceh Tengah (4 kasus). Data ini akan menjadi signifikan lagi bila mengacu pada data yang disampaikan pemerintah provinsi Aceh dimana terdapat sebanyak 592 desa/kelurahan yang tidak berfungsi dan 1.594 desa/kelurahan yang kurang berfungsi dari total 5.862 desa/kelurahan di Aceh (lihat Grafik 2.6). Selain itu, sebanyak 149 kepala desa di tujuh kabupaten di Aceh dilaporkan tewas setelah diculik oleh gerilyawan GAM (lihat Grafik 2.7). Karena itu tidak mengherankan jika mantan Komandan Korem 012/Teuku Umar,

Kolonel Syarifudin Tippe¹²⁸ pernah mengungkapkan bahwa GAM diperkirakan menguasai sekitar 80 persen wilayah provinsi Aceh.¹²⁹

Grafik 2.5
Jumlah Masalah Keamanan di Kabupaten/Kota di Aceh
Periode Implementasi COHA



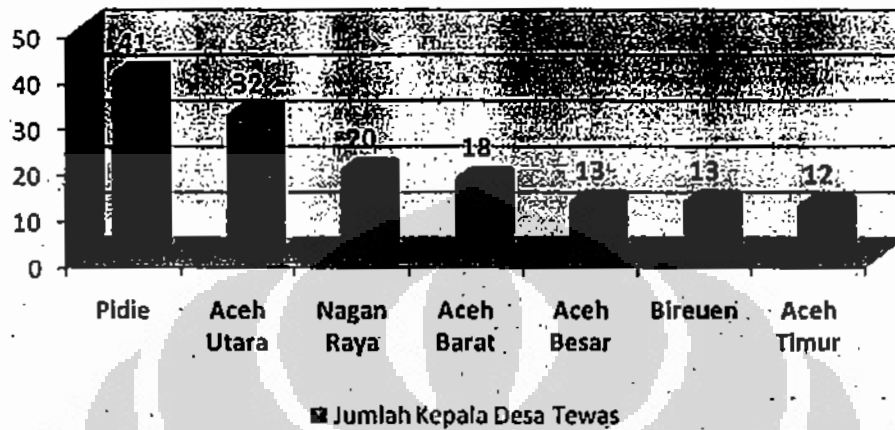
Grafik 2.6
Jumlah Desa di Aceh Yang Tidak atau Kurang Berfungsi
(Sumber: *Republika*, 2 September 2003)



¹²⁸ Syarifudin Tippe pada saat thesis ini ditulis menjabat sebagai Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Departemen Pertahanan RI dengan pangkat Mayor Jenderal.

¹²⁹ Lihat Syarifudin Tippe, *Aceh di Persimpangan Jalan* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000), h. 89.

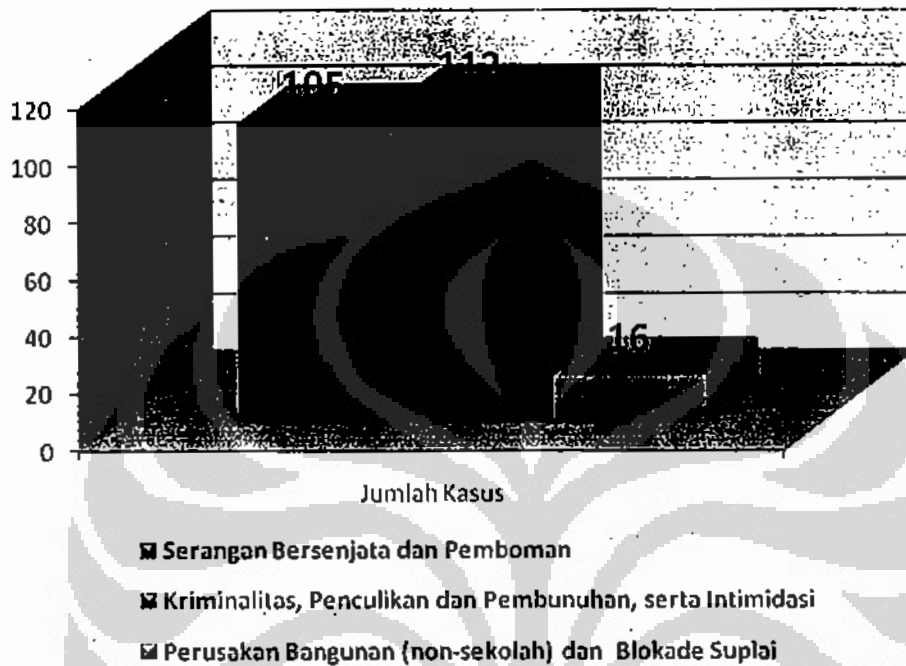
Grafik 2.7
Jumlah Kepala Desa Tewas di Kabupaten di Aceh
 (Sumber: *Republika*, 2 September 2003)



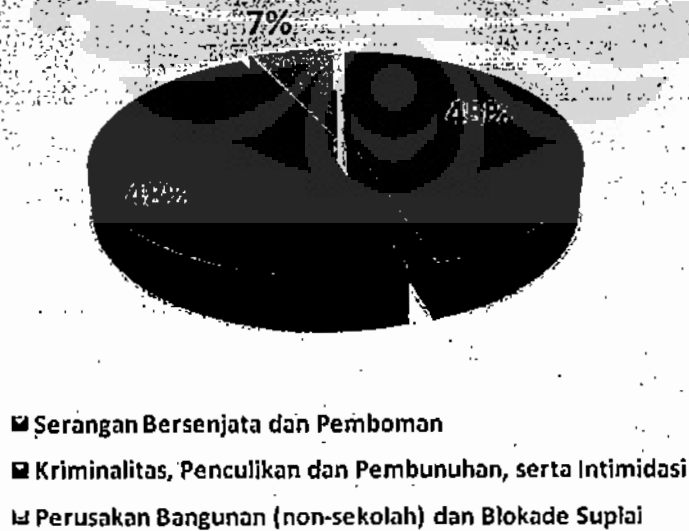
2.2.2. Masalah Keamanan Selama Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer I

Sejak keadaan darurat militer I diberlakukan pada tanggal 18 Mei 2003 sampai tanggal 19 November 2003, insiden serangan bersenjata dan pemboman terjadi sebanyak 105 kasus di Aceh. Peristiwa kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi terjadi sebanyak 112 kasus. Sementara itu, terdapat sebanyak 16 kasus (7 persen) perusakan bangunan (non-sekolah) dan blokade suplai (lihat Grafik 2.8). Dari total jumlah masalah keamanan pada periode ini (lihat Grafik 2.9), peristiwa kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi mendapatkan proporsi terbesar, yaitu sebesar 48 persen. Masalah keamanan kedua terbesar adalah insiden serangan bersenjata dan pemboman dengan proporsi sebesar 45 persen. Adapun perusakan bangunan (non-sekolah) dan blokade suplai memiliki proporsi sebesar 7 persen.

Grafik 2.8
Kategori Masalah Keamanan di Aceh
Periode Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer I

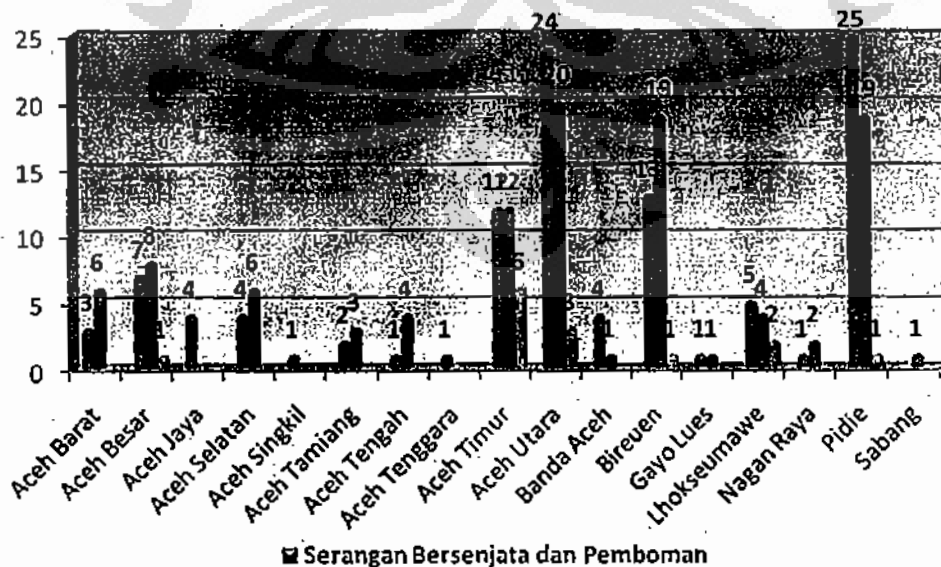


Grafik 2.9
Presentase Kategori Masalah Keamanan di Aceh
Periode Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer I



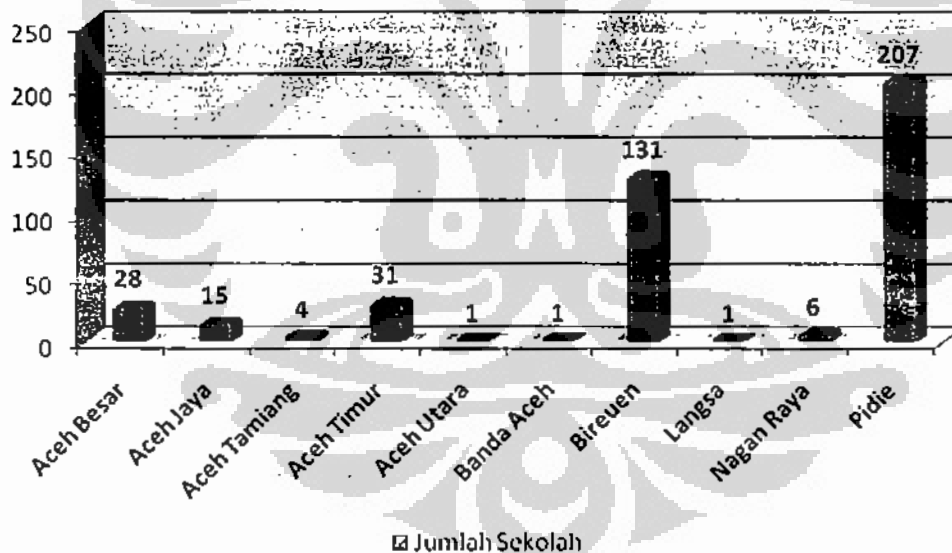
Apabila dijabarkan berdasarkan wilayah peristiwanya, (lihat Grafik 2.10), serangan bersenjata dan pemboman terjadi di enam belas kabupaten/kota, yaitu: Aceh Barat (3 kasus), Aceh Besar (7 kasus), Aceh Jaya (4 kasus), Aceh Selatan (4 kasus), Aceh Singkil (1 kasus), Aceh Tamiang (2 kasus), Aceh Tengah (1 kasus), Aceh Tenggara (1 kasus), Aceh Timur (11 kasus), Aceh Utara (24 kasus), Banda Aceh (4 kasus), Bireuen (13 kasus), Gayo Lues (1 kasus), Lhokseumawe (5 kasus), Nagan Raya (1 kasus), dan Pidie (25 kasus). Adapun peristiwa kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi terjadi di empat belas kabupaten/kota, yaitu: Aceh Barat (6 kasus), Aceh Besar (8 kasus), Aceh Selatan (6 kasus), Aceh Tamiang (3 kasus), Aceh Tengah (4 kasus), Aceh Timur (12 kasus), Aceh Utara (20 kasus), Banda Aceh (1 kasus), Bireuen (19 kasus), Gayo Lues (1 kasus), Lhokseumawe (4 kasus), Nagan Raya (2 kasus), Pidie (19 kasus), dan Sabang (1 kasus). Sementara itu, perusakan bangunan (non-sekolah) dan blokade suplai terjadi di enam kabupaten/kota, yaitu: Aceh Besar (1 kasus), Aceh Timur (6 kasus), Aceh Utara (3 kasus), Bireuen (1 kasus), dan Pidie (1 kasus).

Grafik 2.10
Pemetaan Masalah Keamanan di Kabupaten/Kota di Aceh
Periode Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer I



Sementara itu, berdasarkan laporan Kantor Wilayah Dinas Pendidikan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalah, jumlah bangunan sekolah yang hancur terbakar hingga tanggal 28 Mei 2003, berjumlah sebanyak 425 bangunan. Bangunan sekolah yang terbakar ini tersebar di sebelas kabupaten/kota di Aceh. Kasus pembakaran sekolah yang paling banyak ditemukan di Kabupaten Pidie dan Bireuen, yaitu secara berturut-turut 207 dan 131 bangunan. Pembakaran sekolah juga terjadi antara lain di Aceh Besar (28 sekolah), Aceh Jaya (15 sekolah), Aceh Tamiang (4 sekolah), Aceh Timur (31 sekolah), Aceh Utara (1 sekolah), Banda Aceh (1 sekolah), Bireuen (131 sekolah), Langsa (1 sekolah) dan Nagan Raya (6 sekolah), dan Pidie (207 sekolah) (lihat Grafik 2.11).

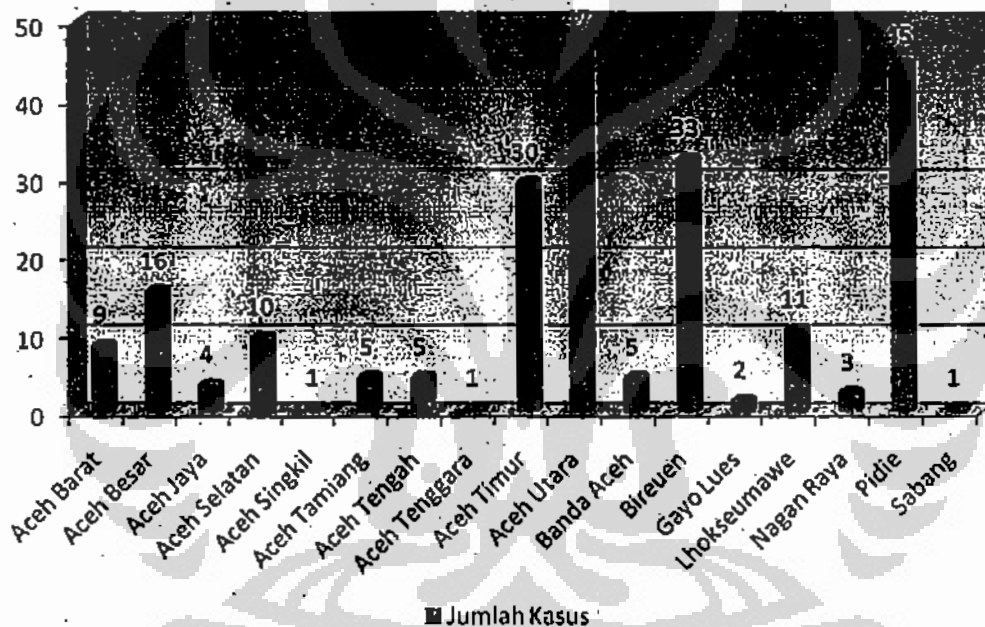
Grafik 2.11
Jumlah Sekolah Terbakar di Aceh Periode Darurat Militer I
 (Sumber: *Republika*, 29 Mei 2003)



Dengan demikian, dapat diketahui total jumlah kasus masalah keamanan yang terjadi di tujuh belas kabupaten/kota di Aceh pada masa pemberlakuan keadaan darurat militer I (lihat Grafik 2.12). Masalah keamanan terbanyak ditemukan di Kabupaten Aceh Utara (47 kasus), Pidie (45 kasus), Bireuen (33 kasus), dan Aceh Timur (30 kasus). Sebaliknya, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh Tenggara, dan Kota Sabang memiliki jumlah masalah keamanan yang paling

sedikit, yaitu masing-masing 1 kasus. Sementara total jumlah masalah keamanan di kabupaten/kota lainnya adalah sebagai berikut Aceh Barat (9 kasus), Aceh Besar (16 kasus), Aceh Jaya (4 kasus), Aceh Selatan (10 kasus), Aceh Tamiang (5 kasus), Aceh Tengah (5 kasus), Banda Aceh (5 kasus), Lhokseumawe (11 kasus), Gayo Lues (2 kasus), dan Nagan Raya (3 kasus).

Grafik 2.12
Jumlah Masalah Keamanan di Kabupaten/Kota di Aceh
Periode Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer I



2.3. Upaya Penanganan Masalah Keamanan di Aceh

Sub-bagian ini menjabarkan data kasus mengenai upaya penanganan ancaman yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Aceh pada masa implementasi Cessation of Hostilities Agreement (COHA) dan pemberlakuan keadaan darurat militer I. Berdasarkan Tabulasi Data Penugasan Aparat Keamanan di Aceh (lihat Lampiran II), terdapat sebanyak 269 kasus upaya penanganan ancaman selama periode waktu mulai dari tanggal 9 Desember 2002 sampai dengan 19 November 2003. Dari jumlah tersebut, sebanyak 39 kasus

upaya penanganan ancaman dilakukan pada masa implementasi COHA. Sementara selama pemberlakuan keadaan darurat militer I, upaya penanganan ancaman yang dilakukan berjumlah 230 kasus (lihat Grafik 2.13). Upaya penanganan ancaman dalam kedua periode waktu tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kategori utama, yaitu: *pertama*, operasi pemulihan keamanan; dan *kedua*, pemolisian dan penegakan hukum.



2.3.1. Penugasan Aparat Keamanan Selama Implementasi COHA

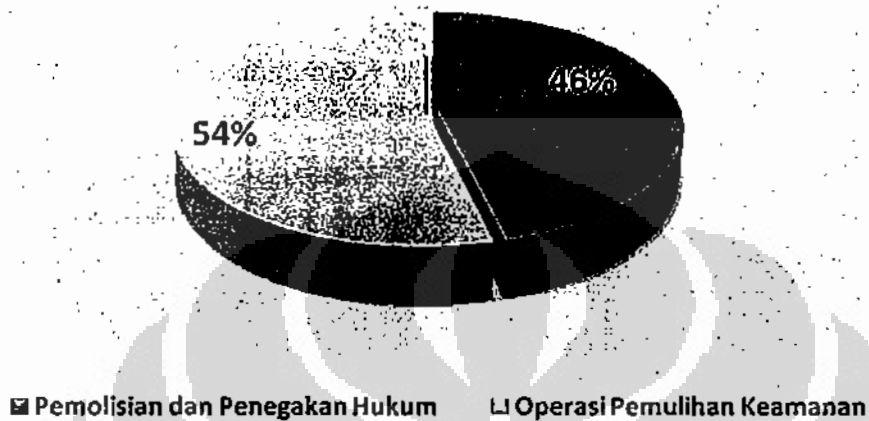
Pada periode implementasi COHA, tercatat sebanyak 21 penugasan operasi pemulihan keamanan yang dilaksanakan baik oleh TNI maupun POLRI. Selain itu, terdapat sebanyak 18 upaya pemolisian dan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, termasuk POLRI (lihat Grafik 2.14). Dari total jumlah upaya penanganan ancaman pada periode ini, operasi pemulihan keamanan memiliki proporsi sebesar 54 persen, sementara upaya pemolisian dan penegakan hukum sebesar 46 persen (lihat Grafik 2.15). Dengan mengacu pada presentase

tersebut, dapat dikatakan bahwa upaya penanganan ancaman pada masa implementasi COHA lebih menitikberatkan pada pelaksanaan operasi pemulihan keamanan daripada upaya pemolisian dan penegakan hukum.

Grafik 2.14
Kategori Penugasan Aparat Keamanan di Aceh
Periode Implementasi COHA

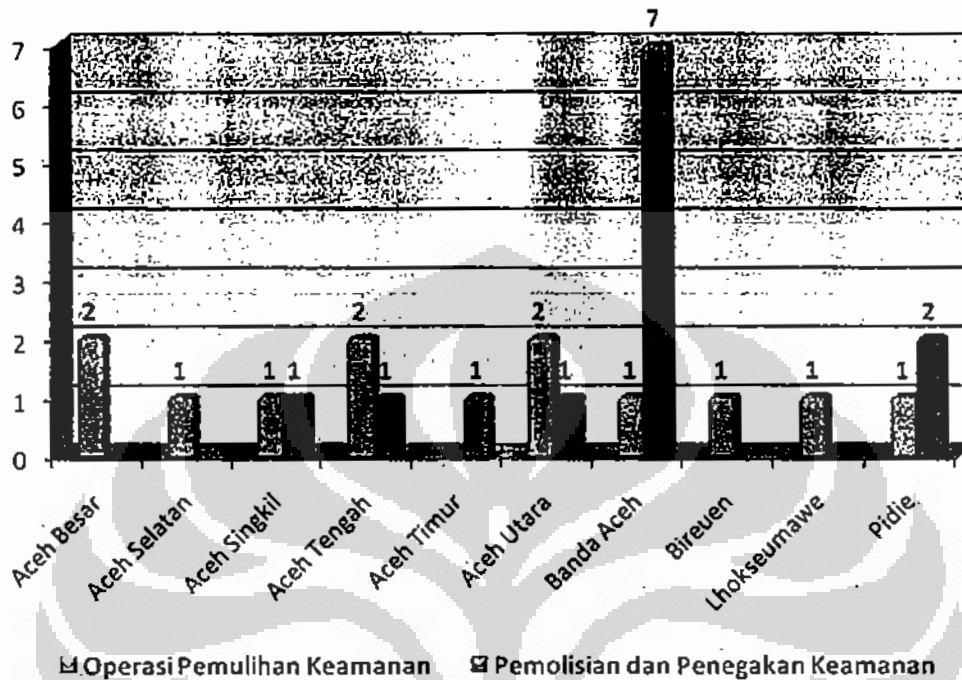


Grafik 2.15
Presentase Kategori Penugasan Aparat Keamanan di Aceh
Periode Implementasi COHA



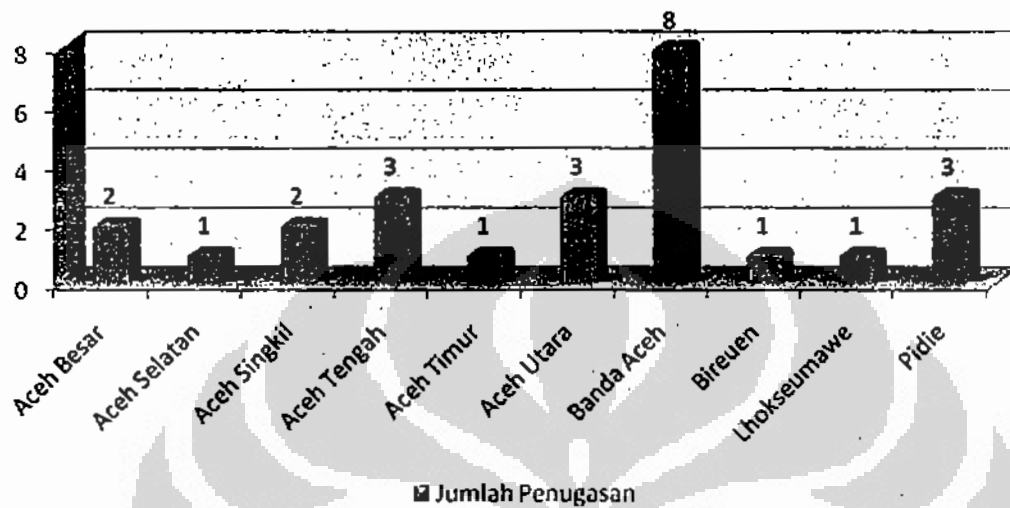
Apabila ditelaah berdasarkan wilayah pelaksanaannya (Grafik 2.16), operasi pemulihan keamanan digelar di sembilan kabupaten/kota, yaitu: Aceh Besar (2 penugasan), Aceh Selatan (1 penugasan), Aceh Singkil (1 penugasan), Aceh Tengah (2 penugasan), Aceh Utara (2 penugasan), Banda Aceh (1 penugasan), Bireuen (1 penugasan), Lhokseumawe (1 penugasan) dan Pidie (1 penugasan). Sementara itu, upaya pemolisian dan penegakan hukum dilaksanakan di enam kabupaten/kota, yaitu: Aceh Singkil (1 penugasan), Aceh Tengah (1 penugasan), Aceh Timur (1 penugasan), Aceh Utara (1 penugasan), Banda Aceh (7 penugasan), dan Pidie (2 penugasan).

Grafik 2.16
Pemetaan Penugasan Aparat Keamanan di Kabupaten/Kota di Aceh
Periode Implementasi COHA



Dengan mengacu pada pemetaan tersebut, dapat diperoleh total jumlah upaya penanganan ancaman yang dilaksanakan di masing-masing kabupaten/kota tersebut pada masa implementasi COHA (lihat Grafik 2.17). Upaya penanganan ancaman tampaknya terkonsentrasi di Kota Banda Aceh, yaitu sebanyak 8 penugasan. Diantara sepuluh kabupaten/kota tersebut, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Timur, Bireuen dan Kota Lhokseumawe hanya ditemukan sebanyak satu penugasan. Adapun upaya penanganan ancaman di kabupaten/kota lainnya adalah Aceh Besar (2 penugasan), Aceh Singkil (2 penugasan), Aceh Utara (3 penugasan), dan Pidie (3 penugasan).

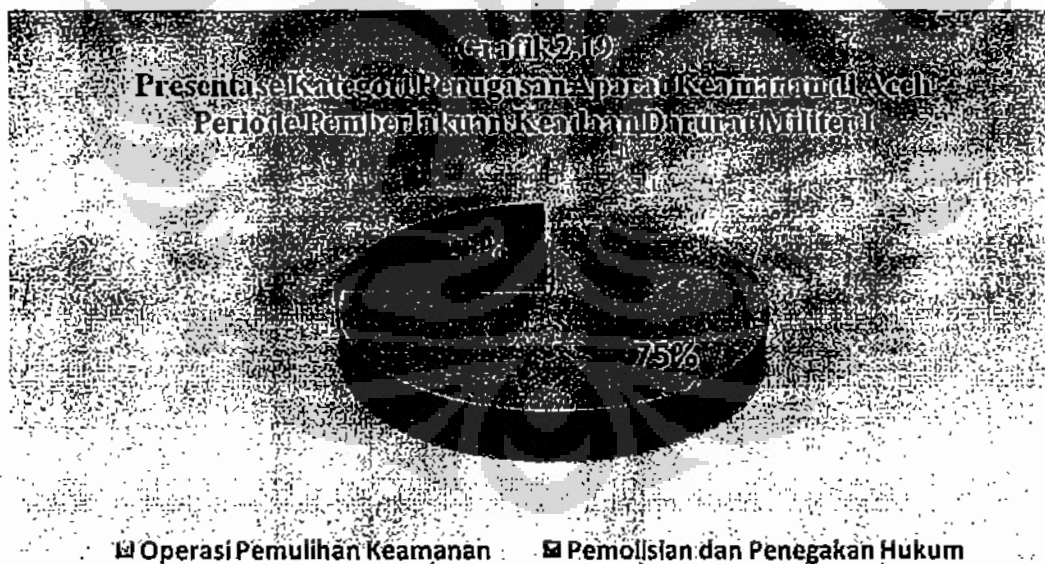
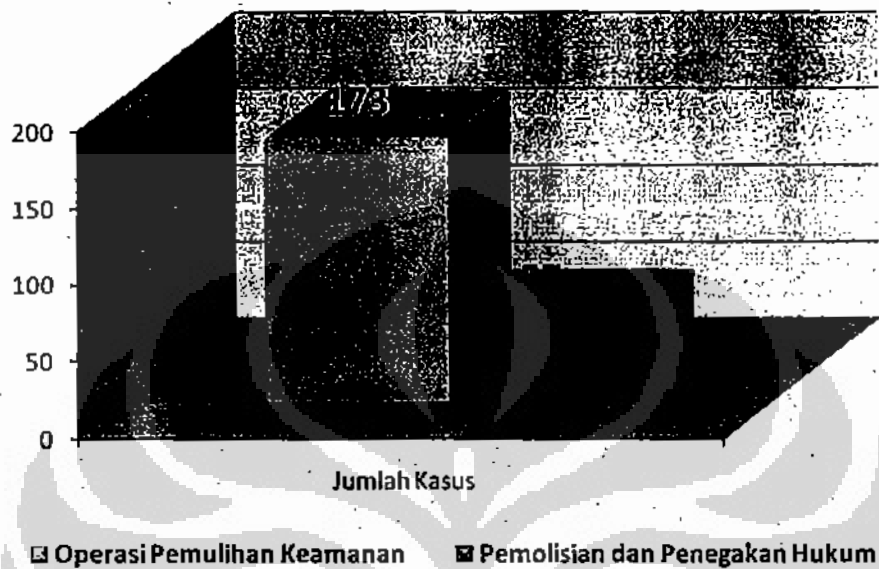
Grafik 2.17
Jumlah Penugasan Aparat Keamanan di Kabupaten/Kota Aceh
Periode Implementasi COHA



2.3.2. Penugasan Aparat Keamanan Selama Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer I

Selama masa pemberlakuan keadaan darurat militer I, ditemukan sebanyak 173 penugasan operasi pemulihan keamanan yang dilaksanakan oleh TNI dan POLRI, dan 57 upaya pemolisian dan penegakan hukum (lihat Grafik 2.18). Dari jumlah total upaya penanganan ancaman pada periode waktu ini, operasi pemulihan keamanan memiliki proporse sebanyak 75 persen, sementara upaya pemolisian dan penegakan hukum hanya sebesar 25 persen (lihat Grafik 2.19). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa operasi pemulihan keamanan sangat mendominasi upaya penanganan ancaman selama pemberlakuan keadaan darurat militer I di Aceh.

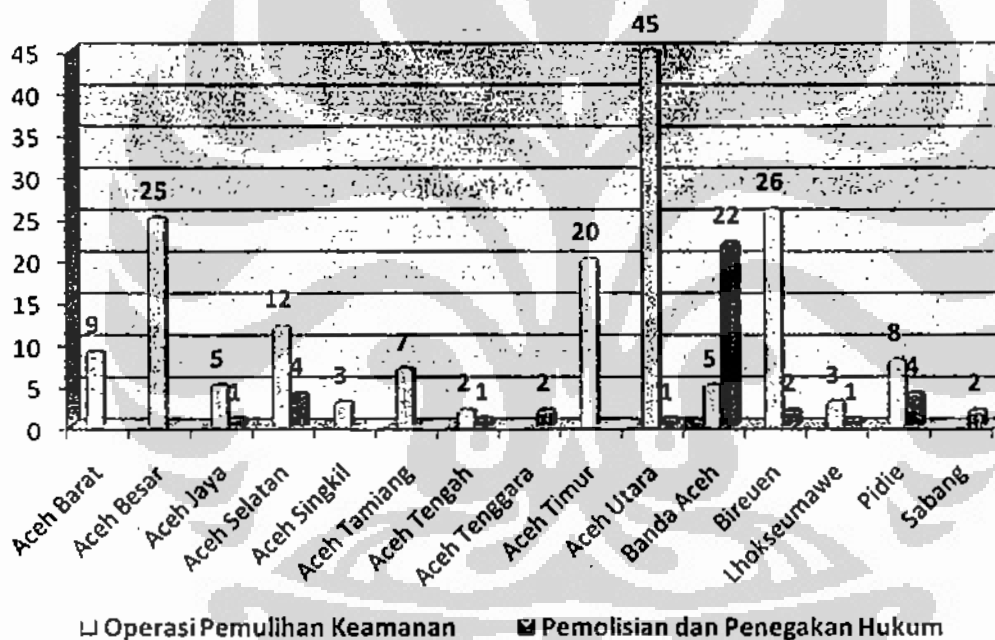
Grafik 2.18
Kategori Penugasan Aparat Keamanan di Aceh
Periode Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer I



Kemudian, berdasarkan wilayah pelaksanaannya (Grafik 2.20), operasi pemulihan keamanan digelar di tiga belas kabupaten/kota, sebagai berikut: Aceh Barat (9 penugasan), Aceh Besar (25 penugasan), Aceh Jaya (5 penugasan), Aceh Selatan (12 penugasan), Aceh Singkil (3 penugasan), Aceh Tamiang (7 penugasan), Aceh Tengah (2 penugasan), Aceh Timur (20 penugasan), Aceh

Utara (45 penugasan), Banda Aceh (5 penugasan), Bireuen (26 penugasan), Lhokseumawe (3 penugasan) dan Pidie (8 penugasan). Sementara itu, upaya pemolisian dan penegakan hukum dilaksanakan di sepuluh kabupaten/kota, yaitu: Aceh Jaya (1 penugasan), Aceh Selatan (4 penugasan), Aceh Tengah (1 penugasan), Aceh Tenggara (2 penugasan), Aceh Utara (1 penugasan)), Banda Aceh (22 penugasan), Bireuen (2 penugasan), Lhokseumawe (1 penugasan), Pidie (2 penugasan), dan Sabang (2 penugasan).

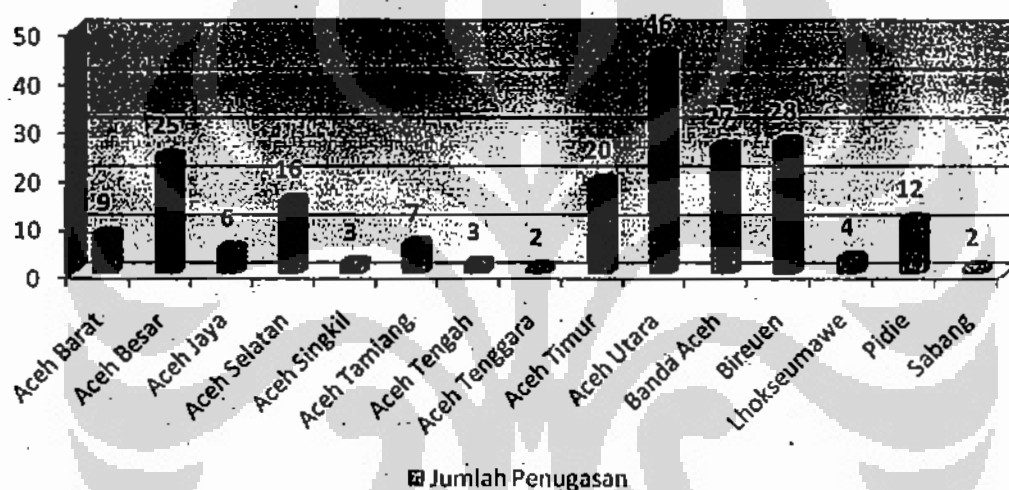
Grafik 2.20
Pemetaan Penugasan Aparat Keamanan di Aceh
Periode Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer I



Berdasarkan pada pemetaan tersebut, dapat diketahui total jumlah upaya penanganan ancaman di lima belas kabupaten/kota di Aceh pada masa pemberlakuan keadaan darurat militer I (lihat Grafik 2.21). Di antara kelima belas daerah tersebut, upaya penanganan ancaman paling banyak dilakukan di Kabupaten Aceh Utara, yaitu sebanyak 46 penugasan. Sebaliknya, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kota Sabang merupakan wilayah yang paling sedikit ditemukan upaya penanganan ancaman, yaitu masing-masing sebanyak dua penugasan. Sementara jumlah total upaya penanganan ancaman di kabupaten/kota

lainnya adalah sebagai berikut: Bireuen (28 penugasan), Banda Aceh (27 penugasan), Aceh Besar (25 penugasan), Aceh Timur (20 penugasan), Aceh Selatan (16 penugasan), Pidie (12 penugasan), Aceh Barat (9 penugasan), Aceh Tamian (7 penugasan), Aceh Jaya (6 penugasan), Lhokseumawe (4 penugasan), dan Aceh Singkil serta Aceh Tengah masing-masing 3 penugasan.

Grafik 2.21
Jumlah Penugasan Aparat Keamanan di Kabupaten/Kota di Aceh
Periode Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer I

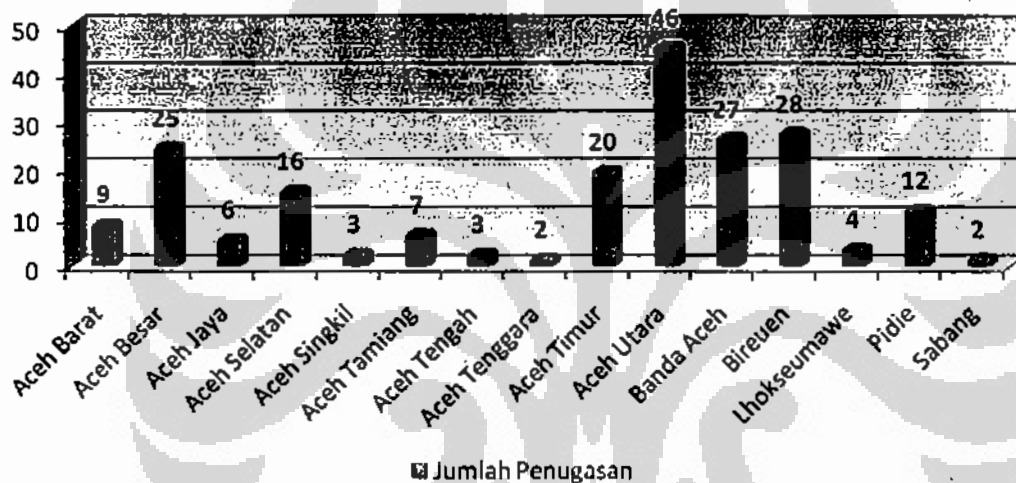


2.4. Penilaian Defisit Keamanan di Aceh Pada Masa Implementasi COHA dan Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer I

Adanya persoalan defisit keamanan (*security deficit*) dalam pengelolaan keamanan nasional di suatu negara dapat dilihat dengan menunjukkan adanya disparitas antara penetrabilitas ancaman dengan kemampuan pemerintah negara tersebut untuk menangani ancaman tersebut. Dengan kata lain, situasi defisit keamanan terjadi apabila totalitas masalah keamanan lebih besar daripada upaya penanganan ancaman. Dalam konteks itu, defisit keamanan di Aceh pada masa implementasi COHA dan pemberlakuan keadaan darurat militer I, dapat ditunjukkan dengan memperbandingkan jumlah kasus masalah keamanan dengan jumlah penugasan aparat keamanan untuk menangani masalah tersebut.

lainnya adalah sebagai berikut: Bireuen (28 penugasan), Banda Aceh (27 penugasan), Aceh Besar (25 penugasan), Aceh Timur (20 penugasan), Aceh Selatan (16 penugasan), Pidie (12 penugasan), Aceh Barat (9 penugasan), Aceh Tamian (7 penugasan), Aceh Jaya (6 penugasan), Lhokseumawe (4 penugasan), dan Aceh Singkil serta Aceh Tengah masing-masing 3 penugasan.

Grafik 2.21
Jumlah Penugasan Aparat Keamanan di Kabupaten/Kota di Aceh
Periode Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer I



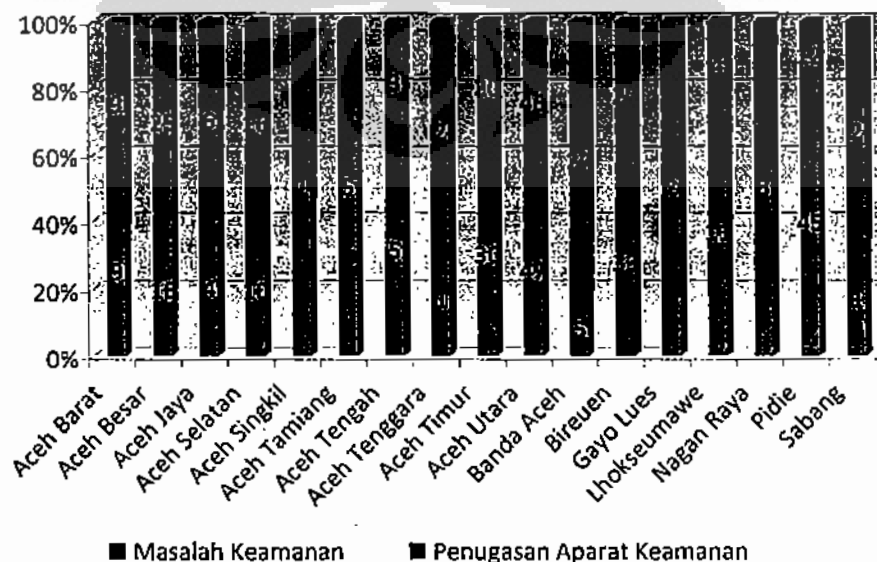
2.4. Penilaian Defisit Keamanan di Aceh Pada Masa Implementasi COHA dan Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer I

Adanya persoalan defisit keamanan (*security deficit*) dalam pengelolaan keamanan nasional di suatu negara dapat dilihat dengan menunjukkan adanya disparitas antara penetrabilitas ancaman dengan kemampuan pemerintah negara tersebut untuk menangani ancaman tersebut. Dengan kata lain, situasi defisit keamanan terjadi apabila totalitas masalah keamanan lebih besar daripada upaya penanganan ancaman. Dalam konteks itu, defisit keamanan di Aceh pada masa implementasi COHA dan pemberlakuan keadaan darurat militer I, dapat ditunjukkan dengan memperbandingkan jumlah kasus masalah keamanan dengan jumlah penugasan aparat keamanan untuk menangani masalah tersebut.

Sementara pada masa pemberlakuan keadaan darurat militer I (lihat Grafik 2.23), dari tujuh belas kabupaten/kota di Aceh, defisit keamanan terjadi di sepuluh daerah. Adapun proporsi masalah keamanan di masing-masing kabupaten/kota tersebut adalah sebagai berikut: Aceh Singkil (100 persen), Aceh Tamiang (100 persen), Aceh Tengah (63 persen), Aceh Timur (60 persen), Aceh Utara (51 persen), Bireuen (55 persen), Gayo Lues (100 persen), Kota Lhokseumawe (73 persen), Nagan Raya (100 persen), dan Pidie (79 persen). Meskipun terdapat secara berturut-turut terdapat satu kasus masalah keamanan di Kabupaten Aceh Singkil, lima kasus di Aceh Tamiang, dan dua kasus di Nagan Raya, namun upaya penanganan ancaman tidak ditemukan di ketiga daerah tersebut. Sementara di Kabupaten Aceh Barat, masalah keamanan dan upaya penanganan ancaman memiliki proporsi yang berimbang, yaitu masing-masing 50 persen. Sebaliknya, kabupaten/kota di Aceh yang tidak mengalami defisit keamanan berjumlah sebanyak enam daerah. Proporsi upaya penanganan ancaman di keenam kabupaten/kota tersebut antara lain: Aceh Besar (61 persen), Aceh Jaya (60 persen), Aceh Selatan (62 persen), Aceh Tenggara (67 persen), Banda Aceh (84 persen) dan Kota Sabang (67 persen).

Grafik 2.23

Komparasi antara Masalah Keamanan dan Penugasan Aparat Keamanan di Kabupaten/Kota di Aceh Periode Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer I

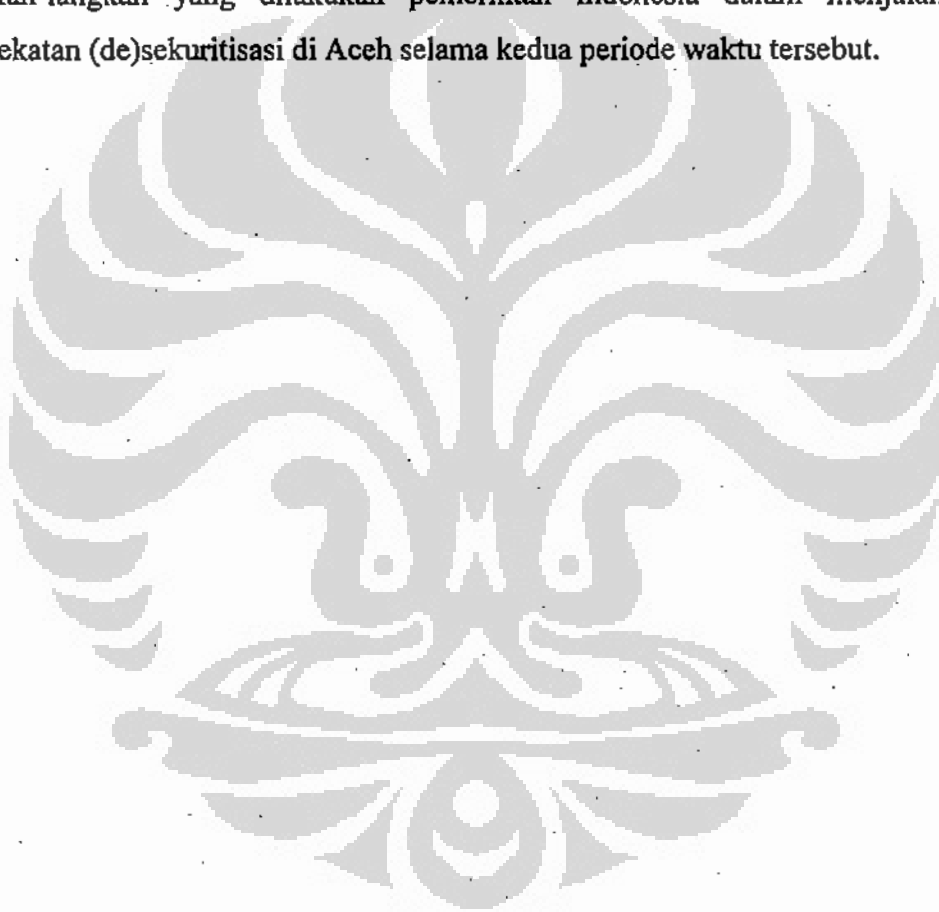


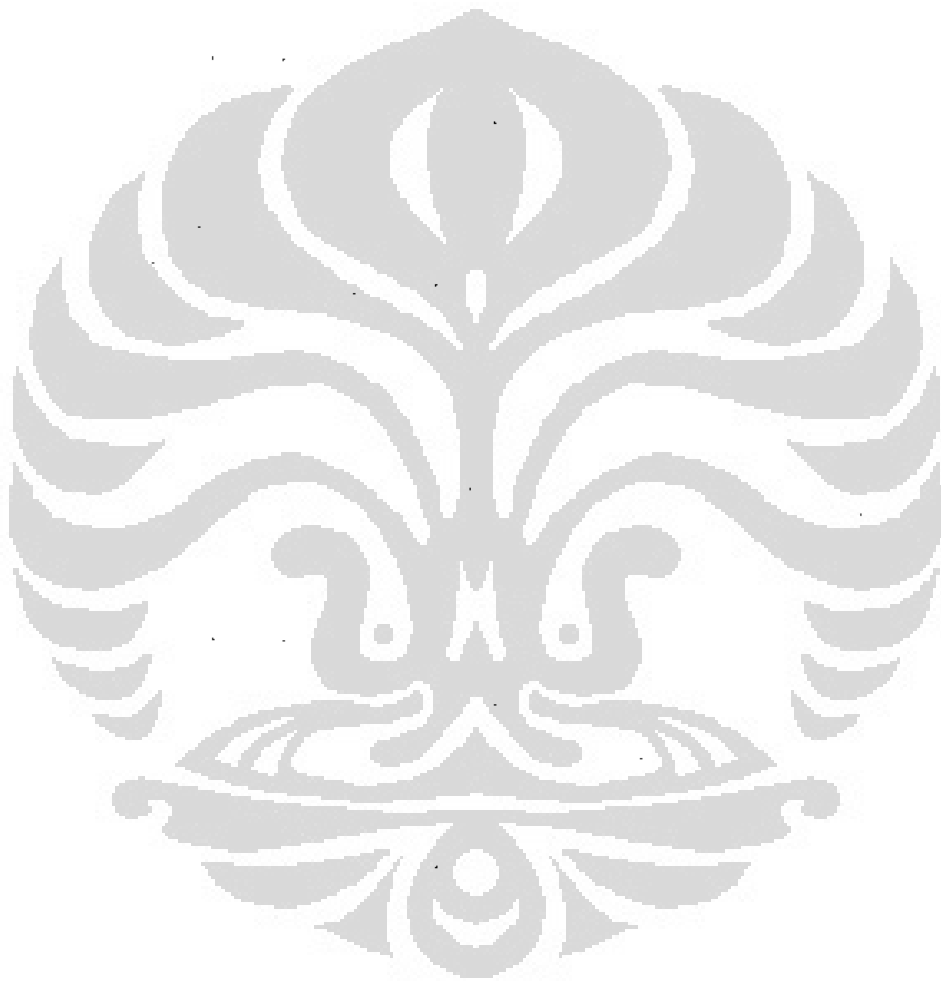
Lebih lanjut lagi, bila dikomparasikan secara keseluruhan, proporsi masalah keamanan pada masa implementasi COHA dan pemberlakuan keadaan darurat militer I secara berturut-turut adalah 65 persen (73 kasus) dan 50 persen (233 kasus). Sebaliknya, proporsi upaya penanganan ancaman pada kedua periode waktu tersebut secara berturut-turut adalah 35 persen (39 penugasan) dan 50 persen (230 penugasan). Meskipun upaya penanganan ancaman pada masa pemberlakuan keadaan darurat militer I memiliki proporsi yang berimbang, namun bila dilihat perbandingan jumlah numeriknya, total kasus masalah keamanan lebih besar daripada total penugasan aparat keamanan untuk menangani ancaman. Oleh karena itu, dapat disimpulkan di sini bahwa terdapat persoalan defisit keamanan dalam pengelolaan keamanan nasional di Aceh, baik pada masa implementasi COHA maupun pemberlakuan keadaan darurat Militer I (lihat Grafik 2.24).

Grafik 2.24
Komparasi Akumulatif dan Presentase Jumlah
Masalah Keamanan dan Penugasan Aparat Keamanan di Aceh



Dengan demikian, ada dua kesimpulan utama yang dapat diperoleh dari seluruh pemaparan bab kedua ini. *Pertama*, pemerintah Indonesia melaksanakan pendekatan sekuritisasi dan desekuritisasi dalam mengelola keamanan nasional dan sekaligus menyelesaikan konflik bersenjata di Aceh. *Kedua*, terdapat persoalan defisit keamanan di Aceh, baik pada masa implementasi Cessation of Hostilities Agreement maupun pada saat pemberlakuan keadaan darurat militer I. Adanya defisit keamanan ini oleh karenanya membuka ruang untuk menelaah langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menjalankan pendekatan (de)sekuritisasi di Aceh selama kedua periode waktu tersebut.





BAB III

**KESENJANGAN DALAM PELAKSANAAN
PENDEKATAN (DE)SEKURITISASI DI ACEH
PADA MASA IMPLEMENTASI
CESSATION OF HOSTILITIES AGREEMENT DAN
PEMBERLAKUAN KEADAAN DARURAT MILITER I**

Permasalahan apa yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam mengelola keamanan nasional di Aceh pada masa implementasi Cessation of Hostilities Agreement dan pemberlakuan keadaan darurat militer I? Dengan menggunakan metodologi *instrumental case study*, bab ketiga dalam penelitian ini memuat pembahasan masalah sehubungan dengan pendekatan desekuritisasi dan sekuritisasi yang dijalankan secara berturut-turut selama kedua periode waktu tersebut. Sub-bab 3.1 secara khusus membahas pendekatan desekuritisasi berdasarkan kerangka kerja penghentian permusuhan yang dimandatkan oleh Cessation of Hostilities Agreement, serta berbagai masalah dalam mengimplementasikan kesepakatan damai tersebut. Berikutnya, sub-bab 3.2 difokuskan untuk membahas pendekatan sekuritisasi berupa pemberlakuan keadaan bahaya pada saat diberlakukannya keadaan darurat militer I, serta persoalan-persoalan khususnya terkait penggelaran operasi pemulihan keamanan dan operasi penegakan hukum berdasarkan kerangka kerja Operasi Terpadu. Adapun sub-bab 3.3 merupakan bagian kesimpulan yang menjelaskan kesenjangan dalam pelaksanaan pendekatan desekuritisasi dan pendekatan sekuritisasi (*securitization gap*) yang ditempuh pemerintah Indonesia secara berturut-turut pada masa implementasi Cessation of Hostilities Agreement dan selama pemberlakuan keadaan darurat militer I di Aceh.

3.1. Pendekatan Desekuritisasi dan Implementasi COHA

Sub-bagian ini membahas tentang pendekatan desekuritisasi melalui implementasi kerangka kerja penghentian permusuhan berdasarkan Cessation of Hostilities Agreement (COHA) dan sekaligus berbagai persoalan dalam implementasi kerangka kerja tersebut. Secara prinsipil, kesepakatan COHA dimaksudkan untuk membangun rasa saling percaya (*confidence building*) di antara pemerintah Indonesia dan GAM dan menghentikan semua bentuk kecurigaan guna menciptakan suasana yang positif dan kooperatif bagi tercapainya solusi damai atas konflik di Aceh.¹³⁰ Karena itu, kesepakatan ini tidak memuat penyelesaian atas persoalan fundamental yang masih menjadi perselisihan di antara kedua belah pihak yang bertikai.¹³¹ Dalam rangka mencapai maksud tersebut, COHA mensyaratkan diimplementasikannya dua tahap utama, yaitu pembangunan kepercayaan dan demiliterisasi, baik oleh pemerintah Indonesia maupun GAM. Implementasi COHA mulai menunjukkan tanda-tanda kegagalannya ketika sampai menjelang waktu pelaksanaannya pada tanggal 9 Februari 2003, kedua belah pihak masih memiliki perbedaan penafsiran tentang implementasi tahap demiliterisasi.

3.1.1. Kerangka Kerja Penghentian Permusuhan

Berdasarkan kesepakatan COHA, pemerintah Indonesia dan GAM sepakat untuk segera menghentikan sikap permusuhan dan seluruh bentuk kekerasan, termasuk intimidasi, perusakan bangunan, kriminalitas dan tindakan ofensif.¹³² Dalam konteks itu, upaya pemeliharaan ketertiban masyarakat dan

¹³⁰ Lihat Pasal 1 butir (b) dalam "Cessation of Hostilities: Framework Agreement between Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement" (selanjutnya disebut Cessation of Hostilities Agreement), 9 Desember 2002.

¹³¹ Lihat Edward Aspinall dan Harold Crouch, "The Aceh Peace Process: Why It Failed", *Policy Studies*, No. 1 (Washington, DC: East West Center, 2003), h. 32.

¹³² Lihat Pembukaan, Cessation of Hostilities Agreement, op.cit.

penegakan hukum di Aceh merupakan tanggung jawab POLRI.¹³³ Kedua belah pihak juga menyetujui untuk tidak memanfaatkan situasi dan melakukan tindakan yang dapat mengganggu suasana kedamaian di Aceh, serta meningkatkan kekuatan bersenjata masing-masing, termasuk menggelar kembali pasukan, menambah jumlah pasukan ataupun meningkatkan persenjataan.¹³⁴ Selain itu, selama dua bulan pertama sejak penandatanganan COHA, baik pemerintah Indonesia maupun GAM diwajibkan menahan diri untuk tidak membuat pernyataan di ruang publik yang dapat melukai perasaan salah satu pihak dan memastikan pasukan masing-masing tidak melakukan tindakan bermusuhan.¹³⁵

Untuk mengimplementasikan dan memantau pelaksanaan butir-butir kesepakatan dalam COHA, pemerintah Indonesia dan GAM sepakat untuk mengaktifkan kembali Joint Security Council (JSC), yang pernah dibentuk pada masa pelaksanaan Kesepakatan Jeda Kemanusiaan.¹³⁶ Keanggotaan JSC terdiri dari satu orang perwakilan dari masing-masing pemerintah Indonesia dan GAM, serta seorang pihak penengah (*third party*) yang disepakati kedua belah pihak.¹³⁷ Adapun tugas yang diemban oleh JSC adalah memantau situasi keamanan di Aceh, menyelidiki berbagai kasus pelanggaran kesepakatan, mengambil tindakan yang diperlukan untuk memberi sanksi terhadap salah satu pihak yang melakukan suatu pelanggaran, memastikan tidak adanya pasukan paramiliter baru yang mengambil alih peran pasukan Brimob, dan merancang serta melaksanakan proses demiliterisasi yang telah disepakati.¹³⁸

Pada awal pelaksanaan tugasnya tersebut, COHA memandatkan agar JSC segera menentukan dan menyiapkan beberapa daerah rawan konflik untuk ditetapkan sebagai “zona damai” untuk membuat jarak tertentu antara pasukan pemerintah Indonesia maupun GAM guna menghindari agar bentrokan senjata

¹³³ Lihat Cessation of Hostilities Agreement, op.cit.

¹³⁴ Lihat Pasal 2 butir (b) dan (c), Ibid.

¹³⁵ Lihat Pasal 5 butir (c), Ibid.

¹³⁶ Lihat Pasal 3 butir (a), Ibid.

¹³⁷ Lihat Pasal 3 butir (c), Ibid.

¹³⁸ Lihat Pasal 3 butir (b), Ibid.

penegakan hukum di Aceh merupakan tanggung jawab POLRI.¹³³ Kedua belah pihak juga menyetujui untuk tidak memanfaatkan situasi dan melakukan tindakan yang dapat mengganggu suasana kedamaian di Aceh, serta meningkatkan kekuatan bersenjata masing-masing, termasuk menggelar kembali pasukan, menambah jumlah pasukan ataupun meningkatkan persenjataan.¹³⁴ Selain itu, selama dua bulan pertama sejak penandatanganan COHA, baik pemerintah Indonesia maupun GAM diwajibkan menahan diri untuk tidak membuat pernyataan di ruang publik yang dapat melukai perasaan salah satu pihak dan memastikan pasukan masing-masing tidak melakukan tindakan bermusuhan.¹³⁵

Untuk mengimplementasikan dan memantau pelaksanaan butir-butir kesepakatan dalam COHA, pemerintah Indonesia dan GAM sepakat untuk mengaktifkan kembali Joint Security Council (JSC), yang pernah dibentuk pada masa pelaksanaan Kesepakatan Jeda Kemanusiaan.¹³⁶ Keanggotaan JSC terdiri dari satu orang perwakilan dari masing-masing pemerintah Indonesia dan GAM, serta seorang pihak penengah (*third party*) yang disepakati kedua belah pihak.¹³⁷ Adapun tugas yang diemban oleh JSC adalah memantau situasi keamanan di Aceh, menyelidiki berbagai kasus pelanggaran kesepakatan, mengambil tindakan yang diperlukan untuk memberi sanksi terhadap terhadap salah satu pihak yang melakukan suatu pelanggaran, memastikan tidak adanya pasukan paramiliter baru yang mengambil alih peran pasukan Brimob, dan merancang serta melaksanakan proses demiliterisasi yang telah disepakati.¹³⁸

Pada awal pelaksanaan tugasnya tersebut, COHA memandatkan agar JSC segera menentukan dan menyiapkan beberapa daerah rawan konflik untuk ditetapkan sebagai “zona damai” untuk membuat jarak tertentu antara pasukan pemerintah Indonesia maupun GAM guna menghindari agar bentrokan senjata

¹³³ Lihat Cessation of Hostilities Agreement, op.cit.

¹³⁴ Lihat Pasal 2 butir (b) dan (c), Ibid.

¹³⁵ Lihat Pasal 5 butir (c), Ibid.

¹³⁶ Lihat Pasal 3 butir (a), Ibid.

¹³⁷ Lihat Pasal 3 butir (c), Ibid.

¹³⁸ Lihat Pasal 3 butir (b), Ibid.

dapat dihindarkan.¹³⁹ Selain itu, kedua belah pihak tidak diperkenankan melaksanakan operasi, pergerakan pasukan ataupun tindakan provokatif lain yang dapat memicu terjadinya konfrontasi bersenjata.¹⁴⁰ Lebih lanjut, COHA mensyaratkan diimplementasikannya dua langkah “demiliterisasi”. *Pertama*, berselang dua bulan sejak penandatangan COHA, yaitu pada tanggal 9 Februari 2003, GAM akan mulai menempatkan secara bertahap seluruh persenjataan dan amunisi gerilyawannya di sebuah “tempat penyimpanan” (*placement site*) yang ditentukan.¹⁴¹ Proses penempatan persenjataan GAM ini akan diselesaikan dalam periode waktu lima bulan, yaitu pada tanggal 9 Juli 2003. *Kedua*, paralel dengan itu, pemerintah Indonesia akan merelokasi pasukan TNI dengan penyesuaian tugas dari posisi ofensif menjadi defensif.¹⁴² Selain itu, penugasan pasukan Brimob POLRI di Aceh juga akan direformulasi untuk melaksanakan tugas-tugas rutin pemolisian tanpa boleh melakukan tindakan ofensif terhadap gerilyawan GAM.¹⁴³

Dalam melaksanakan berbagai tugas tersebut, JSC akan dibantu oleh Tim Monitoring yang bertugas memantau perkembangan situasi keamanan dan menyelidiki setiap pelanggaran yang terjadi selama implementasi COHA di Aceh.¹⁴⁴ Komposisi keanggotaan dari Tim Monitoring ini berasal dari unsur aparat keamanan Indonesia dan unsur anggota GAM, serta seorang perwira militer senior dari negara asing yang disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁴⁵ Dalam pelaksanaannya, pemerintah Indonesia dan GAM meminta kesediaan Thailand dan Filipina untuk mengirimkan sejumlah pemantau yang akan bertindak selaku

¹³⁹ Lihat Pasal 4 butir (a), Cessation of Hostilities Agreement, op.cit.

¹⁴⁰ Lihat Pasal 4 butir (b), Ibid.

¹⁴¹ Dalam Nota Penjelasan HDC terhadap Pasal 3 (b), disebutkan bahwa lokasi penempatan senjata ditetapkan oleh GAM, tapi lokasinya dikomunikasikan kepada pihak HDC. Selain itu, GAM tidak dapat memindahkan senjata yang telah ditempatkan tanpa persetujuan HDC, serta harus mematuhi permintaan HDC untuk melakukan inspeksi setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lihat “Explanatory Note for Article 3 (b) Framework Agreement Between GOI and the Free Aceh Movement”, *Aceh Times*, diakses dari <http://www.acehtimes.com/pu/news/120902.htm>.

¹⁴² Lihat Pasal 3 butir (b), Cessation of Hostilities Agreement, op.cit.

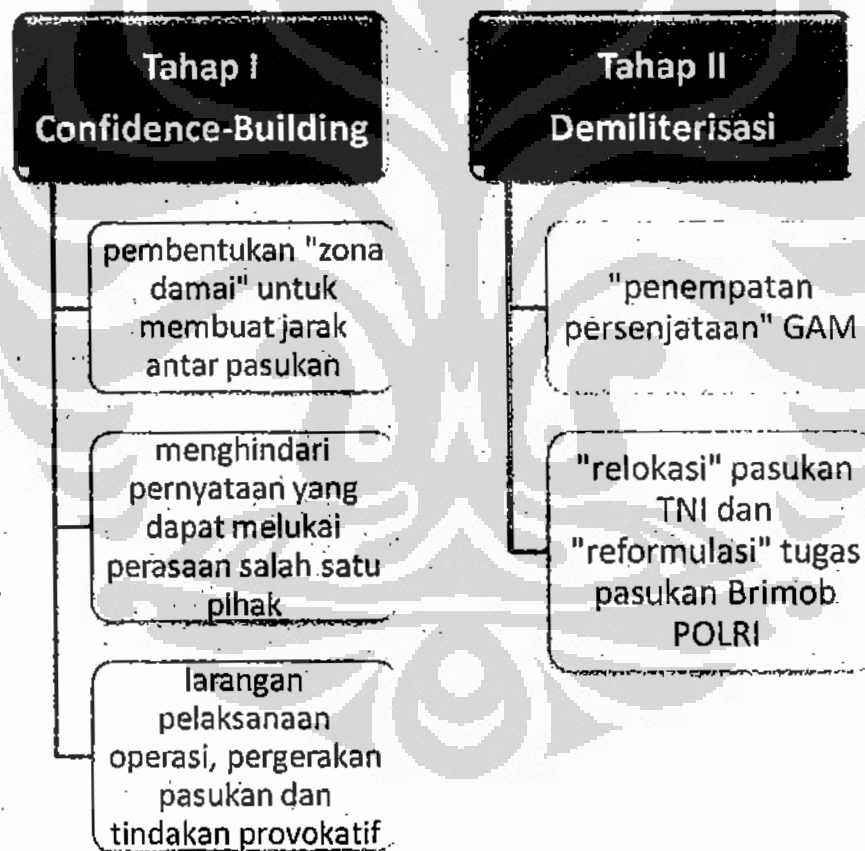
¹⁴³ Lihat Pembukaan, Ibid.

¹⁴⁴ Lihat Pasal 3 butir (d), Ibid.

¹⁴⁵ Lihat Pasal 3 butir (e), Ibid.

individu yang bertanggung jawab kepada HDC. Untuk itu, HDC akan memfasilitasi dukungan pendanaan, logistik dan fasilitas administratif yang diperlukan bagi bekerjanya JSC dan Tim Monitoring.¹⁴⁶ Selain itu, COHA juga mengatur mengenai pembentukan Joint Council yang bertugas menyelesaikan berbagai masalah krusial yang muncul selama implementasi COHA.¹⁴⁷ Badan ini beranggotakan Susilo Bambang Yudhoyono mewakili pemerintah Indonesia, Malik Mahmud dari GAM, dan Martin Griffiths selaku Direktur HDC.

Gambar 3.1
Kerangka Kerja Penghentian Permusuhan



Ketika suasana aman sudah mulai tercipta dan masyarakat dapat dengan bebas menyampaikan pendapatnya, tahap selanjutnya dari proses perdamaian

¹⁴⁶ Lihat Pasal 3 butir (f), Cessation of Hostilities Agreement, op.cit.

¹⁴⁷ Lihat Pasal 8, Ibid.

adalah penyelenggaraan “musyawarah besar” (*all-inclusive dialogue*) yang akan melibatkan seluruh lapisan masyarakat Aceh.¹⁴⁸ Kesepakatan COHA menyebutkan bahwa baik pemerintah Indonesia dan GAM menerima UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai “titik tolak” (*starting point*) dalam proses perdamaian.¹⁴⁹ Karena itu, musyawarah besar masyarakat Aceh dimaksudkan untuk mengkaji seluruh elemen UU No. 18/2001 tersebut. Sehubungan dengan itu, kedua belah pihak menyepakati adanya sebuah proses yang menuju terselenggaranya pemilihan pada tahun 2004 dan terbentuknya sebuah pemerintahan yang terpilih secara demokratis di Aceh. Dalam konteks itu, pemerintah Indonesia akan memastikan dan GAM akan mendukung penyelenggaraan proses pemilihan yang bebas dan adil di Aceh.¹⁵⁰

Dari pemaparan singkat di atas, tampak jelas bahwa penandatanganan COHA masih menyisihkan banyak persoalan substansial yang belum terselesaikan. Dengan kata lain, pemerintah Indonesia dan GAM masih belum menemukan kata sepakat tentang solusi akhir yang akan dicapai bagi penyelesaian konflik bersenjata di Aceh. Implementasi kerangka kerja penghentian permusuhan pada kenyataannya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perselisihan pandangan di antara kedua belah pihak tentang pelaksanaan langkah-langkah yang disepakati berdasarkan kerangka kerja tersebut justru mempertajam perdebatan yang semakin menjauhkan kedua belah pihak dari tercapainya tujuan implementasi COHA, yaitu terciptanya suasana yang positif dan kooperatif bagi tercapainya penyelesaian damai atas konflik bersenjata di Aceh.

¹⁴⁸ Lihat Pasal 6, Cessation of Hostilities Agreement, op.cit.

¹⁴⁹ Lihat Pembukaan, Ibid.

¹⁵⁰ Lihat Pembukaan, Ibid.

3.1.2. Permasalahan Pelaksanaan Tahap Demiliterisasi di Aceh

Penandatanganan COHA disambut dengan penuh suka cita oleh berbagai kalangan, khususnya masyarakat Aceh yang sangat mengharapkan agar butir-butir kesepakatan tersebut segera dapat dilaksanakan di lapangan. Optimisme berbagai kalangan terhadap implementasi kesepakatan damai ini tampaknya didasarkan atas sejumlah alasan. *Pertama*, COHA memiliki mekanisme yang lebih baik dalam mengimplementasikan dan memantau pelaksanaan butir-butir kesepakatannya melalui pembentukan JSC. *Kedua*, COHA mengatur tentang pembentukan “zona damai” di Aceh yang diharapkan dapat memberikan insentif perdamaian bagi kedua belah pihak yang bertikai. *Ketiga*, COHA memperoleh dukungan penuh dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang dan Bank Dunia yang menjanjikan bantuan keuangan bagi rekonstruksi Aceh pasca konflik.¹⁵¹

Tahap Pembangunan Kepercayaan

Berselang sebelas hari sejak ditandatanganinya COHA, JSC mulai bekerja pada tanggal 20 Desember 2002 di bawah kepemimpinan tripartit yang terdiri atas Mayor Jenderal Tanongsuk Tuvinun dari Thailand, Brigadir Jenderal Safzen Noerdin dari TNI, dan Sofyan Ibrahim Tiba dari GAM.¹⁵² Selain itu, sebanyak 50 pemantau asing dari Thailand dan Filipina bekerja bersama 50 pemantau dari unsur aparat keamanan Indonesia dan 50 pemantau dari unsur GAM.¹⁵³ Pada tanggal 3 Februari 2003, JSC melaporkan bahwa sejak penandatanganan COHA, jumlah warga sipil yang tewas per bulan mengalami penurunan drastis dari 87 orang menjadi 11 orang. Korban di pihak aparat keamanan mengalami penurunan dari 45 orang menjadi hanya 4 orang, sementara

¹⁵¹ Lihat Rizal Sukma, “Security Operations in Aceh: Goals, Consequences and Lessons”, *Policy Studies*, No. 3 (Washington, DC: East West Center, 2004), h. 20.

¹⁵² Lihat “KKB Mengadakan Pertemuan Pertama di Banda Aceh”, *Kompas* (21 Desember 2002).

¹⁵³ Lihat “JSC Co-chairman Arrives in Aceh to Begin Peace Monitoring Work”, *The Jakarta Post* (19 Desember 2002).

jumlah anggota GAM yang tewas menurun menjadi hanya 9 orang dari 102 orang.¹⁵⁴

Situasi keamanan yang relatif stabil ini memberikan ruang bagi JSC untuk membentuk zona damai di Aceh. Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar ditetapkan sebagai zona damai pertama pada tanggal 25 Januari 2003.¹⁵⁵ Selanjutnya, Kecamatan Kawai XVI, Aceh Barat dan Kecamatan Sawang, Aceh Selatan diresmikan sebagai zona damai pada tanggal 9 Februari 2003.¹⁵⁶ Pada bulan Maret 2003, JSC mengumumkan secara berturut-turut penetapan empat zona damai yang terletak antara lain di Kecamatan Peusangan, Bireuen; Kecamatan Tiro, Pidie; Kecamatan Simpang Keramat, Aceh Utara; dan kecamatan Idi Tunong, Aceh Timur.¹⁵⁷ Baik pemerintah Indonesia maupun GAM menyepakati bahwa pasukan masing-masing diperbolehkan memasuki wilayah tersebut, namun tidak dibenarkan membawa senjata di dalam wilayah zona damai – kecuali di pos atau markas masing-masing – serta tidak memindahkan pasukan baru ke dalam wilayah tersebut. Namun, hal ini tidak berlaku bagi aparat kepolisian yang menjalankan tugas-tugas rutin pemolisian.¹⁵⁸

Sebagaimana disebutkan di atas, JSC diberi mandat untuk melakukan penyelidikan terhadap berbagai kasus pelanggaran selama implementasi COHA. Direktur HDC, David Gorman menjelaskan bahwa Tim Monitoring akan menyelidiki berbagai kasus pelanggaran, yang kemudian dilaporkan kepada JSC untuk ditetapkan kategori kasus¹⁵⁹ dan sanksi yang diberikan kepada pihak

¹⁵⁴ Lihat "JSC Reports Fall in Violence After Peace Deal", *The Jakarta Post* (4 Februari 2003).

¹⁵⁵ Lihat "Indrapuri, Zona Damai Pertama di Aceh", *Kompas* (26 Februari 2003); "Peace Zone, A Start of Harmony in Aceh", *The Jakarta Post* (26 Februari 2003).

¹⁵⁶ Lihat International Crisis Group, "Aceh: A Fragile Peace", *Asia Report*, No. 47 (27 Februari 2003a), h. 10.

¹⁵⁷ Lihat "Zona Damai di Aceh Bertambah", *Koran Tempo* (9 Maret 2003); "Dua Zona Damai Baru Ditetapkan di Aceh", *Kompas* (10 Maret 2003).

¹⁵⁸ Lihat "JSC Gives Details of Aceh Peace Zones", *The Jakarta Post* (22 Januari 2003); "Warga Berharap Tidak Ada Personel Bersenjata di Zona Damai", *Kompas* (24 Januari 2003).

¹⁵⁹ JSC merumuskan kategori pelanggaran sangat serius sebagai pelanggaran yang mungkin menyebabkan terganggunya implementasi COHA dan menimbulkan kerugian yang berarti terhadap kedua pihak dan warga sipil. Pelanggaran serius adalah pelanggaran terhadap butir-butir

pelanggar.¹⁶⁰ Dalam laporan hasil penyelidikannya pada bulan Januari 2003, JSC menjatuhkan sanksi kepada GAM atas terjadinya dua pelanggaran sangat serius, yaitu: (i) penyerangan terhadap delapan prajurit TNI di Kecamatan Lokop, Aceh Timur pada tanggal 14 Januari 2003, dan (ii) penembakan terhadap dua prajurit TNI di Kecamatan Lamno, Aceh Barat pada tanggal 16 Januari 2003. Sementara itu, sanksi juga diberikan kepada pemerintah Indonesia karena melakukan pelanggaran ringan berupa intimidasi aparat keamanan Indonesia terhadap seorang anggota tim pemantau JSC dari unsur GAM yang tengah menyelidiki bentrokan antara personil Brimob dengan para pengunjuk rasa di Kabupaten Bireuen pada tanggal 14 Januari 2003.¹⁶¹ Menyikapi hasil laporan JSC tersebut, pihak GAM segera menyiapkan mahkamah militer untuk mengadili anggotanya yang melanggar kesepakatan COHA.¹⁶²

Namun demikian, perselisihan mulai terjadi tatkala JSC menungungkan hasil penyelidikan keduanya. Pada bulan Februari 2003, JSC mengumumkan terjadinya dua kasus pelanggaran sangat serius – penembakan dua anggota GAM di Kecamatan Lamno, Aceh Jaya pada tanggal 25 Januari 2003 dan pembunuhan atas seorang warga di Kota Langsa pada tanggal 10 Januari 2003 – dan satu pelanggaran serius yang dilakukan pemerintah Indonesia – pembunuhan seorang warga di Kecamatan Lueng Bata, Aceh Besar pada tanggal 8 Januari 2003. Sementara GAM dikenai sanksi satu kasus pelanggaran sangat seirus, yaitu penyerangan atas prajurit TNI di Kecamatan Manggamat, Aceh Selatan.¹⁶³ Meski menerima hasil temuan penyelidikan atas satu kasus, namun Panglima TNI menyatakan bahwa dua kasus lainnya merupakan kasus penembakan terhadap pelaku kriminal biasa yang tidak ada hubungannya dengan implementasi

kesepakatan COHA yang memungkinkan bahayanya proses kesepakatan itu dan terjadinya luka serius, kematian, cacat permanen dan kerusakan harta benda.

¹⁶⁰ Lihat “JSC Investigasi 32 Kasus Pelanggaran di Aceh”, *Kompas* (5 Februari 2003).

¹⁶¹ Lihat “GAM, RI Charged over Truce Violations”, *The Jakarta Post* (25 Januari 2003); “JSC Jatuhkan Sanksi pada GAM dan RI”, *Suara Pembaruan* (25 Januari 2003); “Komisi Keamanan Bersama Tegur GAM dan Aparat Indonesia”, *Koran Tempo* (27 Januari 2003).

¹⁶² Lihat “TNI dan GAM Siap Terima Sanksi Komisi Keamanan Bersama”, *Suara Pembaruan* (28 Januari 2003).

¹⁶³ Lihat “JSC: Empat Pelanggaran Kesepakatan Damai”, *Kompas* (17 Februari 2003).

COHA.¹⁶⁴ Setelah penyelidikan lebih lanjut, JSC akhirnya menganulir hasil temuannya atas dua kasus tersebut.¹⁶⁵ Akan tetapi, beberapa hari kemudian, GAM menyatakan penolakannya atas hasil temuan JSC yang mempersalahkan GAM atas terjadinya insiden bersenjata di Kecamatan Lokop, Aceh Timur dan Kecamatan Lamno, Aceh Barat.¹⁶⁶

Bahkan, bersamaan dengan dibentuknya JSC, kedua belah pihak mulai saling menuding atas terjadinya sejumlah insiden bersenjata pasca penandatanganan COHA. Wakil Panglima Komando Operasi TNI, Brigadir Jenderal Bambang Darmono mengatakan bahwa pada tanggal 19 Desember 2002, terjadi bentrokan senjata ketika tiga truk yang mengangkut bahan logistik dihadang anggota GAM di Kecamatan Makmur, Aceh Utara.¹⁶⁷ Pada hari yang sama, juru bicara GAM, Sofyan Dawood menyebutkan adanya kontak senjata di Kecamatan Simpang Kramat, Aceh Utara setelah pasukan TNI melakukan operasi dan masuk ke markas GAM.¹⁶⁸ Bahkan, pada tanggal 22 Desember 2002, dua prajurit TNI tewas dan tiga lainnya terluka dalam insiden penyerangan yang dilakukan anggota GAM di Kecamatan Kluet Utara, Aceh Selatan.¹⁶⁹ Meski dibantah oleh Panglima Kodam Iskandar Muda, pihak GAM menyatakan bahwa penyerangan tersebut terjadi sebagai akibat sikap TNI yang masih terus memburu anggota GAM di Aceh Selatan.¹⁷⁰

Pemerintah Indonesia juga menuduh GAM memanfaatkan momentum kesepakatan damai untuk mengkonsolidasikan kekuatannya dan mengkampanyekan kemerdekaan Aceh. Menteri Koordinator Bidang Politik dan

¹⁶⁴ Lihat "Panglima: Komisi Keamanan Bersama Cabut Dua Tuduhan", *Kompas* (28 Februari 2003).

¹⁶⁵ Lihat "JSC Cabut Dua Pelanggaran Indonesia", *Kompas* (1 Maret 2003).

¹⁶⁶ Lihat "GAM Tolak Sanksi dari Komite Keamanan Bersama", *Media Indonesia* (1 Maret 2003); "Tuduh RI Tidak Jujur, GAM Tolak Sanksi", *Suara Pembaruan* (1 Maret 2003).

¹⁶⁷ Lihat "Permusuhan Bisa Dihentikan", *Republika* (21 Desember 2002).

¹⁶⁸ Lihat "TNI-GAM Kontak Senjata 25 Menit", *Media Indonesia* (21 Desember 2002).

¹⁶⁹ Lihat "GAM menyerang Lagi", *Jawa Pos* (23 Desember 2002).

¹⁷⁰ Lihat "Dua Prajurit TNI Tewas di Aceh Selatan", *Suara Pembaruan* (24 Desember 2002); "Pangdam IM Kecewa Dengan GAM", *Kompas* (24 Desember 2002).

Keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono menyesalkan tindakan anggota GAM yang memamerkan kekuatan senjatanya (*show of force*) di ruang publik dan menyelenggarakan rapat akbar yang mengkampanyekan bahwa tujuan akhir implementasi COHA adalah kemerdekaan Aceh, sehingga “musyawarah besar rakyat Aceh” akan digelar dalam bentuk referendum.¹⁷¹ Selain itu, pemerintah Indonesia juga menuding GAM berupaya membangun struktur pemerintahan tandingan di Aceh. Pada tanggal 25 Januari 2003, misalnya, GAM menggelar sebuah upacara pelantikan seorang panglima militer dan seorang gubernur GAM di Kabupaten Pidie.¹⁷² GAM juga dilaporkan melakukan pemungutan pajak liar atau yang dikenal dengan “Pajak Nanggroe” di sejumlah daerah.¹⁷³ Bahkan, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu menyatakan bahwa GAM merekrut sejumlah pemuda untuk menjadi gerilyawan GAM dan sekaligus meningkatkan jumlah persenjataannya (lihat Tabel 3.1).¹⁷⁴ Berbagai tindakan GAM tersebut, menurut Yudhoyono, bertentangan dengan kesepakatan COHA yang mensyaratkan agar kedua belah pihak menghindari segala bentuk pernyataan dan tindakan yang dapat memprovokasi dan meningkatkan ketegangan baru di Aceh.¹⁷⁵

Pemerintah Indonesia tampaknya khawatir terhadap perluasan pengaruh GAM di wilayah pedesaan Aceh. Sejumlah anggota DPR-RI menilai bahwa pemerintah daerah Aceh kurang tanggap dalam mensosialisasikan butir-butir

¹⁷¹ Lihat “GAM Gelar Rapat Akbar di Aceh Utara”, *Media Indonesia* (8 Januari 2003); “Indonesia Sesalkan GAM Pamer Kekuatan Senjata”, *Media Indonesia* (16 Januari 2003); “Sosialisasi Perjanjian Belum Capai Sasaran”, *Suara Pembaruan* (16 Januari 2003).

¹⁷² Lihat “TNI Protes Pelantikan Panglima GAM Pidie”, *Koran Tempo* (28 Januari 2003); “Panglima TNI Pertanyakan Pelantikan Panglima GAM di Pidie”, *Kompas* (28 Januari 2003).

¹⁷³ Lihat Kirsten E. Sculze, “The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of A Separatist Organization”, *Policy Studies*, No. 2 (Washington, DC: East West Center, 2004), h. 27; “GAM Will Comply with Aceh Peace Accord”, *The Jakarta Post* (27 Januari 2003); “Mereka Bermain di Air Keruh”, *Republika* (24 April 2003).

¹⁷⁴ Lihat “KSAD: GAM Tambah Kekuatan”, *Jawa Pos* (28 Maret 2003). Lihat juga “GAM Juga Tambah Pasukan dan Senjata”, *Jawa Pos* (24 April 2003).

¹⁷⁵ Lihat “Menko Polkam: Hindari Penyimpangan Kesepakatan”, *Kompas* (16 Januari 2003).

kesepakatan COHA kepada masyarakat Aceh.¹⁷⁶ Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Letnan Jenderal TNI Sudi Silalahi mengakui adanya beberapa anggota GAM yang berupaya mensosialisasikan referendum bagi kemerdekaan Aceh.¹⁷⁷ Kendala utama dalam hal ini tampaknya adalah lumpuhnya perangkat pemerintahan daerah di sejumlah daerah. Kepala Polda Aceh, Inspektur Jenderal Polisi Bachrumsyah Kasman memperkirakan bahwa GAM menguasai sekitar 40 persen wilayah kecamatan dan pedesaan di Aceh.¹⁷⁸ Lebih lanjut, Gubernur Aceh, Abdullah Puteh menerangkan bahwa di berbagai daerah yang mengalami kelumpuhan roda pemerintahan, anggota GAM mengumpulkan pajak tanah dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan mengeluarkan surat izin mengemudi. Bahkan, menurutnya, warga desa cenderung memilih mengurus masalah pernikahan dengan GAM ketimbang pergi ke Kantor Urusan Agama setempat.¹⁷⁹

Tabel 3.1
Jumlah Kekuatan GAM di Kabupaten di Aceh

Kabupaten	Bulan Agustus 2002		Bulan April 2003	
	Jumlah Anggota	Jumlah Senjata	Jumlah Anggota	Jumlah Senjata
Aceh Barat	426	182	472	113
Aceh Besar	231	94	323	209
Aceh Selatan	130	76	89	74
Aceh Tengah	92	83	86	79
Aceh Tenggara	25	5	25	4
Aceh Timur	939	410	826	346

¹⁷⁶ Lihat "Sosialisasi Kesepakatan Geneva Dinilai Kurang", *Kompas* (3 Januari 2003); "Jangan Memancing Permusuhan Baru", *Kompas* (14 Januari 2003); "Aceh Administration Blamed Partly for Peace Failure", *The Jakarta Post* (29 April 2003).

¹⁷⁷ Lihat "Sosialisasi Perjanjian Damai di Aceh Dinilai Lamban", *Koran Tempo* (3 Januari 2003).

¹⁷⁸ Lihat Aspinal dan Crouch, (2003), *op.cit.*, h. 36. Lihat juga "30 Persen Daerah Pedesaan Aceh Dikuasi GAM", *Media Indonesia* (1 April 2003).

¹⁷⁹ Lihat "Pemerintah Diharapkan Konsultasi Dengan DPR", *Kompas* (28 April 2003).

Aceh Utara	1.157	706	1.331	889
Pidie	649	266	2.365	420

Sumber: diolah dari Kirsten E. Schulze, "The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of A Separatist Organization", *Policy Studies*, No. 2, (Washington, DC: East West Center, 2004), h. 18,32.

Menyadari lemahnya upaya sosialisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia, Yudhoyono kemudian meminta HDC untuk menjelaskan kepada masyarakat Aceh bahwa implementasi kesepakatan COHA tidak akan mengarah pada kemerdekaan Aceh, tetapi pelaksanaan otonomi khusus di Aceh. Menanggapi permintaan tersebut, David Gorman selaku Direktur HDC menggelar konferensi pers di Banda Aceh untuk menjelaskan bahwa COHA tidak membahas mengenai kemerdekaan Aceh maupun rencana penyelenggaraan referendum.¹⁸⁰ Menyusul pernyataan tersebut, Panglima TNI, Jenderal Endriartono Sutarto memperingatkan GAM untuk segera menghentikan propaganda dan kampanye kemerdekaan Aceh.¹⁸¹ Selain itu, aparat keamanan juga menangkapi para orator pada rapat-rapat akbar – termasuk Ketua Sentra Informasi Rakyat Aceh (SIRA), yaitu Muhammad Nazar yang dituduh mengkampanyekan pelaksanaan referendum dan mendesak agar PBB melakukan penyelidikan atas berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Aceh.¹⁸²

Tahap Demiliterisasi

Situasi keamanan di Aceh tidak juga menunjukkan perbaikan, bahkan cenderung bertambah buruk pada tahap pelaksanaan demiliterisasi, Sampai dengan menjelang dimulainya pelaksanaan tahap demiliterisasi, baik pemerintah Indonesia maupun GAM masih belum mencapai kata sepakat tentang mekanisme

¹⁸⁰ Lihat "RI Protests Shows of Support for Aceh Independence", *The Jakarta Post* (10 Maret 2003).

¹⁸¹ Lihat "TNI Minta JSC Tegas Terhadap GAM", *Suara Pembaruan* (13 Maret 2003); "Hentikan Propaganda Aceh Lepas dari NKRI", *Republika* (14 Maret 2003); "GAM Diminta Hentikan Propaganda Aceh Merdeka", *Media Indonesia* (14 Maret 2003).

¹⁸² Lihat "Sipil Dibungkam Dengan Menangkapi Aktivistis Aceh", *Kompas* (19 Februari 2003) "Sidang Ketua SIRA Kembali Digelar", *Suara Pembaruan* (21 April 2003); "Dua Aktivistis SIRA Ditangkap", *Jawa Pos* (22 April 2003).

implementasi tahap tersebut, khususnya terkait “penempatan” senjata GAM dan “relokasi” pasukan TNI.¹⁸³ Pemerintah Indonesia bersikeras bahwa GAM harus “menggudangkan” seluruh persenjataannya; sebaliknya, GAM tetap berpegang pada istilah penempatan sesuai dengan kesepakatan awal dimana persenjataan tersebut disimpan di suatu tempat rahasia dan diawasi sendiri oleh GAM.¹⁸⁴ Atas usulan HDC, GAM kemudian sepakat untuk meletakkan persenjataannya di sebuah “tempat khusus” (*cantonment*) dengan menggunakan sistem “dua kunci” (*two key system*) di bawah pengawasan GAM dan HDC.¹⁸⁵ Pihak GAM juga menegaskan bahwa penempatan senjata GAM tersebut harus dilakukan secara seimbang dengan pelaksanaan relokasi pasukan TNI.¹⁸⁶ Akan tetapi, perwakilan pemerintah Indonesia mempersoalkan bagaimana bisa diketahui berapa banyak senjata GAM yang sudah disimpan, jika tidak diketahui total jumlah persenjataan GAM guna mengukur keseimbangan antara penempatan senjata GAM dan relokasi pasukan TNI.¹⁸⁷ Pada akhirnya, solusi praktis yang ditempuh adalah menunggu sampai tanggal 9 Juli 2003 dimana seluruh persenjataan GAM sudah harus tersimpan.¹⁸⁸

Di samping itu, berdasarkan kesepakatan COHA, baik pemerintah Indonesia maupun GAM juga harus merelokasi posisi pasukan masing-masing untuk mengatur jarak guna menghindari konfrontasi bersenjata. Kedua belah pihak juga tidak diperkenankan melakukan operasi, pergerakan, aktivitas dan tindakan provokasi lainnya yang akan menyebabkan kontak senjata di antara mereka. Dalam pemahaman GAM, relokasi pasukan TNI berarti seluruh pasukan TNI harus ditarik mundur ke markas masing-masing, bukan disebar di berbagai pos keamanan yang berada di tempat-tempat publik. Menurut juru bicara militer

¹⁸³ Lihat “Komite Keamanan Bersama Belum Rumuskan Mekanisme Demiliterisasi”, *Tempo Interaktif* (7 Februari 2003).

¹⁸⁴ Lihat “GAM Bantah Setujui Penggudangan Senjata”, *Koran Tempo* (14 Desember 2002); “Damai Terganjil Perlucutan Senjata”, *Jawa Pos* (17 Desember 2003); “Proses Perdamaian Aceh Bisa Terganjil”, *Kompas* (3 Januari 2003).

¹⁸⁵ Lihat ICG, (2003a), *op.cit.*, h. 9.

¹⁸⁶ Lihat “GAM Jangan Berkeliaran Bawa Senjata”, *Kompas* (7 Februari 2003).

¹⁸⁷ Lihat Aspinall dan Crouch, (2003), *op.cit.*, h. 38.

¹⁸⁸ Lihat “Aceh Enters Crucial Demilitarization Phase”, *The Jakarta Post* (10 Februari 2003).

GAM, Sofyan Ibrahim Tiba, pasukan organik TNI yang berasal dari struktur Kodam Iskandar Muda harus ditarik mundur ke markas teritorialnya masing-masing yang bertempat di Kodam, Korem, Kodim dan Koramil; sementara pasukan non-organik TNI yang berasal dari luar Aceh ditempatkan di markas batalyon, kompi atau barak-barak militer.¹⁸⁹ Ketimbang menarik pasukannya dari 220 pos keamanan, Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Djali Yusuf menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengurangi jumlah pos keamanan yang tersebar di seluruh Aceh untuk membantu masyarakat Aceh membangun kembali daerahnya.¹⁹⁰ Bahkan, sejak minggu pertama implementasi COHA, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu menyatakan bahwa tidak akan ada penarikan mundur pasukan TNI dari Aceh.¹⁹¹ Keengganan GAM menyerahkan senjatanya untuk disimpan, tampaknya disebabkan oleh kecurigaan bahwa TNI sedang mempersiapkan diri melakukan tindakan ofensif.

Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tetap menekankan aparat keamanan akan terus menjalankan fungsi-fungsi normal yang diembankan kepada mereka. Berdasarkan kesepakatan COHA, pemeliharaan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum di Aceh merupakan tanggung jawab POLRI. Kepala POLRI, Jenderal Polisi Da'i Bachtiar menerangkan bahwa sekitar 3.000 personil Brimob di Aceh akan dialih tugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas pemolisian umum.¹⁹² Tidak menutup kemungkinan pula, jumlah personil Brimob tersebut ditambah mengingat masih rendahnya rasio jumlah aparat kepolisian dengan penduduk Aceh, yaitu 1:1.000.¹⁹³ Walaupun personil Brimob akan memperoleh pelatihan untuk meningkatkan profesionalismenya dalam menjalankan peran barunya, namun sejumlah pihak masih meragukan seberapa efektif pelatihan itu

¹⁸⁹ Lihat "Komite Keamanan Bersama Belum Rumuskan Mekanisme Demiliterisasi", *Tempo Interaktif* (7 Februari 2003); "Peletakan Senjata GAM dan Relokasi TNI di Aceh Akankah Terjadi", *Kompas* (8 Februari 2003).

¹⁹⁰ Lihat "TNI Ancam Kerahkan Pasukan Bila GAM Tak Gudangkan Senjata", *Tempo Interaktif* (3 Februari 2003).

¹⁹¹ Lihat "Army Chief Rules out Disarming, Withdrawing Troops from Aceh", *The Jakarta Post* (17 Desember 2002).

¹⁹² Lihat "Tugas Brimob di Aceh Berubah", *Tempo Interaktif* (14 Februari 2003).

¹⁹³ Lihat "More Brimob Troopers for Aceh", *The Jakarta Post* (14 Februari 2003).

dapat mentransformasi karakter personil Brimob dari pasukan paramiliter menjadi aparat penegak hukum yang berwibawa bagi masyarakat Aceh.¹⁹⁴

Menanggapi keengganan GAM untuk melucuti seluruh persenjataannya, pejabat senior pemerintahan dan perwira tinggi TNI mulai mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah Indonesia bisa membatalkan proses perdamaian dan mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap GAM. Pada pertengahan bulan Januari 2003, baik Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan maupun Panglima TNI menyatakan bahwa apabila GAM terus melanggar kesepakatan COHA, maka pemerintah Indonesia akan membatalkan secara sepihak implementasi kesepakatan tersebut.¹⁹⁵ Pada akhir bulan Januari 2003, Panglima TNI mengungkapkan bahwa Markas Besar TNI tengah menyiapkan rencana kontingensi untuk mengantisipasi kegagalan kesepakatan COHA.¹⁹⁶ Bahkan, dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR-RI pada bulan Maret 2003, ia menyampaikan rencana mobilisasi prajurit TNI dalam skala besar untuk dikirimkan ke Aceh.¹⁹⁷ Selain itu, dalam artikelnya di sebuah surat kabar nasional, mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal (Purn.) Kiki Syahnakri membandingkan proses perdamaian di Aceh dengan pengalaman Indonesia di Timor Timur. Menurut Kiki, perundingan damai tidak akan efektif tanpa disertai dengan pelaksanaan operasi keamanan untuk meningkatkan posisi tawar terhadap GAM.¹⁹⁸ Pandangan ini tampaknya mewakili pandangan sejumlah perwira tinggi TNI, khususnya di jajaran angkatan darat.

Keinginan sejumlah kalangan TNI untuk segera menghentikan proses perdamaian semakin bertambah jelas pada bulan Maret 2003 seiring dengan maraknya aksi unjuk rasa di kantor JSC. Insiden pertama terjadi pada tanggal 3

¹⁹⁴ Lihat ICG, (2003a), op.cit., h. 12.

¹⁹⁵ Lihat "RI Ancam Keluar dari Perjanjian Damai Aceh", *Koran Tempo* (18 Januari 2003); "Perjanjian Dengan GAM Bisa Saja Dibatalkan Sepihak", *Kompas* (19 Januari 2003); "Perjanjian Damai Aceh Terancam Batal", *Media Indonesia* (20 Januari 2003); "Minister Warns Aceh Truce Might be Broken", *The Jakarta Post* (21 Januari 2003).

¹⁹⁶ Lihat "TNI Siapkan Rencana Cadangan untuk Aceh", *Kompas* (31 Januari 2003).

¹⁹⁷ Lihat "DPR Dukung Rencana Pengiriman Militer", *Koran Tempo* (8 Maret 2003).

¹⁹⁸ Lihat Kiki Syahnakri, "Aceh Pasca Perjanjian Damai", *Kompas* (25 Februari 2003).

Maret 2003 di Kecamatan Takengon, Aceh Tengah dimana ribuan massa melukai beberapa anggota Tim Monitoring, membakar tiga unit kendaraan dan merusak kantor JSC. Dalam insiden tersebut, para pengunjuk rasa memprotes tindakan pemerasan dan penculikan oleh GAM, serta mendesak ditutupnya kantor JSC di Kabupaten Aceh Utara.¹⁹⁹ Unjuk rasa serupa juga terjadi antara lain Kota Meulaboh, Aceh Barat dimana para pengunjuk rasa menolak rencana pembentukan zona damai dan mendesak penambahan jumlah pos keamanan di beberapa lokasi yang dianggap rawan keamanan.²⁰⁰ Puncak dari aksi unjuk rasa ini adalah pembakaran kantor JSC oleh ratusan massa di Kota Langsa pada tanggal 6 April 2003.²⁰¹ Selain itu, kantor JSC di Kota Lhokseumawe memperoleh ancaman peledakan granat pada tanggal 23 Maret 2003.²⁰² Karena semakin seriusnya ancaman terhadap personilnya di lapangan, JSC kemudian memutuskan untuk menarik mundur 144 anggota tim pemantau ke Banda Aceh pada tanggal 8 April 2003.²⁰³

Adanya aksi unjuk rasa dan penyerangan kantor JSC seolah-olah menunjukkan adanya opini publik bahwa masyarakat Aceh menentang proses perdamaian dan mendukung segera dilaksanakannya operasi militer untuk memulihkan kondisi keamanan di Aceh. Walau menyesali terjadinya aksi kekerasan tersebut, Jenderal TNI Endriartono Sutarto menilai peristiwa tersebut merupakan akumulasi ketidakpuasan masyarakat Aceh terhadap kinerja HDC dan sekaligus menunjukkan betapa mereka bersikap nasionalis dan memandang bahwa

¹⁹⁹ Lihat "JSC Kutuk Insiden di Aceh Tengah", *Suara Pembaruan* (4 Maret 2003); "Kantor JSC di Takengon Diamuk Massa", *Kompas* (5 Maret 2003); "Warga Hancurkan Kantor KKB di Aceh", *Media Indonesia* (5 Maret 2003).

²⁰⁰ Lihat "Kantor JSC Aceh Timur Didatangi Ratusan Warga", *Kompas* (13 Maret 2003); "Zona Damai Ditolak, Pos Militer Minta Ditambah", *Kompas* (31 Maret 2003).

²⁰¹ Lihat "Kantor KKB Aceh Timur Dibakar Massa", *Kompas* (7 April 2003); "Kantor JSC Aceh Timur Dibakar", *Koran Tempo* (7 April 2003); "Kantor KKB di Langsa Dibakar Massa", *Media Indonesia* (7 April 2003).

²⁰² Lihat "Granat Ditemukan di Kantor Komite Keamanan Bersama Aceh", *Koran Tempo* (25 Maret 2003).

²⁰³ Lihat "Seluruh Anggota JSC Ditarik ke Aceh", *Media Indonesia* (9 April 2003); "9 Killed as Aceh Peace Monitors Leave Field Offices", *The Jakarta Post* (9 April 2003).

keadilan harus ditegakkan.²⁰⁴ Akan tetapi, sejumlah pengamat menduga rangkaian aksi unjuk rasa terhadap JSC digerakkan oleh oknum aparat keamanan tertentu. Kantor wilayah KontraS di Aceh, misalnya, melaporkan bahwa seorang saksi mata melihat seorang prajurit Kostrad membagikan spanduk dan plakat kepada para pengunjung rasa yang terlibat pada saat terjadi insiden perusakan kantor JSC di Kecamatan Takengon, Aceh Tengah.²⁰⁵

Sementara itu, pada akhir bulan Maret 2003, puluhan perwira tinggi dan menengah di jajaran Markas Besar Angkatan Darat mengikuti rapat komando di Kota Lhokseumawe.²⁰⁶ Meski rapat tersebut tidak membahas perkembangan situasi keamanan di Aceh,²⁰⁷ namun dalam kunjungan kerja Jenderal Ryamizard Ryacudu ke Kabupaten Pidie, ribuan massa berunjuk rasa mendesak pembentukan kembali pos keamanan di sejumlah kecamatan dan desa.²⁰⁸ Aparat keamanan setempat juga mengungkapkan bahwa sekitar 56 kepala desa di Pidie diculik GAM untuk menghalangi mereka bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Darat.²⁰⁹ Akan tetapi, pihak GAM membantah laporan penyanderaan tersebut dan menuduh Koramil meminta sejumlah kepala desa agar mengerahkan warganya untuk berunjuk rasa pada saat kunjungan pimpinan angkatan darat di Pidie.²¹⁰

Menyikapi kegagalan implementasi tahap demiliterisasi dan berbagai pelanggaran kesepakatan COHA, pemerintah Indonesia kemudian menyampaikan kepada HDC untuk menyelenggarakan pertemuan Joint Council guna

²⁰⁴ Lihat "Perusakan Kantor KKB Aceh Akumulasi Kcecewaan Warga", *Media Indonesia* (6 Maret 2003).

²⁰⁵ Lihat Aspinall dan Crouch, (2003), *op.cit.*, h. 41.

²⁰⁶ Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu menyampaikan bahwa alasan penyelenggaraan rapat tersebut di Aceh adalah agar para pimpinan angkatan darat memahami situasi keamanan di Aceh dan memberikan dukungan moral kepada para prajurit di lapangan, serta meyakinkan masyarakat Aceh tentang kesungguhan TNI dalam mendukung kebijakan pemerintah bagi penyelesaian masalah Aceh. Lihat "Puluhan Perwira TNI-AD Rapat Komando di Aceh", *Media Indonesia* (27 Maret 2003).

²⁰⁷ Lihat "TNI-AD Gelar Rapim di Lhokseumawe", *Media Indonesia* (26 Maret 2003).

²⁰⁸ Lihat "Minta Pos TNI, Ribuan Warga Pidie Unjuk Rasa", *Republika* (28 Maret 2003).

²⁰⁹ Lihat "56 Kepala Desa Diculik", *Jawa Pos* (28 Maret 2003); "GAM Sandera 56 Kades Saat Akan Berunjuk Rasa", *Media Indonesia* (28 Maret 2003).

²¹⁰ Lihat "TNI Tuding GAM Sandera 50 Kepala Desa di Pidie", *Kompas* (28 Maret 2003).

mengkoreksi total terhadap kesepakatan COHA.²¹¹ Sebagai perwakilan Indonesia di Joint Council, Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan dua syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh GAM dalam pertemuan tersebut, yaitu: *pertama*, GAM harus menerima otonomi khusus atas Aceh; dan *kedua*, GAM harus mengundang seluruh persenjataannya.²¹² Semula pertemuan Joint Council dijadwalkan pada tanggal 25 April 2005, namun menjelang pelaksanaannya, GAM meminta pertemuan ditunda hingga tanggal 27 April 2003.²¹³ Karena merasa dimanipulasi oleh GAM, pemerintah Indonesia kemudian memutuskan secara sepihak untuk tidak menghadiri pertemuan tersebut.²¹⁴

Namun demikian, sesuai Sidang Kabinet tanggal 28 April 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri masih memberi waktu selama dua minggu kepada GAM untuk memenuhi dua persyaratan yang diajukan guna memulai kembali perundingan damai.²¹⁵ Tanpa mengindahkan ultimatum tersebut, GAM mengusulkan agar pertemuan Joint Council diselenggarakan setelah tanggal 12 Mei 2003 atau melewati batas waktu yang ditetapkan.²¹⁶ Bahkan, GAM mengisyaratkan keberatannya atas kedua persyaratan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia.²¹⁷ Dalam periode waktu tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menerangkan bahwa pemerintah juga menggelar

²¹¹ Lihat "Pemerintah Koreksi Soal Penyelesaian Aceh", *Media Indonesia* (3 April 2003); "Ada Yang Melenceng Dari Hasil Kesepakatan Damai", *Kompas* (5 April 2003); "HDC Siap Lakukan Sidang 'Joint Council'", *Media Indonesia* (6 April 2003).

²¹² Lihat "RI Tekankan Dua Agenda Penting", *Republika* (22 April 2003); "RI Tetapkan Dua Agenda Dalam JCM", *Media Indonesia* (22 April 2003); "Govt Spells Out Conditions for Talks with GAM", *The Jakarta Post* (24 April 2003).

²¹³ Menurut keterangan pihak GAM, penundaan tersebut terjadi karena delegasi GAM baru mendapat visa kunjungan ke Swiss pada tanggal 24 April 2003. Lihat "GAM Beralih Soal Visa", *Republika* (26 Juni 2003).

²¹⁴ Lihat "GAM Permalukan Indonesia", *Suara Pembaruan* (25 April 2003); "Pemerintah RI Batalkan Perundingan Dengan GAM", *Kompas* (25 April 2003); "Peace in Doubt After Aceh Talks Canceled", *The Jakarta Post* (25 April 2003).

²¹⁵ Lihat "Penyelesaian Aceh Dalam Kerangka NKRI Harga Mati", *Kompas* (29 April 2003); "GAM Diberi Waktu Dua Minggu", *Koran Tempo* (29 April 2003); "Govt Opens up New Chance for Aceh Talks", *The Jakarta Post* (29 April 2003).

²¹⁶ Lihat "GAM Meminta Pertemuan di Geneva", *Kompas* (6 Mei 2003); "Pemerintah: Perundingan Damai Pekan Ini", *Koran Tempo* (6 Mei 2003); "Govt, GAM Unlikely to Meet", *The Jakarta Post* (6 Mei 2003); "Pemerintah Tolak Permintaan GAM", *Media Indonesia* (6 Mei 2003).

²¹⁷ Lihat "GAM Tolak Ultimatum RI", *Republika* (12 Mei 2003).

operasi penegakan hukum, operasi kemanusiaan dan operasi pemantapan jalannya pemerintahan daerah.²¹⁸ Akan tetapi, menurut Jenderal Polisi Da'i Bachtiar, operasi penegakan hukum tidak bisa berjalan jika GAM masih memegang senjata. Oleh karena itu, aparat kepolisian tidak cukup hanya dilengkapi dengan senjata organik, tetapi personil Brimob juga perlu dipersenjatai kembali dengan agar penegakan hukum di Aceh berjalan optimal.²¹⁹ Hal ini justru bertentangan dengan kesepakatan COHA yang mengatur bahwa personil Brimob hanya akan dilengkapi dengan senjata organik untuk melaksanakan tugas-tugas pemolisian umum.

Sementara itu, sepanjang bulan Maret dan April 2003, intensitas insiden bersenjata antara aparat keamanan dan gerilyawan GAM semakin meningkat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, misalnya, mencatat bahwa sejak dua bulan se usai penandatanganan COHA, terdapat tiga kasus penyerangan markas dan pos keamanan, sepuluh kasus kontak senjata, sembilan kasus penembakan, dan tiga kasus peledakan.²²⁰ Menyikapi perkembangan situasi keamanan di Aceh yang semakin memburuk, pada awal bulan April 2003, Presiden Megawati menginstruksikan agar TNI dan POLRI bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan digelarnya operasi pemulihan keamanan di Aceh.²²¹ Menyusul pembatalan pertemuan Joint Council di Jenewa, Panglima Kodam Iskandar Muda mengeluarkan perintah siaga I kepada seluruh pasukan TNI di Aceh.²²²

Bahkan, persiapan operasi militer semakin terlihat dengan pengiriman pasukan TNI ke Aceh. Sebelum adanya perintah siaga dari Presiden, Kepala Staf Angkatan Darat TNI mengungkapkan rencana untuk meningkatkan kekuatan tiga batalion organik di Aceh dari 600-650 prajurit menjadi 746 sampai 1.000 prajurit

²¹⁸ Lihat "Dialog RI-GAM Masih Terbuka", *Republika* (29 April 2003).

²¹⁹ Lihat "GAM Harus Meletakkan Senjata", *Kompas* (30 April 2003).

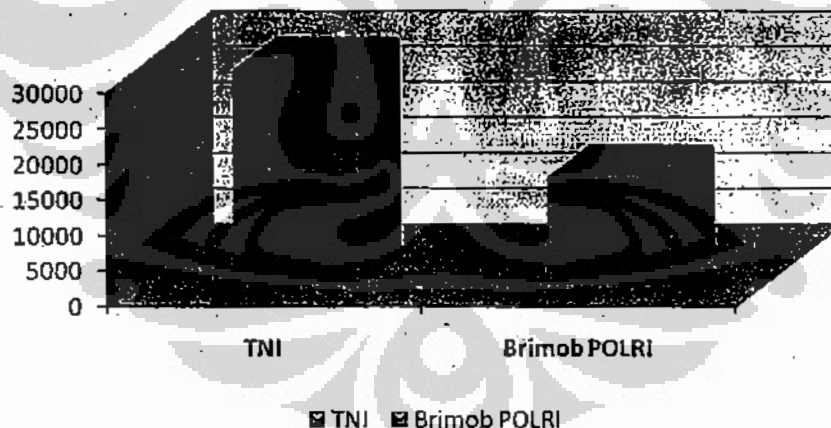
²²⁰ Lihat "Perkembangan Jumlah Kasus di Aceh", *Media Indonesia* (22 April 2003).

²²¹ Lihat "Presiden Perintahkan TNI dan POLRI Siaga", *Kompas* (8 April 2003); "Mega Instruksi Aparat untuk Bersiap Diri", *Jawa Pos* (8 April 2003).

²²² Lihat "Seluruh Pasukan TNI di Aceh Siaga I", *Media Indonesia* (25 April 2003).

per batalion.²²³ Pada pertengahan bulan April 2003, Brigadir Jenderal TNI Bambang Darmono selaku Wakil Panglima Komando Operasi TNI di Aceh menjelaskan bahwa TNI telah menyiapkan 25 batalion pasukan TNI yang terdiri dari 10 batalion pemukul, 11 batalion organik dan 4 batalion khusus untuk menjaga obyek vital di Aceh.²²⁴ Ketika HDC mengingatkan bahwa peningkatan jumlah prajurit TNI tersebut bertentangan dengan kesepakatan COHA, Jenderal Ryamizard menyatakan bahwa penggelaran prajurit TNI di Aceh merupakan kewenangannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.²²⁵ Bahkan, Panglima Kostrad, Letnan Jenderal TNI Bibit Waluyo menegaskan bahwa TNI berhak mengirimkan pasukan tempur ke Aceh karena Aceh merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Karena itu, menurutnya, operasi militer jangan ditunda-tunda agar tidak memunculkan masalah baru.²²⁶

Grafik 3.1
Jumlah Aparat Keamanan di Aceh
 (Sumber: *The Jakarta Post*, 22 Mei 2003)



²²³ Lihat "Kapolda NAD Diminta Selidiki Penculikan 56 Kepala Desa", *Media Indonesia* (29 Maret 2003).

²²⁴ Lihat "TNI Siapkan Ladang Pembantaian GAM", *Koran Tempo* (21 April 2003).

²²⁵ Lihat Aspinall dan Crouch, (2003), op.cit., h. 42.

²²⁶ Lihat "Operasi Militer Jangan Ditunda-tunda", *Media Indonesia* (22 April 2003).

Dalam suasana yang menegangkan tersebut, HDC yang didukung sepenuhnya oleh Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa dan World Bank akhirnya berhasil mendorong kedua belah pihak untuk melangsungkan pertemuan di Tokyo, Jepang pada tanggal 17 Mei 2003.²²⁷ Akan tetapi, menjelang diselenggarakannya pertemuan tersebut, aparat kepolisian di Aceh menahan lima juru runding GAM yang akan menjadi penasihat perwakilan GAM.²²⁸ Karena adanya penahanan tersebut, perwakilan GAM yang telah tiba di Tokyo kemudian menolak hadir apabila kelima juru runding GAM itu tidak dibebaskan.²²⁹ Meski akhirnya perundingan di Tokyo berlangsung tanpa kehadiran mereka, perundingan sempat ditunda selama beberapa jam guna mengatur pembebasan kelima juru runding GAM tersebut dari tahanan kepolisian.²³⁰

Dalam proses perundingan, perwakilan GAM mengajukan draf pernyataan bersama yang memuat komitmen GAM untuk meninggalkan perjuangan bersenjata dan menghindari upaya advokasi kemerdekaan Aceh, serta berpartisipasi dalam proses politik seperti yang tertulis dalam kesepakatan COHA. Namun, draf tersebut dijawab pemerintah Indonesia dengan mengajukan draf yang tetap menghendaki agar GAM menerima sepenuhnya otonomi khusus atas Aceh dan melakukan perlucutan senjata dengan membubarkan Tentara Negara Aceh.²³¹ Oleh sebab itu, tidak mengejutkan apabila perwakilan GAM menolak menandatangani pernyataan bersama dalam perundingan di Tokyo. Sebaliknya, sejumlah pejabat senior pemerintahan maupun perwira tinggi TNI tampaknya menggunakan perundingan di Tokyo sebagai sarana untuk meyakinkan, baik

²²⁷ Lihat "Govt Under Pressure to Save Aceh Peace", *The Jakarta Post* (2 Mei 2003); "Aceh Peace Given Last Chance", *The Jakarta Post* (17 Mei 2003); "Dialog dengan GAM Digelar Lagi 17 Mei", *Kompas* (17 Mei 2003).

²²⁸ Lihat "Lima Petinggi GAM Ditangkap", *Kompas* (17 Mei 2003); "Lima Tokoh GAM Ditangkap", *Media Indonesia* (17 Mei 2003); "Mereka Terlibat Terorisme", *Suara Pembaruan* (17 Mei 2003).

²²⁹ Lihat "Pertemuan Tokyo Terancam Gagal", *Suara Pembaruan* (17 Mei 2003); "Perundingan Tokyo Sempat Tersendat", *Koran Tempo* (18 Mei 2003).

²³⁰ Lihat "Police Release GAM Leaders as Tokyo Meeting Starts", *The Jakarta Post* (18 Mei 2003); "Lima Petinggi GAM Dilepas Polisi Aceh", *Kompas* (18 Mei 2003).

²³¹ Lihat "Tokyo Meeting Doomed to Fail from the Start", *The Jakarta Post* (28 Mei 2003).

publik domestik maupun internasional bahwa pemerintah Indonesia sudah melakukan segala upaya untuk menyelesaikan konflik di Aceh secara damai.²³²

Dari keseluruhan pemaparan sub-bagian 3.1 ini, dapat dipahami bahwa kebijakan desekuritisasi yang ditempuh pemerintah Indonesia berdasarkan kesepakatan COHA ternyata tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terlihat dengan kegagalan pelaksanaan kerangka kerja penghentian permusuhan. Keengganan pemerintah Indonesia merelokasi pasukan TNI – baik dari posisi ofensif ke posisi defensif ataupun menarik mundur pasukan non-organik dari Aceh – pada kenyataannya semakin mendorong penolakan GAM untuk menempatkan persenjataannya – baik itu digudangkan seperti yang dikehendaki pemerintah Indonesia ataupun disimpan di sebuah tempat yang diawasi oleh GAM dan HDC. Persoalan ini bertambah buruk dengan adanya sejumlah pernyataan dari pimpinan aparat keamanan yang mengecam berbagai pelanggaran kesepakatan COHA oleh GAM. Sementara itu, aparat kepolisian tampaknya tidak berbuat banyak untuk menanggulangi berbagai kasus gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum di Aceh. Kegagalan implementasi kesepakatan COHA ini menyebabkan situasi keamanan di Aceh bertambah buruk, yang pada gilirannya mendorong Presiden Megawati memberlakukan keadaan darurat militer.

3.2. Pendekatan Sekuritisasi dan Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer I

Sub-bagian ini membahas tentang pendekatan sekuritisasi yang ditempuh pemerintah Indonesia melalui pemberlakuan keadaan darurat militer I dan pelaksanaan Operasi Terpadu, serta permasalahan pada tataran pelaksanaan operasi tersebut. Setelah kegagalan perundingan di Tokyo, Presiden Megawati menandatangani Keppres No. 28/2003 tentang pemberlakuan keadaan darurat militer I di Aceh. Keppres ini merupakan modalitas politik bagi penggelaran

²³² Lihat Aspinall dan Crouch, (2003), *op.cit.*, h. 43-44.

operasi militer untuk memulihkan keamanan di Aceh.²³³ Keputusan untuk menggelar operasi pemulihan keamanan sebenarnya telah diantisipasi sekitar sebulan sebelum penyelenggaraan perundingan di Tokyo. Pemerintah Indonesia sudah menyiapkan rencana kontingensi bagi pelaksanaan Operasi Terpadu di Aceh yang terdiri atas operasi pemulihan keamanan dan ketertiban, operasi penegakan hukum, operasi pemantapan jalannya pemerintahan daerah, dan operasi kemanusiaan. Akan tetapi, ketidakkomprensifan rencana pelaksanaan operasi tersebut justru menjadikan operasi pemulihan keamanan sebagai komponen inti dalam pelaksanaan Operasi Terpadu.²³⁴

3.2.1. Kerangka Kerja Operasi Terpadu

Berdasarkan UU/Prp No. 23/1959 tentang Keadaan Bahaya, Presiden Megawati merupakan Penguasa Darurat Militer Pusat. Dalam melaksanakan penguasaan keadaan bahaya dengan tingkat keadaan darurat militer, Presiden dibantu oleh badan pelaksana harian di tingkat pusat yang beranggotakan sejumlah menteri/pejabat negara.²³⁵ Keppres No. 28/2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menetapkan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Militer Pusat.²³⁶ Selain itu, penguasaan keadaan darurat militer di daerah dilakukan oleh komandan militer tertinggi selaku Penguasa Darurat Militer Daerah yang daerah-hukumnya ditetapkan oleh Presiden.²³⁷ Karena itu, kewenangan pemerintahan daerah di Aceh beralih dari Gubernur Aceh, Abdullah Puteh kepada Panglima

²³³ Lihat "War Returns to Aceh as Peace Talks Fail", *The Jakarta Post* (19 Mei 2003); "Perundingan Tokyo Gagal", *Koran Tempo* (19 Mei 2003).

²³⁴ Lihat Sukma, (2004), op.cit., h. 22.

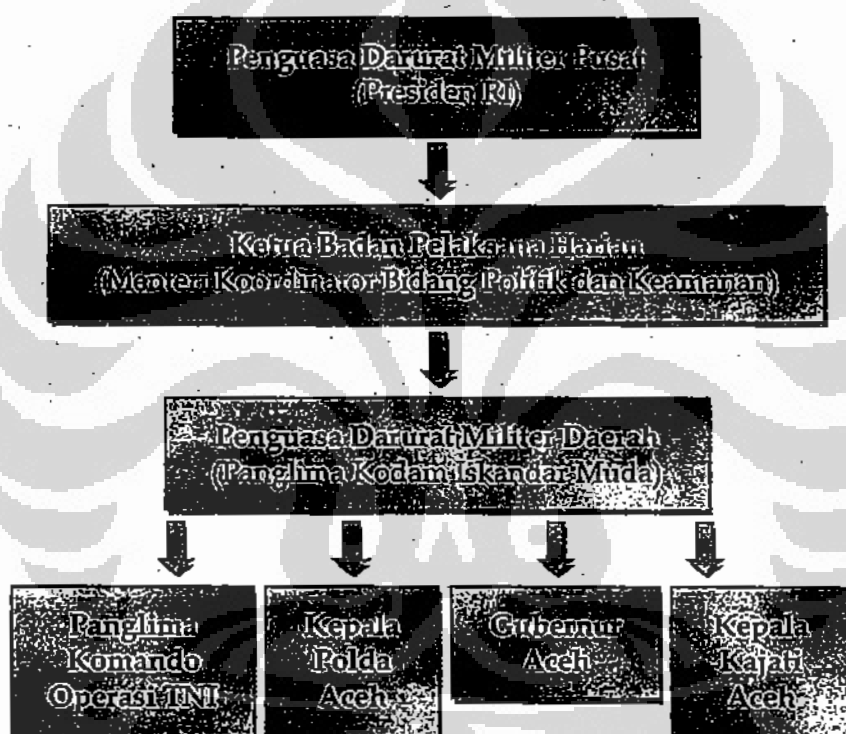
²³⁵ Lihat Pasal 3 UU/Prp No. 23/1959 tentang Keadaan Bahaya (selanjutnya disebut Undang-Undang Keadaan Bahaya).

²³⁶ Lihat Pasal 2 ayat (2) Keppres No. 28/2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (selanjutnya disebut Keppres Penetapan Keadaan Darurat Militer di Aceh).

²³⁷ Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Keadaan Bahaya, op.cit.

Kodam Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Endang Suwarya.²³⁸ Dalam struktur ini, Penguasa Darurat Militer Daerah dibantu oleh Gubernur, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Polda Aceh.²³⁹ Selain itu, Penguasa Darurat Militer Daerah juga membawahi Mayor Jenderal TNI Bambang Darmono yang bertindak sebagai Panglima Komando Operasi TNI di Aceh (lihat Gambar 3.2).

Gambar 3.2
Struktur Pemerintahan Darurat Militer di Aceh



Dengan struktur pemerintahan darurat militer di atas, pelaksanaan Operasi Terpadu di Aceh menjadi tanggung jawab Penguasa Darurat Militer Daerah.²⁴⁰ Melalui pelaksanaan Operasi Terpadu, tampak bahwa pemerintah Indonesia berupaya menyelesaikan masalah pemberontakan bersenjata di Aceh secara komprehensif dengan memadukan aspek militer dan non-militer. Menteri

²³⁸ Lihat Pasal 3 ayat (1) Keppres Penetapan Keadaan Darurat Militer di Aceh, op.cit.

²³⁹ Lihat Pasal 3 ayat (2), Ibid.

²⁴⁰ Lihat Sukma, (2004), op.cit., h. 22.

Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa tujuan politik yang ingin dicapai dari pelaksanaan Operasi Terpadu di Aceh adalah memulihkan keamanan, menormalkan kehidupan masyarakat, melindungi masyarakat, dan menghentikan pemberontakan bersenjata GAM.²⁴¹ Dengan kata lain, menurut Mayor Jenderal TNI Bambang Darmono, kerangka dasar Operasi Terpadu bertujuan untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat Aceh.²⁴² Dalam konteks itu, tiga elemen Operasi Terpadu, yaitu operasi penegakan hukum, operasi pemantapan pemerintahan daerah dan operasi kemanusiaan sebenarnya telah mulai dilaksanakan sejak akhir bulan April 2003. Sementara operasi pemulihan keamanan baru digelar setelah Presiden Megawati mengeluarkan Inpres No. 28/2003.

Mengacu pada tujuan politik tersebut, operasi pemulihan keamanan diarahkan untuk mencapai dua sasaran utama, yaitu: *pertama*, memburu, melumpuhkan, dan menumpas kekuatan GAM; dan *kedua*, melindungi masyarakat Aceh dengan menghindari jatuhnya korban warga sipil seminimal mungkin.²⁴³ Adapun operasi penegakan hukum diarahkan untuk menindak tegas berbagai tindakan kriminalitas dan kekerasan di Aceh. Operasi pemantapan pemerintahan daerah dilakukan untuk memperkuat kinerja pemerintahan daerah dan memulihkan fungsi pemerintahan yang tidak berjalan baik di semua tingkatan di provinsi Aceh. Sementara operasi kemanusiaan dimaksudkan untuk melindungi keselamatan penduduk, memberi bantuan kemanusiaan, membuka lapangan kerja, dan menjamin masyarakat dapat menjalani kehidupan sehari-hari secara layak.²⁴⁴ Dengan keempat elemen utama tersebut, pemerintah Indonesia berharap pelaksanaan Operasi Terpadu dapat memenangkan hati dan pikiran masyarakat Aceh (lihat Gambar 3.3).

²⁴¹ Lihat "Operasi di Aceh Nonkonvensional", *Media Indonesia* (24 April 2003).

²⁴² Lihat "Strategi TNI Tatkala Operasi Digelar", *Media Indonesia* (12 Mei 2003).

²⁴³ Lihat "Panglima TNI: Habisi GAM Sampai ke Akar-akarnya", *Republika* (20 Mei 2003); "GAM Diminta Menyerah", *Kompas* (20 Mei 2003).

²⁴⁴ Lihat "Pemerintah Tunggu GAM dan HDC", *Suara Pembaruan* (29 April 2003); "Dialog RI-GAM Masih Terbuka" *Republika* (29 April 2003); "Pemerintah Bentuk Tim Asistensi Untuk NAD", *Kompas* (20 Mei 2003).

Gambar 3.3
Kerangka Kerja Operasi Terpadu



Sehubungan dengan pelaksanaan operasi pemulihan keamanan, pemerintah Indonesia beserta jajaran Markas Besar TNI telah menyiapkan rencana operasi kontra-gerilya guna meminimalisir dampak kekerasan terhadap warga sipil di Aceh (lihat Gambar 3.4).²⁴⁵ Guna mencapai kedua sasaran utamanya, operasi militer akan dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap *pertama*, pasukan TNI akan menduduki wilayah-wilayah yang diketahui sebagai basis GAM dan memukul mundur mereka dari wilayah tersebut. Tahap *kedua*, operasi militer akan diarahkan untuk memisahkan anggota GAM dari penduduk sipil di Aceh. Sementara pada tahap *ketiga*, operasi militer akan difokuskan untuk menumpas seluruh kekuatan GAM yang tersisa.²⁴⁶ Adapun, metode operasi yang diterapkan dalam ketiga tahap tersebut. Pada tahap pertama, TNI akan melancarkan operasi tempur yang diikuti dengan operasi teritorial dan operasi

²⁴⁵ Lihat "Beda Dengan DOM Orde Baru", *Jawa Pos* (22 April 2003); "DOM adalah Masa Lalu TNI" *Kompas* (26 April 2003).

²⁴⁶ Lihat "Hasil Operasi Terpadu di Aceh Lampaui Target", *Media Indonesia* (29 Mei 2003).

intelijen. Untuk memisahkan gerilyawan GAM dari warga sipil, TNI akan mengandalkan metode operasi intelijen dan operasi teritorial. Setelah berhasil menggiring GAM keluar dari pemukiman penduduk sipil, TNI akan melancarkan operasi tempur untuk menghancurkan seluruh kekuatan bersenjata GAM.²⁴⁷ Melalui pelaksanaan seluruh tahap dan langkah tersebut, Panglima TNI memperkirakan kekuatan bersenjata GAM akan dapat ditumpas dalam waktu dua bulan oleh TNI.²⁴⁸

Gambar 3.4
Skema Operasi Pemulihan Keamanan di Aceh



²⁴⁷ Lihat "Operasi Aceh Tiga Tahap", *Republika* (26 April 2003).

²⁴⁸ Lihat "GAM Akan Lumpuh Dalam Dua Bulan", *Republika* (28 Mei 2003).

3.2.2. Keterbatasan Capaian Pelaksanaan Operasi Pemulihan Keamanan dan Operasi Penegakan Hukum

Terlepas dari upaya untuk mengintegrasikan aspek militer dengan aspek non-militer dalam kerangka Operasi Terpadu, namun pada tataran pelaksanaannya, operasi pemulihan keamanan lebih menonjol ketimbang operasi penegakan hukum, operasi pemantapan pemerintahan daerah dan operasi kemanusiaan (lihat Gambar 3.5).²⁴⁹ Dengan pemberlakuan status keadaan darurat militer, otoritas pemerintahan tertinggi di Aceh dipegang oleh seorang perwira tinggi TNI yang menjabat sebagai Penguasa Darurat Militer Daerah. Walaupun kendali operasi pemulihan keamanan di lapangan dipegang oleh seorang Panglima Komando Pelaksana Operasi, namun secara hirarkhis ia tetap bertanggung jawab kepada Penguasa Darurat Militer Daerah. Oleh karena itu, tampak jelas bahwa kendali pelaksanaan seluruh elemen Operasi Terpadu berada di tangan TNI.²⁵⁰

Gambar 3.5
Pelaksanaan Operasi Terpadu di Aceh



²⁴⁹ Lihat "Sinergi Operasi Terpadu Belum Tampak Jelas", *Suara Pembaruan* (26 Juni 2003).

²⁵⁰ Lihat Working Group on Security Sector Reform, "Rute Baru Penyelesaian Aceh", *Monograph*, No. 1 (Jakarta: ProPatria Institute, 2004), h. 5-6.

3.2.2. Keterbatasan Capaian Pelaksanaan Operasi Pemulihan Keamanan dan Operasi Penegakan Hukum

Terlepas dari upaya untuk mengintegrasikan aspek militer dengan aspek non-militer dalam kerangka Operasi Terpadu, namun pada tataran pelaksanaannya, operasi pemulihan keamanan lebih menonjol ketimbang operasi penegakan hukum, operasi pemantapan pemerintahan daerah dan operasi kemanusiaan (lihat Gambar 3.5).²⁴⁹ Dengan pemberlakuan status keadaan darurat militer, otoritas pemerintahan tertinggi di Aceh dipegang oleh seorang perwira tinggi TNI yang menjabat sebagai Penguasa Darurat Militer Daerah. Walaupun kendali operasi pemulihan keamanan di lapangan dipegang oleh seorang Panglima Komando Pelaksana Operasi, namun secara hirarkhis ia tetap bertanggung jawab kepada Penguasa Darurat Militer Daerah. Oleh karena itu, tampak jelas bahwa kendali pelaksanaan seluruh elemen Operasi Terpadu berada di tangan TNI.²⁵⁰

Gambar 3.5
Pelaksanaan Operasi Terpadu di Aceh



²⁴⁹ Lihat "Sinergi Operasi Terpadu Belum Tampak Jelas", *Suara Pembaruan* (26 Juni 2003).

²⁵⁰ Lihat Working Group on Security Sector Reform, "Rute Baru Penyelesaian Aceh", *Monograph*, No. 1 (Jakarta: ProPatria Institute, 2004), h. 5-6.

Pada akhirnya, tiga elemen operasi lainnya lebih diarahkan untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan ataupun mendukung penggelaran operasi pemulihan keamanan. Operasi kemanusiaan lebih dimaksudkan untuk meringankan penderitaan para pengungsi yang terpaksa meninggalkan desa mereka karena semakin tingginya intensitas bentrokan senjata antara aparat keamanan dan gerilyawan GAM. Adapun operasi penegakan hukum cenderung difokuskan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan hukum terhadap para tersangka anggota dan simpatisan GAM yang tertangkap, termasuk melacak anggota GAM yang melarikan diri keluar Aceh. Sementara itu, operasi pemantapan pemerintahan daerah pada kenyataannya lebih dititikberatkan pada pemulihan otoritas pemerintah di wilayah-wilayah yang semula dikuasai oleh GAM, terutama di tingkat kecamatan dan desa melalui penggantian pejabat sipil dengan prajurit ataupun purnawirawan TNI, terutama.²⁵¹

Pada praktiknya di lapangan, upaya memenangkan hati dan pikiran masyarakat Aceh akan sulit tercapai apabila hanya mengandalkan langkah-langkah simbolis dan seremonial untuk menumbuhkan loyalitas masyarakat Aceh kepada Republik Indonesia. Di sejumlah daerah di Aceh, pemerintah darurat militer, misalnya, menyelenggarakan upacara akbar pengambilan sumpah kesetiaan masyarakat Aceh kepada Republik Indonesia dan kewajiban pengibaran bendera Merah Putih.²⁵² Selain itu, seluruh warga masyarakat Aceh diwajibkan untuk memperoleh kartu identitas baru berupa Kartu Tanda Penduduk Merah Putih.²⁵³ Guna membersihkan jajaran pemerintahan daerah dari unsur-unsur GAM, pemerintah darurat militer melakukan penyelidikan latar belakang tes kesetiaan atau yang dikenal dengan "penelitian khusus" terhadap sekitar seluruh

²⁵¹ Lihat Sukma, (2003), op.cit., hlm. 25; Working Group on Security Sector Reform, (2004), op.cit., h. 6.

²⁵² Lihat "Mana Berani Kami Menolak Apel", *Koran Tempo* (18 Juni 2003); "12.000 Acehese Swear Loyalty to Legitimate Govt", *The Jakarta Post* (11 Juli 2003); "Warga Keturunan Cina Ikrar Setia ke NKRI", *Suara Pembaruan* (4 Agustus 2003); "Deklarasi GPMP Diikuti 10.000 Pemuda", *Suara Pembaruan* (20 Agustus 2003).

²⁵³ Lihat "KTP Ditandatangani Muspika", *Republika* (5 Juni 2003); "Pembuatan KTP Merah Putih Diperpanjang", *Suara Pembaruan* (1 Agustus 2003).

pegawai negeri sipil dan anggota DPRD di seluruh kabupaten/kota di Aceh.²⁵⁴ Sementara itu, pemerintah pusat menginstruksikan pendataan seluruh warga keturunan Aceh yang berada di luar provinsi Aceh, dan mengawasi mereka yang dicurigai terlibat dengan aktivitas GAM.²⁵⁵ Berbagai perlakuan yang disebutkan ini justru akan menimbulkan perasaan keterasingan di kalangan masyarakat Aceh yang pada gilirannya semakin memperbesar rasa ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah Indonesia.²⁵⁶ Lebih buruk lagi, aparat keamanan cenderung mengintimidasi warga masyarakat dengan tuduhan terlibat pemberontakan GAM, apabila mereka dianggap tidak bersikap kooperatif dalam melaksanakan operasi pemulihan keamanan.²⁵⁷

Penumpasan pemberontakan bersenjata GAM sebagai fokus utama Operasi Terpadu terlihat secara jelas dari hasil pelaksanaan operasi pemulihan keamanan di lapangan. Segera setelah diberlakukannya keadaan darurat militer, pasukan TNI melancarkan serangan terhadap berbagai wilayah yang diketahui sebagai basis kekuatan GAM, yaitu Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie, Lhokseumawe, Aceh Selatan dan Aceh Barat.²⁵⁸ Seusai rapat evaluasi pertama pelaksanaan Operasi Terpadu pada tanggal 29 Mei 2003, Panglima TNI menyampaikan bahwa pasukan TNI telah berhasil menduduki basis-basis kekuatan GAM dalam waktu kurang dari dua minggu, sehingga tahap pertama operasi pemulihan keamanan berjalan lebih cepat dari rencana awal.²⁵⁹ Sampai berakhirnya darurat militer I, pihak TNI mengklaim telah menewaskan 839 dan

²⁵⁴ Lihat "PDMD Bersihkan Separatis Berdasi", *Media Indonesia* (24 Juni 2003); "Pendataan Ulang PNS di NAD Ditambah Materi Kesetiaan pada NKRI", *Kompas* (27 Juni 2003); "Civil Servants in Aceh on Edge over Loyalty Test", *The Jakarta Post* (1 Juli 2003).

²⁵⁵ Lihat "Perwakilan Aceh di DKI Diawasi Ketat", *Koran Tempo* (27 Mei 2003); "Beberapa Daerah Waspada! Penyusupan Anggota GAM", *Media Indonesia* (28 Mei 2003); "Warga Aceh di Bandung Hanya Didata", *Kompas* (24 Juni 2003).

²⁵⁶ Lihat ICG, (2003b), op.cit., h. 1; Sukma, (2004), op.cit., h. 28.

²⁵⁷ Lihat Sukma, (2003), op.cit., h. 28; Edward Aspinall, "Anti-insurgency Logic in Aceh", *Inside Indonesia* (October-November 2003), h. 24.

²⁵⁸ Lihat "TNI Langsung Ofensif", *Indopos* (20 Mei 2003).

²⁵⁹ Lihat "Hasil Operasi Terpadu di Aceh Lampau Target", *Media Indonesia* (29 Mei 2003); "Govt Claims Early Success in Aceh Operation", *The Jakarta Post* (29 Mei 2003).

menawan 989 anggota GAM, dan 438 lainnya menyerahkan diri.²⁶⁰ Mayor Jenderal TNI Endang Suwarya selaku Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh meyakini bahwa pelaksanaan operasi pemulihan keamanan di Aceh berhasil melumpuhkan sekitar sekitar 45 persen kekuatan bersenjata GAM.²⁶¹ Terlepas dari capaian tersebut, aparat keamanan mengakui belum ada kemajuan yang signifikan berkenaan dengan penangkapan para pimpinan GAM. Oleh karena itu, operasi militer juga juga difokuskan pada upaya penangkapan dan pengejaran tokoh-tokoh GAM.²⁶²

Walaupun operasi pemulihan keamanan dapat melemahkan kekuatan bersenjata GAM, namun indikator keberhasilan pelaksanaan operasi pemulihan keamanan tampaknya cenderung bersifat kuantitatif yang didasarkan atas jumlah gerilyawan GAM yang tewas, tertangkap ataupun menyerahkan diri kepada aparat keamanan.²⁶³ Parameter kesuksesan operasi kontra-gerilya, dan Operasi Terpadu secara keseluruhan, semestinya dinilai secara kualitatif, misalnya, dengan mengukur seberapa efektif operasi tersebut dapat menurunkan dukungan masyarakat Aceh terhadap GAM dan menormalisasi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Aceh.²⁶⁴ Persoalan lainnya adalah data yang disampaikan oleh pemerintah darurat militer kerap kali berlainan dengan data yang dipublikasikan oleh TNI ataupun POLRI.²⁶⁵ Selain itu, jumlah kekuatan GAM yang diidentifikasi pada awal operasi dan yang berhasil dieliminasi, serta identitas korban yang tewas juga sulit atau bahkan tidak bisa diverifikasi akurasi dan validitasnya.²⁶⁶

²⁶⁰ Lihat "Jalan Berdarah di Serambi Mekah", *Majalah Tempo* (29 Desember 2003).

²⁶¹ Lihat "2.900 GAM Dilumpuhkan" *Media Indonesia* (3 Desember 2003).

²⁶² Lihat "TNI Belum Juga Tangkap Petinggi Militer GAM", *Kompas* (17 Juni 2003); "TNI Fokuskan Tokoh GAM", *Kompas* (23 Juli 2003); "Penangkapan Tokoh GAM Diintensifkan", *Media Indonesia* (18 Oktober 2003); "Pangkooops Yakin Bekuk Tokoh GSA", *Republika* (21 Oktober 2003).

²⁶³ Lihat International Crisis Group, "Aceh: How Not to Win Hearts and Minds", *Indonesia Briefing* (23 Juli 2003b), h. 6.

²⁶⁴ Lihat "Ukuran Sukses TNI Menyesatkan", *Kompas* (19 Juni 2003).

²⁶⁵ Lihat "Data Korban Aceh Simpang Siur", *Suara Pembaruan* (20 Juni 2003).

²⁶⁶ Lihat Working Group on Security Sector Reform, (2004), *op.cit.*, h. 6.

Ketidaksesuaian indikator keberhasilan, kesimpangsiuran dan ketidakakuratan data capaian pelaksanaan operasi pemulihan keamanan justru akan menyulitkan pemerintah Indonesia dalam menentukan strategi jalan keluar (*exit strategy*) dari pemberlakuan keadaan darurat militer di Aceh.²⁶⁷ Kendati Keppres No. 28/2003 mengatur bahwa keadaan darurat militer di Aceh hanya diberlakukan selama enam bulan, namun dapat diperpanjang sesuai dengan perkembangan pelaksanaan Operasi Terpadu. Menjelang berakhirnya masa pemberlakuan keadaan darurat militer I, Jenderal Endriartono Sutarto selaku Panglima TNI mengungkapkan optimismenya bahwa masalah pemberontakan bersenjata di Aceh akan dapat diselesaikan secara tuntas dengan perpanjangan status keadaan darurat militer.²⁶⁸ Padahal, seperti disebutkan di atas, kekuatan GAM diyakini dapat dilumpuhkan dalam waktu dua bulan operasi pemulihan keamanan.

Masalah lainnya adalah kerusakan sarana publik dan kerawanan jalur transportasi serta distribusi logistik di Aceh. Selama digelarnya operasi pemulihan keamanan, ratusan bangunan sekolah dan perumahan penduduk terbakar, sejumlah tower listrik dirobohkan, serta perusakan fasilitas kesehatan publik.²⁶⁹ Selain itu, sejumlah daerah di Aceh mengalami keterbatasan suplai kebutuhan pokok sebagai akibat lumpuhnya jalur transportasi serta suplai logistik.²⁷⁰ Pemerintah Indonesia tampaknya tidak memperkirakan secara teliti kemungkinan terjadinya kedua persoalan tersebut. Aparat keamanan pada kenyataannya lebih difokuskan untuk mengamankan fasilitas-fasilitas vital seperti ladang pengeboran minyak dan gas, stasiun televisi dan radio, instalasi telekomunikasi, serta gedung-

²⁶⁷ Lihat Sukma, (2003), op.cit., hlm. 24; ICG, (2003b), op.cit., h. 6.

²⁶⁸ Lihat "Presiden Perpanjang Darurat Militer", *Kompas* (4 November 2003).

²⁶⁹ Lihat "Pembakaran Sekolah Teror Terjadi", *Republika* (29 Mei 2003); "Fasilitas Kesehatan Rusak, Namun Pelayanan Terjamin", *Kompas* (29 Mei 2003); "TNI Blames GAM in Mass Home Burnings", *The Jakarta Post* (1 Juni 2003); "Pemadaman Listrik di NAD Meluas", *Kompas* (8 Juni 2003).

²⁷⁰ Lihat "Kabupaten Aceh Tengah Masih Terisolasi", *Kompas* (20 Maret 2003); "Bus Banda Aceh-Medan Hentikan Operasi", *Republika* (21 Mei 2003); "GAM Serang Jalur Logistik Bireueun-Pidie", *Media Indonesia* (3 Juni 2003); "Angkutan di Lhokseumawe Lumpuh", *Republika* (4 Juni 2003).

gedung pemerintahan.²⁷¹ Meskipun aparat keamanan kemudian mengawal distribusi logistik ke beberapa daerah di Aceh, namun upaya ini tidak sepenuhnya mampu mengatasi aksi penghadangan dan penyerangan terhadap bus angkutan umum dan truk pengangkut bahan kebutuhan pokok.²⁷²

Dalam kaitannya dengan sasaran pelaksanaan operasi pemulihan keamanan, ada setidaknya dua pertanyaan utama yang menjadi hirauan sejumlah kalangan. *Pertama*, bagaimana cara yang diterapkan untuk memisahkan masyarakat sipil dengan gerilyawan GAM agar jumlah korban warga sipil dapat diminimalisir. *Kedua*, bagaimana memastikan agar operasi pemulihan keamanan tidak menambah penderitaan masyarakat Aceh.²⁷³ Dalam konteks tersebut, Letnan Jenderal TNI Sudi Silalahi pernah mengungkapkan bahwa sebelum pasukan TNI melakukan serangan terhadap markas GAM, terlebih dahulu akan dilakukan evakuasi terhadap wanita dan anak-anak, serta pria yang tidak bersenjata dari pemukiman mereka.²⁷⁴ Yang terjadi di lapangan adalah ribuan warga Aceh terpaksa harus meninggalkan rumah mereka menuju ke tempat pengungsian agar serangan terhadap tempat-tempat yang dicurigai sebagai basis kekuatan GAM dapat dilancarkan.²⁷⁵ Meski dimaksudkan untuk menghindari jatuhnya korban warga sipil, namun langkah ini justru dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Aceh, khususnya karena ketidaklayakan kondisi tempat pengungsian dan pencurian harta benda selama mereka berada di pengungsian.²⁷⁶

²⁷¹ Lihat "Berlapis-lapis, Pengamanan Instalasi Vital di Aceh", *Kompas* (20 Mei 2003); "Schools not Priority for TNI Operation" *The Jakarta Post* (22 Mei 2003).

²⁷² Lihat "TNI Amankan Distribusi Sembako", *Media Indonesia* (27 Mei 2003); "Angkutan Darat Aceh Dikawal TNI Lagi", *Kompas* (22 Juni 2003); "Angkutan Umum Makin Takut Lewati Jalur Aceh-Medan", *Kompas* (12 Juli 2003); "Jalur Jalan Banda Aceh-Medan Masih Sepi dan Tidak Aman", *Kompas* (19 Juli 2003).

²⁷³ Lihat Sukma, (2003), op.cit., hlm. 24.

²⁷⁴ Lihat Ibid., h. 26.

²⁷⁵ Lihat "Acehnese Tell of Forced Evacuations", *The Jakarta Post* (19 Juni 2003); "Setelah Warga Dievakuasi, Basis-Basis GAM Dibom", *Kompas* (1 Juli 2003); "Acehnese People Bear the Brunt of Forced Evacuation", *The Jakarta Post* (8 Agustus 2003).

²⁷⁶ Lihat "Kondisi Pengungsi Memprihatinkan", *Suara Pembaruan* (18 Juni 2003); "ICRC: Kamp Pengungsi Tak Layak Huni", *Indopos* (30 Juni 2003); "Harta Benda Hilang Ketika Ditinggal Mengungsi" *Suara Pembaruan* (12 Agustus 2003).

Besarnya biaya sosial dan kemanusiaan yang harus ditanggung masyarakat Aceh merupakan dampak yang diakibatkan oleh pelaksanaan Operasi Terpadu yang lebih menitikberatkan pada operasi pemulihan keamanan guna mengeliminasi pemberontakan bersenjata GAM. Sistem pembagian daerah – hitam, abu-abu, dan putih – yang menjadi dasar bagi pelaksanaan Operasi Terpadu tidak diterapkan dengan baik, sehingga operasi militer digelar tidak hanya di daerah hitam, tapi juga melebar ke daerah-daerah lainnya.²⁷⁷ Penggelaran operasi militer secara besar-besaran cenderung sarat dengan berbagai pelanggaran hukum humaniter, seperti eksekusi mati di luar proses peradilan, penghilangan paksa, penganiayaan, pengungsian paksa dan perusakan berbagai sarana publik.²⁷⁸ Walaupun vonis hukuman penjara dan pemecatan, serta hukuman disipliner diberikan kepada aparat keamanan yang terbukti melakukan pelanggaran,²⁷⁹ namun upaya penegakan hukum selama pemberlakuan keadaan darurat militer lebih diutamakan untuk melakukan proses hukum terhadap para tahanan anggota GAM.²⁸⁰ Bahkan, pelaksanaan operasi penegakan hukum di Aceh mengalami beberapa kendala, terutama terkait dengan kurangnya jumlah hakim dan jaksa penuntut, serta terbatasnya rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan untuk menampung para narapidana.²⁸¹

Bagi masyarakat Aceh, kinerja birokrasi pemerintahan daerah merupakan tolok ukur untuk menilai keseriusan pemerintah pusat dalam menyelesaikan

²⁷⁷ Lihat Working Group on Security Sector Reform, (2004), op.cit., h. 7.

²⁷⁸ Lihat "Rights Body Demands End to Aceh Operation", *The Jakarta Post* (1 November 2003). Terkait pelanggaran tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat bahwa selama pelaksanaan darurat militer I di Aceh, korban sipil yang tewas berjumlah sebanyak 319 orang, 117 orang terluka, 108 orang hilang, ribuan orang mengungsi dan sekitar 600 gedung sekolah dan rumah terbakar. Lihat "Tim Ad Hoc Komnas HAM", *Kompas* (6 November 2003); "Komnas HAM: Batalkan DM Aceh", *Republika* (6 November 2003).

²⁷⁹ Lihat "Aceh Court to Try 7 Soldiers", *The Jakarta Post* (3 Juni 2003); "Anggota TNI Yang Memperkosakan Divonis 2,5 Tahun", *Suara Pembaruan* (21 Juli 2003).

²⁸⁰ Lihat "Polda NAD Tetapkan 43 Tersangka Makar", *Republika* (28 Mei 2003); "Kepolisian NAD Serahkan 20 Berkas GAM ke Kejaksaan", *Koran Tempo* (24 Juni 2003); "Sudah 390 Anggota GAM Yang Dijatuhi Hukuman", *Kompas* (7 November 2003).

²⁸¹ Lihat "Penegakan Hukum di NAD Belum Optimal", *Republika* (21 Juli 2003); "Jaksa Agung: Hanya Satu Hakim di Tiap Kabupaten di Aceh", *Koran Tempo* (22 Juli 2003); "Anggota GAM Penuhi Ruang Tahanan" *Media Indonesia* (30 Agustus 2003); "Hakim Kurang, Kasus Menumpuk", *Kompas* (9 September 2003).

segenap persolan di daerahnya. Akan tetapi, pada tahun 2003, sejumlah tokoh masyarakat dan berbagai lembaga swadaya masyarakat di Aceh melaporkan adanya dugaan penggelapan dana proyek pembangunan daerah sebesar Rp. 5,5 triliun yang dilakukan oleh beberapa oknum pejabat pemerintahan.²⁸² Bahkan, Penguasa Darurat Militer Daerah menerima laporan adanya indikasi penyimpangan dalam penyaluran dana bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi di Aceh.²⁸³ Walaupun pemerintah Indonesia menegaskan akan mengusut tuntas dan mengadili para pelaku korupsi di Aceh, namun baik kepolisian maupun kejaksaan di Aceh pada kenyataannya tidak mampu berbuat banyak dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan alasan tidak adanya bukti yang memadai.²⁸⁴ Oleh sebab itu, bisa dimengerti jika masyarakat Aceh bersikap pesimis terhadap komitmen pemerintah Indonesia dalam membangun dan mensejahterahkan daerahnya.

Mengacu pada pembahasan dalam sub-bagian ini, dapat dikatakan bahwa pemberlakuan keadaan darurat militer I dan pelaksanaan Operasi Terpadu tidak sepenuhnya mampu mengeliminasi pemberontakan bersenjata GAM di Aceh. Terlepas dari berbagai capaian pelaksanaan operasi pemulihan keamanan, pemerintah Indonesia tidak secara jelas menjabarkan strategi pelaksanaan seluruh elemen Operasi Terpadu. Ketimbang menggunakan tolok ukur kualitatif yang sesuai dengan tujuan politik Operasi Terpadu, penilaian keberhasilan pelaksanaan operasi tersebut lebih didasarkan pada tolok ukur kuantitatif berupa jumlah anggota GAM yang berhasil dilumpuhkan. Pemerintah Indonesia juga tidak menyiapkan upaya penanggulangan kerusakan fasilitas-fasilitas umum, blokade jalur transportasi dan keterbatasan suplai logistik di Aceh. Selain itu, upaya untuk menumbuhkan loyalitas terhadap pemerintah Indonesia pada kenyataannya cenderung menitikberatkan pada langkah-langkah yang bersifat simbolik daripada

²⁸² Lihat Timothy Mapes, "Sold Short", *Far Eastern Economic Review* (9 Oktober 2003).

²⁸³ Lihat "Operasi di Aceh Dinodai Korupsi Dana Pengungsi", *Media Indonesia* (23 September 2003).

²⁸⁴ Lihat "Govt to Take Action Against Corruptors in Aceh", *The Jakarta Post* (3 Oktober 2003); "Pelaku Korupsi Dana Kemanusiaan Aceh Akan Ditindak", *Republika* (3 Oktober 2003).

substantif melalui penegakan hukum terhadap tindak kekerasan aparat keamanan dan kasus korupsi yang terjadi selama pelaksanaan Operasi Terpadu. Seluruh persoalan tersebut justru bertentangan dengan tujuan politik dilaksanakannya Operasi Terpadu, yaitu memenangkan hati dan pikiran masyarakat Aceh.

3.3. Kesenjangan Dalam Pelaksanaan Pendekatan (De)Sekuritisasi di Aceh

Mengacu pada pembahasan kedua sub-bab di atas, dapat disimpulkan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan pendekatan desekuritisasi dan sekuritisasi yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam mengelola keamanan nasionalnya di Aceh. Hal ini terlihat dari kesenjangan antara “tindakan berwacana” (*discursive act*) dengan “tindakan nyata” (*non-discursive act*) yang dinyatakan dan dilakukan oleh pemerintah Indonesia, baik pada masa implementasi kesepakatan COHA dan pemberlakuan keadaan darurat militer I di Aceh (lihat Tabel 3.2). Tindakan berwacana tercermin dari pernyataan terhadap keberadaan GAM – apakah sebagai ancaman atau bukan – sementara tindakan nyata diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan langkah-langkah yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam rangka menyelesaikan konflik bersenjata di Aceh.

Pada masa implementasi COHA, pendekatan desekuritisasi semestinya dilaksanakan dengan mengacu pada kerangka kerja penghentian permusuhan yang meliputi tahap pembangunan kepercayaan dan tahap demiliterisasi. Langkah-langkah yang harus dilaksanakan pada tahap yang pertama adalah membuat jarak antara pasukan TNI dan personil Brimob POLRI dengan gerilyawan GAM, menghindari pernyataan provokatif, larangan pelaksanaan operasi dan pergerakan pasukan. Pada tahap yang kedua, pemerintah Indonesia diharuskan melakukan relokasi pasukan TNI dan reformulasi tugas pasukan Brimob POLRI. Akan tetapi, pada praktiknya di lapangan, pendekatan desekuritisasi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Tabel 3.2
Kesenjangan Dalam Pelaksanaan Pendekatan (De)Sekuritisasi di Aceh

	Pendekatan Desekuritisasi (Implementasi COHA)	Pendekatan Sekuritisasi (Pemberlakuan Keadaan Darurat Militer I)
Tindakan Berwacana (<i>Discursive, Speech Act</i>)	"menghentikan permusuhan antara pemerintah Indonesia dan GAM"	memulihkan keamanan, menormalkan kehidupan masyarakat, melindungi masyarakat, dan menghentikan pemberontakan bersenjata GAM
Tindakan Nyata (<i>Non-discursive Act</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penempatan pasukan TNI di pos-pos keamanan ▪ Penambahan jumlah pos keamanan ▪ Dipersenjatainya kembali pasukan Brimob POLRI ▪ Aktivasi patroli keamanan ▪ Kelemahan upaya pemolisian dan penegakan hukum terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketidakjelasan sasaran dan tahapan pelaksanaan keempat elemen Operasi Terpadu. ▪ Penggelaran operasi pemulihan keamanan tanpa memperhatikan tingkat kerawanan suatu daerah. ▪ Ketidaksesuaian indikator keberhasilan dan ketidakakuratan data hasil capaian operasi pemulihan keamanan. ▪ Ketidaksiapan rencana antisipasi perusakan sarana publik dan penanggulangan blokade jalur transportasi dan suplai logistik ▪ Operasi penegakan hukum terbatas pada proses hukum narapidana GAM. ▪ Ketidaksiapan sumber daya dan infrastruktur penegakan hukum.

Terlepas dari perbedaan penafsiran tentang implementasi tahap demiliterisasi, pemerintah Indonesia pada kenyataannya enggan melakukan relokasi pasukan TNI dari posisi ofensif ke posisi defensif. Hal ini ditunjukkan

dengan tidak ditariknya pasukan TNI dari pos-pos keamanan ke markas atau barak militer, penambahan jumlah pos keamanan, dan tidak ditariknya pasukan non-organik TNI dari Aceh. Selain itu, aparat kepolisian tampaknya tidak berbuat banyak untuk menanggulangi berbagai kasus kriminalitas dan mengusut kasus-kasus pelanggaran hukum lainnya yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Personil Brimob yang dialih tugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas pemolisian umum ternyata tidak cukup mampu menopang upaya penegakan hukum di Aceh. Bahkan, di tengah kemacetan proses perundingan pembahasan teknis implementasi tahap demiliterisasi, personil Brimob yang semula hanya dilengkapi dengan senjata organik kepolisian kemudian dipersenjatai kembali dengan persenjataan tempurnya dan melakukan patroli keamanan untuk menindak gerilyawan GAM yang masih membawa senjata api. Persoalan ini bertambah buruk dengan berbagai kecaman dari para perwira di jajaran TNI dan POLRI terhadap sikap pimpinan GAM yang dianggap memanipulasi pelaksanaan kesepakatan COHA.

Kegagalan implementasi kesepakatan COHA kemudian mendorong pemerintah Indonesia menempuh pendekatan sekuritisasi untuk menumpas pemberontakan bersenjata GAM. Pendekatan ini tercermin dari pemberlakuan keadaan darurat militer dan pelaksanaan operasi pemulihan keamanan sebagai bagian dari Operasi Terpadu di Aceh. Adapun tujuan politik yang ingin dicapai dari pelaksanaan Operasi Terpadu adalah memulihkan keamanan, menormalkan kehidupan masyarakat, melindungi masyarakat, dan menghentikan pemberontakan bersenjata GAM. Oleh karena itu, operasi pemulihan keamanan digelar untuk mencapai dua sasaran utama, yaitu memburu, melumpuhkan, dan menumpas kekuatan GAM; dan melindungi masyarakat Aceh dengan menghindari jatuhnya korban warga sipil seminimal mungkin.

Namun demikian, dalam melaksanakan pendekatan sekuritisasi ini, pemerintah Indonesia tidak secara jelas menjabarkan tujuan pemberlakuan keadaan darurat militer dan strategi pelaksanaan Operasi Terpadu. Pada praktiknya di lapangan, operasi penegakan hukum, operasi pemantapan

pemerintahan daerah dan operasi kemanusiaan cenderung diarahkan untuk menanggulangi dampak dari pelaksanaan operasi pemulihan keamanan. Meski pemerintah Indonesia telah memetakan tingkat kerawanan masing-masing daerah di Aceh, namun sistem pembagian daerah tersebut tidak diterapkan dengan baik sehingga operasi pemulihan keamanan digelar secara besar-besaran di hampir seluruh daerah. Ketimbang menggunakan tolok ukur kualitatif yang lebih mencerminkan perbaikan dan normalisasi situasi keamanan di Aceh, penilaian keberhasilan pelaksanaan operasi kontra-gerilya yang dilakukan TNI cenderung didasarkan pada tolok ukur kuantitatif berupa jumlah anggota GAM yang berhasil dilumpuhkan. Pemerintah Indonesia juga tidak menyiapkan rencana yang sistematis untuk melindungi fasilitas-fasilitas umum dan mengatasi blokade jalur transportasi serta keterbatasan suplai logistik di Aceh. Selain hanya difokuskan untuk melakukan proses hukum terhadap para anggota GAM yang ditahan, pelaksanaan operasi penegakan hukum juga mengalami kendala berupa keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan untuk mengusut dan mengadili berbagai kasus kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Aceh. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan pemberlakuan keadaan darurat militer I dan pelaksanaan operasi pemulihan keamanan tidak sepenuhnya mampu mengeliminasi pemberontakan bersenjata GAM di Aceh.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1. Temuan dan Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa terdapat “defisit keamanan” (*security deficit*) dalam pengelolaan keamanan nasional di negara berkembang, khususnya Indonesia. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah: “mengapa terdapat defisit keamanan dalam penanganan konflik bersenjata di Aceh?” Guna menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan konsep “kesenjangan dalam praktik (de)sekuritisasi” (*securitization gap*) untuk menjelaskan bahwa persoalan defisit keamanan dapat diakibatkan oleh kesenjangan antara “pewacanaan ancaman” (*discursive, speech act*) – pernyataan tentang ada atau tidaknya suatu ancaman – dengan “tindakan nyata” (*non-discursive act*) – berupa kebijakan dan langkah-langkah operasional untuk mengatasi ancaman tersebut. Penelitian ini juga menggunakan dua metode, yaitu analisa database dan studi kasus instrumental untuk membangun data kuantitatif dan menjelaskan data kualitatif tentang adanya kesenjangan dalam pelaksanaan pendekatan (de)sekuritisasi di Aceh pada masa implementasi Cessation of Hostilities Agreement (COHA) dan pemberlakuan keadaan darurat militer I.

Mengacu pada konsep utama dan metodologi tersebut, penelitian ini dapat membuktikan dua hipotesis yang diajukan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian. *Pertama*, membuktikan bahwa terdapat defisit keamanan dalam penanganan konflik bersenjata di Aceh pada masa implementasi COHA dan pemberlakuan keadaan darurat militer I. Hipotesis ini ditunjukkan oleh proporsi jumlah kasus masalah keamanan yang lebih besar daripada jumlah penugasan aparat keamanan untuk mengatasi masalah tersebut. *Kedua*, menunjukkan adanya

kesenjangan dalam pelaksanaan pendekatan (de)sekuritisasi pada kedua periode waktu tersebut. Hipotesis kedua ini dibuktikan dengan adanya kesenjangan antara pernyataan terhadap keberadaan GAM sebagai ancaman atau bukan dengan kebijakan yang ditempuh pemerintah Indonesia dan langkah-langkah operasional yang diterapkan aparat keamanan.

Sehubungan dengan hipotesis pertama, sebagaimana telah dibahas pada Bab II, terdapat sepuluh daerah di Aceh yang mengalami defisit keamanan pada masa implementasi COHA. Proporsi masalah keamanan terhadap upaya penanganan ancaman di masing-masing kabupaten/kota tersebut amat beragam, yaitu Aceh Barat (78 persen), Aceh Besar (100 persen), Aceh Jaya (100 persen), Aceh Selatan (92 persen), Aceh Tengah (57 persen), Aceh Timur (86 persen), Aceh Utara (83 persen), Bireuen (92 persen), Kota Lhokseumawe (86 persen) dan Pidie (63 persen). Dari presentase tersebut, dapat diketahui bahwa upaya penanganan ancaman tidak ditemukan di Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Jaya; padahal, kedua wilayah tersebut secara berturut-turut memiliki empat dan satu kasus masalah keamanan. Sebaliknya, hanya dua kabupaten/kota di Aceh yang tidak mengalami defisit keamanan, yaitu Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Banda Aceh. Meskipun tidak ditemukan kasus masalah keamanan di Kabupaten Aceh Singkil, namun terdapat dua penugasan aparat keamanan untuk menangani masalah keamanan di wilayah tersebut.

Sementara pada masa pemberlakuan keadaan darurat militer I, dari tujuh belas kabupaten/kota di Aceh, defisit keamanan terjadi di sepuluh daerah. Adapun proporsi masalah keamanan di masing-masing kabupaten/kota tersebut adalah sebagai berikut: Aceh Singkil (100 persen), Aceh Tamiang (100 persen), Aceh Tengah (63 persen), Aceh Timur (60 persen), Aceh Utara (51 persen), Bireuen (55 persen), Gayo Lues (100 persen), Kota Lhokseumawe (73 persen), Nagan Raya (100 persen), dan Pidie (79 persen). Meskipun terdapat secara berturut-turut terdapat satu kasus masalah keamanan di Kabupaten Aceh Singkil, lima kasus di Aceh Tamiang, dan dua kasus di Nagan Raya, namun upaya penanganan ancaman tidak ditemukan di ketiga daerah tersebut. Sementara di Kabupaten Aceh Barat,

masalah keamanan dan upaya penanganan ancaman memiliki proporsi yang berimbang, yaitu masing-masing 50 persen. Sebaliknya, kabupaten/kota di Aceh yang tidak mengalami defisit keamanan berjumlah sebanyak enam daerah. Proporsi upaya penanganan ancaman di keenam kabupaten/kota tersebut antara lain: Aceh Besar (61 persen), Aceh Jaya (60 persen), Aceh Selatan (62 persen), Aceh Tenggara (67 persen), Banda Aceh (84 persen) dan Kota Sabang (67 persen).

Dengan demikian, apabila dikomparasikan secara keseluruhan, proporsi masalah keamanan pada masa implementasi COHA dan pemberlakuan keadaan darurat militer I secara berturut-turut adalah 65 persen (73 kasus) dan 50 persen (233 kasus). Sebaliknya, proporsi upaya penanganan ancaman pada kedua periode waktu tersebut secara berturut-turut adalah 35 persen (39 penugasan) dan 50 persen (230 penugasan). Meskipun upaya penanganan ancaman pada masa pemberlakuan keadaan darurat militer I memiliki proporsi yang berimbang, namun bila dilihat perbandingan jumlah numeriknya, total kasus masalah keamanan lebih besar daripada total penugasan aparat keamanan untuk menanggapi ancaman. Oleh karena itu, dapat disimpulkan di sini bahwa terdapat persoalan defisit keamanan dalam pengelolaan keamanan nasional di Aceh, baik pada masa implementasi COHA maupun pemberlakuan keadaan darurat Militer I.

Berkenaan dengan hipotesis kedua, seperti telah dibahas pada Bab 3, pendekatan desekuritisasi pada masa implementasi COHA semestinya dilaksanakan dengan mengacu pada kerangka kerja penghentian permusuhan yang meliputi tahap pembangunan kepercayaan dan tahap demiliterisasi. Langkah-langkah yang harus dilaksanakan pada tahap yang pertama adalah membuat jarak antara pasukan TNI dan personil Brimob POLRI dengan gerilyawan GAM, menghindari pernyataan provokatif, larangan pelaksanaan operasi dan pergerakan pasukan. Pada tahap yang kedua, pemerintah Indonesia diharuskan melakukan relokasi pasukan TNI dan reformulasi tugas pasukan Brimob POLRI.

Namun demikian, pada praktiknya di lapangan, pendekatan desekuritisasi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Terlepas dari keengganan GAM untuk melucuti persenjataannya, pemerintah Indonesia tampaknya juga enggan melakukan relokasi pasukan TNI dari posisi ofensif ke posisi defensif. Hal ini ditunjukkan dengan tidak ditariknya pasukan TNI dari pos-pos keamanan ke markas atau barak militer, penambahan jumlah pos keamanan, dan tidak ditariknya pasukan non-organik TNI dari Aceh. Selain itu, aparat kepolisian tampaknya tidak berbuat banyak untuk menanggulangi berbagai kasus kriminalitas dan mengusut kasus-kasus pelanggaran hukum lainnya yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Personil Brimob yang dialih tugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas pemolisian umum ternyata tidak cukup mampu menopang upaya penegakan hukum di Aceh. Bahkan, di tengah kemacetan proses perundingan pembahasan teknis implementasi tahap demiliterisasi, personil Brimob yang semula hanya dilengkapi dengan senjata organik kepolisian kemudian dipersenjatai kembali dengan persenjataan tempurnya dan melakukan patroli keamanan untuk menindak gerilyawan GAM yang masih membawa senjata api. Persoalan ini bertambah buruk dengan berbagai kecaman dari para perwira di jajaran TNI dan POLRI terhadap sikap pimpinan GAM yang dianggap memanipulasi pelaksanaan kesepakatan COHA.

Kegagalan implementasi kesepakatan COHA kemudian mendorong pemerintah Indonesia menempuh pendekatan sekuritisasi untuk menumpas pemberontakan bersenjata GAM. Pendekatan ini tercermin dari pemberlakuan keadaan darurat militer dan pelaksanaan operasi pemulihan keamanan sebagai bagian dari Operasi Terpadu di Aceh. Adapun tujuan politik yang ingin dicapai dari pelaksanaan Operasi Terpadu adalah memulihkan keamanan, menormalkan kehidupan masyarakat, melindungi masyarakat, dan menghentikan pemberontakan bersenjata GAM. Oleh karena itu, operasi pemulihan keamanan digelar untuk mencapai dua sasaran utama, yaitu memburu, melumpuhkan, dan menumpas kekuatan GAM; dan melindungi masyarakat Aceh dengan menghindari jatuhnya korban warga sipil seminimal mungkin.

Namun demikian, dalam melaksanakan pendekatan sekuritisasi ini, pemerintah Indonesia tidak secara jelas menjabarkan tujuan pemberlakuan keadaan darurat militer dan strategi pelaksanaan Operasi Terpadu. Pada praktiknya di lapangan, operasi penegakan hukum, operasi pemantapan pemerintahan daerah dan operasi kemanusiaan cenderung diarahkan untuk menanggulangi dampak dari pelaksanaan operasi pemulihan keamanan. Meski pemerintah Indonesia telah memetakan tingkat kerawanan masing-masing daerah di Aceh, namun sistem pembagian daerah tersebut tidak diterapkan dengan baik sehingga operasi pemulihan keamanan digelar secara besar-besaran di hampir seluruh daerah. Ketimbang menggunakan tolok ukur kualitatif yang lebih mencerminkan perbaikan dan normalisasi situasi keamanan di Aceh, penilaian keberhasilan pelaksanaan operasi kontra-gerilya yang dilakukan TNI cenderung didasarkan pada tolok ukur kuantitatif berupa jumlah anggota GAM yang berhasil dilumpuhkan. Pemerintah Indonesia juga tidak menyiapkan rencana yang sistematis untuk melindungi fasilitas-fasilitas umum dan mengatasi blokade jalur transportasi serta keterbatasan suplai logistik di Aceh. Selain hanya difokuskan untuk melakukan proses hukum terhadap para anggota GAM yang ditahan, pelaksanaan operasi penegakan hukum juga mengalami kendala berupa keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan untuk mengusut dan mengadili berbagai kasus kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Aceh. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan pemberlakuan keadaan darurat militer I dan pelaksanaan operasi pemulihan keamanan tidak sepenuhnya mampu mengeliminasi pemberontakan bersenjata GAM di Aceh.

4.2. Implikasi Teoritis

Mengacu pada *literatur review* dalam penelitian ini, harus diakui bahwa konseptualisasi “keamanan secara komprehensif” (*comprehensive security*) telah memberikan kontribusi penting bagi perkembangan diskursus dalam kajian

keamanan. Akan tetapi, bagi beberapa teoritis, konseptualisasi tersebut terlalu elastis untuk dapat merumuskan ukuran yang layak guna menentukan kapan suatu masalah dapat dianggap sebagai ancaman. Para teoritis kajian keamanan dari Copenhagen School kemudian membangun kerangka konseptual “sekuritisasi” (*securitization*) untuk memahami siapa yang melakukan sekuritisasi, pada isu apa, untuk siapa, mengapa, apa capaiannya, dan dalam kondisi apa sekuritisasi dilakukan. Para teoritis ini menekankan pentingnya pembentukan “pemahaman subyektif bersama” diantara para pemangku kepentingan tentang adanya ancaman nyata sebagai justifikasi bagi penggunaan “langkah-langkah luar biasa” untuk mengatasi ancaman tersebut.

Kedua konseptualisasi tersebut sangatlah dominan dalam berbagai kajian keamanan di negara-negara Barat. Namun, tidak seperti negara-negara Barat yang lebih maju, negara-negara berkembang harus menghadapi ancaman keamanan yang lebih majemuk. Negara-negara berkembang seperti Indonesia masih dihadapkan pada dua tantangan sekaligus, yaitu memantapkan bangunan kenegaraannya (*state-building*) dan membina kehidupan berbangsanya (*nation-building*). Dalam konteks itu, problematika keamanan yang mereka hadapi adalah apa yang disebut Kusnanto Anggoro sebagai “defisit keamanan” (*security deficit*), yaitu selisih antara daya tembus ancaman dengan kemampuan negara untuk mengatasi ancaman itu. Oleh karena itu, beberapa teoritis seperti Ralph Emmers menekankan bahwa ketika suatu isu disekuritisasi menjadi isu keamanan, maka “pernyataan ancaman” (*discursive act*) tersebut harus disertai dengan “tindakan nyata” (*non-discursive act*) berupa implementasi kebijakan dalam langkah-langkah operasional untuk mengatasi ancaman tersebut. Disparitas antara kedua modalitas itu disebut Rizal Sukma sebagai “kesenjangan praktik sekuritisasi” (*securitization act*).

Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa defisit keamanan dalam penanganan konflik bersenjata di Aceh diakibatkan oleh adanya kesenjangan antara pernyataan terhadap keberadaan GAM sebagai ancaman atau bukan, dengan kebijakan yang ditempuh pemerintah Indonesia dan langkah-langkah

operasional yang diterapkan aparat keamanan. Pelaksanaan pendekatan (de)sekuritisasi di Aceh oleh karenanya menjadi tidak bermakna atau tidak berguna apabila tindakan nyata yang dilakukan pemerintah Indonesia tidak sesuai dengan pernyataan tentang apa yang dianggap atau bukan dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Dengan demikian, masalah dalam pengelolaan keamanan nasional di negara-negara berkembang dapat terjadi bukan saja disebabkan oleh adanya ancaman nyata, tetapi juga karena ketidakberdayaan pemerintah negara tersebut dalam menunaikan fungsinya di bidang keamanan nasional.

4.3. Implikasi Kebijakan

Berangkat dari berbagai temuan dalam penelitian ini, ada dua konsekuensi utama yang terkait dengan pengelolaan keamanan nasional di Indonesia. *Pertama*, kegagalan pendekatan desekuritisasi dalam penyelesaian konflik bersenjata di Aceh berdasarkan kerangka kerja COHA – khususnya terkait dengan relokasi pasukan TNI dan pelaksanaan tugas-tugas pemolisian umum oleh POLRI untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat – menunjukkan “ketidakmantapan” pemerintah Indonesia dalam melakukan normalisasi penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan di bidang keamanan nasional. *Kedua*, keterbatasan capaian implementasi pendekatan sekuritisasi melalui pemberlakuan keadaan darurat militer I dan pelaksanaan operasi militer, mencerminkan “ketidakmatangan” perencanaan kontingensi yang dipersiapkan pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi berbagai potensi eskalasi ancaman dan melakukan tindakan tanggap segera yang tepat guna memulihkan kondisi keamanan.

Sebagai negara yang tengah berupaya memantapkan bangunan kenegaraan dan membina kehidupan berbangsa, pemerintah Indonesia harus memberi perhatian khusus pada pembangunan sistem (*system-building*) di bidang

keamanan nasional. Sebagai sebuah sistem, keamanan nasional suatu negara dikelola dengan memperkirakan kecenderungan ancaman (*predictability*) dan merumuskan jawaban terhadap ancaman tersebut berdasarkan keteraturan kerja elemen-elemen sistem (*regularity*) sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya. Oleh karena itu, pada tataran strategis, sistem keamanan nasional terlihat dari kerangka regulasi – baik berupa undang-undang maupun aturan-aturan lainnya – dan institusionalisasi hubungan antara para pemangku kebijakan (*decision maker*) dengan instansi pelaksana (*implementing agency*). Sementara pada tataran instansional, sistem keamanan nasional meniscayakan diferensiasi struktur dan spesialisasi fungsi, serta kompetensi teknis instansi-instansi pelaksana yang dalam melaksanakan tugasnya dapat menggunakan instrumen koersif, khususnya kepolisian dan militer, serta dinas-dinas intelijen. Dengan demikian, pada situasi normal, pengelolaan keamanan nasional meniscayakan keterpaduan dan bekerjanya dengan baik seluruh unsur penyelenggara fungsi-fungsi pemerintahan melalui pelaksanaan langkah-langkah fungsional (*functional measures*).

Namun demikian, perlu juga digarisbawahi bahwa pengelolaan keamanan nasional juga harus mampu menjawab segenap kemungkinan. Karena skala dan intensitasnya, suatu ancaman dapat terjadi di luar perkiraan sebelumnya atau tanpa diketahui secara pasti kapan terjadinya. Selain itu, suatu instansi pelaksana fungsi keamanan dapat mengalami keterbatasan sumber daya untuk menunaikan tugas pokoknya (*capacity-commitment gap*). Kebijakan untuk menghadapi situasi tersebut kerap kali bertumpu pada skenario terburuk (*worst case scenario*) yang dapat membawa implikasi berupa keniscayaan tindakan tanggap darurat dan penggunaan instrumen koersif. Berkenaan dengan itu, pemerintah Indonesia harus melengkapi sistem keamanan nasional dengan perencanaan kontingensi (*contingency planning*) untuk mengantisipasi berbagai situasi mendesak yang memerlukan tanggapan segera. Penanganan kontingensi pada hakikatnya merupakan langkah penyesuaian terhadap kerangka kerja sistemik pengelolaan keamanan nasional yang berupa mekanisme dan prosedur *ad hoc*. Oleh karena itu, kebijakan kontingensi tidak lebih dari sekedar langkah-

langkah luar biasa (*extraordinary measures*) yang bersifat sementara dan dilakukan dalam lingkup terbatas untuk menjawab masalah-masalah keamanan yang muncul di luar perkiraan dan tidak bisa dijawab dengan langkah-langkah fungsional pada situasi normal.

4.4. Rekomendasi

Mengacu pada keniscayaan pembangunan sistem dan sekaligus perencanaan kontingensi dalam pengelolaan keamanan nasional, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah yang diperlukan dalam upaya penataan kerangka kerja pemerintah Indonesia di bidang keamanan nasional. *Pertama*, sebagai prasyarat mutlak bagi pembangunan sistem keamanan nasional, penataan kerangka regulasi di bidang keamanan nasional tidak hanya ditempuh melalui pembuatan perundang-undangan baru, tetapi juga sinkronisasi atas berbagai undang-undang yang sudah ada dan penataan ulang peran, fungsi, tugas pokok serta kewenangan seluruh institusi dan instansi pelaksana di bidang keamanan nasional.

Kedua, perlu ada rincian tentang (a) komprehensi substansi kebijakan terkait penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan di bidang keamanan nasional; (b) keterpaduan langkah-langkah yang dilakukan instansi-instansi pelaksana, mulai dari deteksi dini, pencegahan, penindakan hingga pemulihan; dan (c) ruang untuk menetapkan apakah penyelesaian masalah keamanan nasional mengedepankan pendekatan fungsional berdasarkan kerangka kerja sistemik pada ranah normal ataukah bertumpu pada pendekatan kontingensi pada ranah kedaruratan.

Ketiga, sehubungan dengan poin (c), perlu segera dipersiapkan sebuah badan yang berperan sebagai *securitizing actor* terhadap masalah-masalah yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Badan tersebut pada praktiknya merupakan *advisory body* ketika Presiden selaku pemegang otoritas

tertinggi terhadap pengelolaan keamanan nasional, diharuskan mengambil keputusan yang diperlukan untuk menjawab masalah-masalah keamanan nasional yang memerlukan tanggapan segera melalui langkah-langkah kontingensi.

Keempat, perlu dipersiapkan secara konkrit landasan legalitas yang memberi ruang bagi pelaksanaan kebijakan kontingensi guna menjamin penyesuaian terhadap kerangka kerja sistemik keamanan nasional tidak berlangsung dalam ruang hampa (*in vacum*). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus merumuskan: (a) ketentuan prosedural, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden ataupun Peraturan Menteri untuk menyelenggarakan fungsi koordinatif dan operasi kontingensi yang mengemban tugas khusus sesuai dengan misi/sasaran yang ditetapkan; dan (b) petunjuk teknis (*standard operating procedures*) yang ditetapkan oleh pimpinan masing-masing instansi pelaksana untuk menopang profesionalisme pelaksanaan tugas aparat di lapangan dan membangun sinergi kerja lintas instansi (*inter-agency cooperation*) ketika mereka berada pada penugasan berdasarkan misi kontingensi tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggoro, Kusnanto, "Bangsa, Negara dan Transisi Politik", dalam Stanley, eds., *Keamanan, Demokrasi dan Pemilu 2004* (Jakarta: ProPatria Institute, 2004)
- _____, "Pertahanan dan Keamanan Negara Pada Milenium Ketiga", dalam Stanley, eds., *Keamanan, Demokrasi dan Pemilu 2004* (Jakarta: ProPatria Institute, 2004)
- _____, "Paradigma Keamanan Nasional dan Pertahanan Negara di Negara Demokrasi", dalam Rusdi Marpaung, Al Araf, Junaidi dan Ghufron Mabruhi, eds., *Dinamika Reformasi Sektor Keamanan* (Jakarta: Imparsial, 2005)
- Ayoob, Mohammed, ed., *Regional Security in the Third World* (London: Groom Helm, 1986)
- _____, *The Third World Security Predicament: State Making, Regional Conflict, and the International System* (Boulder: Lynne Rienner, 1995)
- _____, "Defining Security: A Subaltern Realist Perspective", dalam Keith Krause dan Michael C. Williams, eds., *Critical Security Studies: Concepts and Cases* (London: UCL Press, 1997)
- Azar, Edward dan Chung-in Moon, eds., *National Security in the Third World: The Management of Internal and External Threats* (Hants, England: Edward Elgar Publishing Limited, 1988)
- Baylis, John dan Steve Smith, *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations* (Oxford: Oxford University Press, 2001)
- Bearne, Susanna, Olga Oliker, Kevin A. O'Brien dan Andrew Rathmell, *National Security Decision-Making Structure and Security Sector Reform* (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2005)
- Booth, Ken, ed., *New Thinking about Security and International Security* (London: Harper Collins, 1991)
- Brown, David, *The State and Ethnic Politics in South-East Asia* (London: Routledge, 1994)
- Buzan, Barry, *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, 2nd Ed.* (Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1991)

- _____, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis* (Boulder, CO: Lynne Rienner, 1998)
- Creswell, John W., *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches* (California: Sage Publications, 1994)
- Hartman, Frederick H., *The Relations of Nations* (New York, 1967)
- Hough, Peter, *Understanding Global Security* (London: Routledge, 2004)
- Kalicki, Jan H. dan David L. Goldwyn, eds., *Energy Security* (Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press, 2005)
- Krahmann, Elke, eds., *New Threats and New Actors in International Security* (New York: Palgrave Macmillan, 2005)
- Krause, Keith dan Michael C. Williams, eds., *Critical Security Studies: Concepts and Cases* (London: UCL Press, 1997)
- Laitin, David D., *Nations-States and Violence* (New York: Oxford University Press, 2007)
- Marpaung, Rusdi dkk., eds., *Dinamika Reformasi Sektor Keamanan* (Jakarta: Imparsial, 2005)
- Prihatono, T. Hari, Jessica Evangeline dan Iis Gindarsah, *Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif versus Pembiasaan Politik dan Kebijakan* (Jakarta: ProPatria Institute, 2007)
- _____, eds., *Penataan Kerangka Regulasi Keamanan Nasional* (Jakarta: ProPatria Institute, 2006)
- Punch, Keith F., *Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches* (London: Sage Publication, 1998)
- Rotberg, Robert I, ed., *When States Fail: Causes and Consequences* (New Jersey: Princeton University Press, 2004)
- Stake, R.E. (1994) dalam Keith F. Punch, *Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches* (London: Sage Publication, 1998)
- Stanley, eds., *Keamanan, Demokrasi dan Pemilu 2004* (Jakarta: ProPatria Institute, 2004)
- Thomas, Caroline, "New Directions in Thinking about Security in the Third World", dalam Ken Booth, ed., *New Thinking about Security and International Security* (London: Harper Collins, 1991)
- _____, *The Environment in International Relations* (London: Royal Institute of International Affairs, 1992)
- Tippe, Syarifudin, *Aceh di Persimpangan Jalan* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000)

Wolfers, Arnold, *Discord and Collaboration: Essay on International Politics* (Baltimore: John Hopkins University Press, 1962)

Dokumen Resmi

- “Cessation of Hostilities: Framework Agreement between Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement” 9 Desember 2002.
- Inpres No. 1 Tahun 2002 tentang Peningkatan Langkah Komprehensif Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Masalah Aceh
- Inpres No. 4 Tahun 2001 tentang Langkah-Langkah Komprehensif Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh
- Inpres No. 7 Tahun 2001 tentang Langkah-Langkah Komprehensif Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2002 tentang Peningkatan Langkah Komprehensif Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Masalah Aceh
- Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2001 tentang Langkah-Langkah Komprehensif Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh
- “Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh”, 12 Mei 2000.
- Keppres No. 28 Tahun 2003 tentang “Pernyataan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Darurat Militer di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.”
- United Nations Development Programme, *Human Development Report 1994* (Oxford: Oxford University Press for UNDP, 1994)

Jurnal dan Tulisan Ilmiah

- Anggoro, Kusnanto, “Keamanan Nasional, Pertahanan Negara dan Ketertiban Umum”, paper disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar (14 Juli 2003)
- _____, “Komprehensi Konsep dan Modalitas Pengelolaan Keamanan Nasional”, *Discussion Paper*, ProPatria Institute (14 Desember 2005a), hal. 4-5
- _____, “Bridge Over Troubled Water: Convergence and Divergence in the Formulation of National Security Bill in Indonesia”, *Monograph*, No. 12, ProPatria Institute (1 October 2008)
- Aspinall, Edward, “Anti-insurgency Logic in Aceh”, *Inside Indonesia* (October-November 2003)
- _____, dan Harold Crouch, “The Aceh Peace Process: Why It Failed”, *Policy Studies*, No. 1 (Washington, DC: East West Center, 2003)

- Ayoob, Mohammed, "The Security Problematic of The Third World", *World Politics*, Vol. 43, No. 2 (Januari 1991)
- Booth, Ken, "Security and Emancipation", *Review of International Studies*, Vol. 17, No. 4 (1991)
- Cha, Victor D., "Globalization and the Study of International Security", *Journal of Peace Research*, Vol. 37, No. 3 (May 2000)
- Emmers, Ralph, "The Securitization of Transnational Crime in ASEAN", *Working Paper*, No. 39, S. Rajaratnam School of International Studies (November 2002)
- Haseman, John, "Jakarta Hardens Indonesia Policy", *Jane's Defence Weekly* (2 Mei 2001)
- International Crisis Group, "Aceh: A Fragile Peace", *Asia Report*, No. 47 (27 Februari 2003)
- _____, "Aceh: How Not to Win Hearts and Minds", *Indonesia Briefing* (23 Juli 2003)
- _____, "Aceh: Why Military Force Won't Bring Lasting Peace", *Asia Report*, No. 17 (Juni 2001)
- Luciani, Giacomo, "The Economic Content of Security", *Journal of Public Policy*, Vol. 8, No.2 (1989)
- Mapes, Timothy, "Sold Short", *Far Eastern Economic Review* (9 Oktober 2003)
- Matthews, Jessica Tuchman, "Redefining Security", *Foreign Affairs*, Vol. 68, No. 2 (Spring 1989)
- McSweeney, Bill, "Identity and Security: Buzan and the Copenhagen School", *Review of International Studies*, Vol. 22, No. 1 (1996)
- Muna, Riefqi, "'Grey Areas', Kewenangan dan Peran Politik Elit," *Discussion Paper*, ProPatria Institute (17 Oktober 2002), h. 1-12.
- ProPatria Institute, "Rute Baru Penyelesaian Aceh", *Monograph*, No. 1 (7 Januari 2004)
- _____, "Keamanan Nasional", *Monograph*, No. 2 (16 Februari 2004)
- _____, "Pembangunan Sistem dan Perencanaan Kontingensi dalam Sistem Keamanan Nasional Indonesia", *Monograph*, No. 11 (31 Mei 2008)
- Robinson, Geoffrey, "Rawan is as Rawan Does: The Origins of Disorder in New Order Aceh", *Indonesia*, Vol. 66 (October 1998)
- Schulze, Kirsten, "Indonesia Strives to Restore Order in Aceh", *Jane's Intelligence Review* (September 2001)
- _____, "The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of A Separatist Organization)", *Policy Studies*, No. 2 (Washington, DC: East West Center, 2004)

- Shaw, Martin, "There is No Such Thing as Society: Beyond Socialism and Statism in International Security Studies", *Review of International Studies*, Vol. 19, No. 2 (1993)
- Smith, Anthony L., "Indonesia's Aceh Problem: Measuring International and Domestic Costs", *Asia-Pacific Security Studies*, Vol. 2, No. 5 (Juli 2003)
- Sorenson, George, "Individual Security and National Security: The State Remain Principal Problem", *Security Dialogue*, Vol. 27, No. 4 (1996)
- Sukma, Rizal, "Aceh in Post-Suharto Indonesia: Protracted Conflict Amid Democratisation", paper dipresentasikan di Simposium Internasional yang bertema "At The Frontline of Conflict Prevention in Asia", Japan Institute of International Affairs, Tokyo, 6-7 Juli 2001.
- _____, "Konsep Keamanan Nasional", *Discussion Paper*, ProPatria Institute (28 November 2002)
- _____, "Keamanan Nasional: Ancaman dan Eskalasi", *Discussion Paper*, ProPatria Institute (23 September 2003)
- _____, "Security Operations in Aceh: Goals, Consequences and Lessons", *Policy Studies*, No. 3 (Washington, DC: East West Center, 2004)
- _____, "The Securitization of Human Trafficking in Indonesia", *Working Paper*, No. 162, S. Rajaratnam School of International Studies (3 July 2008)
- Sulistiyanto, Priyambudi, "Whither Aceh", *Third World Quarterly*, Vol. 22, No. 3, (2001)
- Syahnakri, Kiki, "Aceh Pasca Perjanjian Damai," *Kompas* (25 Februari 2003)
- Ullman, Richard H., "Redefining Security", *International Security*, Vol. 8, No. 1 (Summer 1983)

Majalah dan Surat Kabar

- "4 Demonstran Tertembak di Aceh Utara," *Suara Pembaruan*, (10 Januari 2003)
- "6 Bom Meledak di Aceh Saat Perayaan HUT RI," *Media Indonesia*, (19 Agustus 2003)
- "9 GAM Tewas Dalam Kontak Senjata," *Media Indonesia*, (12 Juli 2003)
- "9 Killed as Aceh Peace Monitors Leave Field Offices," *The Jakarta Post* (9 April 2003).
- "10 Anggota GAM dan 2 TNI Tewas di Baktiya," *Media Indonesia*, (20 Juni 2003)
- "10 Kades di Aceh Barat Diculik GAM," *Suara Pembaruan*, (1 September 2003)
- "10 Kapal Perang Amankan Wilayah Perairan Aceh," *Koran Tempo*, (8 Maret 2003)

- "10 Sipil Tewas, JSC Tarik Anggota di Lapangan," *Suara Pembaruan*, (9 April 2003)
- "10 Sipil Tewas, JSC Tarik Anggota di Lapangan," *Suara Pembaruan*, (9 April 2003)
- "12 Anggota GAM Ditangkap," *Republika*, (21 Mei 2003)
- "20 Anggota GAM Tewas di Berbagai Daerah NAD," *Media Indonesia*, (22 Mei 2003)
- "26 Rumah Dibakar, Tiga Terpanggang," *Media Indonesia* (29 September 2000)
- "30 Persen Daerah Pedesaan Aceh Dikuasi GAM," *Media Indonesia* (1 April 2003)
- "31 Anggota GAM Ditangkap," *Koran Tempo*, (25 Agustus 2003)
- "36 Tank Scorpion Amankan Jalur Darat," *Media Indonesia*, (23 Juni 2003)
- "50 Anggota TNI Kepung Markas GAM di Nipah," *Media Indonesia*, (11 Juli 2003)
- "56 Kepala Desa Diculik," *Jawa Pos* (28 Maret 2003)
- "75 Persen Senjata Belum Ditemukan," *Kompas*, (23 Oktober 2003)
- "185 Gedung Sekolah di Aceh Dibakar," *Media Indonesia*, (21 Mei 2003)
- "488 Warga Sipil Jadi Korban GAM," *Media Indonesia*, (23 Agustus 2003)
- "1.000 Babinsa Tempur Segera Tiba di Aceh," *Suara Pembaruan*, (25 Oktober 2003)
- "2.500 Personel Brimob Tiba di Aceh," *Suara Pembaruan*, (24 Oktober 2003)
- "2.900 GAM Dilumpuhkan," *Media Indonesia* (3 Desember 2003).
- "12.000 Acehnese Swear Loyalty to Legitimate Govt," *The Jakarta Post* (11 Juli 2003)
- "Aceh Administration Blamed Partly for Peace Failure," *The Jakarta Post* (29 April 2003).
- "Aceh Court to Try 7 Soldiers," *The Jakarta Post* (3 Juni 2003)
- "Aceh Darurat Militer," *Media Indonesia* (19 Mei 2003).
- "Aceh Enters Crucial Demilitarization Phase," *The Jakarta Post* (10 Februari 2003).
- "Aceh Memanas, Empat Warga Tewas," *Koran Tempo*, (17 Maret 2003)
- "Aceh Peace Given Last Chance," *The Jakarta Post* (17 Mei 2003)
- "Aceh Security Forces Continue to Extort Drivers," *The Jakarta Post*, (20 Januari 2003)
- "Aceh Selatan Mulai Bergolak," *Koran Tempo*, (19 Mei 2003)

- “Aceh Talks Move Slowly in Switzerland,” *The Jakarta Post* (4 Februari 2002).
- “Aceh Terus Bergolak,” *Kompas*, (27 April 2003)
- “Aceh Violence Kills Eight More People,” *The Jakarta Post*, (1 Oktober 2003)
- “Acehnese People Bear the Brunt of Forced Evacuation,” *The Jakarta Post* (8 Agustus 2003).
- “Acehnese Tell of Forced Evacuations,” *The Jakarta Post* (19 Juni 2003)
- “Ada Yang Melenceng Dari Hasil Kesepakatan Damai,” *Kompas* (5 April 2003)
- “Akan Diadili, 12 Prajurit Penganiaya,” *Kompas*, (20 September 2003)
- “Aksi Bumi Hangus Terus Terjadi,” *Republika*, (21 Mei 2003)
- “Alleged GAM Members Kidnap 10 Fishermen,” *The Jakarta Post*, (28 Mei 2003)
- “Ambulans PMI Diserang,” *Indopos*, (21 Juli 2003)
- “Anggota DPRD Aceh Besar Ditembak Mati,” *Kompas* (12 Juni 2002)
- “Anggota DPRD Aceh Utara Ditembak,” *Media Indonesia* (3 September 2000)
- “Anggota TNI Yang Memperkosakan Divonis 2,5 Tahun,” *Suara Pembaruan* (21 Juli 2003)
- “Anggota GAM Penuhi Ruang Tahanan,” *Media Indonesia* (30 Agustus 2003)
- “Anggota Komite Perdamaian Aceh Ditangkap,” *Suara Pembaruan*, (4 Mei 2003)
- “Anggota Pasukan Elite GAM Tewas Tertembak,” *Koran Tempo*, (10 September 2003)
- “Anggota TNI Tewas di Bireun,” *Suara Pembaruan*, (21 April 2003)
- “Anggota TNI Yang Memperkosakan Divonis 2,5 Tahun,” *Suara Pembaruan*, (21 Juli 2003)
- “Angkutan Darat Aceh Dikawal TNI Lagi,” *Kompas* (22 Juni 2003)
- “Angkutan di Lhokseumawe Lumpuh,” *Republika* (4 Juni 2003)
- “Angkutan Umum Makin Takut Lewati Jalur Aceh-Medan,” *Kompas* (12 Juli 2003)
- “Aparat Desa Korban GSA Terus Bertambah”, *Republika* (2 September 2003)
- “Aparat Keamanan Kawal Angkutan ke Aceh Tengah, *Kompas*, (25 Maret 2003)
- “Aparat TNI Musnahkan Tiga Hektare Ladang Ganja Milik GAM, *Media Indonesia*, (15 Agustus 2003)
- “Army Chief Rules out Disarming, Withdrawing Troops from Aceh,” *The Jakarta Post* (17 Desember 2002)
- “Bahtiar Tewas Setelah Menjadi Narasumber TV,” *Republika*, (14 Juli 2003)
- “Baku Tembak Berlangsung di Pinggiran Banda Aceh,” *Republika*, (7 Juni 2003)

- "Baku Tembak GAM-TNI Terus Terjadi," *Kompas*, (1 Mei 2003)
- "Baku Tembak Masih Terjadi," *Koran Tempo*, (27 Januari 2003)
- "Baku Tembak TNI-GAM Makin Gencar," *Kompas*, (2 Mei 2003)
- "Batas Waktu GAM Awal Desember," *Kompas* (20 Agustus 2002)
- "Beberapa Daerah Waspada Penyusupan Anggota GAM," *Media Indonesia* (28 Mei 2003)
- "Beda Dengan DOM Orde Baru," *Jawa Pos* (22 April 2003)
- "Belasan Anggota POLRI Ditangkap Saat Lakukan Pungli," *Media Indonesia*, (29 Oktober 2003)
- "Belum Jelas, Nasib Orang Yang Diculik GAM," *Kompas*, (11 Mei 2003)
- "Berlapis-lapis, Pengamanan Instalasi Vital di Aceh," *Kompas* (20 Mei 2003)
- "Bireun Dalam Cengkraman Teror," *Suara Pembaruan*, (21 Mei 2003)
- "Bom Ditemukan di Depan Pintu PT Arun," *Suara Pembaruan*, (5 Agustus 2003)
- "Bom Ditemukan di Jalan di Aceh Utara," *Koran Tempo*, (21 Agustus 2003)
- "Bom Meledak di Cluster II Exxon Mobil," *Suara Pembaruan*, (13 Agustus 2003)
- "Bom Rakitan Teror Banda Aceh," *Republika*, (3 Juni 2003)
- "Bom Seberat 100 Kg Ditemukan di Aceh Utara," *Media Indonesia*, (12 Agustus 2003)
- "Bom Terus Membakar Aceh," *Koran Tempo*, (6 Mei 2003)
- "Bombs Hit Aceh on Independence Day," *The Jakarta Post*, (19 Agustus 2003)
- "Brimob Sumut Perkuat Perbatasan Sumut-NAD," *Republika*, (21 Mei 2003)
- "Brimob Suspected of Killing 3 Women in Aceh," *The Jakarta Post* (4 Agustus 2002)
- "Bupati Takengon Diduga Terlibat GAM," *Media Indonesia*, (5 Agustus 2003)
- "Bus Banda Aceh-Medan Hentikan Operasi," *Republika* (21 Mei 2003)
- "Bus Penumpang Kembali Ditembaki," *Kompas*, (27 Juni 2003)
- "Camat dan Kapolsek GAM Ditangkap," *Suara Pembaruan*, (28 Juni 2003)"
- "Camat GAM Ditangkap," *Indopos*, (22 Juli 2003)
- "Casualties Rise as Offensive Intensifies," *The Jakarta Post*, (22 Mei 2003)
- "Cegah Penyusupan "Sweeping" Angkutan Umum Terus Digelar," *Kompas*, (1 November 2003)
- "Cegah Penyusupan "Sweeping" Angkutan Umum Terus Digelar," *Kompas*, (1 November 2003)

- “Civil Servants in Aceh on Edge over Loyalty Test,” *The Jakarta Post* (1 Juli 2003).
- “Damai Terganjai Perlucutan Senjata,” *Jawa Pos* (17 Desember 2003)
- “Dan Ops GAM Wilayah Seulimun Tewas,” *Suara Pembaruan*, (14 Agustus 2003)
- “Dana Pengungsi Aceh Dihentikan,” *Koran Tempo*, (20 Desember 2002)
- “Danramil Tewas, Sekda Terluka,” *Suara Pembaruan*, (2 Juni 2003)
- “Data Korban Aceh Simpang Siur,” *Suara Pembaruan* (20 Juni 2003).
- “Deklarasi GPMP Diikuti 10.000 Pemuda,” *Suara Pembaruan* (20 Agustus 2003).
- “Delapan Ledakan Bom Warnai Perayaan HUT RI,” *Kompas*, (19 Agustus 2003)
- “Delapan Pejabat Aceh Selatan Terlibat GAM,” *Media Indonesia*, (19 Juni 2003)
- “Di Bireun, Dua Polisi Tewas,” *Koran Tempo*, (9 Agustus 2003)
- “Dialog dengan GAM Digelar Lagi 17 Mei,” *Kompas* (17 Mei 2003).
- “Dialog RI-GAM Masih Terbuka,” *Republika* (29 April 2003).
- “Dialog RI-GAM Masih Terbuka,” *Republika* (29 April 2003)
- “Dibunuh GAM, Prajurit Pejabat Kades Bukit Bata,” *Media Indonesia*, (27 Agustus 2003)
- “Diculik GAM, Anggota Polsek Sibreh Tewas,” *Suara Pembaruan*, (15 Agustus 2003)
- “Dihadang GAM, Tiga TNI Luka-Luka,” *Kompas*, (8 November 2003)
- “Dikejutkan Kontak Senjata,” *Media Indonesia*, (22 Juli 2003)
- “Dirobohkan, Antena Pemancar Radio GAM,” *Kompas*, (17 Juli 2003).
- “Disergap Pasukan TNI, Ishak Daud Lolos,” *Kompas*, (13 September 2003)
- “Disita, 4.453 Peluru Yang Dikirim ke Aceh,” *Kompas*, (29 Mei 2003)
- “Ditangkap di Medan, Panglima GAM Dibawa ke Lhokseumawe,” *Koran Tempo*, (29 Mei 2003)
- “Ditangkap, Anggota GAM Pembunuh 14 Prajurit,” *Kompas*, (18 Juli 2003)
- “Ditembak Setelah Meliput Aksi Penyisiran,” *Koran Tempo*, (1 Juni 2003)
- “Ditembak, Ketua Partai Bintang Reformasi di Aceh,” *Kompas*, (3 Oktober 2003)
- “Ditemukan 27 Bom,” *Republika*, (6 Mei 2003)
- “Ditemukan, 2 Bom Siap Diledakkan,” *Suara Pembaruan*, (19 Agustus 2003)
- “Ditemukan, Berkas Donasi GAM,” *Kompas*, (4 November 2003)
- “Ditutup, Ruang Gerak GAM ke Kawasan Perkotaan,” *Kompas*, (14 Agustus 2003)

- “DOM adalah Masa Lalu TNI,” *Kompas* (26 April 2003).
- “DPR Dukung Rencana Pengiriman Militer,” *Koran Tempo* (8 Maret 2003).
- “Dua Aktivistis SIRA Ditangkap,” *Jawa Pos* (22 April 2003).
- “Dua Guru SD Aceh Ditembak di Rumah,” *Kompas*, (4 Juni 2003)
- “Dua Hari Terakhir, 11 Anggota GAM Tewas,” *Media Indonesia*, (7 Juni 2003)
- “Dua Instruktur Polisi Ditembak di Aceh Besar,” *Suara Pembaruan*, (8 April 2003)
- “Dua Kasus Kekerasan Kembali Terjadi di Aceh,” *Republika* (27 Juni 2000).
- “Dua Mayat Ditemukan di Bireun,” *Indopos*, (25 Juni 2003)
- “Dua Mayat Selama Demiliterisasi,” *Koran Tempo*, (1 Maret 2003)
- “Dua Orang Tewas Dalam Insiden di Aceh Tengah,” *Kompas*, (17 Maret 2003)
- “Dua Panglima GAM Ditangkap di Jambi,” *Suara Pembaruan*, (20 Juni 2003)
- “Dua Panglima Sagoie GAM Tewas di Aceh Besar,” *Suara Pembaruan*, (11 Agustus 2003)
- “Dua Pembakar Sekolah Dihukum,” *Kompas*, (9 Oktober 2003)
- “Dua Pengutip Dana GAM Ditangkap,” *Suara Pembaruan*, (7 Agustus 2003)
- “Dua Prajurit TNI Terluka Ditembak GAM,” *Koran Tempo*, (10 Oktober 2003)
- “Dua Prajurit TNI Tewas di Aceh Selatan,” *Suara Pembaruan*, (23 Desember 2002)
- “Dua Pria Ditembak Mati di Banda Aceh,” *Kompas*, (3 April 2003)
- “Dua Warga Tewas Ditembak GAM,” *Indopos*, (19 Agustus 2003)
- “Dua Warga Yang Diduga GAM Ditembak di Aceh Besar,” *Suara Pembaruan*, (6 Agustus 2003)
- “Dua Zona Damai Baru Ditetapkan di Aceh,” *Kompas* (10 Maret 2003).
- “Empat Anak Buah Ishak Daud Tewas,” *Suara Pembaruan*, (19 Juli 2003)
- “Empat Anggota GAM Tewas,” *Republika*, (20 Mei 2003)
- “Empat Mayat Ditemukan,” *Media Indonesia*, (19 Juli 2003)
- “Empat Putaran Itu...” *Republika* (10 Mei 2000).
- “Empat Sandera GAM Dibebaskan TNI,” *Kompas*, (16 Oktober 2003)
- “Empat Tower Suplai Listrik Dirobohkan,” *Kompas*, (7 Juni 2003)
- “Enam Anggota Paskhas TNI-AU Tewas Tertembak,” *Kompas* (21 Juni 2002).
- “Enam Mayat Ditemukan di Aceh Timur,” *Kompas* (13 November 2000)
- “Etnis Tertentu Mulai Diburu di Aceh,” *Kompas*, (16 Juli 2003)
- “Exxon Mobil Jadi Sasaran Granat Rakitan,” *Kompas*, (9 September 2003)

- "Fasilitas Kesehatan Rusak, Namun Pelayanan Terjamin," *Kompas* (29 Mei 2003)
- "GAM Akan Lumpuh Dalam Dua Bulan'," *Republika* (28 Mei 2003).
- "GAM Bakar Minibus, 2 Penumpang Luka Bakar," *Media Indonesia*, (11 Juli 2003)
- "GAM Bakart Puskesmas," *Suara Pembaruan*, (27 Oktober 2003)
- "GAM Bantah Setujui Penggudangan Senjata," *Koran Tempo* (14 Desember 2002)
- "GAM Bantah Terima Otonomi Khusus Aceh," *Koran Tempo* (15 Mei 2002).
- "GAM Bantai Satu Keluarga, TNI Tewaskan 11 Orang," *Media Indonesia*, (23 Oktober 2003)
- "GAM Berdalih Soal Visa," *Republika* (26 Juni 2003).
- "GAM Berondong Sekda Lhokseumawe," *Republika*, (2 Juni 2003)
- "GAM Bersedia Tempuh Penyelesaian Politik," *Republika* (11 Januari 2001).
- "GAM Culik Dua Kepala Desa," *Kompas*, (3 Mei 2003)
- "GAM Diberi Waktu Dua Minggu," *Koran Tempo* (29 April 2003)
- "GAM Diberi Waktu Hingga Ramadan," *Media Indonesia* (20 Agustus 2002).
- "GAM Dilaporkan Perkosa Dua Wanita," *Republika* (, 10 Maret 2003)
- "GAM Diminta Hentikan Propaganda Aceh Merdeka," *Media Indonesia* (14 Maret 2003).
- "GAM Diminta Menyerah," *Kompas* (20 Mei 2003).
- "GAM Gelar Rapat Akbar di Aceh Utara," *Media Indonesia* (8 Januari 2003)
- "GAM Harus Meletakkan Senjata," *Kompas* (30 April 2003).
- "GAM Intimidasi Rakyat Yang Rayakan Ulang Tahun RI," *Koran Tempo*, (11 Agustus 2003)
- "GAM Intimidasi Rakyat Yang Rayakan Ulang Tahun RI," *Koran Tempo*, (11 Agustus 2003)
- "GAM Jangan Berkeliaran Bawa Senjata," *Kompas* (7 Februari 2003).
- "GAM Juga Tambah Pasukan dan Senjata," *Jawa Pos* (24 April 2003).
- "GAM Kembali Tembak Warga Sipil," *Media Indonesia*, (24 Juli 2003)
- "GAM Masih Serang Sipil," *Indopos*, (25 September 2003)
- "GAM Meminta Pertemuan di Geneva," *Kompas* (6 Mei 2003)
- "GAM Mengaku Serang Brimob Karena Bela Diri," *Republika* (6 Juli 2000).
- "GAM Menjarah," *Media Indonesia*, (12 Agustus 2003)
- "GAM menyerang Lagi," *Jawa Pos* (23 Desember 2002).

- “GAM Minta Rp 30 Juta di Tiap Desa,” *Koran Tempo*, (31 Januari 2003)
- “GAM Mulai Kembangkan Pola Kekerasan Pada Rakyat,” *Media Indonesia*, (31 Mei 2003)
- “GAM Mulai Lakukan Serangan Kota,” *Media Indonesia*, (5 Mei 2003)
- “GAM Mulai Melawan,” *Indopos*, (22 Mei 2003)
- “GAM Paksa Penduduk Turunkan Bendera Merah Putih,” *Republika*, (25 Juni 2003)
- “GAM Permalukan Indonesia,” *Suara Pembaruan* (25 April 2003)
- “GAM Sandera 200 Warga,” *Indopos*, (31 Mei 2003)
- “GAM Sandera 56 Kades Saat Akan Berunjuk Rasa,” *Media Indonesia* (28 Maret 2003).
- “GAM Serang Jalur Logistik Bireun-Pidie,” *Media Indonesia*, (3 Juni 2003)
- “GAM Serang Kodim, Seorang TNI Tewas,” *Suara Pembaruan* (, 2 Mei 2003)
- “GAM Sweeping Angkutan Umum, Tiga Penumpang Tewas,” *Suara Pembaruan*, (16 Juli 2003)
- “GAM Tembak 9 Penumpang,” *Indopos*, (21 Juni 2003)
- “GAM Tembakkan RPG ke Areal Exxon Mobil,” *Media Indonesia*, (22 Agustus 2003)
- “GAM Terus Lakukan Pembakaran,” *Media Indonesia*, (23 Juni 2003)
- “GAM Tolak Sanksi dari Komite Keamanan Bersama,” *Media Indonesia* (1 Maret 2003)
- “GAM Tolak Ultimatum RI,” *Republika* (12 Mei 2003).
- “GAM Ubah Strategi Perjuangan,” *Kompas* (11 Januari 2001)
- “GAM Will Comply with Aceh Peace Accord,” *The Jakarta Post* (27 Januari 2003)
- “GAM, RI Charged over Truce Violations,” *The Jakarta Post* (25 Januari 2003)
- “GAM-POLRI Baku Tembak,” *Republika*, (19 Mei 2003)
- “Gasak Dana Kemanusiaan, Pejabat Aceh Diburu Polisi,” *Kompas*, (19 November 2003)
- “Gedung SMP Negeri di Aceh Timur Dibakar,” *Suara Pembaruan*, (12 Agustus 2003)
- “Gerombolan Bersenjata Mengganas di Aceh,” *Kompas*, (5 Agustus 2003)
- “Gerombolan Serang Pasukan Brimob di Aceh,” *Bisnis Indonesia* (19 Juni 2000)
- “Govt Claims Early Success in Aceh Operation,” *The Jakarta Post* (29 Mei 2003).

- "Govt Likely to Intensify Military Operation in Aceh," *The Jakarta Post* (5 Juli 2002).
- "Govt Opens up New Chance for Aceh Talks," *The Jakarta Post* (29 April 2003).
- "Govt Spells Out Conditions for Talks with GAM," *The Jakarta Post* (24 April 2003).
- "Govt to Take Action Against Corruptors in Aceh," *The Jakarta Post* (3 Oktober 2003)
- "Govt Under Pressure to Save Aceh Peace," *The Jakarta Post* (2 Mei 2003)
- "Govt, GAM Unlikely to Meet," *The Jakarta Post* (6 Mei 2003)
- "Granat Ditemukan di Kantor Komite Keamanan Bersama Aceh," *Koran Tempo*, (25 Maret 2003)
- "Gubernur GAM dan Istrinya Tewas," *Kompas*, (18 September 2003)
- "Gubernur GAM dan Istrinya Tewas," *Kompas*, (18 September 2003)
- "Guru Mengaji Dibantai di Kebun Pinang," *Republika*, (18 Juni 2003)
- "Hakim Kurang, Kasus Menumpuk," *Kompas* (9 September 2003).
- "Harta Benda Bilang Ketika Ditinggal Mengungsi," *Suara Pembaruan*, (12 Agustus 2003)
- "Harta Benda Hilang Ketika Ditinggal Mengungsi" *Suara Pembaruan* (12 Agustus 2003).
- "Hasil Operasi Terpadu di Aceh Lampau Target," *Media Indonesia* (29 Mei 2003)
- "HDC Defends Filipino Observers," *The Jakarta Post*, (3 Januari 2003)
- "HDC Siap Lakukan Sidang 'Joint Council,'" *Media Indonesia* (6 April 2003).
- "Hentikan Propaganda Aceh Lepas dari NKRI," *Republika* (14 Maret 2003)
- "Hopes High for Aceh Peace After Historic Meeting," *The Jakarta Post* (18 Maret 2000).
- "Humanitarian Pause in Aceh Gets New Life," *The Jakarta Post* (26 September 2000).
- "Ibu dan Anak Tewas Tertembak," *Suara Pembaruan*, (12 Agustus 2003)
- "ICRC: Kamp Pengungsi Tak Layak Huni," *Indopos* (30 Juni 2003)
- "Indonesia Sesalkan GAM Pamer Kekuatan Senjata," *Media Indonesia* (16 Januari 2003)
- "Indrapuri, Zona Damai Pertama di Aceh," *Kompas* (26 Februari 2003)
- "Inong Balee" Menangis Dituntut 30 Bulan Penjara," *Media Indonesia*, (8 Oktober 2003)

- "Irwandi Penerjemah GAM Divonis 7 Tahun Penjara," *Media Indonesia*, (4 November 2003)
- "Jaksa Agung: Hanya Satu Hakim di Tiap Kabupaten di Aceh," *Koran Tempo* (22 Juli 2003)
- "Jalan Berdarah di Serambi Mekah," *Majalah Tempo* (29 Desember 2003).
- "Jalur Jalan Banda Aceh-Medan Masih Sepi dan Tidak Aman," *Kompas* (19 Juli 2003).
- "Jangan Memancing Permusuhan Baru," *Kompas* (14 Januari 2003)
- "Jelang HUT RI di Aceh Razia Diperketat," *Kompas*, (12 Agustus 2003)
- "JSC Cabut Dua Pelanggaran Indonesia," *Kompas* (1 Maret 2003).
- "JSC Co-chairman Arrives in Aceh to Begin Peace Monitoring Work," *The Jakarta Post* (19 Desember 2002).
- "JSC Gives Details of Aceh Peace Zones," *The Jakarta Post* (22 Januari 2003)
- "JSC Investigasi 32 Kasus Pelanggaran di Aceh," *Kompas* (5 Februari 2003).
- "JSC Jatuhkan Sanksi pada GAM dan RI," *Suara Pembaruan* (25 Januari 2003)
- "JSC Kutuk Insiden di Aceh Tengah," *Suara Pembaruan* (4 Maret 2003)
- "JSC Reports Fall in Violence After Peace Deal," *The Jakarta Post* (4 Februari 2003).
- "JSC: Empat Pelanggaran Kesepakatan Damai," *Kompas* (17 Februari 2003).
- "Kabupaten Aceh Tengah Masih Terisolasi," *Kompas*, (20 Maret 2003)
- "Kambing Pun Menanti Kompi Harimau," *Media Indonesia*, (22 Juli 2003)
- "Kamerawan TVRI Aceh Tewas," *Media Indonesia*, (19 Juni 2003)
- "Kantor JSC Aceh Timur Dibakar," *Koran Tempo* (7 April 2003)
- "Kantor JSC Aceh Timur Didatangi Ratusan Warga," *Kompas* (13 Maret 2003)
- "Kantor JSC di Takengon Diamuk Massa," *Kompas* (5 Maret 2003)
- "Kantor KKB Aceh Timur Dibakar Massa," *Kompas*, (6 April 2003)
- "Kantor KKB di Langsa Dibakar Massa," *Media Indonesia* (7 April 2003).
- "Kapal Asing Dilarang Masuk NAD," *Media Indonesia*, (31 Mei 2003)
- "Kapolda NAD Diminta Selidiki Penculikan 56 Kepala Desa," *Media Indonesia* (29 Maret 2003).
- "Kapolri: GAM Telah Jadi Clandestine," *Tempo Interaktif* (12 Juli 2002).
- "Kapolsek Blang Mangat Tewas Ditembak," *Suara Pembaruan*, (24 Juni 2003)
- "Kejaksanaan Periksa Penyelewengan Dana Pengungsi Aceh," *Koran Tempo*, (16 Maret 2003)

- “Kekerasan di Aceh Meningkat,” *Media Indonesia* (23 April 2003)
- “Kekerasan Terhadap Wartawan Meningkat,” *Media Indonesia*, (22 Juli 2003)
- “Keluarga Janda Tewas Dibantai di Pidie,” *Suara Pembaruan*, (10 September 2003)
- “Kepala Desa di Aceh Diancam Agar Tidak Rayakan HUT Ke-58 RI,” *Kompas*, (15 Agustus 2003)
- “Kepala Desa di Aceh Utara Ditembak Orang Tak Dikenal,” *Suara Pembaruan*, (4 Agustus 2003)
- “Kepala Dinas Pendidikan Pidie Ditahan,” *Kompas*, (25 Oktober 2003)
- “Kepolisian NAD Serahkan 20 Berkas GAM ke Kejaksaan,” *Koran Tempo* (24 Juni 2003)
- “Kesepakatan Penghentian Permusuhan Ditandatangani,” *Kompas* (10 Desember 2002)
- “Ketua dan Dua Hakim PN Jantho Dicapot,” *Kompas*, (4 November 2003)
- “Ketua DPRD Langsa Hilang di Perjalanan,” *Suara Pembaruan*, (27 Agustus 2003)
- “KKB Desak Indonesia Investigasi Lengkap Kasus Takengon,” *Kompas*, (21 Maret 2003)
- “KKB Mengadakan Pertemuan Pertama di Banda Aceh,” *Kompas* (21 Desember 2002)
- “Kodam Aceh Wujud Sikap Ganda Pemerintah,” *Media Indonesia* (7 Februari 2002).
- “Kodam Iskandar Muda Diresmikan,” *Suara Pembaruan* (5 Februari 2002); Aceh Military Command Reinstated, *The Jakarta Post* (5 Februari 2002).
- “Komisi Keamanan Bersama Tegur GAM dan Aparat Indonesia,” *Koran Tempo* (27 Januari 2003)
- “Komite Keamanan Bersama Belum Rumuskan Mekanisme Demiliterisasi,” *Tempo Interaktif* (7 Februari 2003)
- “Kondisi Aceh Pasca Ulang Tahun GAM: Tidak Semakin Baik”, *Jurnal Pasar Modal Indonesia* (Januari 2000)
- “Kondisi Pengungsi Memprihatinkan,” *Suara Pembaruan* (18 Juni 2003)
- “Konflik Aceh dan Siklus Pembinaan Prajurit,” *Kompas*, (13 Mei 2003)
- “Kontak Senjata di Aceh Utara, 10 Anggota GAM Tewas,” *Suara Pembaruan*, (21 Juni Tewas)
- “Kontak Senjata di Aceh, Dua Orang Tewas,” *Kompas* (22 Mei 2000)
- “Kontak Senjata di Bireun, Tiga Brimob Cedera,” *Suara Pembaruan*, (15 Maret 2003)

- “Kontak Senjata di Riau, Tiga Anggota GAM Tewas,” *Media Indonesia*, (28 Agustus 2003)
- “Kontak Senjata Terjadi di Dekat Bandara Banda Aceh,” *Kompas*, (1 Agustus 2003)
- “Kontak Senjata TNI dan GAM Terjadi di Kuta Baro,” *Suara Pembaruan*, (11 Juli 2003)
- “Kontak Senjata TNI-GAM Berlanjut,” *Suara Pembaruan* (26 April 2003)
- “Kontak Tembak Berlanjut di Aceh 9 Tewas,” *Kompas*, (12 November 2003)
- “Konvoi Sembako Diserang,” *Indopos*, (28 Mei 2003)
- “Konvoi TNI Dihadang Bom,” *Kompas*, (14 Juli 2003)
- “Kopassus Tertembak di Pidie,” *Media Indonesia*, (3 April 2003)
- “Kopassus Tewaskan Lima Anggota GAM,” *Republika*, (12 Juli 2003)
- “Korban Sipil Mulai Jatuh,” *Koran Tempo*, (22 Mei 2003)
- “Korban Sipil Terus Berjatuh di Aceh,” *Kompas*, (9 Oktober 2003)
- “Korban Terus Berjatuh Dalam Kontak Tembak di Aceh,” *Kompas*, (16 September 2003)
- “Kostrad Tambah Enam Batalyon ke Aceh,” *Republika* (8 Februari 2002).
- “KRI Sigalu Bebaskan 10 ABK Tawanan GAM,” *Media Indonesia*, (29 Oktober 2003)
- “KSAD Harap Kodam Atasi Kekerasan,” *Kompas* (6 Februari 2002), KSAD Resmikan Kodam Iskandar Muda,” *Republika* (6 Februari 2002).
- “KSAD: GAM Tambah Kekuatan,” *Jawa Pos* (28 Maret 2003).
- “KSAD: Jangan Dengar Inggris,” *Indopos*, (24 Juni 2003)
- “KSAD: Tidak Ada Penambahan Pasukan di Aceh,” *Suara Pembaruan* (6 Februari 2002).
- “KTP Ditandatangani Muspika,” *Republika* (5 Juni 2003)
- “Lagi, Dua Guru Dibunuh,” *Kompas*, (17 Juni 2003)
- “Lagi, Guru Diculik di Aceh,” *Kompas* (, 14 November 2003)
- “Lagi, Kepala Desa di Aceh Tewas Ditembak,” *Kompas*, (7 Oktober 2003)
- “Lagi, Minibus Dibakar di Aceh,” *Kompas*, (11 Juli 2003)
- “Lagi, Panglima GAM Tewas,” *Indopos*, (14 Agustus 2003)
- “Lagi, Warga Sipil Diculik,” *Kompas*, (6 November 2003)
- “Lagi, Warga Sipil Jadi Korban,” *Kompas*, (21 Juni 2003)
- “Letusan Senjata dan Bom Rakitan Sambut Pergantian Tahun,” *Kompas* (2 Januari 2001).

- “Lima Anggota JSC-GAM Tersangka Kasus Makar, *Republika*, (20 Mei 2003)
- “Lima Petinggi GAM Dilepas Polisi Aceh,” *Kompas* (18 Mei 2003).
- “Lima Petinggi GAM Ditangkap,” *Kompas* (17 Mei 2003) Lima Tokoh GAM Ditangkap, *Media Indonesia* (17 Mei 2003)
- “Lima Tokoh GAM Ditangkap,” *Media Indonesia*, (17 Mei 2003)
- “MA Beri Kewenangan Penuh Kepada Ketua PT Aceh,” *Suara Pembaruan*, (15 Agustus 2003)
- “Mahkamah Syariah Tak Ganggu Hak Non-Muslim,” *Kompas*, (5 Maret 2003)
- “Mana Berani Kami Menolak Apel,” *Koran Tempo* (18 Juni 2003)
- “Marak, Anak-Anak Direkrut Menjadi Intelijen GAM,” *Kompas*, (22 Oktober 2003)
- “Marinir Tewaskan 14 GAM,” *Republika*, (25 Juni 2003)
- “Markas Sofyan Dawood Dikepung,” *Media Indonesia*, (11 Agustus 2003)
- “Mega Instruksi Aparat untuk Bersiap Diri,” *Jawa Pos* (8 April 2003).
- “Megawati Minta Aparat Bertindak Tegas,” *Koran Tempo* (4 Juli 2002)
- “Melanggar Kesepakatan, GAM Diancam Hukuman Indonesia,” *Koran Tempo*, (30 Desember 2002)
- “Memasuki Ramadhan, Enam GAM Dilumpuhkan,” *Kompas*, (29 Oktober 2003)
- “Menko Polkam: Aksi GAM Merupakan Terorisme,” *Suara Pembaruan* (5 Juli 2002).
- “Menko Polkam: Hindari Penyimpangan Kesepakatan,” *Kompas* (16 Januari 2003).
- “Menteri Keuangan GAM Dituntut 16 Tahun Penjara, *Suara Pembaruan*, (26 September 2003)
- “Mereka Bermain di Air Keruh,” *Republika* (24 April 2003).
- “Mereka Terlibat Terorisme,” *Suara Pembaruan* (17 Mei 2003).
- “Military Fails to Stop Violence in Aceh,” *The Jakarta Post* (24 Juni 2002).
- “Minister Warns Aceh Truce Might be Broken,” *The Jakarta Post* (21 Januari 2003) .
- “Minta Pos TNI, Ribuan Warga Pidie Unjuk Rasa,” *Republika* (28 Maret 2003).
- “Mobil Camat Arongan Aceh Barat Ditembaki,” *Kompas*, (27 Agustus 2003)
- “Mobil Kru SCTV Ditembaki,” *Media Indonesia*, (19 Agustus 2003)
- “Mobil Pengangkut Koran "Serambi Indonesia" Dibakar, *Suara Pembaruan*, (18 Juli 2003)
- “Mobil Pers Dibakar Lagi,” *Kompas*, (24 Juli 2003)

- "Moratorium Tak Mampu Hentikan Kontak Senjata," *Media Indonesia* (26 Januari 2001).
- "More Brimob Troopers for Aceh," *The Jakarta Post* (14 Februari 2003).
- "More Brimob Troopers for Aceh," *The Jakarta Post*, (14 Desember 2002)
- "Muzakkir Manaf Lolos Dari Sergapan TNI," *Media Indonesia*, (14 Agustus 2003)
- "Nama Panglima Darurat Militer Aceh Dipakai Menipu," *Koran Tempo*, (22 Juli 2003)
- "North Sumatra Police Name 16 Suspects in Rp 2 Billion Refugee Aid Scam," *The Jakarta Post*, (12 Maret 2003)
- "Nyaris Jadi Sarden," *Koran Tempo*, (24 Juni 2003)
- "Officials Blame GAM for Piracy, Request More Funding," *The Jakarta Post*, (13 Januari 2003)
- "Operasi Aceh Tiga Tahap," *Republika* (26 April 2003).
- "Operasi di Aceh Dinodai Korupsi Dana Pengungsi," *Media Indonesia* (23 September 2003).
- "Operasi di Aceh Nonkonvensional," *Media Indonesia* (24 April 2003).
- "Operasi Militer Jangan Ditunda-tunda," *Media Indonesia* (22 April 2003).
- "Operasi Pemulihan Keamanan Dimulai," *Kompas* (19 Mei 2003).
- "Operasi Perlu Diperpanjang," *Kompas*, (19 September 2003)
- "Operasi Terpadu Digelar di Aceh," *Republika* (19 Mei 2003)
- "Pangdam IM Kecewa Dengan GAM," *Kompas* (24 Desember 2002).
- "Pangkoops Yakin Bekuk Tokoh GSA," *Republika* (21 Oktober 2003).
- "Panglima GAM Jeram Membelot," *Indopos*, (22 Juli 2003)
- "Panglima GAM Kutaraja Tewas," *Indopos*, (22 Juli 2003)
- "Panglima GAM Lhokseumawe Tewas," *Media Indonesia*, (13 Agustus 2003)
- "Panglima GAM Singkil Ditangkap," *Media Indonesia*, (4 Oktober 2003)
- "Panglima GAM Wilayah Meureuhom Tewas," *Suara Pembaruan*, (16 Juli 2003)
- "Panglima I Peusangan GAM Tewas Ditembak," *Kompas*, (13 Juli 2003)
- "Panglima Muda GAM Pase Tewas," *Suara Pembaruan*, (12 September 2003)
- "Panglima Muda GAM Tewas Terkena Roket," *Kompas*, (12 Juli 2003)
- "Panglima Sagoie GAM Wilayah Panca Tewas," *Suara Pembaruan*, (15 September 2003)
- "Panglima TNI Pertanyakan Pelantikan Panglima GAM di Pidie," *Kompas* (28 Januari 2003).

- "Panglima TNI: Habisi GAM Sampai ke Akar-akarnya," *Republika* (20 Mei 2003)
- "Panglima: Komisi Keamanan Bersama Cabut Dua Tuduhan," *Kompas* (28 Februari 2003).
- "Panser TNI Diserang GAM," *Koran Tempo*, (17 Agustus 2003)
- "Para Pejabat GAM Terus Ditangkap TNI," *Kompas*, (3 November 2003)
- "Pasokan Logistik GAM Wilayah Bireun Terputus," *Kompas*, (27 Juni 2003)
- "Pasukan TNI Gempur Kampung Hasan Tiro," *Kompas*, (17 Juli 2003)
- "PDMD Bersihkan Separatis Berdasi," *Media Indonesia* (24 Juni 2003)
- "PDMD Sita Ribuan Meter Kubik Kayu Curian," *Suara Pembaruan*, (12 Agustus 2003)
- "PDMD: GSA Terus Bantai Warga Sipil di Aceh," *Suara Pembaruan*, (7 Oktober 2003)
- "Peace in Doubt After Aceh Talks Canceled," *The Jakarta Post* (25 April 2003).
- "Peace Zone, A Start of Harmony in Aceh," *The Jakarta Post* (26 Februari 2003).
- "Pejabat di Provinsi NAD Bisa Diisi Anggota Militer," *Kompas*, (21 Mei 2003)
- "Pelaku Korupsi Dana Kemanusiaan Aceh Akan Ditindak," *Republika* (3 Oktober 2003).
- "Peledak Bom Tewas Tertembak," *Suara Pembaruan*, (20 Agustus 2003)
- "Peletakan Senjata GAM dan Relokasi TNI di Aceh Akankah Terjadi," *Kompas* (8 Februari 2003).
- "Pemadaman Listrik di NAD Meluas," *Kompas* (8 Juni 2003).
- "Pembakar Sekolah Ditangkap Saat Sedang Ronda," *Koran Tempo*, (6 Juni 2003)
- "Pembakaran Sekolah Terur Terjadi," *Republika* (29 Mei 2003)
- "Pembakaran Terus Terjadi di Aceh," *Koran Tempo*, (16 Agustus 2003)
- "Pembuatan KTP Merah Putih Diperpanjang," *Suara Pembaruan* (1 Agustus 2003).
- "Pemerintah Bentuk Tim Asistensi Untuk NAD," *Kompas* (20 Mei 2003).
- "Pemerintah Diharapkan Konsultasi Dengan DPR," *Kompas* (28 April 2003).
- "Pemerintah Koreksi Soal Penyelesaian Aceh," *Media Indonesia* (3 April 2003)
- "Pemerintah Minta GAM Menindaklanjuti Kesepakatan Geneva," *Kompas*, 1 Juni 2002.
- "Pemerintah Nyatakan GAM Teroris," *Republika* (5 Juli 2002)
- "Pemerintah RI Batalkan Perundingan Dengan GAM," *Kompas* (25 April 2003)
- "Pemerintah Tak Gubris Permintaan GAM," *Koran Tempo*, (10 April 2003)

- “Pemerintah Tolak Permintaan GAM,” *Media Indonesia* (6 Mei 2003).
- “Pemerintah Tunggu GAM dan HDC,” *Suara Pembaruan* (29 April 2003)
- “Pemerintah: Perundingan Damai Pekan Ini,” *Koran Tempo* (6 Mei 2003)
- “Pemimpin Pesantren Tewas Ditembak,” *Kompas*, (30 Agustus 2003)
- “Penangkapan Tokoh GAM Diintensifkan,” *Media Indonesia* (18 Oktober 2003)
- “Penangkapan Tokoh GAM Terus Berlangsung,” *Kompas*, (28 Juni 2003)
- “Penasihat GAM Divonis Tiga Tahun,” *Republika*, (14 Oktober 2003)
- “Penculikan Makin Marak di Aceh,” *Kompas*, (5 Mei 2003)
- “Pendataan Ulang PNS di NAD Ditambah Materi Kesetiaan pada NKRI,” *Kompas* (27 Juni 2003)
- “Penegakan Hukum di NAD Belum Optimal,” *Republika* (21 Juli 2003)
- “Penembak dan Pembakar Bus Diburu,” *Suara Pembaruan*, (21 Juni 2003)
- “Penembak Misterius Terus Beraksi,” *Media Indonesia* (17 Juni 2002)
- “Penembak Pangkoops Ditangkap, GAM Menantang TNI di Tiro,” *Kompas*, (16 Juli 2003)
- “Penembakan di Aceh,” *Media Indonesia*, (24 Oktober 2003)
- “Pengamanan Aceh Makin Diperketat,” *Kompas*, (16 Agustus 2003)
- “Pengebom Rumah Wakilpolda Aceh Dihukum 11 Tahun Penjara,” *Media Indonesia*, (20 Oktober 2003)
- “Pengiriman Ribuan Butir Peluru ke GAM Digagalkan,” *Suara Pembaruan*, (28 Mei 2003)
- “Pentolan GAM Kembali Ditangkap di Jambi,” *Suara Pembaruan*, (24 Juni 2003)
- “Penumpang Pesawat Diadang GAM,” *Kompas*, (21 Oktober 2003)
- “Penyebar Propaganda GAM Ditangkap,” *Suara Pembaruan*, (28 Mei 2003)
- “Penyelesaian Aceh Dalam Kerangka NKRI Harga Mati,” *Kompas* (29 April 2003)
- “Penyeru Referendum Dituntut 14 Tahun,” *Koran Tempo*, (26 Oktober 2003)
- “Perjanjian Damai Aceh Terancam Batal,” *Media Indonesia* (20 Januari 2003)
- “Perjanjian Dengan GAM Bisa Saja Dibatalkan Sepihak,” *Kompas* (19 Januari 2003)
- “Perkembangan Jumlah Kasus di Aceh,” *Media Indonesia* (22 April 2003).
- “Permusuhan Bisa Dihentikan,” *Republika* (21 Desember 2002).
- “Persoalan Aceh Belum Perlu Dibawa ke PBB,” *Media Indonesia*, (4 Mei 2003)
- “Pertempuran di Aceh Terus Berlanjut,” *Koran Tempo*, (23 April 2003)

- “Pertemuan Tokyo Terancam Gagal, *Suara Pembaruan* (17 Mei 2003)
- “Perundingan Tokyo Gagal, *Koran Tempo* (19 Mei 2003).
- “Perundingan Tokyo Sempat Tersendat,” *Koran Tempo* (18 Mei 2003).
- “Perusakan Kantor KKB Aceh Akumulasi Kekecewaan Warga,” *Media Indonesia* (6 Maret 2003).
- “Perwakilan Aceh di DKI Diawasi Ketat,” *Koran Tempo* (27 Mei 2003)
- “Pimpinan Pondok Pesantren Ditembak Mati,” *Kompas*, (26 September 2003)
- “Pimpro Dana Pendidikan Anak di Aceh Diadili,” *Kompas*, (2 Oktober 2003)
- “PMI Evakuasi Lima Mayat,” *Kompas*, (13 Agustus 2003)
- “Polda Aceh Gelar Operasi Elang Rencong 2003,” *Indopos*, (13 Agustus 2003)
- “Polda Bengkulu Serahkan Tiga Anggota GAM ke Kejaksaan,” *Suara Pembaruan*, (8 Agustus 2003).
- “Polda NAD Gelar Operasi Cinta Damai,” *Suara Pembaruan*, (2 Januari 2003)
- “Polda NAD Periksa Anggota DPRD Aceh Besar,” *Republika*, (25 Juli 2003)
- “Polda NAD Tetapkan 43 Tersangka Makar,” *Republika*, (28 Mei 2003)
- “Polda NAD Usut Pemerksaan Pelajar di Bireun,” *Suara Pembaruan*, (20 Juni 2003)
- “Police Question 13 Over JSC Attack,” *The Jakarta Post*, (8 April 2003)
- “Police Release GAM Leaders as Tokyo Meeting Starts,” *The Jakarta Post* (18 Mei 2003)
- “Police to Discuss Security Supervision,” *The Jakarta Post*, (26 Desember 2002)
- “Policeman Killed in Aceh,” *The Jakarta Post*, (22 Desember 2002)
- “Polisi Bentuk Tim Usut Perkosaan Siswi SMP,” *Koran Tempo*, (20 Juni 2003)
- “Polisi Ditembak, Pos Polisi Digranat,” *Kompas*, (17 November 2003)
- “Polisi Kejar Pembacok Anggota Brimob,” *Kompas*, (19 November 2003)
- “Polisi Penembak Mahasiswa Divonis Penjara 5 Tahun,” *Koran Tempo*, (23 Maret 2003)
- “Polisi Sita 1.000 Butir Amunisi GAM,” *Suara Pembaruan*, (8 Agustus 2003)
- “Polisi Tangkap Lima Perempuan,” *Media Indonesia*, (5 Agustus 2003)
- “Polisi Tangkap Pegawai Saat Rapat,” *Koran Tempo*, (21 Juni 2003)
- “Polisi Tembak Mati Kapolres GAM,” (*Indopos*, 24 Juli 2003)
- “Polisi Tuding GAM Terlibat Bom Medan,” *Republika*, (23 April 2003)
- “Polsek Baktya Digranat, Angkutan Umum Dibakar,” *Kompas*, (18 Juli 2003)
- “Pos TNI Diserang Lagi,” *Indopos*, (29 April 2003)

- “Potong Dana Kemanusiaan, Dua Camat Ditangkap,” *Kompas*, (1 Oktober 2003)
- “Prajurit TNI Akui Menganiaya Warga Aceh,” *Kompas*, (5 Juni 2003)
- “Prajurit TNI Ditembak di Aceh, Satu Tewas,” *Suara Pembaruan*, (15 Januari 2003)
- “Prajurit TNI-AU Masih Diculik GAM,” *Republika*, (5 April 2003)
- “Presiden Perintahkan TNI dan POLRI Siaga,” *Kompas* (8 Mei 2003)
- “Presiden Perpanjang Darurat Militer,” *Kompas* (4 November 2003).
- “Presiden: Tindak Tegas GAM,” *Suara Pembaruan* (4 Juli 2002)
- “Proses Perdamaian Aceh Bisa Terganjil,” *Kompas* (3 Januari 2003).
- “Puluhan Perwira TNI-AD Rapat Komando di Aceh,” *Media Indonesia* (27 Maret 2003).
- “Pungli Merajalela, Ratusan Sopir Truk ke Aceh Mogok,” *Kompas*, (25 Maret 2003).
- “Ratusan Mahasiswa Datangi JSC,” *Kompas*, (29 Januari 2003)
- “Ratusan Pengungsi Datangi JSC,” *Kompas*, (18 Maret 2003)
- “RI Ancam Keluar dari Perjanjian Damai Aceh,” *Koran Tempo* (18 Januari 2003)
- “RI Issues Last Warning Despite Tokyo Talks,” *The Jakarta Post* (18 Mei 2003)
- “RI Protests Shows of Support for Aceh Independence,” *The Jakarta Post* (10 Maret 2003).
- “RI Tekankan Dua Agenda Penting,” *Republika* (22 April 2003)
- “RI Tetapkan Dua Agenda Dalam JCM,” *Media Indonesia* (22 April 2003)
- “Ribuan Warga Aceh Mengungsi,” *Kompas*, (5 Mei 2003)
- “Rights Body Demands End to Aceh Operation,” *The Jakarta Post* (1 November 2003).
- “Satu Keluarga Dibantai, Tiga Tewas,” *Kompas*, (22 Oktober 2003)
- “Satu Prajurit TNI Gugur, Lima Lainnya Luka-Luka,” *Kompas*, (2 November 2003)
- “Schools not Priority for TNI Operation *The Jakarta Post* (22 Mei 2003).
- “Sebelas Warga Yang Disandera GAM Belum Kembali,” *Media Indonesia*, (7 Oktober 2003)
- “Sebuah Bom Ditemukan di Aceh Besar,” *Suara Pembaruan*, (5 Agustus 2003)
- “Sebuah Gardu Listrik Dirubuhkan,” *Suara Pembaruan*, (5 Agustus 2003)
- “Sejumlah Bom Rakitan Ditemukan di Aceh Utara,” *Republika*, (19 Agustus 2003)
- “Sekda GAM Divonis Sembilan Tahun,” *Republika*, (1 September 2003)

- “Sekitar 150 Rumah Dibakar GAM,” *Republika*, (21 Juni 2003)
- “Sekwilda GAM Diadili,” *Kompas*, (22 Juli 2003)
- “Seluruh Aceh Lumpuh,” *Indopos*, (13 Mei 2003)
- “Seluruh Anggota JSC Ditarik ke Aceh,” *Media Indonesia* (9 April 2003)
- “Seluruh Pasukan TNI di Aceh Siaga I,” *Media Indonesia* (25 April 2003).
- “Sembilan GAM Tewas Dalam Dua Hari Terakhir,” *Media Indonesia*, (5 September 2003)
- “Sembilan GAM Tewas Dalam Dua Hari Terakhir,” *Media Indonesia*, (5 September 2003)
- “Semua Pihak Harus Patuhi Penjanjian Damai Jenewa,” *Media Indonesia* (10 Desember 2002).
- “Seorang Aktivis Perempuan Ditangkap,” *Republika*, (21 Mei 2003)
- “Seorang Anggota Kopassus dan Dua GAM Tewas,” *Suara Pembaruan*, (9 September 2003)
- “Seorang Tentara Tewas Dibacok,” *Kompas*, (30 Maret 2003)
- “Seorang TNI dan Lima GAM Tewas,” *Indopos*, (25 Juni 2003)
- “Serangan Udara Untuk Shock Therapy,” *Suara Pembaruan*, (17 Juni 2003)
- “Setelah Warga Dievakuasi, Basis-Basis GAM Dibom,” *Kompas* (1 Juli 2003)
- “Sidang Ketua SIRA Kembali Digelar,” *Suara Pembaruan* (21 April 2003)
- “Sidang Narkoba Oknum TNI Digelar,” *Suara Pembaruan*, (12 Agustus 2003)
- “Sinergi Operasi Terpadu Belum Tampak Jelas,” *Suara Pembaruan* (26 Juni 2003).
- “Sipil Dibungkam Dengan Menangkapi Aktivis Aceh,” *Kompas* (19 Februari 2003)
- “Siswi SMP Mengaku Diperkosa Brimob,” *Koran Tempo*, (19 Juni 2003)
- “Situasi Aceh Memanas, GAM Mulai Serang TNI,” *Media Indonesia*, (26 April 2003)
- “Sosialisasi Kesepakatan Geneva Dinilai Kurang,” *Kompas* (3 Januari 2003)
- “Sosialisasi Perjanjian Belum Capai Sasaran,” *Suara Pembaruan* (16 Januari 2003).
- “Sosialisasi Perjanjian Damai di Aceh Dinilai Lamban,” *Koran Tempo* (3 Januari 2003).
- “Strategi TNI Tatkala Operasi Digelar,” *Media Indonesia* (12 Mei 2003).
- “Struktur PDMD Disempurnakan,” *Media Indonesia*, (22 Juli 2003)

- “Sudah 390 Anggota GAM Yang Dijatuhi Hukuman,” *Kompas*, (7 November 2003)
- “Tembak di Tempat Diberlakukan di Aceh,” *Kompas*, (22 Mei 2003)
- “Temukan Senjata di Sungai,” *Media Indonesia*, (23 Juli 2003)
- “Tension Increases in Aceh as Deadline Looms,” *The Jakarta Post*, (4 Mei 2003)
- “Teungku Amri Akan Diproses Secara Hukum,” *Media Indonesia*, (17 Mei 2003)
- “Tewas, Dua Pria Diidentifikasi Sebagai Petinggi GAM,” *Kompas*, (25 Agustus 2003)
- “Three GAM Fighters Killed in Shootout with Police,” *The Jakarta Post*, (4 April 2003)
- “Three Soldiers Questioned over Rapes,” *The Jakarta Post*, (30 Juni 2003)
- “Tiarap Dalam Hujan Peluru,” *Koran Tempo*, (23 Juni 2003)
- “Tiga Anggota GAM dan Satu TNI Tewas,” *Jawa Pos* (10 Juni 2002)
- “Tiga Anggota GAM Tewas Dalam Insiden Terpisah,” *Suara Pembaruan*, (6 Mei 2003)
- “Tiga Bocah Terkena GLM,” *Kompas*, (25 Juli 2003)
- “Tiga Kontak Senjata Terjadi di Aceh,” *Koran Tempo*, (23 Agustus 2003)
- “Tiga Korban Pembunuhan Ditemukan di Aceh Utara,” *Suara Pembaruan*, (11 Agustus 2003)
- “Tiga Mantan Perunding GAM Divonis Penjara 12-15 Tahun,” *Kompas*, (22 Oktober 2003)
- “Tiga Perawat Diculik di Pidie,” *Koran Tempo*, (21 Juni 2003)
- “Tiga Polisi Hilang di Aceh,” *Kompas* (11 Oktober 2000)
- “Tiga Tiang Listrik Kembali Roboh,” *Koran Tempo*, (19 Juni 2003)
- “Tiga Wanita Ditembak Mati, Satu Anak Luka,” *Kompas* (4 Agustus 2002).
- “Tim Ad Hoc Komnas HAM,” *Kompas* (6 November 2003); Komnas HAM: Batalan DM Aceh,” *Republika* (6 November 2003).
- “TNI Amankan Distribusi Sembako,” *Media Indonesia*, (27 Mei 2003)
- “TNI Ancam Kerahkan Pasukan Bila GAM Tak Gudangkan Senjata,” *Tempo Interaktif* (3 Februari 2003).
- “TNI Ancam Langgar Perjanjian Damai Aceh,” *Koran Tempo*, (21 Januari 2003)
- “TNI Belum Juga Tangkap Petinggi Militer GAM,” *Kompas* (17 Juni 2003)
- “TNI Blames GAM in Mass Home Burnings,” *The Jakarta Post* (1 Juni 2003)
- “TNI dan GAM Siap Terima Sanksi Komisi Keamanan Bersama,” *Suara Pembaruan* (28 Januari 2003).

- “TNI Fokuskan Tokoh GAM,” *Kompas* (23 Juli 2003)
- “TNI Gagalkan Penyelundupan Senjata,” *Republika*, (1 Mei 2003)
- “TNI Gempur GAM di Aceh Tamiang,” *Kompas*, (25 Juli 2003)
- “TNI Incar Markas Dua Petinggi GAM,” *Republika*, (1 Juni 2003)
- “TNI Kembali Dihadang di Aceh,” *Republika*, (17 Januari 2003)
- “TNI Kepung GSA di Gunung Siron,” *Republika*, (28 Juni 2003)
- “TNI Kepung Kantong-Kantong GAM,” *Republika*, (31 Mei 2003)
- “TNI Kepung Kawasan Sofyan Daud,” *Koran Tempo*, (1 Juni 2003)
- “TNI Kepung Markas GAM Aceh Besar,” *Suara Pembaruan*, (21 Juli 2003)
- “TNI Kerahkan Tank Scorpion,” *Indopos*, (23 Juni 2003)
- “TNI Kesulihan Hadapi GAM,” *Kompas* (9 Mei 2001).
- “TNI Kuasai Stasiun Radio Antar Benua GAM,” *Indopos*, (21 Juli 2003)
- “TNI Kuasai Wilayah Panglima GAM Sofyan Dawood,” *Republika*, (1 Juni 2003)
- “TNI Lancarkan Serangan Udara,” *Media Indonesia*, (17 Juni 2003)
- “TNI Langsung Masuk Zona Merah Basis GAM,” *Media Indonesia*, (, 20 Mei 2003)
- “TNI Minta JSC Tegas Terhadap GAM,” *Suara Pembaruan* (13 Maret 2003)
- “TNI Minta Klarifikasi Thailand Soal Senjata,” *Media Indonesia*, (1 Mei 2003)
- “TNI Protes Pelantikan Panglima GAM Pidie,” *Koran Tempo* (28 Januari 2003)
- “TNI 'Selamatkan' Lima Wartawan,” *Republika*, (21 Juni 2003)
- “TNI Siapkan Ladang Pembantaian GAM,” *Koran Tempo* (21 April 2003).
- “TNI Siapkan Rencana Cadangan untuk Aceh,” *Kompas* (31 Januari 2003).
- “TNI Sita 13 Bom dan 25 Detonator Rakitan,” (*Kompas*, 18 November 2003)
- “TNI Sita Sejumlah Senjata GAM,” *Koran Tempo*, (16 Juli 2003)
- “TNI Tembak Mati Wagub GAM Wilayah Pase,” *Media Indonesia*, (25 Juli 2003)
- “TNI Temukan Dua Bunker di Aceh,” *Media Indonesia*, (28 Juni 2003)
- “TNI Temukan Kabel "Repeater" Pemancar GAM,” *Kompas*, (24 Juli 2003)
- “TNI Temukan Peralatan Merakit Bom Milik GSA,” *Republika*, (9 Agustus 2003)
- “TNI Temukan Puluhan Bom,” *Media Indonesia*, (29 Mei 2003)
- “TNI Terus Kejar Pemberontak GAM,” *Suara Pembaruan*, (28 Juni 2003)
- “TNI Terus Menekan GAM,” *Kompas*, (24 Juni 2003)
- “TNI Terus Tekan GAM,” *Kompas*, (13 September 2003)
- “TNI Tetap Konsisten Perjanjian Aceh,” *Republika*, (24 Desember 2002)

- “TNI Tingkatkan Gempuran Untuk Memburu GAM,” *Kompas*, (27 Mei 2003)
- “TNI Tuding GAM Sandera 50 Kepala Desa di Pidie,” *Kompas* (28 Maret 2003).
- “TNI-AD Gelar Rapim di Lhokseumawe,” *Media Indonesia* (26 Maret 2003).
- “TNI-AL Kawal Kapal Pengangkut Sembako,” *Suara Pembaruan*, (4 Juni 2003)
- “TNI-GAM Kembali Kontak Senjata,” *Republika*, (2 Mei 2003)
- “TNI-GAM Kontak Senjata 25 Menit,” *Media Indonesia*, (21 Desember 2002)
- “TNI-GAM Kontak Senjata, 2 Sipil Tewas,” *Media Indonesia*, (2 Mei 2003)
- “Tokyo Meeting Doomed to Fail from the Start,” *The Jakarta Post* (28 Mei 2003).
- “Tolak Bayar Pajak Nanggroe, Kepala Sekolah Tewas Tertembak,” *Suara Pembaruan*, (5 Agustus 2003)
- “Transportasi Dikawal Panser,” *Indopos*, (27 Mei 2003)
- “Tuduh RI Tidak Jujur, GAM Tolak Sanksi,” *Suara Pembaruan* (1 Maret 2003).
- “Tugas Brimob di Aceh Berubah,” *Tempo Interaktif* (14 Februari 2003).
- “Tujuh Anggota GAM Tewas Dalam Baku Tembak,” *Kompas*, (19 Mei 2003)
- “Tujuh Mayat Warga Sipil,” *Media Indonesia*, (29 Agustus 2003)
- “Tujuh Pembakar Sekolah Ditangkap,” *Media Indonesia*, (8 Juni 2003)
- “Tujuh Warga Sipil Disandera,” *Media Indonesia*, (11 Mei 2003)
- “Tumbang Lagi, Tiga Tower Listrik,” *Republika*, (17 Juni 2003)
- “Two More Govt Offices Attacked in Banda Aceh,” *The Jakarta Post* (1 Oktober 2000)
- “Ukuran Sukses TNI Menyesatkan,” *Kompas* (19 Juni 2003).
- “Villagers Take GAM Relatives Hostage,” *The Jakarta Post*, (21 Juli 2003)
- “Violence Increases in Aceh as Peace Process in Danger,” *The Jakarta Post*, (1 Mei 2003)
- “War Returns to Aceh as Peace Talks Fail,” *The Jakarta Post* (19 Mei 2003)
- “Warga Aceh di Bandung Hanya Didata,” *Kompas* (24 Juni 2003).
- “Warga Aceh Selatan Minta Operasi Terpadu,” *Kompas*, (14 Mei 2003)
- “Warga Berharap Tidak Ada Personel Bersenjata di Zona Damai,” *Kompas* (24 Januari 2003).
- Warga Diancam GAM Agar Tidak Peringati HUT RI,” *Suara Pembaruan*, (11 Agustus 2003)
- “Warga Hancurkan Kantor KKB di Aceh,” *Media Indonesia* (5 Maret 2003).
- “Warga Keturunan Cina Ikrar Setia ke NKRI,” *Suara Pembaruan* (4 Agustus 2003)

“Warga Sandera Keluarga Anggota GAM,” *Suara Pembaruan*, (21 Juli 2003)

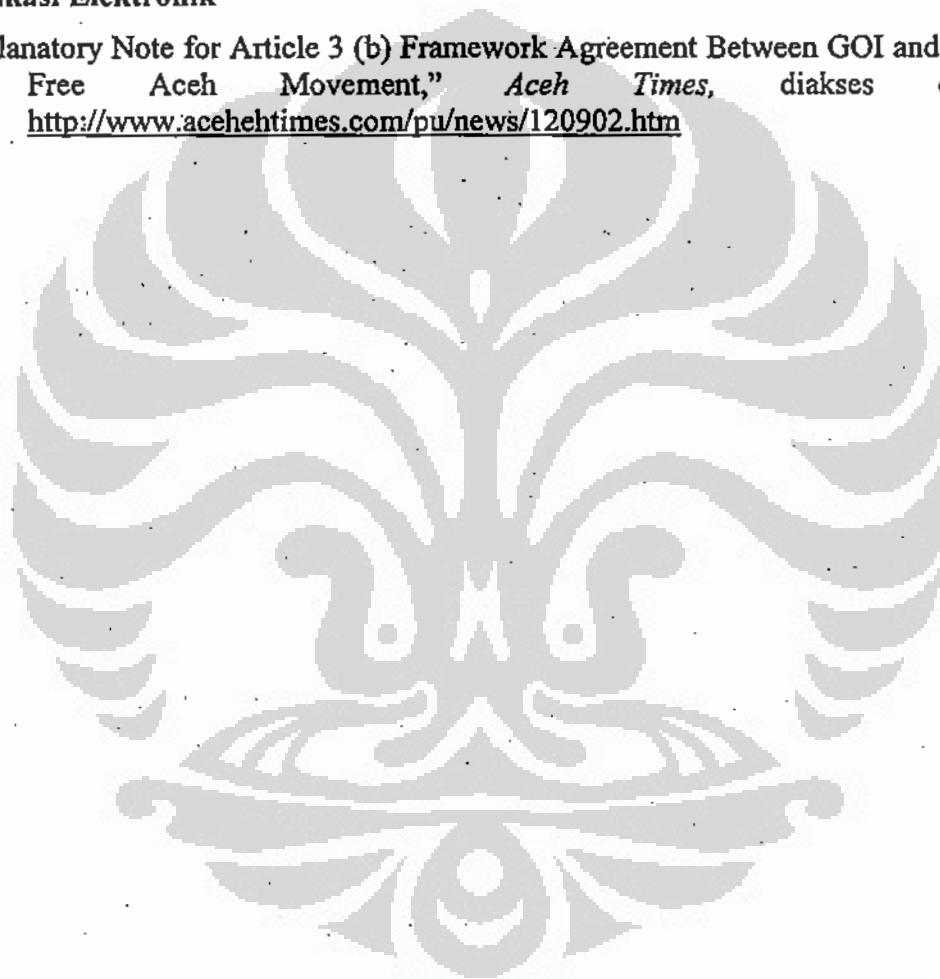
“Wartawan "Waspada" dan Keluarga Ditembak Kelompok Bersenjata Api,”
Kompas, (21 Juli 2003)

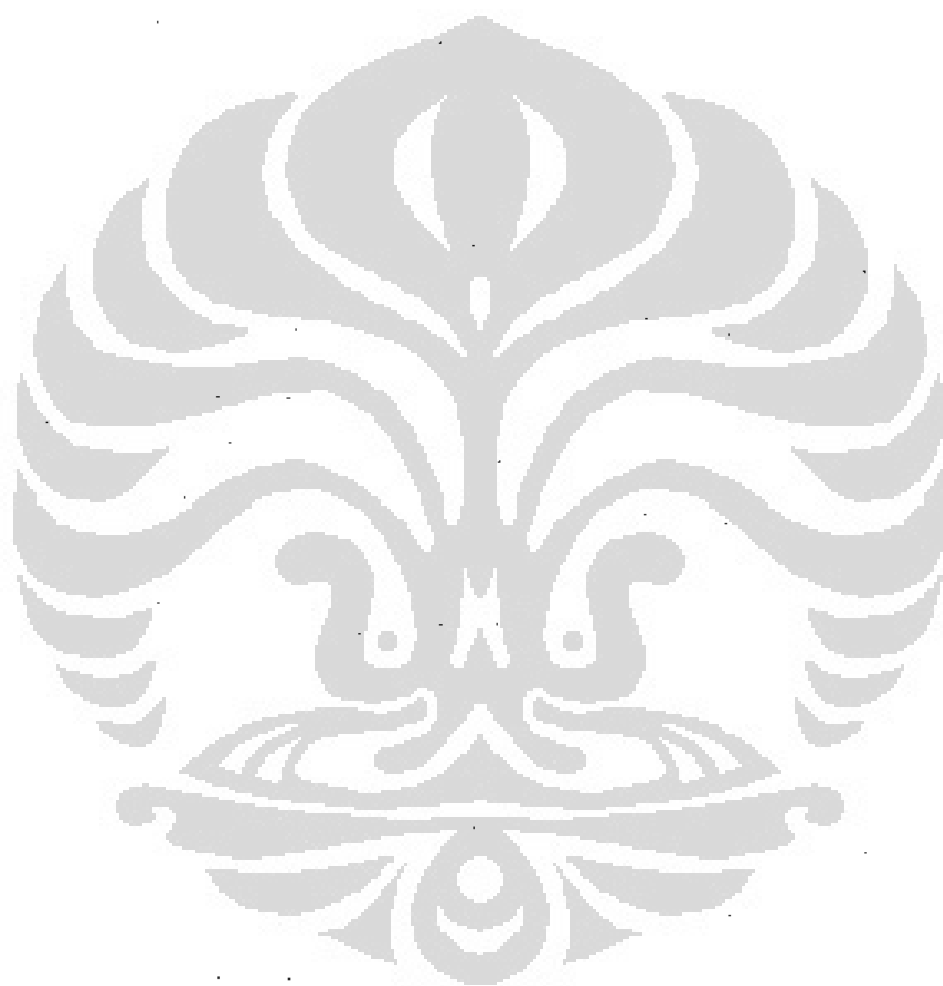
“Zona Damai di Aceh Bertambah,” *Koran Tempo* (9 Maret 2003)

“Zona Damai Ditolak, Pos Militer Minta Ditambah,” *Kompas* (31 Maret 2003).

Publikasi Elektronik

“Explanatory Note for Article 3 (b) Framework Agreement Between GOI and the
Free Aceh Movement,” *Aceh Times*, diakses dari
<http://www.acehehtimes.com/pu/news/120902.htm>





LAMPIRAN I

TABULASI DATA KASUS MASALAH KEAMANAN DI ACEH (9 DESEMBER 2002 SD. 19 NOVEMBER 2003)

Tanggal Beristiwa	Kategori Kasus	Deskripsi	Lokasi	Sumber dan Tanggal Berita
DESEMBER 2002				
19 Desember 2002	Serangan bersenjata dan pemboman	Pasukan TNI terlibat 2 kali kontak senjata dengan kelompok GAM di Desa Batu Delapan, Kecamatan Kota Makmur.	Aceh Utara	TNI-GAM Kontak Sejata 25 Menit (Media Indonesia, 21 Desember 2002)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Adanya indikasi penyelewengan terhadap dana bantuan sosial untuk pengungsi Aceh di lapangan.		Dana Pengungsi Aceh Dihentikan (Koran Tempo, 20 Desember 2002)
21 Desember 2002	Serangan bersenjata dan pemboman	Seorang anggota Resimen III Brimob tewas ditembak di Desa Meunasah-Krueng, Kecamatan Peudada.	Bireueun	Policeman Killed in Aceh (The Jakarta Post, 22 Desember 2002)
22 Desember 2002	Serangan bersenjata dan pemboman	1 truk pasukan Parako diserang di Desa Jambo Papeun, Kecamatan Kluet Utara.	Aceh Selatan	Dua Prajurit TNI Tewas di Aceh Selatan (Suara Pembaruan, 23 Desember 2002)
23 Desember 2002	Serangan bersenjata dan pemboman	Terjadi penyerangan terhadap pos polisi PT Wiralano di Desa Kampung Malaka, Kecamatan Kluet Utara.	Aceh Selatan	TNI Tetap Konsisten Perjanjian Aceh (Republika, 24 Desember 2002)
JANUARI 2003				
9 Januari 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	4 warga sipil dilaporkan tertembak ketika anggota Brimob berusaha membubarkan aksi demo di kawasan Geudong, Kecamatan Samudera, Aceh Utara.	Aceh Utara	4 Demonstran Tertembak di Aceh Utara (Suara Pembaruan, 10 Januari 2003)

11 Januari 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Nelayan di Sumatera Utara mengeluhkan meningkatnya aksi perampokan dengan senjata api di perairan sekitar Aceh.		Officials Blame GAM for Piracy, Request More Funding (The Jakarta Post, 13 Januari 2003)
14 Januari 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	2 prajurit TNI dari Yonif 431/Wirabuana tertembak setelah pasukan mereka dihadang 10 orang bersenjata di kawasan Lokop, Kecamatan Serbajadi, Aceh Timur.	Aceh Timur	Prajurit TNI Ditembak di Aceh, Satu Tewas (Suara Pembaruan, 15 Januari 2003)
16 Januari 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	Penghadangan terhadap anggota TNI dari Yonif 521/Kostrad oleh kelompok bersenjata terjadi di Desa Lhong Tunong, Kecamatan Jaya Lamno, Aceh Barat.	Aceh Barat	TNI Kembali Dihadang di Aceh (Republika, 17 Januari 2003)
18 Januari 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Banyak pengemudi truk mengeluhkan pemungutan liar oleh aparat keamanan di kawasan Aceh Timur dan Aceh Barat.	Aceh Timur Aceh Barat	Aceh Security Forces Continue to Extort Drivers (The Jakarta Post, 20 Januari 2003)
20 Januari 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Tim relawan PMI Aceh Utara mengevakuasi 3 mayat di kawasan Blang Kulam, Desa Pantan Rayeuk, Kecamatan Kuta Makmur. Juru Bicara GAM Wilayah Pasee mengkuai, ketiganya adalah anggota GAM yang ditangkap TNI 2 hari sebelum penandatanganan Kesepakatan COHA.	Aceh Utara	TNI Ancam Langgar Perjanjian Damai Aceh (Koran Tempo, 21 Januari 2003)
25 Januari 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	2 mahasiswa bersaudara ditembak orang tak dikenal ketika melintasi kawasan Lamreung, Kecamatan Krueng Baronajaya, Aceh Besar.	Aceh Besar	Ratusan Mahasiswa Datangi JSC (Kompas, 29 Januari 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	Terjadi baku tembak yang berawal dari serangan sekitar 10 anggota GAM terhadap pasukan Kostrad di Desa Cot Dulang, Kecamatan Lamno, Aceh Barat.	Aceh Barat	Baku Tembak Masih Terjadi (Koran Tempo, 27 Januari 2003)
30 Januari 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Danrem 011/Lilawangsa mengungkapkan bahwa dari intel yang dikerahkannya, diperoleh informasi bahwa GAM meminta dana Rp 30 juta kepada setiap desa di Aceh Utara.	Aceh Utara	GAM Minta Rp 30 Juta di Tiap Desa (Koran Tempo, 31 Januari 2003)

FEBRUARI 2003				
21 Februari 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	Sebuah bom rakitan meledak di Kecamatan Nisam, Aceh Utara. GAM Wilayah Pase membantah bertanggung jawab atas peledakan tersebut.	Aceh Utara	Suara Pembaruan, 4 Maret 2003
27 Februari 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Sesosok mayat tak dikenal ditemukan di Desa Blang Rimueng, Kecamatan Syamtalira Bayu, 11 km sebelah timur Kota Lhokseumawe.	Lhokseumawe	Dua Mayat Selama Demiliterisasi (Koran Tempo, 1 Maret 2003)
28 Februari 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Tim relawan PMI Aceh Utara mengevakuasi 1 mayat dari Kompleks Pelabuhan Krueng Keugueh, 17 km sebelah barat Kota Lhokseumawe.	Lhokseumawe	Dua Mayat Selama Demiliterisasi (Koran Tempo, 1 Maret 2003)
MARET 2003				
3 Maret 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Ribuan warga menyerbu Kantor JSC di Wisma Buntul Kubu, Kecamatan Takengon, Aceh Tengah. Warga marah karena JSC dianggap tidak menggubris laporan-laporan mereka.	Aceh Tengah	Kantor JSC di Takengon Diamuk Massa (Kompas, 3 Maret 2003)
8 Maret 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	KSAD menunjukkan laporan tertulis mengenai kasus 2 orang wanita diperkosa dan seorang suami dibunuh di Takengon, Aceh Utara.	Aceh Utara	GAM Dilaporkan Perkosa Dua Wanita (Republika, 10 Maret 2003)
14 Maret 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	Sebuah mobil yang mengangkut sejumlah anggota Polres dihujani peluru oleh 7 anggota GAM di Kecamatan Jeumpa, Bireuen.	Bireuen	Kontak Senjata di Bireun, Tiga Brimob Cedera (Suara Pembaruan, 15 Maret 2003)
15 Maret 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	Sebanyak 45 orang bersenjata menyerbu warga Kampung Burlintang, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah.	Aceh Tengah	Dua Orang Tewas Dalam Insiden di Aceh Tengah (Kompas, 17 Maret 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	Aksi kekerasan juga meletup di Desa Aluawe, Aceh Utara.	Aceh Utara	Aceh Memanas, Empat Warga Tewas (Koran Tempo, 17 Maret 2003)
19 Maret 2003	Perusakan fasilitas umum dan pemukiman,	Kabupaten Aceh Tengah terisolasi karena lumpuhnya transportasi darat. Insiden berdarah terjadi menyebabkan awak angkutan tak berani mengambil	Aceh Tengah	Kabupaten Aceh Tengah Masih Terisolasi (Kompas, 20

	serta blokade	resiko beroperasi ke daerah itu.		Maret 2003)
20 Maret 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Tak tahan dengan banyaknya pungutan liar yang masih terjadi di sepanjang jalan mulai dari Binjai, Sumatera Utara menuju Banda Aceh, ratusan sopir truk yang melayani angkutan barang melakukan aksi mogok.		Pungli Merajalela, Ratusan Sopir Truk ke Aceh Mogok (Kompas, 25 Maret 2003)
23 Maret 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Setelah sebelumnya diwarnai aksi demonstrasi di sejumlah kantor perwakilannya, kantor JSC di Lhokseumawe diancam dengan penemuan granat tipe manggis buatan Korea oleh tim Gegana Polres Aceh Utara.	Lhok-seumawe	Granat Ditemukan di Kantor Komite Keamanan Bersama Aceh (Koran Tempo, 25 Maret 2003)
27 Maret 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Sebanyak 56 <i>keuchik</i> (kepala desa) di Kabupaten Sigli, Pidie disandera oleh GAM sehubungan dengan rencana unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi di markas Kodim dan kantor JSC di kabupaten tersebut.	Pidie	GAM Sandera 56 Kades Saat Akan Berunjuk Rasa (Media Indonesia, 28 Maret 2003)
29 Maret 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	1 prajurit Yonif 328/Kostrad tewas dibacok oleh seorang yang diduga anggota GAM di Desa Lhok Kuala, Kecamatan Geumpang, Pidie.	Pidie	Seorang Tentara Tewas Dibacok (Kompas, 30 Maret 2003)
APRIL 2003				
2 April 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	Terjadi insiden penembakan saat 4 prajurit TNI datang ke sebuah toko di pasar Beureuneun, Kecamatan Mutiara, Pidie.	Pidie	Kopassus Tertembak di Pidie (Media Indonesia, 3 April 2003)
3 April 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	1 prajurit TNI-AU bersama 1 warga sipil diculik kelompok bersenjata GAM di kawasan Kecamatan Montasik, Aceh Besar.	Aceh Besar	Prajurit TNI-AU Masih Diculik GAM (Republika, 5 April 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	6 anggota GAM menyergap patroli polisi di kawasan Lheung Sago, Pidie.	Pidie	Three GAM Fighters Killed in Shoutout with Police (The Jakarta Post, 4 April 2003)

6 April 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Kantor JSC di Langsa Aceh Timur, dibakar massa karena dianggap tak mampu menyelesaikan persoalan keamanan yang dihadapi warga.	Aceh Timur	Kantor KKB Aceh Timur Dibakar Massa (Kompas, 6 April 2003)
7 April 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	2 instruktur Sekolah Polisi Negara, Seulawah diberondong oleh kawanan bersenjata di di kawasan Lamtamot, Aceh Besar.	Aceh Besar	Dua Instruktur Polisi Ditembak di Aceh Besar (Suara Pembaruan, 8 April 2003)
8 April 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Istri Ketua DPD II Partai Golkar tewas ditembak 2 pria bersenjata di depan rumahnya, di Desa Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Aceh Utara.	Aceh Utara	10 Sipil Tewas, JSC Tarik Anggota di Lapangan (Suara Pembaruan, 9 April 2003)
9 April 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	1 prajurit Yonif 320/Badak Putih diserang di Desa Lhok Guci, Kecamatan Teunom, Aceh Jaya saat hendak berangkat kerja bakti.	Aceh Jaya	Pemerintah Tak Gubris Permintaan GAM (Koran Tempo, 10 April 2003)
19 April 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	1 prajurit dari Yonif 144/Kodam Sriwijaya tewas dibacok di Desa Glumpang Payong, Kecamatan Jeumpa, Bireuen.	Bireuen	Anggota TNI Tewas di Bireun (Suara Pembaruan, 21 April 2003)
21 April 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Penduduk Desa Tanah Pasir menemukan sesosok mayat warga Desa U Blang Asan, Kecamatan Syamtalira Aron, Aceh Utara.	Aceh Utara	Pertempuran di Aceh Terus Berlanjut (Koran Tempo, 23 April 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Anggota GAM menembak seorang warga Desa Tempurung, Kecamatan Simpang, Aceh Timur.	Aceh Timur	Kekerasan di Aceh Meningkat (Media Indonesia, 23 April 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	Anggota GAM menyerang Pertempuran terjadi di pos Koramil 12/TVF dan Polsek Tanah Pasir di Desa Matang Ulim, Kecamatan Tanah Pasir, Aceh Utara.	Aceh Utara	Kekerasan di Aceh Meningkat (Media Indonesia, 23 April 2003)
22 April 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	Terjadi bentrokan senjata saat sekitar 15 anggota GAM menghadang aparat keamanan di Desa Ulee Glee, Kecamatan Leubu, Bireuen.	Bireuen	Pertempuran di Aceh Terus Berlanjut (Koran Tempo, 23 April 2003)

25 April 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	20 anggota GAM menghadang 17 personil gabungan TNI/POLRI di kawasan Aleu Raya, Kecamatan Sawang, Banda Aceh.	Banda Aceh	Situasi Aceh Memanas, GAM Mulai Serang TNI (Media Indonesia, 26 April 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	Di Bireuen, pos Yonif 144/JY Kostrad diserang dengan mortir oleh anggota GAM di Desa Tepi Mani, Kecamatan Juli.	Bireuen	
26 April 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	Patroli Kapolres Bireun diserang 20 pria bersenjata saat melintasi kawasan Cot Gapa.	Bireuen	Aceh Terus Bergolak (Kompas, 27 April 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	Di Kecamatan Samalanga, Bireun, 1 prajurit Koramil 016/Samalanga tewas ditembak anggota GAM di tengah keramaian pasar.	Bireuen	
	Serangan bersenjata dan pemboman	Pos Marinir Tiping/Gajah, Aceh Barat diserang oleh sekitar 20 anggota GAM.	Aceh Barat	
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	4 anggota GAM menculik 2 karyawan BRI Cabang Kota, Aceh Selatan.	Aceh Selatan	Aceh Terus Bergolak (Kompas, 27 April 2003)
28 April 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Di Aceh Tengah, 30 anggota GAM melakukan pemukulan dan menjarah toko milik warga Desa Bathin, Kecamatan Permata, Aceh Tengah.	Aceh Tengah	Aceh Terus Bergolak (Kompas, 27 April 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	Terjadi kontak senjata di Kecamatan Jeunib, Bireun saat pos Yonif 328/Kostrad diserang belasan anggota GAM.	Bireuen	Pos TNI Diserang Lagi (Indopos, 29 April 2003)
30 April 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	Terjadi baku tembak antara polisi dengan GAM di Desa Peulanteu, Kecamatan Arongan Lambalek, Aceh Barat setelah aparat mendapat laporan penghadangan truk pengangkut bahan bakar minyak oleh kelompok bersenjata.	Aceh Barat	Baku Tembak GAM-TNI Terus Terjadi (Kompas, 1 Mei 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	15 prajurit TNI dari Yonif 320/Badak Sakti yang sedang melakukan pengamanan acara tolak bala di Dusun Manggaman, Kecamatan Kluet, Aceh Selatan, diserang 20 anggota GAM.	Aceh Selatan	TNI-GAM Kembali Kontak Senjata (Republika, 2 Mei 2003)
	Serangan bersenjata dan	Di kawasan Geulumpang, Kecamatan Jeumpa, Bireun, terjadi kontak senjata antara pasukan Brimob dengan anggota	Bireuen	Baku Tembak GAM-TNI Terus Terjadi

	pemboman	GAM.		(Kompas, 1 Mei 2003)
MEI 2003				
1 Mei 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	20 anggota GAM melakukan aksi penembakan ke arah warga sipil di Jalan Ujung Blang, Desa Uli Jalan, Kecamatan Banda Sakti, Aceh Utara	Aceh Utara	Baku Tembak TNI-GAM Makin Gencar (Kompas, 2 Mei 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	Sekitar 40 anggota GAM melakukan penyerangan terhadap sejumlah prajurit dari Yonif 725 di Desa Alue Lohop, Aceh Timur.	Aceh Timur	TNI-GAM Kontak Senjata, 2 Sipil Tewas (Media Indonesia, 2 Mei 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	Terjadi penyerangan terhadap markas Koramil Mila, Kabupaten Pidie oleh 15 anggota GAM.	Pidie	GAM Serang Kodim, Seorang TNI Tewas (Suara Pembaruan, 2 Mei 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	2 Kepala Desa dari Desa Blang Mane, Kecamatan Makmur, Aceh Utara dan Desa Meriah Jaya, Kecamatan Tamiang, Aceh Tengah diculik oleh kelompok bersenjata	Aceh Utara	GAM Culik Dua Kepala Desa (Kompas, 3 Mei 2003)
3 Mei 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	1 warga sipil tewas ditembak di sebuah warung oleh 2 pria tak dikenal yang menggunakan sepeda motor di Jl. Teuku Hamzah Bendahar, Kota Lhokseumawe.	Lhok-seumawe	Tension Increases in Aceh as Deadline Looms (The Jakarta Post, 4 Mei 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	Terjadi kontak senjata di Desa Teupin Gajah, Aceh Selatan yang bermula ketika sejumlah anggota GAM menyerang pos keamanan setempat.	Aceh Selatan	
	Serangan bersenjata dan pemboman	20 anggota GAM menyerang pos marinir di Desa Teping, Aceh Selatan.	Aceh Selatan	Ribuan Warga Aceh Mengungsi (Kompas, 5 Mei 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	25 anggota GAM membakar jembatan yang menghubungkan Desa Blangmei, dan Desa Tasiara, Kecamatan Woyla, Aceh Barat.	Aceh Barat	GAM Mulai Lakukan Serangan Kota (Media Indonesia, 5 Mei 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan,	Ketua DPRD Lhokseumawe, Aceh Utara dicegat dan sempat diculik anggota GAM. Namun, ajudan dan sopir, serta kendaraannya masih	Aceh Utara	Persoalan Aceh Belum Perlu Dibawa ke PBB (Media

	serta intimidasi	ditahan.		Indonesia, 4 Mei 2003)
4 Mei 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	Sebuah bom dilempar dan meledak di Jl. Desa Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe.	Lhokseumawe	GAM Mulai Lakukan Serangan Kota (Media Indonesia, 5 Mei 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	Terjadi aksi penyerangan yang dilakukan GAM terhadap 30 prajurit TNI dari Yonif 320/BP di Desa Tanah Mungah, Kecamatan Kelut Selatan, Aceh Selatan.	Aceh Selatan	
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas di Sungai Krueng Tadu, Desa Alue Bata, Kecamatan Kuala, Aceh Besar.	Aceh Besar	Penculikan Makin Marak di Aceh (Kompas, 5 Mei 2003)
5 Mei 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	Baku tembak antara 15 anggota GAM dan 20 personel Brimob pecah di Desa Pante, Kecamatan Peusangan, Bireun	Bireuen	Bom Terus Membakar Aceh (Koran Tempo, 6 Mei 2003)
7 Mei 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	7 penumpang bus disandera 10 anggota GAM di kawasan Langsa Timur, Aceh Timur.	Aceh Timur	Tujuh Warga Sipil Disandera (Media Indonesia, 11 Mei 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	2 pria bersenjata api menembak 1 anggota Brimob BKO Polsek Tanah Luas di Jl. Kenari, Kecamatan Kuta Blang, Aceh Utara	Aceh Utara	
10 Mei 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	Sebuah bom meledak di kawasan Rantau, Kecamatan Darussalam, Lhokseumawe.	Lhokseumawe	Belum Jelas, Nasib Orang Yang Diculik GAM (Kompas, 11 Mei 2003)
12 Mei 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	11 warga Desa Pusma, Kecamatan Kuala Baro, Aceh Selatan diculik sejumlah orang yang diduga anggota GAM	Aceh Selatan	Seluruh Aceh Lunpuh (Indopos, 13 Mei 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Di Aceh Barat, seorang guru tewas ditembak di rumahnya, Desa Balek, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat.	Aceh Barat	Konflik Aceh dan Siklus Pembinaan Prajurit (Kompas, 13 Mei 2003)

	Serangan bersenjata dan pemboman	Terjadi kontak senjata setelah 10 prajurit TNI yang tengah berpatroli diserang 4 anggota GAM di Kampung Drien, Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan	Aceh Selatan	Konflik Aceh dan Siklus Pembinaan Prajurit (Kompas, 13 Mei 2003)
13 Mei 2003	Perusakan fasilitas umum dan pemukiman, serta blokade	Sebuah tempat penggilingan padi milik warga Desa Matang Jareng, Kecamatan Samalanga, Bireun habis dibakar anggota GAM.	Bireuen	Warga Aceh Selatan Minta Operasi Terpadu (Kompas, 14 Mei 2003)
17 Mei 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	Rombongan Muspida Kabupaten Aceh Selatan diserang kelompok bersenjata api saat melintasi Desa Ujung Pulo Cut, Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan.	Aceh Selatan	Tujuh Anggota GAM Tewas Dalam Baku Tembak (Kompas 19 Mei 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	Sekitar 15 anggota GAM menyerang pos Brimob di Desa Seulikat, Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan.	Aceh Selatan	Aceh Selatan Mulai Bergolak (Koran Tempo, 19 Mei 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Di Aceh Utara, Kepala Desa Ulee Jalan, Kecamatan Banda Sakti tewas ditembak saat mengendarai sepeda motor.	Aceh Utara	Aceh Selatan Mulai Bergolak (Koran Tempo, 19 Mei 2003)
18 Mei 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	1 anggota Brimob terluka parah saat terjadi baku tembak antara pasukan perintis dengan GAM di kawasan perbatasan Dea Cot Uno dan Desa Kota Baru, Kecamatan Jeumpa, Bireun.	Bireuen	GAM-POLRI Baku Tembak (Republika, 19 Mei 2003)
20 Mei 2003	Perusakan fasilitas umum dan pemukiman	GAM dilaporkan membakar 1 stasiun pemancar RRI di Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar.	Aceh Besar	Casualties Rise as Offensive Intensifies (The Jakarta Post, 22 Mei 2003)
	Perusakan fasilitas umum dan pemukiman	Rumah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bireun dan Ketua DPRD Kabupaten Aceh Utara juga musnah dibakar.	Bireuen	185 Gedung Sekolah di Aceh Dibakar (Media Indonesia, 21 Mei 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Seorang anggota DPRD Bireun dari Fraksi Aliansi tewas ditembak kelompok bersenjata	Bireuen	Aksi Bumi Hangus Terus Terjadi (Republika, 21 Mei 2003)

	Perusakan fasilitas umum dan pemukiman, blokade	Sejumlah orang tak dikenal menebang pohon kelapa di sekitar Dusun Cot Unu, Bireun untuk merintang jalan, sehingga tiada kendaraan yang berani melintas.	Bireuen	Aksi Bumi Hangus Terus Terjadi (Republika, 21 Mei 2003)	
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Di Bireun, warga Desa Cot Unoc, Cot Trieng, Gelanggang dan sekitarnya mengeluhkan aksi perampasan KTP oleh sekelompok orang bersenjata.	Bireuen	Bireun Dalam Cengkraman Teror (Surara Pembaruan, 21 Mei 2003)	
	Perusakan fasilitas umum dan pemukiman, blokade	Armada bus angkutan jurusan Banda Aceh-Medan tidak beroperasi. Selain karena pemumpang langka, para sopir bus merasa khawatir akibat meningkatnya ketegangan di Aceh.		Bus Banda Aceh-Medan Hentikan Operasi (Republika, 21 Mei 2003)	
21 Mei 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	Sebuah truk diberondong dan kemudian dibakar di kawasan Teupin, Kecamatan Glumpang Tiga, Pidie setelah menyuruh supir truk keluar.	Pidie	Korban Sipil Mulai Jatuh (Koran Tempo, 22 Mei 2003)	
	Serangan bersenjata dan pemboman	1 prajurit Detasemen 1 Kompi A terluka saat pasukannya menyeberangi sungai, ditembaki oleh GAM di Desa Ule Jalan, Kecamatan Peusangan, Bireun.	Bireuen		
	Serangan bersenjata dan pemboman	Pasukan Brimob dicegat sekitar 10 anggota GAM di Desa Krueng Luas, Kecamatan Trumon, Aceh Selatan.	Aceh Selatan		
	Serangan bersenjata dan pemboman	GAM menyerang kendaraan Exxon Mobil di Teupin Punt, Kecamatan Geudong, Aceh Utara.	Aceh Utara		Kompas, 22 Mei 2003
	Serangan bersenjata dan pemboman	Detasemen-1 Satgas Mobil-2 dihadang anggota GAM di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Makmur, Aceh Timur.	Aceh Timur		Tembak di Tempat Diberlakukan di Aceh (Kompas, 22 Mei 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	GAM juga menyerang pasukan gabungan Yonif 511 dan Yonif 320 di Kota Fajar, Aceh Selatan.	Aceh Selatan		GAM Mulai Melawan (Indopos, 22 Mei 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	(i) Patroli pasukan gabungan Yonif 315 dan Brimob disergap 6 anggota GAM di Kecamatan Di Tiro, Pidie. (ii) Pasukan Brimob Polsek Bandar Dua dihadang 20 anggota GAM saat berpatroli di Desa Manyang, Kecamatan Lancok, Pidie.	Pidie		

	Serangan bersenjata dan pemboman	Kru TV7 diserang oleh penembak gelap di Kecamatan Teupin Raya, Bireun dalam perjalanan dari Banda Aceh menuju Lhokseumawe.	Lhokseumawe	Suara Pembaruan, 2 Juni 2003
	Perusakan fasilitas umum dan pemukiman, blokade	2 orang tak dikenal membakar rumah seorang warga Desa Hagu Barat Laut, Kota Lhokseumawe.	Lhokseumawe	
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Sejumlah anggota GAM melakukan aksi <i>sweeping</i> dan merampas KTP penduduk Desa Alue We, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara.	Aceh Utara	
24 Mei 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	Mobil yang ditumpangi wartawan Metro TV dan Media Indonesia diberondong peluru saat melintasi Desa Blang Mane, Kecamatan Makmur, Bireuen.	Bireuen	Ditembak Setelah Meliput Aksi Penyisiran (Koran Tempo, 1 Juni 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	Kru TV7 kembali diserang oleh penembak gelap di Kecamatan Teupin Raya, Bireun dalam perjalanan kembali ke Banda Aceh.	Banda Aceh	Suara Pembaruan, 2 Juni 2003
25 Mei 2003	Perusakan fasilitas umum dan pemukiman, blokade	30 anggota GAM melakukan penghadangan jalan dengan membuat beton sepanjang 2 meter dan tinggi 70 sentimeter di Desa Alue Merah, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara.	Aceh Utara	Media Indonesia, 27 Mei 2003
	Serangan bersenjata dan pemboman	Kelompok GAM melempar granat di depan Toko Prima, kurang lebih 10 meter dari pos Marinir di Desa Keude Pantan Labu, Kecamatan Tanah Jambo, Aceh Utara.	Aceh Utara	Transportasi Dikawal Panser (Indopos, 27 Mei 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	Sekitar 100 anggota GAM melakukan penghadangan terhadap Tim Gabungan Satgas Yonif Linud 433, Brimob dan Koramil 8 Sungai Hiu di Desa Seunebok, Kecamatan Simpang Empat, Aceh Timur.	Aceh Timur	
	Serangan bersenjata dan pemboman	(i) Di Kecamatan Teupin Raya, Bireun 2 mobil yang mengangkut 6 wartawan ditembaki oleh orang tak dikenal. (ii) Di waktu yang berbeda, mobil wartawan Metro TV juga ditembak di tempat yang sama.	Bireuen	Suara Pembaruan, 2 Juni 2003
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan,	Anggota GAM membakar rumah seorang anggota Satpam PT Exxon Mobil di Desa Blang Kabo, Kecamatan Samudra, Aceh Utara.	Aceh Utara	TNI Amankan Distribusi Sembako (Media

	serta intimidasi			Indonesia, 27 Mei 2003)
26 Mei 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	3 mobil dibakar orang tak dikenal di Desa Blang Kuta, Kecamatan Gandapura, Bireun.	Bireuen	TNI Tingkatkan Gempuran Untuk Memburu GAM (Kompas, 27 Mei 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	Yonif Linud 433 kembali melakukan kontak senjata dengan kelompok GAM di Desa Mila Daya, Kecamatan Bireun Bayeun, Aceh Timur saat berpatroli.	Aceh Timur	Media Indonesia, 27 Mei 2003
	Serangan bersenjata dan pemboman	Tim Kosatgas Mobil-1 dihadang sekitar 25 anggota GAM di Desa Matang Selemak, Kecamatan Idi Cut, Aceh Timur.	Aceh Timur	Konvoi Sembako Diserang (Indopos, 28 Mei 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Sebanyak 21 nelayan asal Pangkalan Brandan, Sumatera Utara ditawan GAM di perairan Aceh Tamiang	Aceh Tamiang	Alleged GAM Members Kidnap 10 Fishermen (The Jakarta Post, 28 Mei 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	Konvoi 10 truk pengangkut sembako yang dikawal tim gabungan Yonif 315 dan Kodim 01/02 Pidie diserang oleh belasan anggota GAM ketika memasuki Desa Jurong Pandai, Kecamatan Glumpang Tiga, Pidie.	Pidie	Konvoi Sembako Diserang (Indopos, 28 Mei 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	Pasukan Resimen III Brimob dihadang kelompok GAM di Desa Suak Bekah Simpang Empat Lhok Kruet, Kecamatan Sampoinet, Aceh Jaya.	Aceh Jaya	
	Serangan bersenjata dan pemboman	Yonif 133 Kostrad yang tengah berpatroli diserang GAM di Desa Busu, Kecamatan Mutiara Barat, Pidie.	Pidie	
	Serangan bersenjata dan pemboman	Mobil yang membawa wartawan Associated Press diserang di kawasan Teupin Raya, Bireun.	Bireuen	Suara Pembaruan, 2 Juni 2003
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	GAM menyandera warga Desa Sibuanan, Kecamatan Runding, Aceh Singkil. Sandera akhirnya dibebaskan dan GAM melarikan diri setelah diberikan Rp 750.000.	Aceh Singkil	Media Indonesia, 29 Mei 2003
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Seorang karyawan BRI dilaporkan diculik sekelompok orang bersenjata di kawasan Jl. Japakeh, Aceh Besar.	Aceh Besar	Republika, 28 Mei 2003

28 Mei 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	Terjadi kontak senjata antara Tim Baladika dengan 200 anggota GAM di Desa Serena Maju, Kecamatan Matang Kuli, Aceh Utara.	Aceh Utara	Republika, 29 Mei 2003
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	3 mayat pria tanpa identitas dengan sejumlah luka tembak ditemukan di Desa Bukit Seumadam, Kecamatan Kejuruan, Aceh Tamiang.	Aceh Tamiang	Koran Tempo, 29 Mei 2003
29 Mei 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	Pasukan TNI dari Detasemen Cakra terlibat kontak senjata dengan kelompok GAM ketika berpatroli di pinggir pantai Krueng Genting, Kecamatan Kuala Simpang, Aceh Tamiang.	Aceh Tamiang	Kapal Asing Dilarang Masuk NAD (Media Indonesia, 31 Mei 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	Tim Satgas Yonif 431 terlibat baku tembak dengan kelompok GAM di Desa Penggalangan, Kecamatan Blang Kejeren, Gayo Lues.	Gayo Lues	Kapal Asing Dilarang Masuk NAD (Media Indonesia, 31 Mei 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	2 prajurit TNI, termasuk Danramil 03/Seruay tewas dalam kontak senjata dengan sekitar 50 anggota GAM di Desa Pusong Kapal, Kabupaten Aceh Tamiang.	Aceh Tamiang	GAM Mulai Kembangkan Pola Kekerasan Pada Rakyat (Media Indonesia, 31 Mei 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	Kelompok GAM melemparkan sebuah granat ke Pos Yonif 312 di Kampung Lueng Bata, Kota Banda Aceh.	Banda Aceh	Kapal Asing Dilarang Masuk NAD (Media Indonesia, 31 Mei 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	Terjadi pembakaran 4 unit armada angkutan darat di 2 lokasi terpisah pada ruas jalan raya Banda Aceh-Medan, yaitu di Desa Julok Tunong dan Desa Bukit Selamat, Aceh Timur.	Aceh Timur	Republika, 31 Mei 2003
30 Mei 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	Kompi Rajawali Yonif 305/Kostrad disergap 8 anggota GAM terjadi di kawasan Ujung Pancu, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar.	Aceh Besar	TNI Kepung Kantong-Kantong GAM (Republika, 31 Mei 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	GAM menyandera sekitar 200 warga Desa Pusong Kapal, yang terletak di Pulau Pusong Kapal di Kecamatan Seruay, Aceh Tamiang.	Aceh Tamiang	GAM Sandera 200 Warga (Indopos, 31 Mei 2003)

	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	PMI Kabupaten Bireun mengevakuasi 3 mayat tak dikenal di Desa Lancoy, Kecamatan Jeumpa, Bireun.	Bireuen	
	Perusakan fasilitas umum dan pemukiman, serta blokade	Sekelompok GAM membakar 52 rumah penduduk Desa Krueng Simpo, Kecamatan Peurlak Timur, Aceh Timur.	Aceh Timur	TNI Blames GAM in Mass Home Burnings (The Jakarta Post, 1 Juni 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	1 prajurit Yonif 305 Kostrad tewas diserang anggota GAM saat pasukannya berada di kawasan perbukitan Geulayang, Desa Ujong Pancu, Kecamatan Lamteh, Aceh Besar.	Aceh Besar	TNI Kepung Kawasan Sofyan Daud (Koran Tempo, 1 Juni 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	2 warga sipil tewas ditembak di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara.	Aceh Utara	Republika, 2 Juni 2003
31 Mei 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Seorang siswi SMU Kuta Binjai diculik sejumlah anggota GAM di Desa Blang Nisam, Kecamatan Julok, Aceh Timur.	Aceh Timur	TNI Blames GAM in Mass Home Burnings (The Jakarta Post, 1 Juni 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	Komandan Koramil 04 gugur ditembak anggota GAM setelah mobil yang ditumpangnya dicegat GAM di Desa Parao, Kecamatan Lhong, Aceh Besar.	Aceh Besar	Danramil Tewas, Sekda Terluka (Suara Pembaruan, 2 Juni 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	3 unit mobil jurusan Medan-Meulaboh dibakar kelompok bersenjata di Kampung Lhok Jain, Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan.	Aceh Selatan	Republika, 2 Juni 2003
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	10 orang bersenjata merampas kendaraan dan merampok uang milik seorang sopir taksi di Desa Ujung Mangki, Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan	Aceh Selatan	
JUNI 2003				
1 Juni 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	Sekretaris Daerah Pemkot Lhokseumawe, Aceh Utara terluka parah akibat diberondong tembakan saat mengendarai mobil di Desa Dayah Tanoh, Kecamatan Glumpang Tiji,	Pidie	GAM Berondong Sekda Lhokseumawe (Republika, 2 Juni 2003)

		Pidie.		
2 Juni 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	2 bom meledak dalam waktu yang hampir bersamaan Banda Aceh, yaitu di Jl. Malahayati, belakang Markas Polres Banda Aceh, dan di Lam Pulo.	Banda Aceh	Bom Rakitan Teror Banda Aceh (Republika, 3 Juni 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	Truk pengangkut sembako dari Saree ke Bireun yang dikawal anggota Polres Pidie, dihadang dan ditembaki oleh GAM di Desa Seupeng, Kecamatan Peukan Baro, Pidie.	Pidie	GAM Serang Jalur Logistik Bireun-Pidie (Media Indonesia, 3 Juni 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	Seorang prajurit TNI dari Yonif 315/Siliwangi terluka parah akibat ditembak oleh anggota GAM di Desa Tungo, Kecamatan Simpang Tiga, Pidie.	Pidie	
	Serangan bersenjata dan pemboman	Terjadi penyerbuan terhadap pos Brimob di Kecamatan Krueng Sabe, Aceh Jaya oleh 30 anggota GAM.	Aceh Jaya	Republika, 3 Juni 2003
	Serangan bersenjata dan pemboman	Sebuah granat meledak di atap rumah seorang warga di Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe.	Lhokseumawe	Dua Guru SD Aceh Ditembak di Rumah (Kompas, 4 Juni 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Kepala Sekolah SD Blang Bade, Bireun tewas ditembak bersama anaknya yang juga guru di rumahnya, Desa Lancok, Kecamatan Jeumpa.	Bireuen	Dua Guru SD Aceh Ditembak di Rumah (Kompas, 4 Juni 2003)
3 Juni 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	Rumah dinas Kapolres Aceh Utara diserang dengan pelontar granat, tapi meleset mengenai rumah seorang dokter.	Aceh Utara	Koran Tempo, 4 Juni 2003
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	3 kepala desa di Kecamatan Indrajaya, Pidie melapor ke kepolisian karena diancam sejumlah anggota GAM.	Pidie	Koran Tempo, 4 Juni 2003
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Kepala Desa Kampung Melayu, Kecamatan Indrajaya mengalami luka tembak saat menuju kantor Dinas Pendidikan setempat.	Pidie	Koran Tempo, 4 Juni 2003

	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Seorang pegawai bagian Tata Usaha SMPN Tulang Cut ditemukan tak bernyawa di pinggir jembatan Alur Bebat, Kecamatan Karang Baru, Aceh Timur.	Aceh Timur	Koran Tempo, 4 Juni 2003
	Perusakan fasilitas umum dan pemukiman, serta blokade	Para sopir angkutan umum di Lhokseumawe tidak beroperasi sepanjang hari karena khawatir terkena penyisiran dan kendaraan mereka dibakar anggota GAM.	Lhokseumawe	Angkutan di Lhokseumawe Lumpuh (Republika, 4 Juni 2003)
5 Juni 2003	Perusakan fasilitas umum dan pemukiman, serta blokade	4 menara <i>base transmitter station</i> PLN di Desa Senebuk Dalam, Kecamatan Rantau Selamat, Aceh Timur dirobohkan orang tak dikenal. Akibatnya, pasokan listrik ke Aceh Utara dan sebagian Aceh Timur putus total.	Aceh Timur	Empat Tower Suplai Listrik Dirobohkan (Kompas, 7 Juni 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	Prajurit Yonif 502 menjumpai 15 anggota GAM saat berpatroli di Desa Panggoi, Kecamatan Nisam, Aceh Utara.	Aceh Utara	Dua Hari Terakhir, 11 Anggota GAM Tewas (Media Indonesia, 7 Juni 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Seorang karyawan PT Pupuk Iskandar Muda tewas ditembak 6 orang bersenjata di rumahnya, Kompleks BTN PIM, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Lhokseumawe.	Lhokseumawe	Empat Tower Suplai Listrik Dirobohkan (Kompas, 7 Juni 2003)
6 Juni 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	GAM menembakkan granat ke Markas Koramil 14 dari seberang sungai Desa Penten Labu, Aceh Utara.	Aceh Utara	Dua Hari Terakhir, 11 Anggota GAM Tewas (Media Indonesia, 7 Juni 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Seorang petani dibacok di Kampung Kute Arma, Kecamatan Bandar, Aceh Tengah	Aceh Tengah	Koran Tempo, 7 Juni 2003
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Mayat seorang warga Desa Cot Bukit, Kecamatan Peusangan, Bireun ditemukan di saluran irigasi Payameneng.	Bireuen	

15 Juni 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	Di Aceh Besar, 5 anggota GAM menembaki pos Yonif 312 di Desa Lampahan, Kecamatan Indrapuri.	Aceh Besar	TNI Lancarkan Serangan Udara (Media Indonesia, 17 Juni 2003)
16 Juni 2003	Perusakan fasilitas umum dan pemukiman, serta blokade	3 tower listrik di Kecamatan Rantau Seulamat, Aceh Timur ditumbangkan GAM, yang mengakibatkan pemadaman listrik di sepanjang wilayah pantai timur Aceh.	Aceh Timur	Tumbang Lagi, Tiga Tower Listrik (Republika, 17 Juni 2003)
	Perusakan fasilitas umum dan pemukiman, serta blokade	Sebuah poliklinik di Desa Tanjong Hagu, Kecamatan Samudra, Aceh Utara dibakar sekelompok orang.	Aceh Utara	Koran Tempo, 17 Juni 2003
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Seorang warga sipil ditembak saat menuju kantornya, BRI, di Kota Sigli, Pidie.	Pidie	Koran Tempo, 17 Juni 2003
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	2 orang guru diculik dan ditemukan tewas di lokasi gedung SMU Susoh di Kabupaten Aceh Barat Daya yang terbakar beberapa waktu lalu.	Aceh Barat Daya	Lagi, Dua Guru Dibunuh (Kompas, 17 Juni 2003)
17 Juni 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Seorang warga ditemukan tewas di kebun Pinang, Desa Suminah, Kecamatan Nisam, Aceh Utara.	Aceh Utara	Guru Mengaji Dibantai di Kebun Pinang (Republika, 18 Juni 2003)
18 Juni 2003	Perusakan fasilitas umum dan pemukiman, serta blokade	Sebanyak 3 tiang listrik di Desa Bagog, Kecamatan Nurussalam, Aceh Timur dirobohkan orang tak dikenal.	Aceh Timur	Tiga Tiang Listrik Kembali Roboh (Koran Tempo, 19 Juni 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Anggota Brimob dilaporkan telah memperkosa seorang siswi kelas 3 SMPN 2 Bireuen.	Bireuen	Siswi SMP Mengaku Diperkosa Brimob (Koran Tempo, 19 Juni 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Kamerawan TVRI Stasiun Banda Aceh yang hampir sebulan diculik, ditemukan tewas di kawasan Kreung Cut, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar.	Aceh Besar	Kamerawan TVRI Aceh Tewas (Media Indonesia, 19 Juni 2003)

19 Juni 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	2 pos TNI di Pidie diserang dengan pelontar granat. Serangan pertama menghantam Pos Dahana VI, sedangkan serangan kedua mengenai markas Koramil di Desa Lhong Putung.	Pidie	Lagi, Warga Sipil Jadi Korban (Kompas, 21 Juni 2003)
	Perusakan fasilitas umum dan pemukiman, serta blokade	Sebanyak 150 rumah karyawan, 1 unit kantor manajer, 7 unit mess dan 3 unit truk, serta menjarah sejumlah aset PT Patria Kamo di Desa Gajah Muntah, Kecamatan Rantau Selamat, Aceh Timur dibakar sekitar 250 anggota GAM.	Aceh Timur	Sekitar 150 Rumah Dibakar GAM (Republika, 21 Juni 2003)
20 Juni 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	(i) Sebuah bus CV Salam ditembaki oleh sekitar 20 anggota GAM saat melintas di Kecamatan Glumpang Tiga, Pidie, dan kemudian membakar bus itu. 9 penumpang bus terluka terbakar. (ii) Kawanan ini juga menembaki dan membakar Colt L300 yang melintas di Desa Pante Raja, Pidie. 3 penumpang terluka. (iii) Peristiwa serupa juga menimpa 3 truk pengangkut besar. Namun, 1 truk berhasil diselamatkan.	Pidie	GAM Tembak 9 Penumpang (Indopos, 21 Juni 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	Markas Polsek Baiturrahman, Banda Aceh dilempari granat oleh orang tak dikenal.	Banda Aceh	
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	3 perawat Puskesmas di Kecamatan Mereudu, Pidie diculik oleh anggota GAM.	Pidie	Tiga Perawat Diculik di Pidie (Koran Tempo, 21 Juni 2003)
21 Juni 2003	Perusakan fasilitas umum dan pemukiman, serta blokade	Sedikitnya 23 rumah toko hangus terbakar di kawasan Panter, Dusun Suka Makmur, Kota Sabang, yang diduga dilakukan oleh anggota GAM.	Sabang	GAM Terus Lakukan Pembakaran (Media Indonesia, 23 Juni 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	2 mayat warga sipil ditemukan di 2 lokasi terpisah di Desa Blang Banjo dan di Sungai Pantelhong, Kecamatan Peusangan, Bireun.	Bireuen	TNI Kerahkan Tank Scorpion (Indopos, 23 Juni 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Mayat pria tanpa identitas dengan luka penganiayaan ditemukan di perbatasan Desa Suad Ribee, Aceh Besar.	Aceh Besar	Tiarap Dalam Hujan Peluru (Koran Tempo, 23 Juni 2003)

	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Di Aceh Utara, seorang warga sipil tewas ditembak 4 orang tak dikenal saat menumpang angkutan dari Kota Binjai menuju Kota Langsa.	Aceh Utara	36 Tank Scorpion Amankan Jalur Darat (Media Indonesia, 23 Juni 2003)
22 Juni 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Seorang Kepala SD tertembak saat angkutan umum yang ditumpanginya ditembaki di Sesa Kuta Batee, Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara.	Aceh Utara	Kapolsek Blang Mangat Dibunuh GAM (Koran Tempo, 24 Juni 2003)
	Perusakan fasilitas umum dan pemukiman, serta blokade	15 anggota GAM dilaporkan menumbangkan pohon di badan jalan desa dan merampas KTP, serta mengancam penduduk Desa Teungoh, Kecamatan Samalanga, Aceh Timur untuk tidak mengurus KTP Merah Putih.	Aceh Timur	Tiarap Dalam Hujan Peluru (Koran Tempo, 23 Juni 2003)
23 Juni 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	3 minibus kembali diserang GAM di kawasan Lam Leupung, Kuta Cot Glee, Aceh Besar. Begitu melihat sweeping GAM tersebut, 2 minibus yang lain berusaha berbalik arah, namun keduanya pun ditembaki.	Aceh Besar	KSAD: Jangan Dengar Inggris (Indopos, 24 Juni 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	Kapolsek Blang Mangat tewas ditembak anggota GAM di Simpang Kandang, Desa Mee, Kota Lhokseumawe.	Lhokseumawe	Kapolsek Blang Mangat Tewas Ditembak (Suara Pembaruan, 24 Juni 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	GAM menembak mati Kepala Desa Pulo Luh, Kecamatan Ulim, Pidie.	Pidie	KSAD: Jangan Dengar Inggris (Indopos, 24 Juni 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	5 anggota Brimob terluka ketika truk yang mereka tumpangi terbalik akibat melindas bom yang dipasang anggota GAM di daerah Aule Ladong, Kecamatan Geumpang, Pidie.	Pidie	TNI Terus Menekan GAM (Kompas, 24 Juni 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	1 prajurit TNI dari Tim IV Kompi Parako gugur dalam kontak senjata di Kampung Nila, Kabupaten Nagan Raya, sekitar 400 km Kota Banda Aceh.	Pidie	Seorang TNI dan Lima GAM Tewas (Indopos, 25 Juni 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	Di Desa Palu Usie, Kecamatan Mutiara, Pidie, 1 anggota GAM tewas tertembak saat terjadi penyerangan pasukan TNI.	Pidie	Koran Tempo, 25 Juni 2003

	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	1 mayat pria tanpa identitas ditemukan warga Desa Cot Deu, Kecamatan Julok, Aceh Timur.	Aceh Timur	Koran Tempo, 25 Juni 2003
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	20 anggota GAM merampas barang-barang di Kantor Desa Muka Blang, Kecamatan Pante Raja, Pidie.	Pidie	Kapolsek Blang Mangat Dibunuh GAM (Koran Tempo, 24 Juni 2003)
	Perusakan fasilitas umum dan pemukiman, serta blokade	Di Desa Bagok Panah, Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur, GAM memotong sebuah tower transmisi listrik.	Aceh Timur	KSAD: Jangan Dengar Inggris (Indopos, 24 Juni 2003)
24 Juni 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	Pasukan TNI diserang di Desa Ujung Rimba, Kecamatan Mutiara, Pidie.	Pidie	Koran Tempo, 25 Juni 2003
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	2 mayat pria ditemukan warga di 2 lokasi terpisah di Kabupaten Bireun, yaitu di bawah Jembatan Krueng Tingkeum, Kecamatan Gandapura dan di bawah jembatan gantung Desa Pantee Lhong, Kecamatan Peusangan.	Bireuen	Dua Mayat Ditemukan di Bireun (Indopos, 25 Juni 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	GAM memaksa penduduk untuk menurunkan bendera merah putih di Desa Muka Blang, Kecamatan Pantai Raja, Pidie.	Pidie	GAM Paksa Penduduk Turunkan Bendera Merah Putih (Republika, 25 Juni 2003)
26 Juni 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	Sebuah bus CV Cendrawasih jurusan Bireun-Sigli ditembaki kelompok bersenjata di kawasan Desa Kuta Pangwa, Kecamatan Treung Gading, Pidie.	Pidie	Bus Penumpang Kembali Ditembaki (Kompas, 27 Juni 2003)
29 Juni 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	3 prajurit TNI dilaporkan telah memperkosa 4 wanita di 4 desa di Kecamatan Sunagi Mas, Pidie, yaitu Kajeun, Kedaung, Lancong dan Tutut.	Pidie	Three Soldiers Questioned over Rapes (The Jakarta Post, 30 Juni 2003)
JULI 2003				
6 Juli 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan,	Warga Desa Kreung Ceukou, Kecamatan Saunangan, Aceh Barat menyandera keluarga anggota GAM. Mereka meminta GAM melepaskan 2	Aceh Barat	Warga Sandera Keluarga Anggota GAM (Suara

	serta intimidasi	guru yang disandera.		Pembaruan, 21 Juli 2003)
10 Juli 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	Sebuah minibus jurusan Kuala Simpang-Sigli dibakar kawanan bersenjata di kawasan Meunasah Nga, Kecamatan Lhok Sukon, Aceh Utara.	Aceh Utara	Lagi, Minibus Dibakar di Aceh (Kompas, 11 Juli 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	Di Kecamatan Kota Makmur, Aceh Utara, sejumlah anggota GAM menghadang patroli Tim-2 Kompi A Yonif Linud 501.	Aceh Utara	GAM Bakar Minibus, 2 Penumpang Luka Bakar (Media Indonesia, 11 Juli 2003)
13 Juli 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	Konvoi 3 truk TNI yang mengangkut logistik dihadang kelompok bersenjata dengan ranjau di kawasan Desa Tepi Nara, Kecamatan Geudong, Aceh Utara.	Aceh Utara	Konvoi TNI Dihadang Bom (Kompas, 14 Juli 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Seorang warga Desa Dayah Panjoe, Kecamatan Gandapura, Bireun ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala di Desa Barat Lanyan, Kecamatan Lancang, Bireun.	Bireuen	Bahtiar Tewas Setelah Menjadi Narasumber TV (Republika, 14 Juli 2003)
15 Juli 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	9 anggota GAM menghadang 6 mobil angkutan umum di jalan raya antara Blang Kejeran, sekitar perbatasan Aceh Tengah dan Gayo Lues, tepatnya pada Km 23 Desa Gudang Hutan, Kecamatan Rikit Gaib.	Aceh Tengah	GAM Sweeping Angkutan Umum, Tiga Penumpang Tewas (Suara Pembaruan, 16 Juli 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	Terjadi penghadangan dan perampasan mobil PLN unit Panto Labu di Desa Arogan Lise, Kecamatan Pantan Labu, Aceh Utara.	Aceh Utara	Polsek Baktya Digranat, Angkutan Umum Dibakar (Kompas, 18 Juli 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Dalam aksi <i>sweeping</i> -nya di Kecamatan Rikit Gaib, anggota GAM menculik dan membunuh 3 penumpang dari etnis tertentu.	Gayo Lues	Etnis Tertentu Mulai Diburu di Aceh (Kompas, 16 Juli 2003)
16 Juli 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	Markas Polsek Baktya, Aceh Utara digranat orang tak dikenal.	Aceh Utara	Polsek Baktya Digranat, Angkutan Umum Dibakar (Kompas, 18 Juli 2003)
	Serangan	Sebuah bus umum jurusan	Aceh	

	bersenjata dan pemboman	Lhokseumawe-Panton Labu dibakar di tengah jalan Desa Peusong, Kecamatan Samudra, Aceh Utara.	Utara	
17 Juli 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	Mobil pengangkut surat kabar <i>Serambi Indonesia</i> dilaporkan dibakar sejumlah pria bersenjata di kawasan Desa Lambeuso, Kecamatan Jaya Lamno, Aceh Jaya.	Aceh Jaya	Mobil Pengangkut Koran "Serambi Indonesia" Dibakar (Suara Pembaruan, 18 Juli 2003)
18 Juli 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	Prajurit TNI menembak mati 4 anggota GAM dalam suatu kontak senjata di Desa Alur Kaur dan Paneron, Kecamatan Bayen, Aceh Timur.	Aceh Timur	Empat Anak Buah Ishak Daud Tewas (Suara Pembaruan, 19 Juli 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	4 mayat warga sipil yang ditemukan di 3 tempat terpisah di kawasan Simpang Balek, Aceh Tengah.	Aceh Tengah	Empat Mayat Ditemukan (Media Indonesia, 19 Juli 2003)
19 Juli 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	Mobil ambulans PMI Aceh diserang orang tak dikenal di kawasan Desa Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.	Aceh Besar	Ambulans PMI Diserang (Indopos, 21 Juli 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	20 personel Unit Perintis Sabhara dari Polda Sulsel yang tengah berpatroli ditembaki oleh 2 orang bersepeda motor di Desa Keureumok, Kecamatan Delima, Pidie.	Pidie	
	Serangan bersenjata dan pemboman	Mobil Metro TV diberondong peluru di Julok, Aceh Timur.	Aceh Timur	Kekerasan Terhadap Wartawan Meningkat (Media Indonesia, 22 Juli 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Warga Kecamatan Kuala, Aceh Barat menyandera 36 orang keluarga anggota GAM karena beberapa hari sebelumnya ada warga setempat yang disandera GAM.	Aceh Barat	Villagers Take GAM Relatives Hostage (The Jakarta Post, 21 Juli 2003)
20 Juli 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Wartawan Harian Umum <i>Waspada</i> bersama anak dan istrinya ditembak 4 orang bersenjata api di rumahnya di Desa Bangka Jya, Kecamatan Krueng Geukeuh, Aceh Utara.	Aceh Utara	Wartawan "Waspada" dan Keluarga Ditembak Kelompok Bersenjata Api

				(Kompas, 21 Juli 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Kepala Dinas Pendidikan Lhokseumawe ditembak anggota GAM usai shalat maghrib di rumahnya di Kecamatan Muara Dua.	Lhok-seumawe	Struktur PDMD Disempurnakan (Media Indonesia, 22 Juli 2003)
21 Juli 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	Terjadi kontak senjata antara anggota Brimob dan anggota GAM saat digelarnya apel kesetiaan kepada NKRI di Desa Lhongraya, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar.	Aceh Besar	Dikejutkan Kontak Senjata (Media Indonesia, 22 Juli 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	Di Desa Teupin, Kecamatan Glumpang Tiga, Pidie, 3 truk barang dilaporkan ditembak dan kemudian dibakar oleh sekelompok orang bersenjata api.	Pidie	Panglima GAM Jeram Membelot (Indopos, 22 Juli 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Terjadi aksi penipuan dengan mengatasnamakan PDMD untuk meminta uang jutaan rupiah kepada para korban dengan dalih pembiayaan operasi keamanan.		Nama Panglima Darurat Militer Aceh Dipakai Menipu (Koran Tempo, 22 Juli 2003)
22 Juli 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	2 guru Madrasah Ibtidayah Negeri ditembak di kawasan Desa Drien Bungong, Kecamatan Bandar Dua, Pidie.	Pidie	GAM Kembali Tembak Warga Sipil (Media Indonesia, 24 Juli 2003)
23 Juli 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	Kendaraan operasional surat kabar lokal, <i>Serambi Indonesia</i> dibakar 5 pria berpistol di Desa Krueng Mane, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara.	Aceh Utara	Mobil Pers Dibakar Lagi (Kompas, 24 Juli 2003)
24 Juli 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	3 bocah bersaudara menjadi korban ledakan granat saat bermain di depan Puskesmas Ulim, Kecamatan Ulim, Pidie.	Pidie	Tiga Bocah Terkena GLM (Kompas, 25 Juli 2003)
AGUSTUS 2003				
3 Agustus 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	(i) Kepala Desa Mane Tunong, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara terluka di bagian perut akibat ditembak orang tak dikenal di dekat rumah Sekretaris Desa. (ii) Kepala Pemukiman Paloh, Kecamatan Muara Dua, Aceh Utara juga ditembak orang tak dikenal dan mengenai lehernya.	Aceh Utara	Kepala Desa di Aceh Utara Ditembak Orang Tak Dikenal (Suara Pembaruan, 4 Agustus 2003)
	Kriminalitas, penculikan	(i) Seorang kepala sekolah merangkap sekretaris desa di Desa Riceh Baroh,	Aceh Utara	Tolak Bayar Pajak Nanggroe,

	dan pembunuhan, serta intimidasi	Aceh Utara tewas ditembak sekelompok orang bersenjata di rumahnya. (ii) Sementara kepala desa di Desa Richeh Baroh tewas dalam perjalanan pulang dari kenduri.		Kepala Sekolah Tewas Tertembak (Suara Pembaruan, 5 Agustus 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Sepasang suami istri ditembak di rumah mereka di Desa Raul, Kecamatan Makmur, Nagan Raya.	Nagan Raya	
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Peristiwa penembakan juga terjadi pada seorang petani miskin di Desa Gampong Gunci, Aceh Utara.	Aceh Utara	Gerombolan Bersenjata Mengganas di Aceh (Kompas, 5 Agustus 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	6 warga yang tengah mencari kayu di Gunung Gucut, Kecamatan Seulawah, Pidie disandera sekitar 20 anggota GAM.	Pidie	
4 Agustus 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, intimidasi	Sebuah bom rakitan berkekuatan besar ditemukan warga di pinggir jalan Desa Neusuk, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar.	Aceh Besar	Sebuah Bom Ditemukan di Aceh Besar (Suara Pembaruan, 5 Agustus 2003)
5 Agustus 2003	Perusakan fasilitas umum dan pemukiman, serta blokade	Sebuah gardu listrik di Kampung Abeuk Jaloh, Kecamatan Jangka, Bireun dirobohkan oleh sekelompok orang tak dikenal.	Bireuen	Sebuah Gardu Listrik Dirubuhkan (Suara Pembaruan, 5 Agustus 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, intimidasi	Sebuah bom rakitan seberat 10 kilogram ditemukan Yonif 121/Macan Kumbang tepat di depan pintu I PT Arun, Desa Maneutunong, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara.	Aceh Utara	Bom Ditemukan di Depan Pintu PT Arun (Suara Pembaruan, 5 Agustus 2003)
7 Agustus 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	2 anggota Polsek Samalanga, Bireun ditembak 5 orang bersenjata api saat keduanya sedang bertugas mengamankan BPD Aceh Unit Samalanga.	Bireuen	Di Bireun, Dua Polisi Tewas (Koran Tempo, 9 Agustus 2003)
9 Agustus 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta	Seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Tangan Tangan, Aceh Barat diculik 3 orang bersenjata di rumahnya.	Aceh Barat	Jelang HUT RI di Aceh Razia Diperketat (Kompas, 12 Agustus 2003)

	intimidasi			
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Juru Bicara TNI menyampaikan, GAM mendatangi sejumlah kepala desa dan mengancam agar masyarakat tidak memperingati upacara 17 Agustus. Selain itu, kepala desa dilarang berhubungan dengan kantor pemerintah.		Warga Diancam GAM Agar Tidak Peringati HUT RI (Suara Pembaruan, 11 Agustus 2003)
10 Agustus 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	3 mayat tanpa identitas dengan kondisi yang mengesankan ditemukan di 3 lokasi berbeda di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, yaitu Desa Lancang Barat, Desa Bangka Jaya, dan Desa Beluka Tubai.	Aceh Utara	Tiga Korban Pembunuhan Ditemukan di Aceh Utara (Suara Pembaruan, 11 Agustus 2003)
	Perusakan fasilitas umum dan pemukiman, serta blokade	SMPN Paya Meuligo, Kecamatan Peureulak, Aceh Timur dibakar oleh sekelompok orang bersenjata. Mereka juga membakar 3 rumah, 1 laboratorium, perpustakaan, Mushola dan pos kamling.	Aceh Timur	Gedung SMP Negeri di Aceh Timur Dibakar (Suara Pembaruan, 12 Agustus 2003)
11 Agustus 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	GAM berkekuatan 40 orang menjarah rumah kepala desa, pertokoan dan kilang padi di Aceh Tenggara.	Aceh Tenggara	GAM Menjarah (Media Indonesia, 12 Agustus 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Warga Desa Juli Mee Tengoh dan Desa Seupeng, Kecamatan Juli, Bireun mengaku kehilangan harta benda mereka saat mengungsi ke Cot Gapu.	Bireun	Harta Benda Bilang Ketika Ditinggal Mengungsi (Suara Pembaruan, 12 Agustus 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	Sebuah bom meledak di tempat pembakaran kondensat cluster II Exxon Mobil, Aceh Utara.	Aceh Utara	Bom Meledak di Cluster II Exxon Mobil (Suara Pembaruan, 13 Agustus 2003)
12 Agustus 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	2 warga ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala dan dada di wilayah Ule Tutu, Desa Tingkeuem Baru, Kecamatan Gandapura, Bireun.	Bireun	Ibu dan Anak Tewas Tertembak (Suara Pembaruan, 12 Agustus 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan,	PMI Cabang Gandapura mengevakuasi 5 mayat tak dikenal yang terkubur selama 6 hari di kawasan tambak udang Desa Samuti Krueng, Kecamatan	Bireun	PMI Evakuasi Lima Mayat (Kompas, 13 Agustus 2003)

	serta intimidasi	Gandapura, Bireun.		
13 Agustus 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Markas Koops TNI menyebutkan adanya penculikan dan pembunuhan terhadap Kepala Desa Tunong Payakruiep, Kecamatan Nurussalam, Aceh Timur.	Aceh Timur	Muzakkir Manaf Lolos Dari Sergapan TNI (Media Indonesia, 14 Agustus 2003)
14 Agustus 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Sejumlah kepala desa (<i>keuchik</i>) dan kepala sekolah di Kecamatan Sawangan, Aceh Utara mendapat teror dari kelompok bersenjata GAM agar tidak memperingati Hari Kemerdekaan RI.	Aceh Utara	Kepala Desa di Aceh Diancam Agar Tidak Rayakan HUT Ke-58 RI (Kompas, 15 Agustus 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	7 anggota GAM menyerang Satgas Yonif 320/Badak Putih yang tengah berpatroli terlibat kontak senjata di Kecamatan Kluet, Aceh Selatan.	Aceh Selatan	
	Serangan bersenjata dan pemboman	Seorang anggota polisi dari Polsek Sibreh, Kecamatan Suka Makmur, Aceh Besar yang diculik GAM, ditemukan tewas dengan kondisi sangat mengenaskan.	Aceh Besar	
15 Agustus 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	2 unit mobil tangki pengangkut minyak tanah dibakar sekelompok orang bersenjata di kawasan Desa Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, Aceh Besar.	Aceh Besar	Pembakaran Terus Terjadi di Aceh (Koran Tempo, 16 Agustus 2003)
16 Agustus 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	1 panser Yonkav 7 TNI ditembaki oleh sekitar 10 anggota GAM ketika sedang berpatroli di Desa Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar.	Aceh Besar	Panser TNI Diserang GAM (Koran Tempo, 17 Agustus 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Di Pidie, 2 orang kepala desa dan 1 sekretaris desa diculik dari rumahnya masing-masing, namun dilepaskan keesokan harinya.	Pidie	
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	2 anggota GAM merampok rumah seorang warga di Desa Pulo Klumpang, Kecamatan Tiro, Pidie.	Pidie	
17 Agustus 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	(i) Di Aceh Utara, ditemukan 2 bom di pinggir jalan Desa Meunasah Tutong dan Desa Menasah Asan, Kecamatan Santalira. (ii) Sebuah bom rakitan juga ditemukan di Desa Blang Peuriah, Kecamatan	Aceh Utara	Sejumlah Bom Rakitan Ditemukan di Aceh Utara (Republika, 19 Agustus 2003)

		Samudra, Aceh Utara.		
	Serangan bersenjata dan pemboman	Di Aceh Jaya, terjadi penyerangan terhadap Polsek Lamno oleh anggota GAM.	Aceh Jaya	
	Serangan bersenjata dan pemboman	Di Nagan Raya, kelompok GAM menghadang dan menembaki kendaraan yang mengangkut warga sipil, yang dikawal personil Brimob di Desa Cot Kuta, Kecamatan Seunagan.	Nagan Raya	
	Serangan bersenjata dan pemboman	Mobil yang ditumpangi wartawan dan kamerawan SCTV diberondogn tembakan oleh kelompok GAM di kawasan Desa Alue Glung, Pidie	Pidie	Mobil Kru SCTV Ditembaki (Media Indonesia, 19 Agustus 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	Markas Koramil Bayu di Kecamatan Syamtalira Bayu, Aceh Utara, dilempari sebuah granat.	Aceh Utara	6 Bom Meledak di Aceh Saat Perayaan HUT RI (Media Indonesia, 19 Agustus 2003)
18 Agustus 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	Terjadi ledakan bom di depan kantor PT Asuransi Berdikari di Kota Lhokseumawe.	Lhokseumawe	Bombs Hit Aceh on Independence Day (The Jakarta Post, 19 Agustus 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	(i) 2 bom meledak di Kecamatan Peusong, Aceh Utara. (ii) 1 bom di Kecamatan Lhoksukon. (iii) 1 bom di Kecamatan Matangkuli. (iv) 1 bom di Desa Cot Murung, Kecamatan Nisam.	Aceh Utara	Delapan Ledakan Bom Warnai Perayaan HUT RI (Kompas, 19 Agustus 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	3 anggota GAM menembak mati 2 warga di Cot Sukun Kemukiman Langgar, Kecamatan Sakti, Pidie.	Pidie	Dua Warga Tewas Ditembak GAM (Indopos, 19 Agustus 2003)
21 Agustus 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	GAM melepaskan tembakan granat dari peluncur roket ke areal poin-A Exxon Mobil di Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara.	Aceh Utara	GAM Tembakkan RPG ke Areal Exxon Mobil (Media Indonesia, 22 Agustus 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	Di Desa Krueng Puepuet, Kecamatan Samalanga, Bireun, Tim-6 Kompi A Yonif 411 dihadang sekitar 20 anggota GAM.	Bireuen	Tiga Kontak Senjata Terjadi di Aceh (Koran Tempo,

	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Prajurit TNI yang menjabat sebagai Kepala Desa Bukit Bata, Aceh Timur ditemukan tewas di Pantai Bidadari, Kecamatan Simpang Ulim.	Aceh Timur	23 Agustus 2003) Dibunuh GAM, Prajurit Pejabat Kades Bukit Bata (Media Indonesia, 27 Agustus 2003)
26 Agustus 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	Mobil Camat Arongan Lambalek, Aceh Barat diberondong tembakan oleh sekelompok orang bersenjata di kawasan perkebunan karet Desa Peuribu, Kecamatan Arongan, Aceh Barat.	Aceh Barat	Mobil Camat Arongan Aceh Barat Ditembak (Kompas, 27 Agustus 2003)
27 Agustus 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Ketua DPRD Kota Langsa dikabarkan diculik sejumlah orang tak dikenal di kawasan Selalah, Kecamatan Langsa Barat, Aceh Timur.	Aceh Timur	Ketua DPRD Langsa Hilang di Perjalanan (Suara Pembaruan, 27 Agustus 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	7 mayat warga sipil ditemukan bergelimpangan di kawasan Muge Ara, Desa Rah Selimit, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah.	Aceh Tengah	Tujuh Mayat Warga Sipil (Media Indonesia, 29 Agustus 2003)
28 Agustus 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Sebanyak 10 Kades bersama 2 Sekdes di Kecamatan Woyla, Aceh Barat, dilaporkan hilang dalam perjalanan pulang se usai mengikuti penyuluhan keamanan di Meulaboh.	Aceh Barat	10 Kades di Aceh Barat Diculik GAM (Suara Pembaruan, 1 September 2003)
29 Agustus 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Pemimpin Pesantren Malikul Mukmin di Kecamatan Mila, Pidie ditembak mati sekelompok orang di jalan Desa Meunasah Tunong.	Pidie	Pemimpin Pesantren Tewas Ditembak (Kompas, 30 Agustus 2003)
SEPTEMBER 2003				
4 September 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	Di Pidie, pertempuran sengit terjadi saat patroli Tim Ki-D Denkul-3 dihadang puluhan pemberontak GAM di kawasan pegunungan Kecamatan Banda Baru.	Pidie	Sembilan GAM Tewas Dalam Dua Hari Terakhir (Media Indonesia, 5 September 2003)
7 September 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	Seorang anggota Kopassus tewas dalam bentrokan senjata saat patroli pasukannya diserang anggota GAM di kawasan Bukit Seuntang, Lliokseukon, Aceh Utara.	Aceh Utara	Seorang Anggota Kopassus dan Dua GAM Tewas (Suara Pembaruan, 9 September 2003)

	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Seorang janda dan keluarganya tewas dibantai oleh 10 orang bersenjata di rumahnya, Desa Baru, Kecamatan Bandar Baru, Pidie.	Pidie	Keluarga Janda Tewas Dibantai di Pidie (Suara Pembaruan, 10 September 2003)
8 September 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	2 pelontar granat rakitan ditemukan di sekitar lokasi instalasi Instalasi perusahaan Exxon Mobil di daerah Lhoksukon, Aceh Utara.	Aceh Utara	Exxon Mobil Jadi Sasaran Granat Rakitan (Kompas, 9 September 2003)
11 September 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Relawan PMI mengevakuasi sesok mayat di kawasan perbukitan Desa Blang Laot, Kecamatan Leupung, Aceh Besar.	Aceh Besar	TNI Terus Tekan GAM (Kompas, 13 September 2003)
14 September 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	Seorang anggota Brimob tewas dan 1 lainnya terluka parah saat terjadi penyerangan oleh GAM di di pedalaman Kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat.	Aceh Barat	Korban Terus Berjatuh Dalam Kontak Tembak di Aceh (Kompas, 16 September 2003)
15 September 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Karyawan PT Perkebunan Nusantara I tewas ditembak di rumahnya di Dusun Pondok Kelapa, Kecamatan Langsa, Bireuen	Bireuen	Gubernur GAM dan Istrinya Tewas (Kompas, 18 September 2003)
16 September 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	Seorang penduduk Kampung Tanjung Hagu, Kecamatan Syamtalira Arun, Aceh Utara tewas terkena peluru dalam kontak senjata pasukan TNI dan GAM di kampungnya.	Aceh Utara	Gubernur GAM dan Istrinya Tewas (Kompas, 18 September 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Sesosok mayat warga sipil ditemukan di ujung jembatan Krueng Tingkem Kuta Blang, Kecamatan Gandapura, Bireuen.	Bireuen	
21 September 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Pemimpin Pondok Peusantren Darul Amma di Desa Usi, Kecamatan Mutiara, Bireun ditembak mati oleh sekelompok orang.	Bireuen	Pimpinan Pondok Pesantren Ditembak Mati (Kompas, 26 September 2003)
22 September 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta	(i) Kelompok bersenjata menembak seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Rasian, Aceh Selatan (ii) Seorang tukang ojek dibacok oleh seorang pria tak dikenal di Desa	Bireuen	GAM Masih Serang Sipil (Indopos, 25 September 2003)

	intimidasi	Gampong Putoh, Bireuen.		
29 September 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	2 pria bersenjata menculik seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Peukan Baro, Pidie.	Pidie	Aceh Violence Kills Eight More People (The Jakarta Post, 1 Oktober 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	(i) Penduduk Kecamatan Julok, Aceh Timur menemukan 4 mayat tak dikenal di 2 lokasi terpisah. (ii) Mayat seorang pria dengan luka tembak juga ditemukan di Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur.	Aceh Timur	
OKTOBER 2003				
1 October 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Ketua DPC Partai Bintang Reformasi ditemukan tewas di Terminal Baru, Kota Lhokseumawe.	Lhok-seumawe	Ditembak, Ketua Partai Bintang Reformasi di Aceh (Kompas, 3 Oktober 2003)
3 October 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Sedikitnya 11 warga Aceh ditangkap pihak GAM di Desa Air Dingin, Kecamatan Sawang, Aceh Selatan.	Aceh Selatan	Sebelas Warga Yang Disandera GAM Belum Kembali (Media Indonesia, 7 Oktober 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Dalam aksi <i>sweeping</i> -nya di Desa Air Dingin, Kecamatan Sawang, Aceh Selatan, gerombolan GAM tidak hanya membakar sepeda motor, tetapi juga merampas uang dan harta benda para penumpang bus yang melintas di wilayah tersebut.	Aceh Selatan	Sebelas Warga Yang Disandera GAM Belum Kembali (Media Indonesia, 7 Oktober 2003)
4 October 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Seorang kepala desa tewas ditembak sekelompok orang yang memberondong rumahnya di Desa Blang Ramee, Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara.	Aceh Utara	Lagi, Kepala Desa di Aceh Tewas Ditembak (Kompas, 7 Oktober 2003)
6 October 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	(i) Terjadi penembakan terhadap seorang pegawai Dinas Pendidikan di Bireuen. (ii) Terjadi penculikan 2 warga Kecamatan Muara Dua, Aceh Utara saat keduanya menghadiri resepsi pernikahan di Desa Ujung Pacu. (iii) Ditemukan mayat 3 warga yang diculik di Desa Blang Baro, Kecamatan Geulumpang Tiga, Pidie.	Bireuen Aceh Utara Pidie	Korban Sipil Terus Berjatuhan di Aceh (Kompas, 9 Oktober 2003)

	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Anggota GAM dilaporkan menculik seorang petani warga Desa Alue Indang, Kabupaten Seulimun, Aceh Besar.	Aceh Besar	PDMD: GSA Terus Bantai Warga Sipil di Aceh (Suara Pembaruan, 7 Oktober 2003)
9 October 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	2 prajurit TNI terluka akibat terkena tembakan anggota GAM saat pasukan mereka disergap di Desa Geulenggang Meurak, Kecamatan Manyak Payed.	Aceh Timur	Dua Prajurit TNI Terluka Ditembak GAM (Koran Tempo, 10 Oktober 2003)
14 October 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Terjadi aksi penculikan di kawasan Meunasah Tgk Digadong, Kecamatan Jeumpa, Bireun.	Bireuen	Empat Sandera GAM Dibebaskan TNI (Kompas, 16 Oktober 2003)
15 October 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Terjadi aksi penyanderaan oleh pemberontak GAM saat sebuah angkutan umum yang membawa 5 penumpang melintasi Desa Paya Gajah, Kecamatan Pereulak, Aceh Timur.	Aceh Timur	Empat Sandera GAM Dibebaskan TNI (Kompas, 16 Oktober 2003)
19 October 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Kepala Desa Rambung, Kecamatan Permata, Aceh Tengah ditembak hingga tewas.	Aceh Tengah	Marak, Anak-Anak Direkrut Menjadi Intelijen GAM (Kompas, 22 Oktober 2003)
20 October 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Rombongan kendaraan yang membawa para penumpang pesawat perintis SMAC dari Bandara Cut Ali menuju Tapak Tuan, dihadang kawanan bersenjata di Desa Ujung Batu, Kecamatan Pasi Raja, Aceh Selatan.	Aceh Selatan	Penumpang Pesawat Diadang GAM (Kompas, 21 Oktober 2003)
21 October 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	1 keluarga yang tinggal di Desa Pulo Panjoe, Kecamatan Glumpang Baro, Pidie, dibantai sekelompok orang bersenjata api.	Pidie	Satu Keluarga Dibantai, Tiga Tewas (Kompas, 22 Oktober 2003)
23 October 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Kepala Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi ditembak kelompok GAM di depan rumahnya, Desa Pasar Manggeng, Aceh Barat Daya.	Aceh Barat Daya	Penembakan di Aceh (Media Indonesia, 24 Oktober 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan,	GAM menembak mati Sekretaris Desa Seuneubok Punto, Aceh Selatan saat sedang beristirahat di depan rumahnya.	Aceh Selatan	1.000 Babinsa Tempur Segera Tiba di Aceh (Suara

	serta intimidasi			Pembaruan, 25 Oktober 2003)
25 October 2003	Perusakan fasilitas umum dan pemukiman, serta blokade	Anggota GAM dilaporkan membakar sebuah Puskesmas di Desa Krueng Jangko, Kecamatan Geulumpang Tiga, Pidie.	Pidie	GAM Bakart Puskesmas (Suara Pembaruan, 27 Oktober 2003)
31 October 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	3 sosok mayat ditemukan di Sungai Ujong Pacu, Kecamatan Muara Dua, Aceh Utara.	Aceh Utara	Cegah Penyusupan "Sweeping" Angkutan Umum Terus Digelar (Kompas, 1 November 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	Seorang prajurit TNI gugur saat patroli pasukannya terlibat kontak senjata dengan GAM di Kampung Jalan Dua, Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur.	Aceh Timur	Satu Prajurit TNI Gugur, Lima Lainnya Luka-Luka (Kompas, 2 November 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	Patroli pasukan TNI dihadang GAM di Desa Blang Rambong, Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur.	Aceh Timur	
NOVEMBER 2003				
2 November 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Pasukan TNI menemukan mayat seorang pria tanpa identitas di Desa Paya Meuneung, Kecamatan Peusangan, Bireuen.	Bireuen	Ditemukan, Berkas Donasi GAM (Kompas, 4 November 2003)
4 November 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Seorang warga Desa Alue Mudim, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara diculik oleh kelompok bersenjata karena menolak membayar pajak <i>nanggroe</i> .	Aceh Utara	Lagi, Warga Sipil Diculik (Kompas, 6 November 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	4 karyawan PT Fajar Baizury dan 2 karyawan pemasok perusahaan kelapa sawit itu diculik di Desa Selamat Datang, Kecamatan Kuala, Nagan Raya.	Nagan Raya	Sudah 390 Anggota GAM Yang Dijatuhi Hukuman (Kompas, 7 November 2003)
	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Warga Kampung Lubuk Mungkit, Kecamatan Trumon, Aceh Selatan diculik 20 orang bersenjata api.	Aceh Selatan	
7 November 2003	Serangan bersenjata dan	Patroli pasukan TNI diserang di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara.	Aceh Utara	Dihadang GAM, Tiga TNI Luka-Luka

	pemboman			(Kompas, 8 November 2003)
11 November 2003	Kriminalitas, penculikan dan pemboman, serta intimidasi	Sebuah bom seberat 8 kilogram ditemukan terpasang di suatu kawasan padat penduduk, sekitar 5 kilometer dari pusat Kota Banda Aceh.	Banda Aceh	Kontak Tembak Berlanjut di Aceh 9 Tewas (Kompas, 12 November 2003)
12 November 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	Seorang guru SD di Kecamatan Peureulak, Aceh Timur diculik oleh kelompok bersenjata.	Aceh Timur	Lagi, Guru Diculik di Aceh (Kompas, 14 November 2003)
15 November 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	Seorang anggota Polsek Dewantara ditembak di kawasan Simpang Ujong Pacu, Kecamatan Lhokseumawe.	Lhok-seumawe	Polisi Ditembak, Pos Polisi Digranat (Kompas, 17 November 2003)
	Serangan bersenjata dan pemboman	2 granat dilempar ke pos polisi lalu lintas di kawasan Cunda, Lhokseumawe.	Lhok-seumawe	
	Serangan bersenjata dan pemboman	(i) Serangan GAM terhadap TNI di Pidie mengakibatkan 1 warga Desa Krueng Jangka tewas. (ii) Serangan GAM terhadap TNI di Aceh Utara menyebabkan 1 warga Desa Blang Mane, Kecamatan Paya Bakong terluka.	Pidie Aceh Utara	TNI Sita 13 Bom dan 25 Detonator Rakitan (Kompas, 18 November 2003)
16 November 2003	Kriminalitas, penculikan dan pembunuhan, serta intimidasi	4 penumpang minibus L-300 disandera GAM saat mobil mereka melintas di Desa Blang Bitra, Kecamatan Peureulak, Aceh Timur.	Aceh Timur	Polisi Kejar Pembacok Anggota Brimob (Kompas, 19 November 2003)
18 November 2003	Serangan bersenjata dan pemboman	2 anggota Brimob tewas akibat dibacok sesuai shalat tarawih di Desa Jeunib, Kecamatan Jeunib, Bireun.	Bireuen	Polisi Kejar Pembacok Anggota Brimob (Kompas, 19 November 2003)



LAMPIRAN II

TABULASI DATA PENUGASAN APARAT KEAMANAN DI ACEH (9 DESEMBER 2002 SD. 19 NOVEMBER 2003)

Tanggal Peristiwa	Kategori Kasus	Deskripsi	Lokasi	Sumber & Tanggal Berita
DESEMBER 2002				
13-Dec-02	pemolisian dan penegakan hukum	Kapolri menyatakan akan menambah jumlah personil Brimob di Aceh untuk melaksanakan tugas-tugas pemolisian di provinsi itu.		More Brimob Troopers for Aceh (The Jakarta Post, 14 Desember 2002)
24-Dec-02	pemolisian dan penegakan hukum	Wakapolri menerangkan, kepolisian akan membahas upaya pemeliharaan perdamaian di Aceh, khususnya terkait pelanggaran terhadap Kesepakatan COHA.		Police to Discuss Security Supervision (The Jakarta Post, 26 Desember 2002)
29-Dec-02	pemolisian dan penegakan hukum	Gubernur Aceh menyatakan, pelanggaran Kesepakatan COHA, baik oleh aparat keamanan maupun GAM akan dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.	Banda Aceh	Melanggar Kesepakatan, GAM Diancam Hukuman Indonesia (Koran Tempo, 30 Desember 2002)
JANUARI 2003				
1 Januari 2003	pemolisian dan penegakan hukum	Polda Aceh menggelar Operasi Cinta Damai untuk mencegah dan menanggulangi berbagai tindak kriminal.		Polda NAD Gelar Operasi Cinta Damai (Suara Pembaruan, 2 Januari 2003)
2 Januari 2003	operasi pemulihan keamanan	Pasukan gabungan TNI/POLRI membebaskan 2 warga sipil dari tawanan kelompok bersenjata di Desa Sungai, Kecamatan Kuala Baru, Aceh Singkil.	Aceh Singkil	HDC Defends Filipino Observers (The Jakarta Post, 3 Januari 2003)
FEBRUARI 2003				
12 Februari 2003	pemolisian dan penegakan hukum	Ketua SIRA dibekuk aparat Polresta Banda Aceh di rumahnya dengan tuduhan penghasutan dan penyebaran kabar yang dapat merusak keutuhan NKRI.	Banda Aceh	Suara Pembaruan, 4 Maret 2003

26 Februari 2003	operasi pemulihan keamanan	1 orang pria yang mengaku Panglima GAM Wilayah Asahan tewas tertembak di Jl. KF Tendea, Tebing Tinggi, Sumatera Utara.		Suara Pembaruan, 4 Maret 2003
MARET 2003				
4 Maret 2003	pemolisian dan penegakan hukum	Peresmian dan pelantikan 20 hakim Mahkamah Syariah Aceh oleh Ketua MA menandai pemberlakuan syariah Islam di seluruh wilayah provinsi Aceh.	Banda Aceh	Mahkamah Syariah Tak Ganggu Hak Non-Muslim (Kompas, 5 Maret 2003)
7 Maret 2003	operasi pemulihan keamanan	Setidaknya 10 KRI disiapkan oleh TNI-AL untuk melakukan patroli di kawasan perairan Sumatera Utara dan Aceh untuk mengatasi perompakan dan pembajakan terhadap kapal nelayan dan kargo.		10 Kapal Perang Amankan Wilayah Perairan Aceh (Koran Tempo, 8 Maret 2003)
12 Maret 2003	pemolisian dan penegakan hukum	Polda Sumatera Utara mengumumkan 16 nama tersangka yang terlibat dalam kasus penyelewengan dana terminasi untuk pengungsi Aceh di Sumatera Utara.		North Sumatra Police Name 16 Suspects in Rp 2 Billion Refugee Aid Scam (The Jakarta Post, 12 Maret 2003)
14 Maret 2003	pemolisian dan penegakan hukum	Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terus memeriksa 11 saksi dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan untuk pengungsi Aceh sebesar Rp 2,4 miliar.		Kejaksaan Periksa Penyelewengan Dana Pengungsi Aceh (Koran Tempo, 16 Maret 2003)
15 Maret 2003	pemolisian dan penegakan hukum	Kapolri mengemukakan, pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan untuk mencari pelaku insiden di Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah.	Aceh Tengah	Ratusan Pengungsi Datangi JSC (Kompas, 18 Maret 2003)
20 Maret 2003	pemolisian dan penegakan hukum	Pihak kepolisian hingga kini masih menyelidiki kasus penyerangan terhadap kantor JSC di Takengon, Aceh Utara. Namun, sejauh ini belum ada seorang pun yang dijadikan saksi.	Aceh Utara	KKB Desak Indonesia Investigasi Lengkap Kasus Takengon (Kompas, 21 Maret 2003)
22 Maret 2003	pemolisian dan penegakan hukum	Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada seorang anggota kepolisian atas penembakan seorang mahasiswa Unsyiah pada 18 Juli 2002.	Banda Aceh	Polisi Penembak Mahasiswa Divonis Penjara 5 Tahun (Koran Tempo, 23 Maret 2003)

24 Maret 2003	operasi pemulihan keamanan	Transportasi darat dari dan menuju Kabupaten Aceh Tengah kembali lancar meskipun harus mendapat pengawalan dari aparat keamanan.	Aceh Tengah	Aparat Keamanan Kawal Angkutan ke Aceh Tengah (Kompas, 25 Maret 2003)
28 Maret 2003	pemolisian dan penegakan hukum	Kapolri memerintahkan Kapolda Aceh untuk menyelidiki kasus penculikan 56 kepala desa di Kecamatan Sigli, Pidie.	Pidie	Kapolde NAD Diminta Selidiki Penculikan 56 Kepala Desa (Media Indonesia, 29 Maret 2003)
APRIL 2003				
2 April 2003	pemolisian dan penegakan hukum	2 pria yang diklaim polisi sebagai pelaku tindak kriminal ditembak mati di Desa Limpok, Kecamatan Darussalam, Banda Aceh.	Banda Aceh	Dua Pria Ditembak Mati di Banda Aceh (Kompas, 3 April 2003)
7 April 2003	pemolisian dan penegakan hukum	Setidaknya 13 orang dimintai keterangannya oleh Polres Aceh Timur terkait kasus pembakaran kantor JSC di kota itu.	Aceh Timur	Police Question 13 Over JSC Attack (The Jakarta Post, 8 April 2003)
8 April 2003	operasi pemulihan keamanan	Di Pidie, sejumlah orang bersenjata tewas ditembak aparat di 3 lokasi berbeda, yaitu: di Kecamatan Tiro (2 orang), Kecamatan Mutiara (2 orang) dan Kecamatan Delima (5 orang)	Pidie	10 Sipil Tewas, JSC Tarik Anggota di Lapangan (Suara Pembaruan, 9 April 2003)
22 April 2003	pemolisian dan penegakan hukum	Direktur Reserse Kriminal Mabes POLRI mengungkapkan, 2 tersangka pelaku peledakan bom di Medan yang ditangkap pihak kepolisian awal bulan April adalah kelompok GAM.		Polisi Tuding GAM Terlibat Bom Medan (Republika, 23 April 2003)
24 April 2003	operasi pemulihan keamanan	Pangdam Iskandar Muda memerintahkan siaga I kepada seluruh pasukan TNI di Aceh untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.		Polisi Tuding GAM Terlibat Bom Medan (Republika, 23 April 2003)
25 April 2003	operasi pemulihan keamanan	Di Lhokseumawe, polisi setempat menggerebek tempat persembunyian anggota GAM di kompleks perumahan Bank Duta, Desa Lampok Teungoh.	Lhokseumawe	Kontak Senjata TNI-GAM Berlanjut (Suara Pembaruan, 26 April 2003)
29 April 2003	operasi pemulihan keamanan	Tim gabungan TNI dari kesatuan Marinir dan tim Cakra berhasil menggagalkan penyelundupan senjata dengan menangkap 1 unit kapal nelayan di Pantai Krueng Geukeh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara.	Aceh Utara	TNI Gagal Penyelundupan Senjata (Republika, 1 Mei 2003)

		Tim Pengamanan Obyek Vital Koops TNI menggagalkan upaya penyelundupan senjata yang diduga dilakukan oleh kelompok GAM di perairan Jambo Aye, Aceh Utara.	Aceh Utara	TNI Minta Klarifikasi Thailand Soal Senjata (Media Indonesia, 1 Mei 2003)
		6 anggota GAM ditembak mati dalam sebuah kontak senjata di Kabupaten Aceh Tengah.	Aceh Tengah	Violence Increases in Aceh as Peace Process in Danger (The Jakarta Post, 1 Mei 2003)
MEI 2003				
3 Mei 2003	pemolisian dan penegakan hukum	6 anggota JSC dari perwakilan GAM ditahan polisi saat berada di zona damai Indrapuri, Aceh Besar karena menyalahgunakan prosedur penggunaan kendaraan JSC. Sesuai peraturan tata tertib JSC, penggunaan mobil operasional lebih dari 10 km harus seizin utusan senior JSC. Keenamnya kemudian dibebaskan setelah diperiksa selama 5 jam di Polresta Banda Aceh.	Banda Aceh	Anggota Komite Perdamaian Aceh Ditangkap (Suara Pembaruan, 4 Mei 2003)
5 Mei 2003	operasi pemulihan keamanan	Terjadi kontak senjata antara aparat keamanan dan GAM secara berturut-turut di Kecamatan Jangka dan Dewantara, Bireuen.	Bireuen	Tiga Anggota GAM Tewas Dalam Insiden Terpisah (Suara Pembaruan, 6 Mei 2003)
		(i) Unit reserse Polda Aceh menemukan 27 buah granat rakitan di persawahan Desa Tanjong Selamat, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar. (ii) Sebelumnya, tim Gegana menemukaka 3 bom rakitan dipasang di jalan Desa Siem, Aceh Besar.	Aceh Besar	Ditemukan 27 Bom (Republika, 6 Mei 2003)
14 Mei 2003	pemolisian dan penegakan hukum	Kapolri menegaskan, kepolisian akan memproses secara hukum Komandan Operasi GAM Wilayah Tiro, Pidie dengan mempertimbangkan kesadarannya untuk kembali ke pangkuan NKRI.	Pidie	Teungku Amri Akan Diproses Secara Hukum (Media Indonesia, 17 Mei 2003)
16 Mei 2003	pemolisian dan penegakan hukum	5 tokoh GAM ditangkap jajaran reserse Polda Aceh beberapa saat setelah meninggalkan Hotel Kuala Tripa, Banda Aceh untuk menuju Bandara Sultan Iskandar Muda.	Banda Aceh	Lima Tokoh GAM Ditangkap (Media Indonesia, 17 Mei 2003)
17 Mei 2003	operasi pemulihan keamanan	7 anggota GAM tewas ditembak pasukan TNI dalam penyerbuan ke Desa Jambo Kapuk, Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan.	Aceh Selatan	Aceh Selatan Mulai Bergolak (Koran Tempo, 19 Mei 2003)

19 Mei 2003	pemolisian dan penegakan hukum	Polda Aceh menangkap kembali 5 anggota JSC dari GAM yang baru dibebaskan, dan menetapkan kelimanya sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana makar dan teroris.	Banda Aceh	Lima Anggota JSC-GAM Tersangka Kasus Makar (Republika, 20 Mei 2003)
	operasi, patroli keamanan	Yonif 143/Tri Wira Eka Jaya menyerang markas GAM di Desa Puentet, Kecamatan Muara Dua, Aceh Utara. 7 anggota GAM dibekuk.	Aceh Utara	TNI Langsung Masuk Zona Merah Basis GAM (Media Indonesia, 20 Mei 2003)
		Yonif 202/Rajawali menysisir kawasan Desa Sumirah, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, dan menemukan 2 bom rakitan di pinggir jalan menuju desa itu.	Aceh Utara	
		Yonif 202/Taji Malela dari Kodam Jaya bergerak ke Desa Semerah, Kecamatan Nisan, sekitar 40 km dari Kota Lhokseumawe. Mereka meledakkan 2 bom yang dipasang di jalan dan menysisir wilayah tersebut dari pasukan GAM.	Lhokseumawe	
		(i) 3 anggota GAM tewas ditembak dalam kontak senjata di Desa Indrapuri, Kecamatan Blang Kuala, Aceh Utara. (ii) 1 anggota GAM lagi tewas di Aceh Besar.	Aceh Utara	Empat Anggota GAM Tewas (Republik, 20 Mei 2003)
20 Mei 2003	pemolisian dan penegakan hukum	Seorang aktivis wanita ditangkap polisi di kediamannya di kawasan Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.	Banda Aceh	Seorang Aktivis Perempuan Ditangkap (Republika, 21 Mei 2003)
		Seorang anggota Yonif 143 ditahan Pomdam Iskandar Muda karena diduga melakukan pemerasan saat penyeragaman anggota GAM di Desa Peunteut, Kecamatan Blang Mangga, Aceh Utara.	Aceh Utara	
	operasi pemulihan keamanan	Polda Sumatera Utara telah menerjunkan 1.000 personil Brimob dalam operasi terpadu di perbatasan Aceh-Sumut, termasuk 330 personil tambahan di Pos Keamanan di Pulau Sembilan, Pulau Kampai dan Pulau Banyak.		Brimob Sumut Perkuat Perbatasan Sumut-NAD (Republika, 21 Mei 2003)
		5 anggota GAM ditahan bersama ribuan amunisi oleh anggota Brimob dari Polres Aceh Utara dalam patroli di Desa Meunasah, Kecamatan Blang Mangat, Aceh Utara.	Aceh Utara	12 Anggota GAM Ditangkap (Republika, 21 Mei 2003)
		Dalam penyeragaman di Desa Peuteut, Kecamatan Blang Mangat, Aceh Utara, pasukan TNI menewaskan 1 anggota GAM dan menangkap 7 lainnya.	Aceh Utara	

	Pemolisian dan penegakan hukum	Polda Bali mengirimkan tambahan 50 personil polisi untuk mendukung kepolisian di Aceh.		Pejabat di Provinsi NAD Bisa Diisi Anggota Militer (Kompas, 21 Mei 2003)
21 Mei 2003	operasi pemulihan keamanan	(i) 10 anggota GAM tewas dalam kontak senjata di Desa Cot Ijue dan Desa Mamplang, Kecamatan Peusangan, Bireun. (ii) 2 anggota GAM tewas dalam penyerangan markas GAM oleh Pasukan TNI di Desa Cot Kueng, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar.	Aceh Besar	20 Anggota GAM Tewas di Berbagai Daerah NAD (Media Indonesia, 22 Mei 2003)
		Kompi 1 Yonif 621 melakukan penyergapan di Desa Paya Meligo, Kecamatan Peureulak, Aceh Timur.	Aceh Timur	
		Pasukan TNI dari 2 Yonif 305/ Kujang, Pasukan Katak Marinir dan Yon Zipur 112/Japakeh dikerahkan untuk menyerbu Pulau Nasi di sebelah barat Kecamatan Sabang, Aceh Utara.	Aceh Utara	Korban Sipil Mulai Jatuh (Koran Tempo, 22 Mei 2003)
		Di Desa Blang Mane, Kecamatan Samudra, Aceh Utara, pasukan gabungan Koramil dan Kodim menyergap kelompok GAM. 1 anggota GAM tertangkap		
		Pasukan gabungan TNI-AD dan TNI-AL melakukan penyerbuan ke basis GAM di Kecamatan Pulo, Aceh Besar sekitar 6,4 km dari Kota Banda Aceh.	Banda Aceh	GAM Mulai Melawan (Indopos, 22 Mei 2003)
		Tim-2 Kompi-1 Yonif 408 terlibat kontak senjata dengan 4 anggota GAM di Desa Pantan Rayeuk, Kecamatan Tamiang Hulu, Aceh Tamiang.	Aceh Tamiang	
		Pasukan gabungan Brimob dan Marinir melakukan penyergapan markas GAM di Mekek, Aceh Selatan.	Aceh Selatan	
23 Mei 2003	pemolisian dan penegakan hukum	Bareskrim POLRI menahan juru propaganda GAM di Jl. Otista III, Cipinang, Jakarta Timur.		Penyebar Propaganda GAM Ditangkap (Suara Pembaruan, 28 Mei 2003)
26 Mei 2003	pemolisian dan penegakan hukum	Menyusul dikuasanya Pulau Nasi, Kabupaten Aceh Besar, Polda Aceh menempatkan 30 Brimob untuk melakukan patroli dan penegakan hukum di wilayah itu.	Aceh Besar	Republika, 28 Mei 2003
		Pasukan TNI menyita sebuah STNK yang dikeluarkan kepolisian GAM dari sebuah mobil Carry.	Aceh Utara	Media Indonesia, 27 Mei 2003

	operasi pemulihan keamanan	Yonif 305/Tengkorak melumpuhkan 16 anggota GAM di Desa Temaron, Kecamatan Woyla, Aceh Barat.	Aceh Barat	Transportasi Dikawal Panser (Indopos, 27 Mei 2003)
		Panglima Sagoe Wilayah Cot Pundi ditembak mati oleh Tim-1 Yonif 304 di Desa Cot Pundi, Kecamatan Woyla, Aceh Barat.	Aceh Barat	
		Pasukan gabungan Satgas Yonif 144 menyergap 4 anggota GAM di Desa Panto Cut, Kecamatan Peusangan. 1 anggota GAM berhasil ditangkap.	Bireuen	
		Di Bireun, kontak senjata terjadi antara Kompi A Yonif 301 dan 40 anggota GAM di Desa Lhok Ulam, Kecamatan Jeunib.	Bireuen	TNI Amankan Distribusi Sembako (Media Indonesia, 27 Mei 2003)
		Koops TNI menurunkan pasukan untuk mengamankan truk yang mengangkut bahan kebutuhan pokok masyarakat dari Sumatera Utara ke wilayah NAD.		
		Tim gabungan Cakra dan satuan intel menyergap anggota GAM di Simpang Yu, Kecamatan Peureulak, Aceh Timur.	Aceh Timur	Media Indonesia, 27 Mei 2003
27 Mei 2003	operasi pemulihan keamanan	13 prajurit Marinir dari Pos Batalyon 3 menyergap markas GAM di Desa Blang Dalam, Aceh Selatan saat mereka tengah melakukan rapat.	Aceh Selatan	Konvoi Sembako Diserang (Indopos, 28 Mei 2003)
		Di Desa Pantan, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, Tim khusus Detasemen Pemukul Yonif 403 menangkap 1 anggota GAM beserta sejumlah barang bukti.	Aceh Utara	
		Di Aceh Barat, 1 anggota GAM juga ditangkap oleh Kompi Dadali Yonif 305 di Desa Alue Buh, Kecamatan Senagan.	Aceh Barat	
	pemolisian dan penegakan hukum	3 anggota GAM, termasuk Panglima Sagoe Wilayah Cut Pulo ditangkap tim gabungan Poltabes Medan dan Kodim 0201/Berdiri Sendiri.		Ditangkap di Medan, Panglima GAM Dibawa ke Lhokseumawe (Koran Tempo, 29 Mei 2003)
Aparat Polresta Medan berhasil menggagalkan pengiriman sebanyak 4.453 butir peluru untuk senjata AK-47 ke Aceh			Pengiriman Ribuan Butir Peluru ke GAM Digagalkan (Suara Pembaruan, 28 Mei 2003)	
Poltabes Pekanbaru menahan 3 warga Desa Perlis, Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Mereka diduga sebagai penyandang dana berbagai operasi GAM.			Disita, 4.453 Peluru Yang Dikirim ke Aceh (Kompas, 29 Mei 2003)	

		Polda Aceh menetapkan 43 orang yang terkait dengan GAM sebagai tersangka tindak pidana makar.	Banda Aceh	Polda NAD Tetapkan 43 Tersangka Makar (Republika, 28 Mei 2003)
28 Mei 2003	operasi pemulihan keamanan	Tim Satgas Mobil-1 Parako TNI menemukan puluhan peralatan untuk membuat bom rakitan dan bom siap pakai dalam penyisiran di Desa Matang Kuli, Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara.	Aceh Utara	TNI Temukan Puluhan Bom (Media Indonesia, 29 Mei 2003)
		Pasukan Marinir yang bermarkas di Kuta Tinggi, Aceh Selatan menyergap kelompok GAM, sehingga mengakibatkan 1 anggota GAM tewas.	Aceh Selatan	Kapal Asing Dilarang Masuk NAD (Media Indonesia, 31 Mei 2003)
		Detasemen Pemukul 4 Kompi C mengeledah rumah yang diduga kantor Camat GAM di Desa Sidomulyo, Kecamatan Makmur, Aceh Utara.	Aceh Utara	Republika, 29 Mei 2003
		Anggota Koramil Lampeunerut menemukan bom pipa rakitan di Desa Lamring, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar.	Aceh Besar	
	pemolisian dan penegakan hukum	Polresta Medan menyita 4.453 butir peluru untuk senjata jenis AK-47 dan M-16 dari seorang sopir truk yang bertugas mengangkut kiriman amunisi itu dari Jakarta ke Aceh.		Disita, 4.453 Peluru Yang Dikirim ke Aceh (Kompas, 29 Mei 2003)
29 Mei 2003	operasi pemulihan keamanan	Satuan Taktis II di Ulee Glee, Pidie menyergap GAM sehingga mengakibatkan 1 anggota GAM tewas.	Pidie	Kapal Asing Dilarang Masuk NAD (Media Indonesia, 31 Mei 2003)
30 Mei 2003	operasi pemulihan keamanan	Sekitar 1.200 personil TNI mengepung markas Panglima GAM Wilayah Passe di Desa Geumpang Empat Uno, Kecamatan Jambu Aye, Aceh Utara.	Aceh Utara	TNI Kuasai Wilayah Panglima GAM Sofyan Dawood (Republika, 1 Juni 2003)
		Pasukan TNI dari Detasemen Tempur Cakra VII berhasil menguasai salah satu basis GAM di Kampung Tuak, Desa Kuala Penaga, Kecamatan Arun, Aceh Utara.	Aceh Utara	TNI Kepung Kantong-Kantong GAM (Republika, 31 Mei 2003)
31 Mei 2003	operasi pemulihan keamanan	Pasukan TNI menyerbu markas GAM di Desa Monte Raja, Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Namun, penasihat GAM wilayah Sawang berhasil melarikan diri.	Aceh Utara	TNI Incar Markas Dua Petinggi GAM (Republika, 1 Juni 2003)

		Panglima GAM Wilayah Blang Pidie bersama anggotanya ditangkap pasukan TNI di Desa Krueng Batee, Kecamatan Tangan Tangan, Aceh Barat.	Aceh Barat	TNI Blames GAM in Mass Home Burnings (The Jakarta Post, 1 Juni 2003)
2 JUNI 2003				
2 Juni 2003	operasi pemulihan keamanan	Tim Pemukul Yonif 431 terlibat baku tembak dengan 7 anggota GAM di Desa Pasir Putih, Kecamatan Samar Kilang, Aceh Tengah.	Aceh Tengah	Republika, 3 Juni 2003
		Prajurit TNI menembak mati seorang anggota GAM di Kampung Rasian, Kecamatan Pasi Raja, Aceh Selatan.	Aceh Selatan	
	pemolisian dan penegakan hukum	7 prajurit TNI disidangkan di peradilan militer di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan tuduhan melakukan tindak kekerasan terhadap warga Desa Lawang, Kecamatan Peudada, Bireuen.	Bireuen	Aceh Court to Try 7 Soldiers (The Jakarta Post, 3 Juni 2003)
		Aparat Polsek Pidie menangkap 2 remaja yang diduga terlibat aksi pembakaran sekolah di wilayah itu.	Pidie	Pembakar Sekolah Ditangkap Saat Sedang Ronda (Koran Tempo, 6 Juni 2003)
3 Juni 2003	operasi pemulihan keamanan	2 kapal perang TNI-AL mengawal KM Jatra III milik PT ASDP yang membawa sembako, peralatan sekolah dan obat-obatan ke Pelabuhan Lhokseumawe, Aceh Utara.	Lhokseumawe	TNI-AL Kawal Kapal Pengangkut Sembako (Suara Pembaruan, 4 Juni 2003)
4 Juni 2003	operasi pemulihan keamanan	Pasukan TNI menyergap anggota GAM di kawasan perbukitan di wilayah Ujong Pancu, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar.	Aceh Besar	Prajurit TNI Akui Menganiaya Warga Aceh (Kompas, 5 Juni 2003)
		Yonif 320/Badak Putih menembak mati seorang anggota GAM di Kampung Rawa, Kecamatan Trumon, Aceh Selatan.	Aceh Selatan	Koran Tempo, 5 Juni 2003
		14 prajurit Marinir menembak mati 2 anggota GAM di Kampung Gunung, Kecamatan Kluet, Aceh Selatan.	Aceh Selatan	
	Terjadi baku tembak dalam penyerbuan markas GAM oleh pasukan gabungan TNI dari Pos 64 Jeuram dan Yonif 305 di Desa Alue Kambuh, Kecamatan Seunangan, Aceh Barat.	Aceh Barat		
	pemolisian dan penegakan hukum	Aparat kepolisian dibantu TNI menggelar razia kendaraan bermotor pada 3 titik di Kota Banda Aceh.	Banda Aceh	Prajurit TNI Akui Menganiaya Warga Aceh (Kompas, 5 Juni 2003)

				2003)
6 Juni 2003	operasi pemulihan keamanan	35 prajurit TNI menyergap markas GAM di Desa Lingkung Busu, Kecamatan Mutiara, Aceh Timur, dan menangkap 2 anggota GAM.	Aceh Timur	Baku Tembak Berlangsung di Pinggiran Banda Aceh (Republika, 7 Juni 2003)
		Terjadi baku tembak antara Tim Kalong-3 Yonif 305 dan GAM di kawasan Tutut, Aceh Barat.	Aceh Barat	
		7 anggota GAM tewas dalam penyerapan oleh 15 prajurit Tim Baladika TNI di Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur.	Aceh Timur	Dua Hari Terakhir, 11 Anggota GAM Tewas (Media Indonesia, 7 Juni 2003)
		8 prajurit Marinir menyergap pondok pesantren Miftahulum, Kampung Suok Buluh, Kecamatan Barabot, Aceh Barat Daya, dan menangkap seorang tokoh majelis penasihat GAM	Aceh Barat Daya	Koran Tempo, 7 Juni 2003
7 Juni 2003	operasi pemulihan keamanan	7 anggota GAM yang membakar gedung-gedung sekolah di Aceh Utara ditangkap prajurit TNI dari Koramil 05/Bayu.	Aceh Utara	Tujuh Pembakar Sekolah Ditangkap (Media Indonesia, 8 Juni 2003)
15 Juni 2003	operasi pemulihan keamanan	Pasukan TNI dari Yonif 320/Badak Putih melakukan <i>sweeping</i> di Kampung Teum Nurking, Kecamatan Kluet, Aceh Selatan, dan menemukan pabrik senjata milik GAM.	Aceh Selatan	TNI Lancarkan Serangan Udara (Media Indonesia, 17 Juni 2003)
16 Juni 2003	operasi pemulihan keamanan	2 pesawat F-16 dan 2 pesawat OV-10 Bronco membom daerah konsentrasi GAM di Kecamatan Baktiya, Aceh Utara,	Aceh Utara	TNI Lancarkan Serangan Udara (Media Indonesia, 17 Juni 2003)
		Di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, prajurit TNI dari Denkul-3 Yonif 403 menemukan sebuah bom rakitan yang dipasang di sebuah jembatan.	Aceh Utara	Koran Tempo, 17 Juni 2003
		Seorang anggota GAM ditembak mati pasukan TNI di Kecamatan Seulimun, Aceh Besar.	Aceh Besar	Serangan Udara Untuk Shock Therapy (Suara Pembaruan, 17 Juni 2003)
		Di Kecamatan Rantau Panjang, Aceh Timur, 3 anggota Gam ditangkap oleh prajurit TNI	Aceh Timur	
18 Juni 2003	operasi pemulihan keamanan	2 anggota GAM tewas dalam baku tembak dengan aparat di Kampung Mata Ie, Kecamatan Pasie Raja, Aceh Selatan.	Aceh Selatan	Media Indonesia, 19 Juni 2003
	pemolisian dan penegakan hukum	Aparat keamanan menangkap 8 pejabat pemerintahan di Kabupaten Aceh Selatan karena diduga terkait dengan aktivitas GAM.	Aceh Selatan	Delapan Pejabat Aceh Selatan Terlibat GAM (Media Indonesia,

				19 Juni 2003)	
19 Juni 2003	operasi pemulihan keamanan	Pasukan gabungan TNI dari Satuan Gabungan Intelijen, Parako, dan Yonif 408 menyerang sejumlah anggota GAM di kawasan Matang Cut, Kecamatan Baktiya Barat, Aceh Utara.	Aceh Utara	10 Anggota GAM dan 2 TNI Tewas di Baktiya (Media Indonesia, 20 Juni 2003)	
		Seorang anggota GAM tewas tertembak dalam penggerebekan aparat kepolisian di Desa Cot Pundi-Simpang VI, Kecamatan Sampoinip, Aceh Jaya.	Aceh Jaya	Polda NAD Usut Pemerksaan Pelajar di Bireun (Suara Pembaruan, 20 Juni 2003)	
		Satuan Gabungan Intelijen, Yonif 408 dan Parako melakukan penyergapan di Desa Matang, Kecamatan Bhaktia, Aceh Utara.	Aceh Utara	Kontak Senjata di Aceh Utara, 10 Anggota GAM Tewas (Suara Pembaruan, 21 Juni Tewas)	
	pemolisian dan penegakan hukum	Tim gabungan Brimob BKO dan Polsek Kluet Selatan, Aceh Selatan menangkap 10 anggota GAM di Desa Indra Damai, Kecamatan Kluet, Aceh Selatan.	Aceh Selatan	10 Anggota GAM dan 2 TNI Tewas di Baktiya (Media Indonesia, 20 Juni 2003)	
		Tim gabungan Polsek Ladang Rima bersama Perintis dan Brimob BKO menangkap anggota GAM di Desa Ladang Rimba, Kecamatan Bakonang Timur, Aceh Selatan.	Aceh Selatan		
		Jajaran Polda Aceh tengah mengusut dan mengungkap kasus pemerksaan oknum Brimob atas seorang siswi SLTP 2 Bireun	Bireuen	Polisi Bentuk Tim Usut Perkosaan Siswi SMP (Koran Tempo, 20 Juni 2003)	
		Aparat keamanan menangkap 2 pelinggi GAM di 2 tempat berbeda di Kota Jambi, yaitu Panglima Muda GAM Wilayah Rimba Raya, Takengon di Kecamatan Telanaipura, dan pelatih militer GAM Wilayah Takengon di kecamatan Kota Baru.		Dua Panglima GAM Ditangkap di Jambi (Suara Pembaruan, 20 Juni 2003)	
	20 Juni 2003	operasi pemulihan keamanan	Pasukan TNI menembak mati 5 anggota GAM dan menahan 1 tokoh GAM saat berpatroli di Desa Seunebok Baro, Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang.	Aceh Tamiang	Penembak dan Pembakar Bus Diburu (Suara Pembaruan, 21 Juni 2003)

		Aparat gabungan menangkap 3 warga yang diduga anggota GAM dan menyita sejumlah barang bukti di Kecamatan Delima, Pidie.	Pidie	Kontak Senjata di Aceh Utara, 10 Anggota GAM Tewas (Suara Pembaruan, 21 Juni 2003)
		Di kawasan Desa Seneubok Leuang, Kecamatan Jeumpa, Bireun, pasukan TNI menggempur persembunyian sekitar 200 anggota GAM pimpinan Panglima Operasi GAM dan Panglima Muda GAM Wilayah Jeumpa. Kawasan itu ditutup untuk memotong jalur logistik mereka.	Bireuen	Lagi, Warga Sipil Jadi Korban (Kompas, 21 Juni 2003)
		5 wartawan diselamatkan pasukan gabungan TNI dari Yonif 315/GRD dan Brimob saat melakukan penyisiran di Kampung Tanjung, Kecamatan Mutiara, Pidie.	Pidie	TNI 'Selamatkan' Lima Wartawan (Republika, 21 Juni 2003)
	pemolisian dan penegakan hukum	Seorang staf biro pemerintah pada Sekretariat Daerah Banda Aceh, ditahan oleh 3 aparat kepolisian karena diduga merupakan anggota GAM.	Banda Aceh	Polisi Tangkap Pegawai Saat Rapat (Koran Tempo, 21 Juni 2003)
21 Juni 2003	operasi pemulihan keamanan	Tim Gabungan TNI dari Koramil 23 Batee dan Kodim Pidie menyergap markas GAM di Desa Mee, Kecamatan Batee. Seorang anggota GAM yang diduga pelaku pembakar sekolah tertangkap.	Pidie	Tiarap Dalam Hujan Peluru (Koran Tempo, 23 Juni 2003)
22 Juni 2003	operasi pemulihan keamanan	Aparat gabungan TNI/POLRI menangkap 2 anggota GAM yang memungut pajak nanggroe di Kampung Melayu, Kecamatan Kota Baru, Aceh Besar.	Aceh Besar	Nyaris Jadi Sarden (Koran Tempo, 24 Juni 2003)
	pemolisian dan penegakan hukum	Kepolisian NAD sudah menyerahkan 20 berkas kasus makar sejumlah anggota GAM kepada kejaksaan.		Kepolisian NAD Serahkan 20 Berkas GAM ke Kejaksaan (Koran Tempo, 24 Juni 2003)
23 Juni 2003	operasi pemulihan keamanan	Tim Gegana Polres Aceh Utara menemukan 6 bom di jalan Desa Pantan, Labu, Kecamatan Jambu Aye.	Aceh Utara	KSAD: Jangan Dengar Inggris (Indopos, 24 Juni 2003)
		Pasukan Marinir TNI berhasil menguasai Desa Simpang Jaya, Kecamatan Juli, Bireun yang 5 hari sebelumnya masih menjadi basis GAM.	Bireuen	TNI Terus Menekan GAM (Kompas, 24 Juni 2003)
		Terjadi kontak senjata antara pasukan TNI dengan GAM di kawasan Kampung Sango, Kecamatan Lamno, Aceh Jaya.	Aceh Jaya	Seorang TNI dan Lima GAM Tewas

		1 pasukan TNI menyergap 6 anggota GAM di Kampung Kruet Lintang Kecamatan Peureulak, Aceh Timur.	Aceh Timur	(Indopos, 25 Juni 2003)
		Tim Gabungan TNI menyergap 1 anggota GAM di Desa Alue Gajah, Aceh Utara dan menyita sejumlah bubuk natrium untuk membuat bom rakitan.	Aceh Utara	Koran Tempo, 25 Juni 2003
	pemolisian dan penegakan hukum	Satuan Gabungan Polda Jambi menangkap seorang tokoh GAM yang melarikan diri dari Bengkulu ke Kota Jambi.		Pentolan GAM Kembali Ditangkap di Jambi (Suara Pembaruan, 24 Juni 2003)
24 Juni 2003	operasi pemulihan keamanan	Terjadi kontak senjata antara Kompi Gladiator Yonmar III dan GAM di Kampung Mutiara, Kecamatan Sawang, Aceh Selatan.	Aceh Selatan	Seorang TNI dan Lima GAM Tewas (Indopos, 25 Juni 2003)
		2 peleton pasukan Marinir menyergap markas GAM di kawasan Sarah Sirung, Kecamatan Juli, Bireun.	Bireuen	Marinir Tewaskan 14 GAM (Republika, 25 Juni 2003)
26 Juni 2003	operasi pemulihan keamanan	Pasukan Marinir dari BTP-1, Surabaya ditempatkan di kawasan perbukitan Cot Goh, Kecamatan Jeumpa dan Juli, Bireun untuk mengepung sekitar 200 anggota GAM pimpinan Darwis Jeunib.	Bireuen	Pasukan Logistik GAM Wilayah Bireun Terputus (Kompas, 27 Juni 2003)
		4 anggota GAM yang ditangkap prajurit TNI dari Yonif 301/Prabu Kiansantang di barak pengungsian Desa Reuleut Timur, Kecamatan Muara Baru, Aceh Utara.	Aceh Utara	
27 Juni 2003	pemolisian dan penegakan hukum	Aparat Koramil 16/Baloan Sabang menangkap Wakil Gubernur GAM Wilayah Sabang di tempat persembunyiannya di Pulau Weh.	Sabang	Penangkapan Tokoh GAM Terus Berlangsung (Kompas, 28 Juni 2003)
		2 anggota Inong Balee ditangkap aparat TNI dari Intel Kodim 0101/Aceh Besar di RSU Zainal Abidin, Banda Aceh.	Banda Aceh	
		Aparat Koramil Tangse menangkap 3 pria yang diyakini sebagai kepala polisi dan camat GAM di Desa Pulau Kawah, Kecamatan Tangse, Pidie.	Pidie	
	operasi pemulihan keamanan	(i) Denkul-3 Satgas Mobil-2 Rajawali menemukan bunker persembunyian anggota GAM di sebuah rumah di Desa Alue Dua, Kecamatan Nisam, Aceh Utara. (ii) Tim gabungan dari Brimob dan Brigif I	Bireuen	TNI Temukan Dua Bunker di Aceh (Media Indonesia, 28 Juni 2003)

		Marinir juga menemukan bunker ketika menyisir kawasan Desa Juli Setuy, Kecamatan Juli, Bireun.		
		Pasukan TNI dari Yonif 642/Kapuas yang tengah berpatroli, diserang anggota GAM di kawasan Desa Meunarah Utah, Pidie.	Pidie	TNI Kepung GSA di Gunung Siron (Republika, 28 Juni 2003)
		Di Desa Blang Rambong, Kecamatan Idi Rayeuh, Aceh Timur Yonif 725 semakin mempersempit ruang gerak sekitar 200 anggota GAM pimpinan Panglima GAM Wilayah Idie.	Aceh Timur	
		Sekitar 1 kompi Yonif 502/Darma Juda melakukan pengejaran dan pengepungan anggota GAM di kawasan hutan Gunung Siron, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar.	Aceh Besar	TNI Terus Kejar Pemberontak GAM (Suara Pembaruan, 28 Juni 2003)
JULI 2003				
9 Juli 2003	operasi pemulihan keamanan	Seorang Panglima Sagoe GAM Wilayah Peudawah Puntong tewas dalam kontak senjata dengan Tim Khusus Satgas Mobil-1 yang sedang berpatroli di Desa Matang Nibong, Kecamatan Bireun Bayeun, Aceh Timur.	Aceh Timur	GAM Bakar Minibus, 2 Penumpang Luka Bakar (Media Indonesia, 11 Juli 2003)
10 Juli 2003	operasi pemulihan keamanan	30 anggota Brimob menangkap seorang anggota GAM saat melakukan penyisiran di Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar.	Aceh Besar	GAM Bakar Minibus, 2 Penumpang Luka Bakar (Media Indonesia, 11 Juli 2003)
		Pasukan gabungan dari Yonif 643/Wanara Sakti, Paskhas dan Satuan II/D365Pelopor Brimob mengepung markas GAM di sebuah rawa Desa Nipah, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar.	Aceh Besar	Kontak Senjata TNI dan GAM Terjadi di Kuta Baro (suara Pembaruan, 11 Juli 2003)
		Polresta Aceh Besar menangkap seorang anggota GAM dalam penyergapan di Desa Lam Jampok, Kecamatan Lambaro Kafee.	Aceh Besar	50 Anggota TNI Kepung Markas GAM di Nipah (Media Indonesia, 11 Juli 2003)
11 Juli 2003	operasi pemulihan keamanan	Baku tembak antara Tim 10 Parako dan 8 anggota GAM terjadi di Desa Gleumpang, Kecamatan Matang Kuli, Aceh Utara.	Aceh Utara	Kopassus Tewaskan Lima Anggota GAM (Republika, 12 Juli 2003)

		Di Aceh Utara, pasukan dari Yonif 143 menyergap markas GAM di wilayah Desa Rayeuk, Kecamatan Lhok Sukon.	Aceh Utara	9 GAM Tewas Dalam Kontak Senjata (Media Indonesia, 12 Juli 2003)
		Panglima Muda GAM Wilayah Peukan Bada tewas ditembak pasukan Resimen III/Pelopor Brimob di Desa Geurah, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar.	Aceh Besar	Panglima Muda GAM Tewas Terkena Raket (Kompas, 12 Juli 2003)
12 Juli 2003	operasi pemulihan keamanan	Pasukan Brimob Kompi 2 Detasemen C Satuan III/Pelopor menembak mati Panglima GAM Wilayah Peusangan di Desa Barat Layan, Kecamatan Jangka, Bireun.	Bireuen	Panglima I Peusangan GAM Tewas Ditembak (Kompas, 13 Juli 2003)
15 Juli 2003	operasi pemulihan keamanan	Panglima GAM Wilayah Meureuhom Daya tewas tertembak dalam bentrokan senjata dengan sejumlah prajurit TNI dari Yonif 509/Kostrad di kawasan Kecamatan Teunom, Aceh Jaya.	Aceh Jaya	Panglima GAM Wilayah Meureuhom Tewas (Suara Pembaruan, 16 Juli 2003)
		Pasukan gabungan dari Tim Charli 1 Yonif 643 dan Brimob terlibat kontak tembak di Desa Cot Cut, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar.	Aceh Besar	TNI Sita Sejumlah Senjata GAM (Koran Tempo, 16 Juli 2003)
		Terjadi kontak senjata antara Tim A Yonif 463 dengan sejumlah anggota GAM di Desa Ramlah, Kecamatan Syamtalira, Aceh Besar.	Aceh Besar	
		Dalam penyergapan di Dusun Bahagia dan Maang Reubek, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, Tim Baladika menyita 13 pucuk senjata GAM.	Aceh Utara	
		2 anggota GAM yang diduga pelaku penembakan terhadap konvoi rombongan Pangkoops TNI pada Maret 2003, ditangkap pasukan TNI dari Yonif 143/Sriwijaya di kawasan Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Aceh Utara.	Aceh Utara	Penembak Pangkoops Ditangkap, GAM Menantang TNI di Tiro (Kompas, 16 Juli 2003)
16 Juli 2003	operasi pemulihan keamanan	Pasukan TNI dari BTP I Marinir menemukan 1 set antena pemancar radio komunikasi GAM di kawasan hutan Desa Sara Sarung, Kabupaten Bireun.	Bireuen	Dirobohkan, Antena Pemancar Radio GAM (Kompas, 17 Juli 2003)
		Pasukan gabungan TNI dari Yonif 315/Garuda, Yonif 642/Kapuas dan pasukan Tank Marinir, serta Kopassus diterjunkan untuk menggempur Desa Dayah Baroe, Kecamatan Tiro, Pidie.	Pidie	Pasukan TNI Gempur Kampung Hasan Tiro (Kompas, 17 Juli 2003)

		Kapolsek GAM Wilayah Telaga Meuku, Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang beserta 2 anggota GAM lainnya ditangkap aparat Polres Langkat di Desa Pelawi, Kecamatan Brandan, Sumatera Utara.	Aceh Tamiang	Ditangkap, Anggota GAM Pembunuh 14 Prajurit (Kompas, 18 Juli 2003)
19 Juli 2003	pemolisian dan penegakan hukum	Di Lhokseumawe, 3 prajurit TNI yang didakwa dalam kasus pemerkosaan terhadap 4 wanita warga Aceh, divonis 2 tahun 6 bulan penjara.	Lhok-seumawe	Anggota TNI Yang Memperkosa Divonis 2,5 Tahun (Suara Pembaruan, 21 Juli 2003)
20 Juli 2003	operasi pemulihan keamanan	Pasukan gabungan TNI Yonif 643/Wanara Sakti, Yonif 305/Rajawali dan Yonif 409/Condrowono masih mengepung basis GAM di kawasan Glee Iniem, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar. Dalam pengepungan itu sudah 6 anggota tewas.	Aceh Besar	TNI Kepung Markas GAM Aceh Besar (Suara Pembaruan, 21 Juli 2003)
		Satgas dari kesatuan Brigif Linud 502/Trisula menduduki pemancar komunikasi satelit milik GAM di Desa Aloe Mudik, Kecamatan Sawangan, Aceh Utara.	Aceh Utara	TNI Kuasai Stasiun Radio Antar Benua GAM (Indopos, 21 Juli 2003)
		Pasukan Kompi Harimau dari Batalyon Tim Pendarat I Marinir berhasil melumpuhkan seperangkat alat komunikasi (<i>reapeater</i>) di Desa Simpang Jaya, Bireun.	Bireuen	Kambing Pun Menanti Kompi Harimau (Media Indonesia, 22 Juli 2003)
21 Juli 2003	operasi pemulihan keamanan	Seorang tokoh GAM yang diduga sebagai Panglima GAM Wilayah Kutaraja, tewas ditembak dalam penyergapan Yonif 312/Siliwangi di Desa Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar.	Aceh Besar	Panglima GAM Kutaraja Tewas (Indopos, 22 Juli 2003)
		Satgas Muara Batalyon 6 Marinir menemukan 4 pucuk senjata api dan sejumlah granat milik anggota GAM di dalam sungai di Kampung Kuala Raja, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang.	Aceh Tamiang	Temukan Senjata di Sungai (Media Indonesia, 23 Juli 2003)
	pemolisian dan penegakan hukum	Seorang pria yang diduga sebagai camat GAM Wilayah Ulim, Pidie ditangkap polisi di tempat tinggal di Desa Iboih, Kecamatan Suka Karya, Sabang.	Sabang	Camat GAM Ditangkap (Indopos, 22 Juli 2003)
Pengadilan kasus makar yang melibatkan Sekwilda GAM Wilayah Aceh Besar digelar di Pengadilan Negeri, Banda Aceh.		Banda Aceh	Sekwilda GAM Diadili (Kompas, 22 Juli 2003)	

22 Juli 2003	operasi pemulihan keamanan	Di Kecamatan Peusangan, Bireun, 1 regu Tim Gabungan Satuan Brimob BKO dan Organik terpaksa menembak mati seorang pria yang disebut sebagai Kapolres GAM Wilayah Jangka karena berusaha melarikan diri saat ditangkap.	Bireuen	Polisi Tembak Mati Kapolres GAM (Indopos, 24 Juli 2003)
		Pasukan gabungan TNI Tim Bravo-4 Detasemen Pemukul-3, Satgas Mobil-2 Rajawali dan Tim Alva-2 Yonif 403 Kodam Diponegoro menemukan 80 meter kabel <i>repeater</i> pemancar radio komunikasi dan 1 pucuk AK-47 beserta amunisi milik GAM di Desa Drien Kuning, Kecamatan Nisam, Aceh Utara.	Aceh Utara	TNI Temukan Kabel "Repeater" Pemancar GAM (Kompas, 24 Juli 2003)
		Wakil Gubernur GAM Wilayah Pase tewas ditembak oleh Tim Delta-4 Yon Linud 501 di Kampung Alue Mbang, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara.	Aceh Utara	TNI Tembak Mati Wagub GAM Wilayah Pase (Media Indonesia, 25 Juli 2003)
24 Juli 2003	operasi pemulihan keamanan	Satgas Mobil-IV Marinir telah menggembur dan menyisir basis kelompok GAM di kawasan rawa-rawa di Kecamatan Kuala Langsa, Aceh Tamiang.	Aceh Tamiang	TNI Gempur GAM di Aceh Tamiang (Kompas, 25 Juli 2003)
	pemolisian dan penegakan hukum	Polda Aceh mulai memeriksa anggota DPRD Aceh Besar yang terindikasi terlibat GAM.	Aceh Besar	Polda NAD Periksa Anggota DPRD Aceh Besar (Republika, 25 Juli 2003)
30 Juli 2003	operasi pemulihan keamanan	Prajurit Paskhas TNI-AU menyergap 7 anggota GAM di sebuah lokasi yang berjarak 5 kilometer dari Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh.	Banda Aceh	Kontak Senjata Terjadi di Dekat Bandara Banda Aceh (Kompas, 1 Agustus 2003)
		Di kawasan Desa Rumah Rayeuk, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, pasukan gabungan dari Yonif 143 dan Koramil 07 menemukan 1 amunisi, 9 bom rakitan aktif dan 2 ranjau milik GAM, serta menahan 5 anggota GAM saat menyisir kawasan tersebut.	Aceh Utara	
AGUSTUS 2003				
3 Agustus 2003	pemolisian dan penegakan hukum	Tim penjinak bom Polda Aceh berhasil menjinakkan sebuah bom rakitan seberat 3,5 kilogram di depan rumah dinas Camat Syah Kuala, Kota Banda Aceh.	Banda Aceh	Sebuah Bom Ditemukan di Aceh Besar (Suara Pembaruan, 5 Agustus 2003)
4 Agustus 2003	pemolisian dan penegakan	Personil kepolisian menangkap 5 perempuan yang diduga sering membantu GAM di Kecamatan Sampoiniet, Aceh	Aceh Jaya	Polisi Tangkap Lima Perempuan (Media Indonesia,

	hukum	Jaya.		5 Agustus 2003)
		Jajaran Polda Aceh tengah menyelidiki dugaan keterlibatan Bupati Takengon dengan pemberontak GAM.	Aceh Tengah	Bupati Takengon Diduga Terlibat GAM (Media Indonesia, 5 Agustus 2003)
5 Agustus 2003	operasi pemulihan keamanan	6 pria yang diidentifikasi sebagai anggota GAM tewas ditembak aparat keamanan dalam kontak senjata di 2 desa di Kecamatan Bireun, yaitu Pulo Blang dan Pulo U.	Bireuen	Sebuah Gardu Listrik Dirubuhkan (Suara Pembaruan, 5 Agustus 2003)
		Aparat kepolisian melakukan penggerebekan saat sejumlah anggota GAM tengah menggelar rapat di Desa Jeureung Balee Samahani, Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar.	Aceh Besar	Dua Warga Yang Diduga GAM Ditembak di Aceh Besar (Suara Pembaruan, 6 Agustus 2003)
6 Agustus 2003	pemolisian dan penegakan hukum	2 warga yang diduga sebagai pengutip pajak nanggroe ditangkap aparat Polresta Banda Aceh.	Banda Aceh	Dua Pengutip Dana GAM Ditangkap (Suara Pembaruan, 7 Agustus 2003)
7 Agustus 2003	pemolisian dan penegakan hukum	Polda Bengkulu telah menyerahkan 3 tersangka GAM ke Kejari Bengkulu untuk segera disidangkan.		Polda Bengkulu Serahkan Tiga Anggota GAM ke Kejaksaan (Suara Pembaruan, 8 Agustus 2003)
		Aparat Polresta Banda Aceh menyita 1.000 butir amunisi senjata jenis AK-47 di kawasan pergunungan Goh Lumo, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar.	Aceh Besar	Polisi Sita 1.000 Butir Amunisi GAM (Suara Pembaruan, 8 Agustus 2003)
8 Agustus 2003	operasi pemulihan keamanan	Saat berpatroli di Kampung Alue Dua, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, pasukan TNI dari Yonif 501 Kostrad menemukan sejumlah barang untuk membuat bom rakitan.	Aceh Utara	TNI Temukan Peralatan Merakit Bom Milik GSA (Republika, 9 Agustus 2003)
		Prajurit TNI dari Yonif 433/JS menemukan 1 unit mobil Kijang, 2 granat MO-60, empat amunisi LE dan 1 magasin LE di Kampung Pintu Rimba, Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur.	Aceh Timur	Markas Sofyan Dawood Dikepung (Media Indonesia, 11 Agustus 2003)

9 Agustus 2003	operasi pemulihan keamanan	2 pria yang diduga Panglima Sagoe Wilayah Darussalam dan Ulee Kareng tewas ditembak aparat Polresta Banda Aceh dalam penyeragaman di kawasan Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar.	Aceh Besar	Dua Panglima Sagoe GAM Tewas di Aceh Besar (Suara Pembaruan, 11 Agustus 2003)
		Tim Singa-2 Yonif 621 Satgas Mobil -1 terlibat baku tembak dengan kelompok GAM di Kecamatan Peureulak, Aceh Timur.	Aceh Timur	Markas Sofyan Dawood Dikepung (Media Indonesia, 11 Agustus 2003)
		Prajurit TNI dari Pos Kobra 2 Kipan 3 Yonif 405/SK melakukan penyeragaman anggota GAM di Desa Ujung Tanjong, Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang.	Aceh Tamiang	
		Dalam baku tembak di Bireun, Tim Singa-3 BTP 1 Marinir terlibat kontak senjata dengan sejumlah anggota GAM	Bireuen	
		Pasukan Marinir dari Tim Garuda-2 Equador terlibat kontak senjata dengan anggota GAM di Desa Sungaiayu, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang.	Aceh Tamiang	GAM Intimidasi Rakyat Yang Rayakan Ulang Tahun RI (Koran Tempo, 11 Agustus 2003)
10 Agustus 2003	operasi pemulihan keamanan	Dalam 2 hari terakhir, pasukan TNI menyekat kawasan Seunudon, Aceh Utara dan wilayah Mon Keulayu, Bireun. Kedua wilayah itu diyakini sebagai tempat persembunyian Juru Bicara Militer GAM dan Panglima GAM Wilayah Jeunib.	Bireuen	Markas Sofyan Dawood Dikepung (Media Indonesia, 11 Agustus 2003)
		Pasukan TNI dari Yonif 433 terlibat kontak senjata dengan sekitar 30 anggota GAM saat melakukan penyisiran di kawasan Kuta Binjee, Kecamatan Julok, Aceh Timur.	Aceh Timur	GAM Intimidasi Rakyat Yang Rayakan Ulang Tahun RI (Koran Tempo, 11 Agustus 2003)
11 Agustus 2003	operasi pemulihan keamanan	1 bom rakitan seberat 100 kilogram ditemukan Tim Tiger-4 Yonif 121/MK saat berpatroli di Dusun Lokasan, Desa Alurmajrun, Kecamatan Syamtalira, Aceh Utara. Sebelumnya, 4 bom rakitan seberat 45 kilogram juga ditemukan di Kampung Simpang Buntul, Kecamatan Permata, Aceh Tengah.	Aceh Tengah	Bom Seberat 100 Kg Ditemukan di Aceh Utara (Media Indonesia, 12 Agustus 2003)
		Yonif 143 dalam suatu penyeragaman, menembak mati Panglima GAM Wilayah Lhokseumawe bersama 2 rekannya di Desa Lancok, Desa Syamtalira, Aceh Utara.	Aceh Utara	Panglima GAM Lhokseumawe Tewas (Media Indonesia, 13 Agustus 2003)
	pemolisian dan	Mahkamah Militer 101 Banda Aceh menggelar sidang atas kasus seorang	Banda Aceh	Sidang Narkoba Oknum TNI

	penegakan hukum	prajurit TNI yang ditangkap Denpom 101 Kodam Iskandar Muda karena membawa ganja ke Medan.		Digelar (Suara Pembaruan, 12 Agustus 2003)
12 Agustus 2003	operasi pemulihan keamanan	Polda Aceh menggelar operasi kewilayahan Elang Rencong 2003 dengan tujuan untuk menutup ruang gerak kelompok GAM yang beraksi di perkotaan.		Polda Aceh Gelar Operasi Elang Rencong 2003 (Indopos, 13 Agustus 2003)
	pemolisian dan penegakan hukum	PDMD Aceh menyita sebanyak 16 ribu meter kubik lebih kayu curian beserta peralatan yang digunakan milik pengusaha di Kecamatan Seumeule, Aceh Tenggara.	Aceh Tenggara	PDMD Sita Ribuan Meter Kubik Kayu Curian (Suara Pembaruan, 12 Agustus 2003)
13 Agustus 2003	operasi pemulihan keamanan	Pasukan gabungan yang tengah berpatroli, berpapasan dengan dengan anggota GAM di kawasan Montasik, Desa Atong, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar. Panglima Sagoe Montasi tewas dalam baku tembak ini.	Aceh Besar	Lagi, Panglima GAM Tewas (Indopos, 14 Agustus 2003)
		Dalam bentrokan senjata di kawasan Lamkabee, Kecamatan Seulimun, Aceh Besar, seorang komandan operasi GAM setempat tewas ditembak pasukan gabungan TNI/POLRI.	Aceh Besar	Dan Ops GAM Wilayah Seulimun Tewas (Suara Pembaruan, 14 Agustus 2003)
		Aparat TNI/POLRI dari Denku-2 Yonif 315/GRD dibantu anggota Koramil 17/Geumpang dan pasukan Brimob BKO, berhasil menewaskan 6 anggota GAM di 2 lokasi berbeda, yaitu Desa Pereuk dan Desa Alue Glue, Kecamatan Geumpang, Bireun.	Bireun	Ditutup, Ruang Gerak GAM ke Kawasan Perkotaan (Kompas, 14 Agustus 2003)
		Panglima GAM, Muzakkir Manaf nyaris tertangkap ketika Tim Dahlia-2 dari Yonif 301/Prabu Kiansantang Siliangi melakukan operasi ke Dusun Cot Alin, Desa Blang Releu, Kecamatan Simpang Kramat, Aceh Utara.	Aceh Utara	Muzakkir Manaf Lolos Dari Sergapan TNI (Media Indonesia, 14 Agustus 2003)
	pemolisian, penegakkan hukum	Mahkaman Agung memberi kewenangan penuh kepada Ketua Pengadilan Tinggi NAD untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu bagi kelancaran seluruh persidangan yang digelar di Aceh.		MA Beri Kewenangan Penuh Kepada Ketua PT Aceh (Suara Pembaruan, 15 Agustus 2003)

14 Agustus 2003	pemolisian, penegakkan hukum	Ladang ganja seluas 3 hektar lebih, ditemukan pasukan TNI dari kesatuan Linud 431/Kostrad yang bertugas di Pos Lawe Kelabu, Kecamatan Badar, Aceh Tenggara. Pasukan TNI juga mengamankan 4 tersangka, dan menyerahkan mereka beserta barang bukti kepada Polres Aceh Tenggara.	Aceh Tenggara	Aparat TNI Musnahkan Tiga Hektare Ladang Ganja Milik GAM (Media Indonesia, 15 Agustus 2003)
15 Agustus 2003	operasi pemulihan keamanan	(i) Dalam baku tembak di Kampung Piyeng, Kecamatan Montasik, Aceh Besar, Tim Manyar Yonif 312/KH menewaskan 1 dari 5 anggota GAM. (ii) Tim gabungan Kodim 010/AB, Koramil Indra-Puri dan Yonkav BKO Kodim 010/AB menembak mati seorang anggota GAM.	Aceh Besar	Pengamanan Aceh Makin Diperketat (Kompas, 16 Agustus 2003)
16 Agustus 2003	operasi pemulihan keamanan	Tim Singa Yonif 621 terlibat baku tembak dengan GAM di Kecamatan Muara Dua, Aceh Utara.	Aceh Utara	Sejumlah Bom Rakitan Ditemukan di Aceh Utara (Republika, 19 Agustus 2003)
17 Agustus 2003	operasi pemulihan keamanan	Tim Waltis Yon 1 Pam Obvitnas Yonif 121/MK terlibat kontak senjata dengan GAM di Desa Darul Iman, Kecamatan Syamtalira Bayu, Aceh Utara.	Aceh Utara	Sejumlah Bom Rakitan Ditemukan di Aceh Utara (Republika, 19 Agustus 2003)
		Tim Sadap III Yonif 301/PKS menahan seorang anggota GAM di Desa Pulo Blang, Kecamatan Peusangan, Bireun.	Bireun	
18 Agustus 2003	operasi pemulihan keamanan	2 bom rakitan yang siap diledakan, ditemukan di Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara	Aceh Utara	Ditemukan, 2 Bom Siap Diledakkan (Suara Pembaruan, 19 Agustus 2003).
		Tim Dharma-1 Yonif 509 menangkap 2 anggota GAM di Desa Panggung, Kecamatan Krueng Sabe, Aceh Jaya.	Aceh Jaya	Dua Warga Tewas Ditembak GAM (Indopos, 19 Agustus 2003)
19 Agustus 2003	operasi pemulihan keamanan	Seorang anggota GAM, yang terlibat pengeboman kendaraan TNI pada 14/8, tewas ditembak prajurit Yon 433 di Desa Keudeu Plik, Kecamatan Idi Reyeuk, Aceh Timur.	Aceh Timur	Peledak Bom Tewas Tertembak (Suara Pembaruan, 20 Agustus 2003)
20 Agustus 2003	operasi pemulihan keamanan	Pasukan di Pos Baktiya bersama Polsek Seunuddon, menemukan 4 buah bom aktif yang dipasang di atas badan jalan Desa Alue Capli, Kecamatan Seuneudon, Aceh Utara.	Aceh Utara	Bom Ditemukan di Jalan di Aceh Utara (Koran Tempo, 21 Agustus 2003)

		2 anggota GAM ditangkap secara berturut-turut oleh tim Tiger-1 Satgas Pam Obvitnas di Kampung Blang Trieng, dan tim Tiger-2 di Kampung Blang Awi, Kecamatan Syamtalira Bayu, Aceh Utara.	Aceh Utara	GAM Tembakkan RPG ke Areal Exxon Mobil (Media Indonesia, 22 Agustus 2003)
21 Agustus 2003	operasi pemulihan keamanan	Pasukan TNI dari Tim-12 Yonif 511/DY berhasil menewaskan Panglima Sagoe Wiayah Bengkung dalam kontak senjata di Kampung Dasan, Kecamatan Sultan Daulat, Aceh Singkil.	Aceh Singkil	488 Warga Sipil Jadi Korban GAM (Media Indonesia, 23 Agustus 2003)
		Tim Calang-1 Yonif 527 terlibat baku tembak dengan GAM di Kampung Lhueng Gayo, Kecamatan Teunom, Aceh Jaya.	Aceh Jaya	
24 Agustus 2003	operasi pemulihan keamanan	2 pria yang diidentifikasi sebagai Kepala Polisi GAM Wilayah Aceh Rayeukdan Panglima Sagoe Wilayah Darul Imarah, tewas tertembak dalam operasi di kawasan Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.	Aceh Besar	Tewa, Dua Pria Diidentifikasi Sebagai Petinggi GAM (Kompas, 25 Agustus 2003)
	pemolisian dan penegakan hukum	Aparat gabungan TNI/POLRI menangkap 31 anggota dan simpatisan GAM dalam sebuah razia di kawasan Lamseunong dan Pu'uk, Aceh Besar.	Aceh Besar	31 Anggota GAM Ditangkap (Koran Tempo, 25 Agustus 2003)
27 Agustus 2003	operasi pemulihan keamanan	3 anggota GAM disergap 7 prajurit TNI di Desa Sosa, Kecamatan Dalu-Dalu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.		Kontak Senjata di Riau, Tiga Anggota GAM Tewas (Media Indonesia, 28 Agustus 2003)
30 Agustus 2003	pemolisian dan penegakan hukum	Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh memvonis terdakwa Sekdes GAM dengan hukuman 9 tahun penjara.	Banda Aceh	Sekda GAM Divonis Sembilan Tahun (Republika, 1 September 2003)
SEPTEMBER 2003				
3 September 2003	operasi pemulihan keamanan	Di Aceh Selatan, tim Macan-2 Kima Satgas Yonif 713/ST terlibat baku tembak dengan GAM di kawasan Kampung Jambo Papeun, Kecamatan Meukek.	Aceh Selatan	Sembilan GAM Tewas Dalam Dua Hari Terakhir (Media Indonesia, 5 September 2003)
		Prajurit TNI menembak mati 2 pemberontak dalam kontak senjata di kawasan Sungai Paoh, Kampung Krueng Lima, Kecamatan Langsa Kota, Aceh Timur.	Aceh Timur	
4 September 2003	operasi pemulihan keamanan	Di Aceh Timur, Tim Satgas Mobil-1 menyergap anggota GAM di Desa Pasir Putih, Kecamatan Peureulak.	Aceh Timur	Sembilan GAM Tewas Dalam Dua Hari Terakhir (Media Indonesia, 5 September 2003)

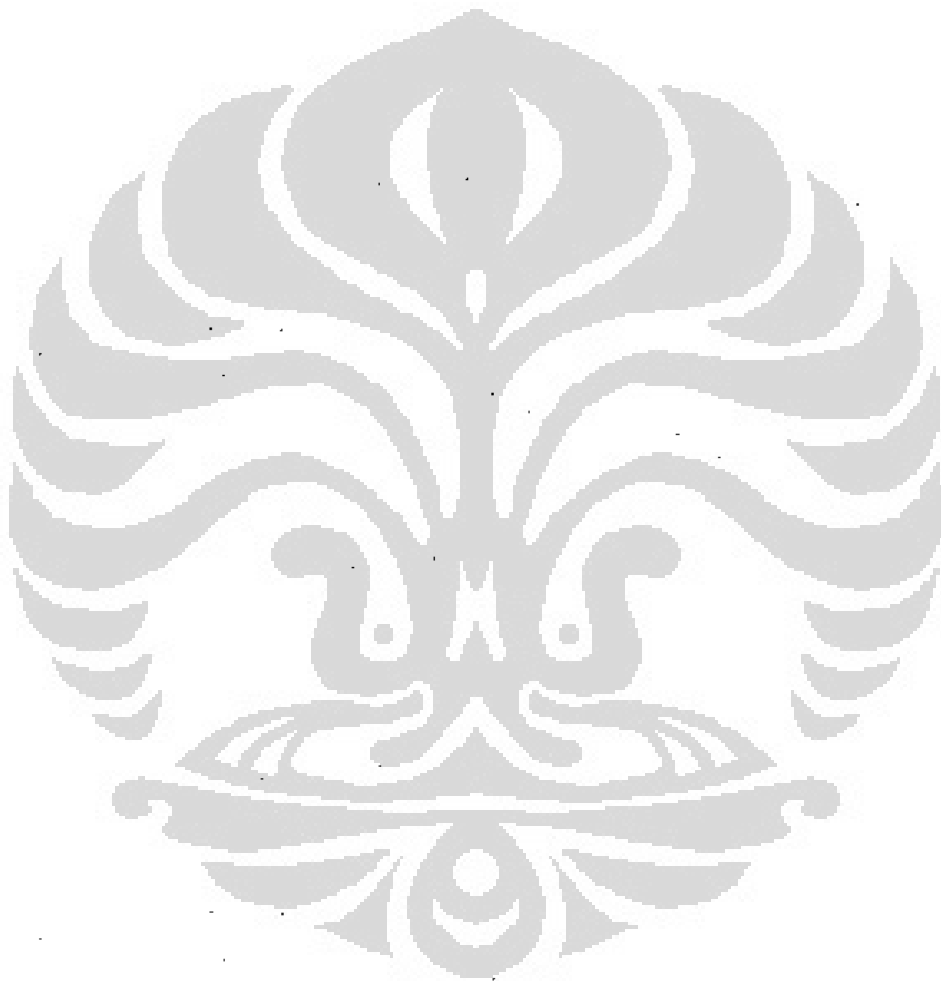
		3 kawan anggota GAM tewas ditembak tim gabungan TNI di Kampung Baireh, Kecamatan Tiro, Pidie.	Pidie	
9 September 2003	operasi pemulihan keamanan	Dalam penyergapan di Kampung Kuta Krueng, Kecamatan Samalanga, Bireuen, Tim-3 Florida Yonif 4 Marinir berhasil menewaskan 1 anggota GAM.	Bireuen	Anggota Pasukan Elite GAM Tewas Tertembak (Koran Tempo, 10 September 2003)
		PPRC TNI dari Yonif 502 terlibat dalam kontak tembak yang menewaskan seorang anggota GAM di Desa Leubok Stoy, Kecamatan Peusangan, Bireuen.	Bireuen	
		Di Aceh Singkil, pasukan TNI dalam sebuah penyergapan berhasil menahan 11 anggota GAM, termasuk seorang Panglima Sagoe Wilayah Sigeling.	Aceh Singkil	
12 September 2003	operasi pemulihan keamanan	Panglima Muda GAM Wilayah Pase dan seorang pengawalnya tewas dalam suatu penyergapan oleh pasukan TNI dari Tim Badak-3 Yonif 143 di Desa Tarjong Dalam, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara.	Aceh Utara	Panglima Muda GAM Pase Tewas (Suara Pembaruan, 12 September 2003)
		Denkul-1 Yonif 408 menyergap sebuah rumah di pedalaman Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur. Namun, anggota GAM berhasil melarikan diri, termasuk diantaranya Panglima Operasi GAM Wilayah Peureulak.	Aceh Timur	Disergap Pasukan TNI, Ishak Daud Lolos (Kompas, 13 September 2003)
		Di Pidie, pasukan TNI terlibat baku tembak dengan GAM di kawasan Seung Unggoh, Kecamatan Padang Tiji.	Pidie	TNI Terus Tekan GAM (Kompas, 13 September 2003)
		Di Bireuen, Tim Ekuador Yonif 4 Marinir menyergap satu lokasi di Kampung Cot Keumude, Kecamatan Jeumpa.	Bireuen	
13 September 2003	operasi pemulihan keamanan	Seorang pria yang diklaim sebagai Panglima Sagoe GAM Wilayah Panca, dilaporkan tewas dalam sebuah bentrokan senjata dengan pasukan TNI dari Yonif 312/Kala Hitam dan Yonif 305 Kostrad di kawasan pengunungan Bukit Cot Meurehong, Kecamatan Lembah Seulawah, Aceh Besar.	Aceh Besar	Panglima Sagoe GAM Wilayah Panca Tewas (Suara Pembaruan, 15 September 2003)
16 September 2003	operasi pemulihan keamanan	Gubernur GAM Wilayah Linge, Aceh Tengah beserta istrinya tewas dalam kontak senjata dengan Yonif 411 Kostrad di kawasan hutan di lereng Gunung Geuleugoh, Kecamatan Juli, Bireuen.	Bireuen	Gubernur GAM dan Istrinya Tewas (Kompas, 18 September 2003)
18 September 2003	operasi pemulihan keamanan	Seorang pasukan elite GAM tewas dalam kontak senjata dengan pasukan TNI dari Yonif 312/KH di perbukitan Tanoh Abee, Kecamatan Seulimun, Banda Aceh.	Banda Aceh	Operasi Perlu Diperpanjang (Kompas, 19 September 2003)

19 September 2003	operasi pemulihan keamanan	6 anggota GAM diberitakan tewas ditembak pasukan TNI di Desa Alue Kuyun, Kecamatan Peusangan, Aceh Utara.	Aceh Utara	Akan Diadili, 12 Prajurit Penganiaya (Kompas, 20 September 2003)
25 September 2003	pemolisian dan penegakan hukum	Menteri Keuangan GAM dituntut 16 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut dalam sidang perkara makar di Pengadilan Negeri Banda Aceh.	Banda Aceh	Menteri Keuangan GAM Dituntut 16 Tahun Penjara (Suara Pembaruan, 26 September 2003)
29 September 2003	operasi pemulihan keamanan	3 orang yang diduga anggota GAM ditembak dalam sebuah kontak senjata di Kecamatan Baktiya, Aceh Utara	Aceh Utara	Aceh Violence Kills Eight More People (The Jakarta Post, 1 Oktober 2003)
30 September 2003	pemolisian dan penegakan hukum	Polres Pidie menahan Camat Indrajaaya dan Meureudu dengan tuduhan penyelewengan dana bantuan kemanusiaan bagi para korban konflik di Aceh.	Pidie	Potong Dana Kemanusiaan, Dua Camat Ditangkap (Kompas, 2 Oktober 2003)
OKTOBER 2003				
2-Oct-03	operasi pemulihan keamanan	Panglima Operasi GAM Wilayah Aceh Singkil dan wakilnya diringkus aparat Polres Aceh Tenggara dalam suatu penyeragaman di kawasan Jamur Damar, Kecamatan Lawe Alas.	Aceh Singkil	Panglima GAM Singkil Ditangkap (Media Indonesia, 4 Oktober 2003)
	pemolisian dan penegakan hukum	Seorang pimpinan proyek di Dinas Pendidikan NAD disidang di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan dakwaan korupsi dana pendidikan bagi anak-anak korban konflik.	Banda Aceh	Pimpro Dana Pendidikan Anak di Aceh Diadili (Kompas, 2 Oktober 2003)
7-Oct-03	pemolisian dan penegakan hukum	Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh memvonis seorang anggota <i>inong balee</i> dengan hukuman penjara selama 30 tahun dengan dakwaan tindakan makar.	Banda Aceh	"Inong Balee" Menangis Dituntut 30 Bulan Penjara (Media Indonesia, 8 Oktober 2003)
8-Oct-03	pemolisian dan penegakan hukum	2 pemuda yang diadili di Pengadilan Negeri Banda Aceh divonis hukuman masing-masing 2 tahun penjara.	Banda Aceh	Dua Pembakar Sekolah Dihukum (Kompas, 9 Oktober 2003)
13-Oct-03	pemolisian dan penegakan hukum	Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh memvonis terdakwa penasihan GAM dengan hukuman penjar 3 tahun karena terbukti secara sah terlibat dalam melakukan kejahatan terhadap negara.	Banda Aceh	Penasihat GAM Divonis Tiga Tahun (Republika, 14 Oktober 2003)

15-Oct-03	operasi pemulihan keamanan	Pasukan TNI melakukan pengejaran dan berhasil membebaskan 4 dari 5 penumpang angkutan umum yang disandera di Kecamatan Peureulak, Aceh Timur.	Aceh Timur	Empat Sandera GAM Dibebaskan TNI (Kompas, 16 Oktober 2003)
18-Oct-03	pemolisian dan penegakan hukum	Terdakwa pembom rumah Wakapolda Aceh dijatuhi hukuman 11 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh.	Banda Aceh	Pengebom Rumah Wakapolda Aceh Dihukum 11 Tahun Penjara (Media Indonesia, 20 Oktober 2003)
21-Oct-03	operasi pemulihan keamanan	(i) Di Bireun, baku tembak terjadi saat pasukan TNI berpatroli di kawasan Cot Mong-Mong. (ii) Kontak senjata juga terjadi di Kampung Nicah, Kecamatan Peusangan, Bireun. 1 pemberontak tewas, 4 lainnya tertangkap hidup. (iii) Seorang pemberontak tewas dalam baku tembak di Kampung Alue Hitam, Kecamatan Sungai Raya, Aceh Timur.	Bireun Aceh Timur	GAM Bantai Satu Keluarga, TNI Tewaskan 11 Orang (Media Indonesia, 23 Oktober 2003)
	pemolisian dan penegakan hukum	Pengadilan Negeri Banda Aceh menghukum 3 mantan juru runding GAM yang diadili dengan tuduhan terlibat terorisme dan makar. Mereka masing-masing dihukum 13,12 dan 15 tahun penjara.		Tiga Mantan Perunding GAM Divonis Penjara 12-15 Tahun (Kompas, 22 Oktober 2003)
22-Oct-03	operasi pemulihan keamanan	3 peleton pasukan TNI mengepung 15 anggota GAM di Desa Kampung Baru, Kecamatan Peusangan, Bireun.	Bireun	75 Persen Senjata Belum Ditemukan (Kompas, 23 Oktober 2003)
		Pasukan TNI menyerbu kelompok GAM di kawasan pegunungan Bilue, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar.	Aceh Besar	2.500 Personel Brimob Tiba di Aceh (Suara Pembaruan, 24 Oktober 2003)
24-Oct-03	pemolisian dan penegakan hukum	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie ditahan polisi sebagai tersangka penyalahgunaan dana pendidikan.	Pidie	Kepala Dinas Pendidikan Pidie Ditahan (Kompas, 25 Oktober 2003)
25-Oct-03	pemolisian dan penegakan hukum	Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, serorang wanita penyeru referendum dituntut dengan hukuman penjara 14 tahun.	Banda Aceh	Penyeru Referendum Dituntut 14 Tahun (Koran Temo, 26 Oktober 2003)

27-Oct-03	operasi pemulihan keamanan	KRI Sigalu berhasil membebaskan 10 ABK KM Mitra Jaya yang tengah disandera dan dirompak oleh anggota GAM di perairan Peureulak, Aceh Timur.	Aceh Timur	KRI Sigalu Bebaskan 10 ABK Tawanan GAM (Media Indonesia, 29 Oktober 2003)
28-Oct-03	operasi pemulihan keamanan	Dalam penyergapan di Desa Paloh Mambu, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, pasukan TNI berhasil melumpuhkan seorang intelijen GAM.	Aceh Utara	Memasuki Ramadhan, Enam GAM Dilumpuhkan (Kompas, 29 Oktober 2003)
	pemolisian dan penegakan hukum	Belasan oknum aparat kepolisian ditangkap Provost Polda Aceh saat melakukan praktik pungutan liar di pos-pos keamanan.		Belasan Anggota POLRI Ditangkap Saat Lakukan Pungli (Media Indonesia, 29 Oktober 2003)
31-Oct-03	operasi pemulihan keamanan	Yonkav I Kostrad menggelar <i>sweeping</i> terhadap semua angkutan, mulai dari mobil pikap yang membawa hasil bumi sampai bus umum jurusan Banda Aceh-Medan.		Cegah Penyusupan "Sweeping" Angkutan Umum Terus Digelar (Kompas, 1 November 2003)
		(i) TNI menyergap Kepala Mukim GAM yang membawahi beberapa keuchik di Kampung Long Taro, Kecamatan Blang Pidie, Aceh Barat. (ii) Komandan GAM Wilayah Pasee juga berhasil ditangkap dalam penyergapan di Desa Ujung Pacu, Kecamatan Muara Dua, Aceh Utara.	Aceh Barat Aceh Utara	
NOVEMBER 2003				
1 November 2003	operasi pemulihan keamanan	TNI melakukan operasi penyergapan di Desa Cot Glumpang Baroh, Kecamatan Jeunib, Bireun. Seorang pengawal Panglima GAM Wilayah Batee Ilik dan seorang polisi GAM berhasil ditangkap.	Bireuen	Para Pejabat GAM Terus Ditangkap TNI (Kompas, 3 November 2003)
3 November 2003	pemolisian dan penegakan hukum	Pengadilan Tinggi NAD mencopot ketua dan 2 hakim, serta seorang panitera di Pengadilan Negeri Jantho, Aceh Besar karena dugaan ketidakberesan persidangan kasus korupsi di ruang ketua pengadilan.	Aceh Besar	Ketua dan Dua Hakim PN Jantho Dicapot (Kompas, 4 November 2003)
		Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun kepada Juru Propaganda GAM karena terbukti bersalam menerjemahkan siaran pers GAM ke bahasa Inggris untuk kepentingan publikasi bagi media asing.	Banda Aceh	Irwandi Penerjemah GAM Divonis 7 Tahun Penjara (Media Indonesia, 4 November 2003)
4 November 2003	operasi pemulihan keamanan	Pasukan TNI berhasil menangkap Panglima Sagoe Wilayah Kota Bulu di tempat persembunyiannya di Kampung Matang,	Aceh Timur	Sudah 390 Anggota GAM Yang Dijatuhi

		Kecamatan Peureulak, Aceh Timur.		Hukuman (Kompas, 7 November 2003)
	pemolisian dan penegakan hukum	Di Aceh Selatan, seorang bocah berumur 10 ditangkap pasukan TNI di Desa Gunung Kapur, Kecamatan Trumon saat ia mengantar logistik untuk GAM.	Aceh Selatan	Sudah 390 Anggota GAM Yang Dijatuhi Hukuman (Kompas, 7 November 2003)
5 November 2003	operasi pemulihan keamanan	Seorang tokoh GAM di Kabupaten Bireuen tewas tertembak dalam sebuah penyeragaman oleh pasukan TNI.	Bireuen	Sudah 390 Anggota GAM Yang Dijatuhi Hukuman (Kompas, 7 November 2003)
6 November 2003	operasi pemulihan keamanan	Pasukan TNI berhasil menangkap Panglima Operasi GAM Wilayah Pante Cermin di Desa Cot Manggeng, Kecamatan Baroh Rot, Aceh Barat.	Aceh Barat	Dihadang GAM, Tiga TNI Luka- Luka (Kompas, 8 November 2003)
		Di Bireuen, TNI melumpuhkan Panglima Operasi GAM Wilayah Bireuen di Desa Abuek Tingkeum, Kecamatan Jeumpa.	Bireuen	
10 November 2003	operasi pemulihan keamanan	Di Aceh Selatan, patroli pasukan TNI terlibat kontak tembak dengan anggota GAM di kawasan Sesak, Kecamatan Trumon.	Aceh Selatan	Kontak Tembak Berlanjut di Aceh 9 Tewas (Kompas, 12 November 2003)
		Aparat keamanan juga menewaskan 4 anggota GAM di kawasan Teupin Tinggi, Kecamatan Trumon.	Aceh Selatan	
		TNI mengklaim telah menembak mati seorang anggota GAM di kawasan Naga Ubang, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar.	Aceh Besar	
11 November 2003	operasi pemulihan keamanan	(i) Pada insiden di Desa Teungoh, Kecamatan Syamtalira, Aceh Utara, 2 pria yang diyakini sebagai anggota GAM tewas ditembak aparat keamanan. (ii) Di kecamatan yang sama juga terjadi kontak senjata yang menewaskan seorang anggota GAM	Aceh Utara	Kontak Tembak Berlanjut di Aceh 9 Tewas (Kompas, 12 November 2003)
18 November 2003	pemolisian dan penegakan hukum	Seorang pejabat di kantor Kesbanglinmas Kabupaten Aceh Timur tengah dicari polisi sehubungan dengan raibnya Rp 700 juta yang dipegangnya.	Aceh Timur	Gasak Dana Kemanusiaan, Pejabat Aceh Diburu Polisi (Kompas, 19 November 2003)



LAMPIRAN III

**CESSATION OF HOSTILITIES:
FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE FREE ACHEH MOVEMENT**

Preamble

The Government of the Republic of Indonesia (GOI) and the Free Aceh Movement (GAM) have been engaged in a process of dialogue since January 2000 and concur that the priority in Aceh is the security and welfare of the people and therefore agree on the need for finding an immediate peaceful solution to the conflict in Aceh. On 10 May 2002, the GOI and GAM issued a Joint Statement set out below:

1. On the basis of the acceptance of the NAD Law as a starting point, as discussed on 2-3 February 2002, to a democratic all-inclusive dialogue involving all elements of Acehese society that will be facilitated by HDC in Aceh. This process will seek to review elements of the NAD Law through the expression of the views of the Acehese people in a free and safe manner. This will lead to the election of a democratic government in Aceh, Indonesia.
2. To enable this process to take place both parties agree to work with all speed on an agreement on cessation of hostilities with an adequate mechanism for accountability of the parties to such an agreement. This will also provide the opportunity and environment for much needed socio-economic and humanitarian assistance to the people of Aceh.

The GOI and GAM share the common objective to meet the aspirations of the people of Aceh to live in security with dignity, peace, prosperity, and justice. In order to meet the aspirations of the people of Aceh and permit them to administer themselves freely and democratically, the GOI and GAM agree to a process which leads to an election in 2004 and the subsequent establishment of a democratically elected government in Aceh, Indonesia, in accordance with the review of the NAD Law, as provided for in point 1 of the 10 May 2002 Joint Statement.

To this end, the GOI will ensure and GAM will support the development of a free and fair electoral process in Aceh, which will be designed to ensure the broadest participation of all elements of Acehese society.

In light of the delicate nature of the confidence building process, the GOI and GAM further appeal for the support of all elements of society and request that no party undertake any action which is inconsistent with this Agreement and may jeopardize the future security and welfare of the people of Aceh.

The immediate requirement is to ensure the cessation of hostilities and all acts of violence, including intimidation, destruction of property and any offensive and criminal action. Offensive and criminal action is deemed to include violent actions such as attacking, shooting, engaging in torture, killing, abducting, bombing, burning, robbing, extorting, threatening, terrorising, harassing, illegally arresting people, raping, and conducting illegal searches.

Throughout the peace process the maintenance of law and order in Aceh will continue to be the responsibility of the Indonesian Police (Polri). In this context, the mandate and mission of Brimob will be reformulated to strictly conform to regular police activities and as such will no longer initiate offensive actions against members of GAM not in contravention of the Agreement.

The JSC will be the point of reference for all complaints regarding police functions and action that are deemed to be in contravention of the spirit and letter of the Cessation of Hostilities (COH) Agreement. As such, the JSC will be responsible for defining, identifying and investigating when and if the police have breached their mandate.

With this general understanding, and to bring the peace process forward to the next phase, both parties hereby agree on the following:

Article 1: Objectives of the Cessation of Hostilities and All Acts of Violence

- a) Since both sides have thus agreed that, from now on, enmity between them should be considered a thing of the past, the peace process, which is continued by an agreement on this phase, will proceed by building further confidence and both sides will prove to each other that they are serious about achieving this ultimate common objective.
- b) The objectives of the cessation of hostilities and all acts of violence between both parties are (i) to proceed to the next phase of the peace process, as mutually agreed on 10 May 2002 in Switzerland; (ii) to continue the confidence building process with a view to eliminating all suspicions and creating a positive and cooperative atmosphere which will bring the conflict in Aceh to a peaceful conclusion; and, (iii) to enable, provided hostilities and all acts of violence cease, for the peace process to

proceed to the next phases, i.e. the delivery of humanitarian, rehabilitation and reconstruction assistance.

Article 2: Commitment by Both Sides to Cease Hostilities and All Acts of Violence

- a) Both sides explicitly express their commitment to meet the terms of this Agreement to cease hostilities and all forms of violence toward each other and toward the people in Aceh, by implementing the steps stipulated in this Agreement. In expressing such commitment, both sides guarantee that they are in full control of, respectively, TNI/Polri and GAM forces on the ground. GOI and GAM commit to control those groups that do not share their objectives but claim to be part of their forces.
- b) Both sides further commit themselves to immediately after the signing of this Agreement thoroughly inform their respective forces on the ground of the terms of this Agreement, and to instruct them to cease hostilities immediately.
- c) Both sides agree that, should there be other parties taking advantage of the situation and disturbing the peaceful atmosphere, they will endeavour to take joint action against them to restore the peace.
- d) During this confidence-building period, both sides agree that they will not increase their military strength, which includes re-deployment of forces, increase in military personnel or military equipment into Aceh.
- e) HDC is requested to strictly facilitate the implementation of this Agreement.
- f) Both parties will allow civil society to express without hindrance their democratic rights.

Article 3: Joint Security Committee (JSC)

- a) The senior leadership in charge of security from each side will meet, in order to establish the initial contact and understanding between both sides. They should also (i) reactivate the Joint Security Committee (JSC), which was established during the implementation of the Humanitarian Pause, and (ii) commence discussion, in order to reach agreement expeditiously, on a plan of action for the JSC in discharging its duties.
- b) The functions of JSC are: (i) to formulate the process of implementation of this Agreement; (ii) to monitor the security situation in Aceh; (iii) to undertake full investigation of any security violations; (iv) in such cases, to take appropriate action to restore the security situation and to agree beforehand on the sanctions to be applied, should any party violate this Agreement; (v) to publish weekly reports on the security situation in Aceh; (vi) to ensure that no new paramilitary force is created to assume previous functions of Brimob, and (vii) to design and implement a mutually agreed upon process of demilitarisation. Regarding this last task, the JSC will designate what will be called Peace Zones (see Art. 4(a)).

After peace zones have been identified, the GAM will designate placement sites for its weapons. Two months after the signing of the COH and as confidence grows, GAM will begin the phased placement of its weapons, arms and ordinance in the designated sites. The JSC will also decide on a simultaneous phased relocation of TNI forces which will reformulate their mandate from a strike force to a defensive force. The GOI has the right to request HDC to undertake no-notice verification of the designated sites. With the growth in confidence of both parties in the process the phased placement of GAM weapons will be completed within a period of five months (see attached note).

- c) The composition of JSC will be senior officials appointed as representatives of the GOI and the GAM and a senior third party personality of high standing agreed upon by both sides, Each senior official from the three parties are to be accompanied by up to four persons as members. The heads of delegations from both sides have to be senior and have the authority to be able to take decisions on the spot.

The third party (HDC) personality needs to be able to command the respect and high regard of both sides in order to be able to assist in resolving problems, as they arise.

- d) In order to perform these functions, the JSC is to be assisted by a monitoring team or monitoring teams, which would be provided security guarantees by both sides in monitoring the security situation and in investigating any violation.
- e) The composition of each of the monitoring teams are appointed officials as representatives of the High Command of the security forces of the GOI and the High Command of the forces of the GAM in Aceh and a senior third party military officer agreed upon by both sides reporting to the senior third party personality of high standing in the JSC.
- f) JSC and the monitoring team(s) would be provided with the necessary technical and administrative staff and logistical support. The HDC is requested to facilitate the establishment of these bodies by providing the necessary funds, logistical and administrative facilities.
- g) It is agreed upon that the JSC and the monitoring team(s) will be established and be operational within one month of the signing of this Agreement. Civil society has the right to provide inputs to the JSC.

Article 4: Establishment of "Peace Zones"

- a) Following the signing of the COH Agreement, the JSC, with the direct participation of the senior leadership for security from both sides, will immediately identify and prepare locations of conflict to be designated as "Peace Zones". This would facilitate considerably the work of the JSC since it could focus its attention on these areas in establishing and maintaining security, and these zones, provided peace could be

established, will be the focus of the initial humanitarian, rehabilitation and reconstruction assistance.

- b) For the first two months after the signing, both parties will relocate to defensive positions as agreed upon by the JSC. Adjustments to these locations could be made by the JSC in order to separate the forces of both parties with sufficient distance to avoid contact or confrontation. Forces of both parties will refrain from operations, movements, activities or any provocative acts that could lead to contact or confrontation with each other.
- c) In order to build trust and confidence during these crucial months, these zones and surroundings will be monitored by the tripartite monitoring teams. The JSC will be informed by both parties of any significant movements or activities in these areas.
- d) POLRI will be able to investigate criminal activities in these areas in consultation with the JSC.
- e) The designation of identified areas of demilitarised zones such as schools, mosques, health institutions and public places, bazaars, Acehnesse meunasahs, market-places, foodstalls, communication centres including bus-terminals, taxi-stations, ferry-terminals, public roads, river transportation services, and fishing ports.

Article 5: Time Frames

- a) Both sides agree that hostilities and all acts of violence by both sides should cease forever in Aceh.
- b) Both sides also agree that hostilities and all acts of violence during the first three months from the time when the JSC and the monitoring team(s) become operational are very crucial as indicator of the seriousness of the commitment from both sides. If indeed hostilities and all acts of violence could decrease dramatically, or even cease altogether, during this first three month period, the Acehnesse and other Indonesian people, and the international community, would consider that the peace process would most likely succeed.
- c) During the period between the signing of this Agreement and the time when the JSC and the monitoring team(s) become operational, both signatories to this Agreement commit themselves to exercise the utmost restraint by not making any public statement that would inflame the feeling and sentiment of the other side, including the people, and by ensuring that their forces will not initiate any hostile act toward the other.

Article 6: All-Inclusive Dialogue

The parties agree to support the process of All-Inclusive Dialogue in Aceh as provided for in the Joint Statement of 10 May 2002. The parties agree to ensure, through this Agreement, the necessary security and freedom of movement for all participants in the All-Inclusive Dialogue to enable the

process to be conducted in a safe and fair manner, reflecting the views of all elements of Achehnese society. The parties reconfirm their agreement that the process of All-Inclusive Dialogue be facilitated by HDC.

Article 7: Public Information and Communications

- a) To ensure national and international support for the peace process in Aceh, the Agreement of 10 May 2002, and this Agreement and its implementation have to be publicised as widely as possible within one month of the signing of this Agreement. The process of implementation has to be as transparent as possible and the people have to be regularly informed of the progress made and difficulties encountered.
- b) Communications to the public will be given priority, especially through the print and electronic media. Television and radio programmes have to be devised to enable obtaining inputs from the general public provided that they are conducted in a fair and balanced manner. The JSC remains the final reference on this matter.
- c) Other media, such as community meetings, seminars, flyers, bumper stickers, T-shirts, and others could also be considered, as appropriate.
- d) The HDC is requested to look for sources of funding these public information and communication activities.

Article 8: Joint Council

A Joint Council will be established, composed of the most senior representatives of the GOI and the GAM, and of the third party (HDC). The function of this Joint Council will be to resolve all issues or disputes arising out of the implementation of this Agreement, which cannot be resolved by other Committees or Structures established under this Agreement. The Joint Council may amend the articles and provisions of this Agreement.

Article 9: Amendment or Termination

This Agreement may only be amended by agreement between the two parties in the Joint Council. Should either party wish to unilaterally terminate the Agreement then they are obligated to first bring the issue to the Joint Council and engage in and support all efforts by the Joint Council to resolve the problem within a sufficient period of time (no less than 30 days). If the Joint Council is unable to resolve the matter, then either party has the right to unilaterally withdraw from the Agreement.

For the Government of the Republic of Indonesia:

Amb. Mr. S. Wiryono

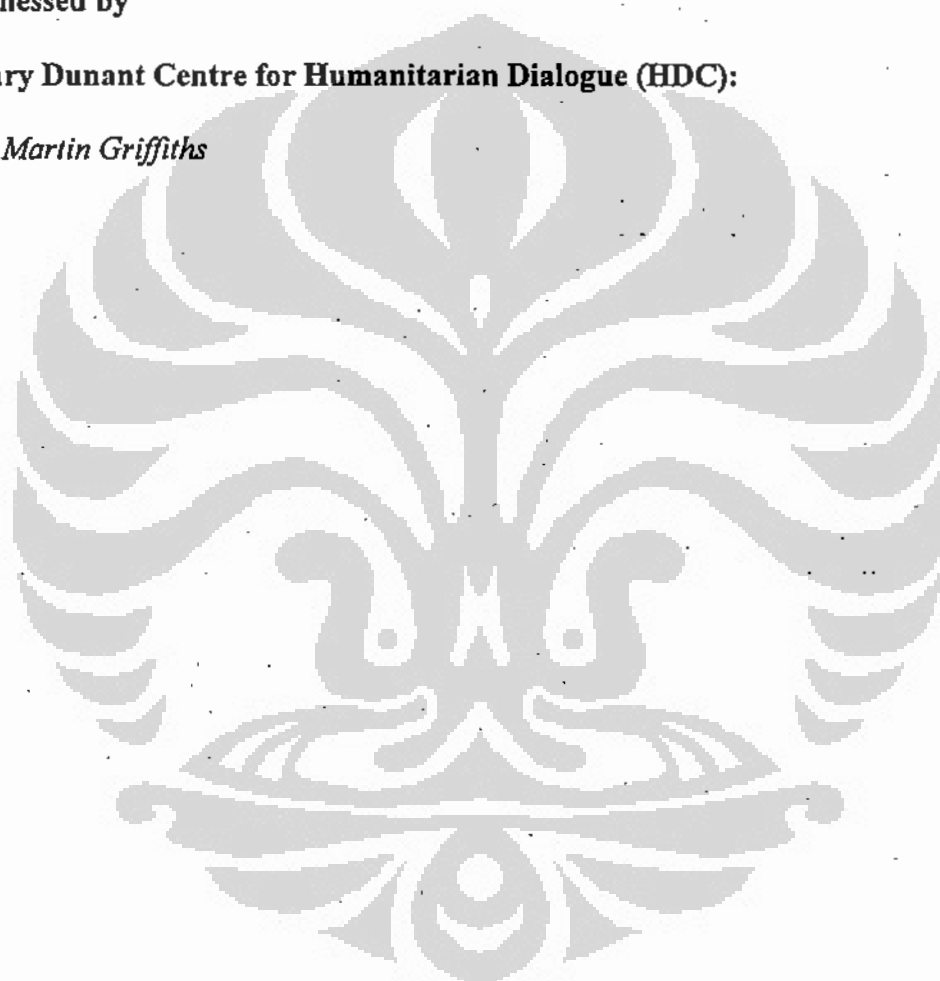
For the Leadership of the Free Aceh Movement:

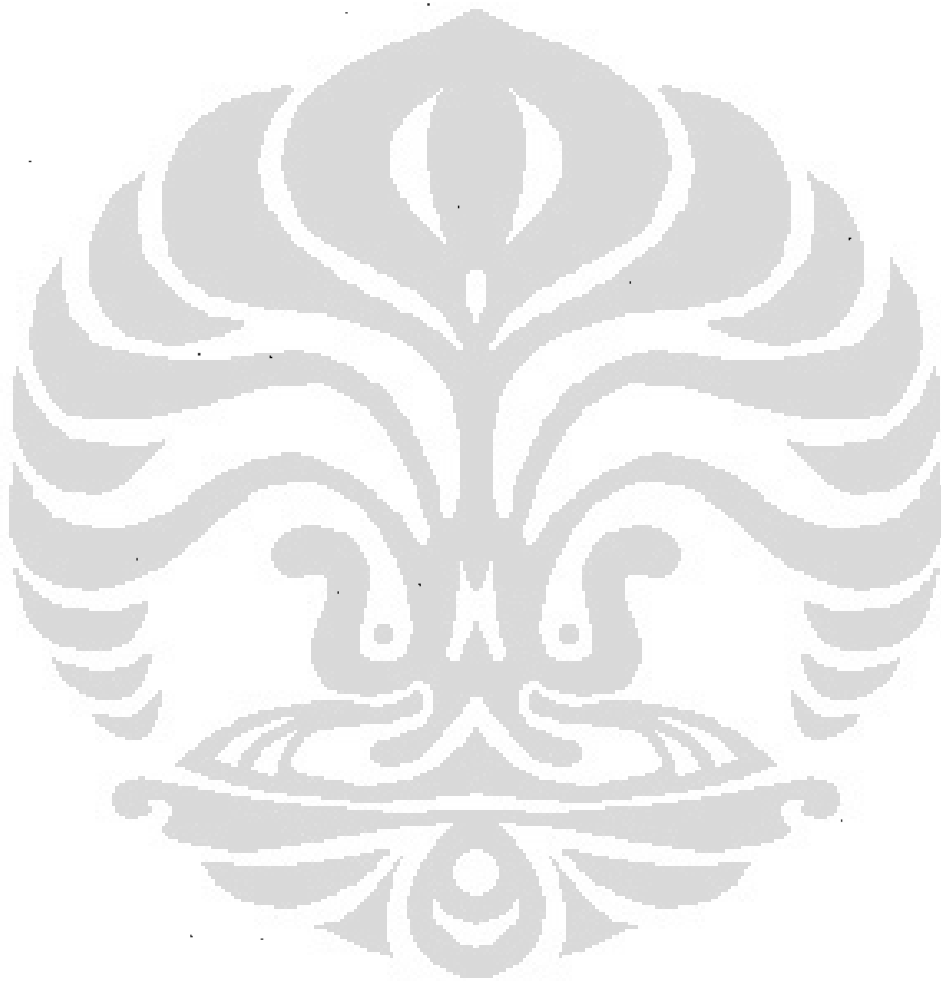
Dr. Zaini Abdullah

Witnessed by

Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue (HDC):

Mr. Martin Griffiths





LAMPIRAN IV



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2003

TENTANG

**PERNYATAAN KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN
KEADAAN DARURAT MILITER DI PROVINSI NANGGROE
ACEH DARUSSALAM**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa rangkaian upaya damai yang dilakukan pemerintah, baik melalui penetapan otonomi khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pendekatan terpadu dalam rencana pembangunan yang komprehensif, maupun dialog bahkan yang dilakukan di luar negeri sekalipun, ternyata tidak menghentikan niat dan tindakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyatakan kemerdekaannya;
 - b. bahwa dalam kondisi seperti itu, dan semakin meningkatnya tindak kekerasan bersenjata yang kian

Universitas Indonesia

mengarah pada tindakan terorisme yang dilakukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tidak hanya merusak ketertiban dan ketentraman masyarakat, mengganggu kelancaran roda pemerintahan, dan menghambat pelaksanaan berbagai program pembangunan, tetapi semakin memperluas dan memperberat penderitaan masyarakat Aceh dan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada umumnya;

- c. bahwa keadaan yang pada akhirnya dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, dan secepatnya harus dihentikan melalui upaya-upaya yang lebih terpadu, agar kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan dapat segera dipulihkan kembali;
- d. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dilaksanakan Presiden untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan sesuai pula dengan kewenangan yang dimiliki Presiden berdasarkan Undang-undang tentang Keadaan Bahaya, serta setelah mendengar dan mempertimbangkan dengan seksama segala pandangan dan dukungan yang dinyatakan Pimpinan DPR RI, Fraksi-fraksi dan Komisi I serta Komisi II DPR RI, sebagaimana diputuskan bersama sebagai kesimpulan dalam Rapat Konsultasi antara Presiden dengan seluruh Pimpinan DPR RI, Fraksi-fraksi dan kedua Komisi tersebut pada tanggal 15 Mei 2003, dan selanjutnya setelah mencermati perkembangan keadaan dan sikap Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada hari-hari terakhir setelah Rapat Konsultasi tersebut yang tidak menunjukkan perubahan ke arah perbaikan, dipandang perlu untuk menetapkan Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer untuk seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 12 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 52 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2113);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERNYATAAN KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT MILITER DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

Pasal 1

Seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan dalam Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer.

Pasal 2

- (1) Penguasaan tertinggi Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Presiden selaku Penguasa Darurat Militer Pusat.
- (2) Dalam melakukan penguasaan Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer, Presiden dibantu oleh Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Militer Pusat yang terdiri dari :
 1. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
 2. Anggota :
 - a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 - b. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Menteri Sosial;
 - d. Menteri Dalam Negeri;
 - e. Menteri Luar Negeri;
 - f. Menteri Pertahanan;

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2003

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERNYATAAN KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT MILITER DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

Pasal 1

Seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan dalam Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer.

Pasal 2

- (1) Penguasaan tertinggi Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Presiden selaku Penguasa Darurat Militer Pusat.
- (2) Dalam melakukan penguasaan Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer, Presiden dibantu oleh Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Militer Pusat yang terdiri dari :
 1. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
 2. Anggota :
 - a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 - b. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Menteri Sosial;
 - d. Menteri Dalam Negeri;
 - e. Menteri Luar Negeri;
 - f. Menteri Pertahanan;

- g. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
- h. Menteri Kesehatan;
- i. Menteri Pendidikan Nasional;
- j. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
- l. Menteri Agama;
- m. Menteri Perhubungan;
- n. Menteri Keuangan;
- o. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
- p. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- q. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- r. Jaksa Agung;
- s. Kepala Badan Intelijen Negara;
- t. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
- u. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan
- v. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.

Pasal 3

- (1) Penguasaan Keadaan Darurat Militer di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan oleh Panglima Daerah Militer Iskandar Muda selaku Penguasa Darurat Militer Daerah.
- (2) Dalam melakukan penguasaan Keadaan Darurat Militer di Daerah, Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda dibantu oleh:
 - 1. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - 2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; dan
 - 3. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 4

Terhadap Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku ketentuan-ketentuan Keadaan Darurat Militer sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 52 Prp Tahun 1960.

Pasal 5

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pukul 00.00 WIB tanggal 19 Mei 2003 untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, kecuali diperpanjang dengan Keputusan Presiden tersendiri.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Mei 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Mei 2003

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan

Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands